

## BIODATA PENULIS

Nama : Lilik Sumarni  
Tempat/tgl lahir : Malang, 16 November 1969  
Alamat : Perumahan Pondok Sawah Indah (Alvita) Blok O No. 4,  
Ciputat, Tangerang -Banten 15413  
Identitas Ktp Nomor : 3219142008.3612244  
Status Material : *single* dengan tiga anak  
Email Address : [Sep112k@yahoo.com](mailto:Sep112k@yahoo.com)

### **Riwayat Pendidikan**                      **Formal**

1983 : Tamat SDN Makarjaya 13, Depok  
1986 : Tamat SMPN 3, Depok  
1989 : Tamat SMAN 39, Jakarta  
2003 : Tamat Sekolah Komunikasi  
Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)

### **Pengalaman Kerja**

1991 : *Junior I Cabin Attendant*, PT. Garuda Indonesia  
1993 : *Junior II Cabin Attendant*, PT. Garuda Indonesia  
1995 : *Senior/First Class Cabin attendant*, PT. Garuda Indonesia  
2000-2007 : *Internal Affair Manager*, PT. Grahasapta Pusaka  
2008- Saat ini : *Direktur Utama*, PT. Grahasapta Pusaka; pengembangan.

## **KATA PENGANTAR**

### **Bismilahirrahmannirrahim**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan kerendahan hati atas cahaya Nya dan rasa syukur yang dalam saya ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Lembut atas limpahan karunia dan rahmatNya jua dapat terselesaikannya penulisan tesis ini yang berjudul *Ekonomi Politik Media Di Balik Berita; Sebuah Studi Analisis Wacana Kritis terhadap Berita-berita Persengketaan Pilkada Depok 2005 pada Koran KOMPAS, TEMPO dan Republika.*

Tesis ini berisi tentang posisi dan kemampuan media didalam merekayasa fakta dalam *system* produksi teks yang merupakan proses kompleks dan berbagai kepentingan yang membebani “makna” dalam teks. Memahami media dengan strategi framingnya telah menempatkan kekuatannya dalam menentukan opini publik mengenai citra aktor-aktor politik dalam sebuah wacana yang dimunculkan, dengan cara mengarahkan “frame individu” dalam memberikan definisi terhadap aktor atau peristiwa politik “Persengketaan Pilkada Depok 2005” melalui pemilihan sumber-sumber berita, permainan kata dan tanda-tanda, dan strategi konstruksi politik pemberitaan. Penelitian ini berusaha menelisik dan menyelami sebuah rekayasa realitas media yang mengganggu independensi media dan pecideraan nilai-nilai demokrasi. Dengan strategi riset multi level analisis maka diharapkan dapat memperoleh gambaran pemahaman sesungguhnya dan menyeluruh dengan menguak cerita dibalik teks.

Tesis ini berhasil di selesaikan berkat bantuan berbagai pihak yang dengan rela dan tulus hati meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, keterangan-keterangan, data dan dorongan baik berupa moril maupun materiil sejak persiapan hingga berakhirnya penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Ibu Dr. HJ Masyitoh, M.Ag Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Bapak Dr. Rahmat Salam M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta

3. Bapak Dr. Eko Harry Susanto, M.Si Ketua Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta
4. Bapak Prof. Dr. Ibnu Hamad, M.Si Dosen Pembimbing Tesis
5. Bapak Dr. Indrawadi Tamin, M.Sc. Dosen Mata *Political Public Relation*.
6. Bapak Prof. Dr. Agus Suradika M.Si. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta .
7. Bapak Dr. Udi Rusadi, M.Si Dosen Mata Kuliah *International Political Economy*.
8. Ibu Dr. Siti Zuhro M.Si Dosen Mata Kuliah *Political Communication*.
9. Bapak Dr. Erman Anom Dosen Mata Kuliah *Political Communication*.
10. Bapak Drs. Sumarno M.Si Dosen Mata Kuliah *Political Communication*.
11. Ibu Dra. Aminah Swarnawati, M.Si Dosen Mata Kuliah Jurusan Komunikasi.
12. Bapak dan Ibu Staf Administrasi pada Program Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Komunikasi FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
13. Rekan-rekan Mahasiswa Jurusan Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis Program Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Tidak lupa saya ucapkan terimakasih yang sangat dalam kepada suami saya tercinta Ir. Dany Wachyu Sulaksono Kadir MM, anak-anak serta keluarga tercinta, yang dengan penuh kasih sayang telah memberikan dorongan bagi penulisan tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan oleh mereka kepada penulis selama penyelesaian tesis.

Saya sangat menyadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik maupun saran masih sangat diperlukan didalam penyempurnaan tulisan ini.

Assalamualaikum Wr. Wb

Ciputat, Mei 2008

Penulis

Lilik Sumarni

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.A Latar Belakang Masalah

Wacana mutakhir kondisi saat ini media tetap merupakan alat yang signifikan dalam membangun opini publik yang luas, terutama dalam kehidupan politik; peran media yang sangat fundamental merupakan wilayah terjadinya perang opini para elit politik. Kemampuan media dalam membangun wacana dan menciptakan isu-isu politik populer juga sangat sentral, hal ini berhubungan dengan sejauh mana kemampuan media dalam melaksanakan strateginya untuk mengkonstruksi dan merekayasa realitas politik dalam bentuk teks berita yang dihadirkan kepada masyarakat.

Perkembangan demokrasi, keterbukaan dan *system pers* bebas di Indonesia membuahakan sikap kritis daerah kepada pemerintah pusat. Keterbukaan yang mempengaruhi sistem pemerintahan melahirkan desentralisasi kekuasaan yang merupakan produk otonomi daerah.<sup>1</sup> Pelaksanaan pilkada secara langsung yang merupakan terobosan politik

---

<sup>1</sup> Keterangan ini diambil dalam naskah Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia yang ditampilkan di [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net); dijelaskan pelaksana pilkada langsung tidak dapat dilepaskan dari terobosan politik dalam pemberian otonomi kepada daerah (berdasarkan UU No. 32 tahun 2004). Dijelaskan juga mengenai pemberian otonomi ini memiliki korelasi perspektif dengan teori-teori dasar tentang desentralisasi dan politik lokal. Desentralisasi secara umum dilihat dari perspektif administrasi dan politik. Dalam perspektif administratif; definisi desentralisasi sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah, dalam perspektif politik, dikatakan Smith desentralisasi sebagai *the transfer of power, from top level to lower level, in a territoria I hierarchy which could be one of governments within a state, or office whithin a large organization.*

berdasarkan UU No.32 tahun 2004 belum tersosialisasi dengan baik dan masih banyak menimbulkan konflik.

Wacana terakhir yang terlihat saat ini Undang-Undang yang mengatur tata cara pelaksanaan pilkada belum tersosialisasi secara optimal dan dipahami oleh berbagai pihak baik pelaksana, para peserta maupun masyarakat pada umumnya. Maka tidak mengherankan, jika setiap pelaksanaan pilkada selalu diwarnai dengan berbagai kerusuhan dan amuk massa seperti yang terjadi di Tuban dan Banyuwangi. Contoh lainnya sengketa pilkada seperti berita yang dimuat di Koran tempo, Kamis, 27 Desember 2007: pada berita yang berjudul; *MK Sarankan Upaya Peninjauan Kembali, Penolakan putusan MA masuk ranah politik;* pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan; dimana Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie berkomentar bahwa keputusan MA terhadap sengketa hasil pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan memunculkan ketidakpastian hukum, pengulangan pemilihan daerah di empat kabupaten dinilai memunculkan sengketa baru.<sup>2</sup>

Sengketa pilkada yang terjadi di 173 daerah; meliputi propinsi, kabupaten dan kota, 2 daerah dalam penelitian gubernur (propinsi), 83

---

<sup>2</sup> Dalam berita tersebut juga dijelaskan bahwa keputusan yang diambil MA untuk melakukan pemilihan ulang di empat kabupaten Sulawesi Selatan berdasarkan penilaian MA; bahwa telah terjadi kecurangan dalam proses pilkada. KPUD dinilai tak merespon kecurangan. Sedangkan penyelenggara pemilihan dan KPUD Gowa menolak melaksanakan pemilihan ulang. Di samping itu, PDIP akan mengupayakan (PK) peninjauan kembali; mengacu pada sengketa pilkada Depok. PK diambil berdasarkan alasan bahwa keputusan mengulang pemilihan kepala daerah dianggap tak memiliki dasar hukum.

daerah kabupaten (dalam pemilihan bupati), 14 kota (untuk memilih walikota).

Sengketa Pilkada Depok dengan obyek gugatan mengenai penetapan hasil perhitungan suara (Kep. 18/2005), dengan pokok gugatan yaitu adanya pemilihan illegal, pemilihan dari luar daerah, pemilihan yang dihambat sehingga tidak dapat memilih, pembatalan hasil perhitungan, pengurangan perolehan calon terpilih, menetapkan hasil perhitungan untuk nomer tiga: 269.551 dan calon nomer lima: 204.823.<sup>3</sup>

Dengan melihat berbagai peluang pelanggaran yang terjadi proses pilkada selanjutnya sebaiknya prosedur dan pelaksanaan serta peraturan dipahami oleh seluruh peserta dan partai pendukungnya. KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam hal ini menjadi wasit dan penentu suksesnya pilkada harus mendapat dukungan dari masyarakat maupun para peserta juga dari pemerintah daerah berupa fasilitas yang memadai; seperti yang terjadi di KPU Kota Depok (hasil wawancara dengan M Amin Nurdin sebagai Bidang Kampanye, Pendaftaran Pemilih dan Sengketa Pilkada) saat pelaksanaan Pilkada Depok; menurut beliau dengan fasilitas yang sangat minim tetapi tuntutan hasil kerja yang cepat dan optimal tentu ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Namun demikian KPU diberbagai daerah sebagai institusi yang independent yang berperan penting dalam pelaksanaan pilkada, kerap menjadi pelampiasan dari pihak-pihak yang tidak

---

<sup>3</sup> Keterangan jumlah sengketa pilkada didapat dari hasil wawancara dengan M. Amin Nurdin KPU kota Depok; sebagai Ketua Bidang Kampanye, Pendaftaran Pemilih dan Sengketa Hasil Pilkada; serta tulisan beliau mengenai *Pengaturan dan Sengketa Hukum Pilkada*, Seminar Setengah Hari KPU Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung 2006.

puas terhadap hasil perhitungan yang dilaksanakan, baik berupa intimidasi dan gangguan-gangguan lainnya.

Konsep-konsep kebebasan dan demokrasi dipersepsi menurut kepentingan masing-masing, maka bentuknya orang sangat sulit menerima keberadaan satu dengan yang lainnya, masing-masing kelompok menuntut perbedaan untuk ditonjolkan, dan lebih mengutamakan semua ini mereka lakukan terkadang hanya untuk kepentingan partai dan kelompoknya yang menimbulkan benturan-benturan dalam masyarakat.

Pada era kebebasan saat ini; dimana sistem pers dan sistem politik selalu berkaitan; media massa hadir sebagai salah satu kekuatan yang memainkan peran signifikan, terutama dalam pembentukan opini publik dan sarana perang wacana yang dimanfaatkan oleh para elit politik untuk menjual nilai-nilai atau tokoh-tokoh partainya dengan gaya yang sensual dan berwarna memeriahkan peristiwa politik dalam perang opini agar memiliki nilai jual.

Media massa, terutama surat kabar; melalui konstruksi realitas yang dihadapkannya kepada publik, kerap memunculkan isu-isu dan kejutan-kejutan dalam teks yang merupakan *realitas hasil bentukan* atau *realitas semu* yang terkadang jauh dengan kenyataan yang ada, distorsi ini terjadi dimungkinkan karena adanya tuntutan internal dan eksternal yang melingkupi media. Kita melihat, media sesungguhnya berada ditengah kerumunan realitas sosial yang sarat dengan kepentingan, konflik dan fakta yang kompleks, belum lagi kepentingan ekonomi media untuk bertahan di suasana pasar yang penuh persaingan. Sebaliknya, kita sebagai audien

berada pada arus wacana yang melingkupi area perspektif kita, yang tumpang tindih, bergerak cepat, yang mengharuskan kita untuk lebih cerdas dan kritis di dalam menterjemahkan permainan tanda-tanda dalam bentuk bahasa yang sarat dengan makna yang bercabang. Kita dipermainkan dengan kejahatan simbolik, yang terkadang sangat berpengaruh di dalam domain analisa kita dalam memberikan pemahaman akan sebuah opini-opini dan peristiwa politik. Disamping itu pemahaman tentang fakta juga tidak dapat sama dimata seseorang, seperti yang dikatakan Walter Lippmann; bahwa masyarakat menerima fakta bukan sebagaimana adanya, akan tetapi *apa yang mereka anggap sebagai fakta*; kenyataan fatamorgana atau “lingkaran palsu”.<sup>4</sup> Distorsi-distorsi tidak hanya datang dari faktor-faktor emosional dan kebutuhan ego saja, tetapi juga dari stereotip-stereotip, gambaran yang telah kita miliki tentang tokoh figur publik dan produk benda-benda. Ungkapan Lippmann yang terkenal adalah berbicara “gambaran-gambaran dalam benak kita” dan tentang citra sebagai akibatnya yang tidak sesuai dengan situasi dunia diluar diri kita. Dan ternyata gambaran ini dan lingkungan palsu ini telah banyak sekali menentukan tingkah laku politik;<sup>5</sup> mengenai tokoh-tokoh politik tertentu.

---

<sup>4</sup> Lippmann : Opini Umum (terjemahan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm.14; diterangkan bahwa hal ini mungkin tidak persis dengan apa yang diungkapkan Cooley mengenai “*looking-glass self*” (konsep cermin diri) dan pendapat Mead; ia berpikir bahwa konsepsi tentang pendapat orang lain mengenai dirinya. Walaupun pendapat Lippmann tidak sama persis, namun dikatakan mereka sepakat bahwa individu-individu membangun realitas melalui interaksi dengan orang lain.

<sup>5</sup> Lippmann : Opini Umum (terjemahan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998); menjelaskan bahwa analisa tersebut dapat diterapkan dalam praktik Dinas Intelejen agar dapat memberikan fakta-fakta dan atas dasar ini dapat dibuat penilaian. Menurut Lippmann bahwa pemerintah yang representatif tidak dapat bekerja dengan berhasil tanpa ada organisasi yang ahli dan independen untuk memetakan fakta-fakta yang tidak kelihatan itu menjadi dapat dimengerti oleh para pembuat keputusan; riset diperlukan untuk menyiapkan fakta-fakta bagi orang-orang praktisi di lapangan.



Tak dapat dielakkan belakangan konsep partisipasi politik pun mengarah pada wacana politik (*political discourses*)<sup>6</sup> yang awalnya hanya praktik politik biasa, saat ini pergulatan politik berperang dengan menggunakan wacana. Ditunjang dengan teknologi komunikasi yang canggih; para aktor politik pengguna wacana dapat menjangkau public yang semakin luas dan dalam waktu yang sangat cepat serta menembus batas-batas yang paling fundamental dari diri kita; yaitu *frame* kita dalam memberikan definisi mengenai opini; tokoh politik dan peristiwa politik.

Disamping itu praktek-praktek kapitalisme modern, *system* pasar bebas, kepemilikan media, *market*, maupun konteks ekonomi politik yang berkembang juga menyebabkan media dihadapkan pada dualisme kepentingan. Koran sebagai institusi; harus memenuhi tuntutan kepentingan ganda; sebab Koran tidak hanya sebagai media pemasang iklan tetapi juga iklan itu sendiri. Oleh karena itu citra yang dibuat oleh Koran atas publik mempunyai nilai penting. Koran juga merupakan bisnis spekulatif, yang tergantung pada pertumbuhan perdagangan dunia dan secara khusus tergantung pada sirkulasi yang tidak berdasarkan atas kontrak mati dengan pembacanya.<sup>7</sup> Kontrak yang tidak mengikat inilah maka sasaran tiap penerbit ialah sirkulasi direkayasa oleh citra tertentu sehingga memunculkan

---

<sup>6</sup> Sparingga; dalam Seminar tentang *Implikasi Teknologi Komunikasi Terhadap Globalisasi Informasi Publik* di Universitas Airlangga, 5 Juli 2007, dengan Judul topik; *TIK, Demokrasi dan Kebebasan Pers: "Dari Media Massa ke Media Massa (?)"*: dijelaskan perkembangan TIK mengeliminasi kecenderungan elitisme, oligarkisme, monolitisme dan hegemoni dalam struktur dan relasi kekuasaan, Konsep Partisipasi politik berubah dari praktik politik biasa (*political practicess*) ke wacana politik (*political discourses*) menghasilkan sebuah dinamika baru di antara "*the quantity of participation Vs The quality of discourse*"

<sup>7</sup> Lippmann: *Opini Umum* (terjemahan), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 311-312.

kelompok pembaca yang setia; hal ini biasanya tidak hanya pada kualitas berita, akan tetapi ada relasi antara ‘sentimen ideologi’ antara media sebagai institusi dan pembaca setianya, inilah yang akan mereka jual.

Oleh karena itu untuk tetap eksis media harus bertahan secara ekonomi, dan investor swasta yang telah lihai di dunia bisnis mulai bermain di media; sehingga yang terlihat konten berita terkadang hanya menjadi sebuah perpanjangan tangan bagi proses struktur produksi makna, maka bisa kita perhatikan isi berita terkadang hanya merupakan pesanan pihak-pihak yang memiliki *power* dalam media tanpa memperhitungkan mutu isinya. Seperti oleh sebagian orang media (pers) sering disebut sebagai *the fourth estate* dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik.<sup>8</sup> Dan ketika globalisasi dan pasar bebas menjangkau secara virtual seperti saat ini media telah menjadi “*The New Class*”, tidak hanya menjadi anjing penjaga tetapi seperti yang dikatakan kritikus dan editor, Sam Lipski; mereka (media) sekarang ini tumbuh menjadi anjing yang sangat besar dan menakutkan. Mereka mudah menyebar, dan sangat kuat.<sup>9</sup> Hal ini berhubungan dengan peran media yang sangat signifikan sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian atas peristiwa tentang berbagai hal, ia memiliki kemampuan berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik, dan yang terpenting adalah mempengaruhi *frame* individu di dalam mengkonstruksi makna suatu informasi, disamping itu media juga dapat berkembang menjadi

---

<sup>8</sup> Sobur: *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, 2001: 130.

<sup>9</sup> Sobur: *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, 2001: 33-34.

kelompok penekan atas suatu ide atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Sungguh luar biasa apa yang dapat dilakukan oleh media kepada khalayak. Hal ini membuktikan pendapat Antonio Gramsci; bahwa media sebagai ruang dimana berbagai *ideology*” direpresentasikan, yang memiliki arti, disatu sisi media menjadi sarana penyebaran *ideology* penguasa, alat legitimasi dan kontrol atas wacana publik. Namun disisi lain, serta sekaligus bisa menjadi instrument perjuangan bagi kaum tertindas untuk membangun kultur dan *ideology* tandingan.<sup>10</sup>

Dominasi dan hegemoni terhadap media yang saat ini terjadi secara umum telah mendatangkan ketidaknyamanan politik, sehingga banyak melahirkan sebuah diskursus yang dikaitkan dengan pertanyaan makro tentang kepemilikan dan pengendalian media. Keterkaitannya dengan industri media dan industri lainnya serta keterkaitan ekonomi politik dan elit sosial.<sup>11</sup>

Semua ini pada akhirnya membuka peluang tentang penelitian-penelitian dan pemikiran-pemikiran kritis tentang kekuasaan para *owner*, keseimbangan dan tanggung jawab sosial media. Melihat kecanggihan

---

<sup>10</sup> Sobur: *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, 2001: 30.

<sup>11</sup> A. Reader: *Approaches to Media : The Political Economy Approach: Oliver Boyd-Barett*, 1995: 186. Dijelaskan keterkaitan ekonomi politik dan elit sosial; ini biasa terlihat pada proses konsolidasi, dieversifikasi, komersialisasi, internasionalisasi, yang mana bekerja dengan motif untuk mencari keuntungan dalam rangka untuk memburu audien dan atau dengan menggunakan periklanan dan dikatakan ini merupakan konsekuensi-konsekuensi dari apa yang dilakukan media terhadap isi media.

media dalam meng-*create* cara berpikir masyarakat; khususnya dalam sikap politiknya dan hubungannya dengan ekonomi politik media, maka penelitian tentang peristiwa politik dan media sangat mendesak untuk dilakukan, hal ini juga mempertimbangkan sikap masyarakat kita saat ini lebih tanggap dalam menanggapi peristiwa politik (*political a wear*).

Kebebasan yang dianut oleh media dalam menyajikan sebuah peristiwa, tidak terlepas dari kebebasan yang berdasarkan *ideology* media tersebut. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa di dalam memahami sesuatu teks berita, kita tidak dapat melepaskan diri dari faktor-faktor internal dan eksternal yang memberikan kontribusi hingga lahirnya sebuah teks, maka ketika kita menterjemahkan makna berita, diperlukan suatu pemahaman secara konprehensif, yang menyatukan antara teks, sitem redaksional atau institusional, dan subyek si pembuat teks dan kondisi sosial politik atau ditempatkan pada konteks seperti apa teks itu berada. Karena dalam memahami kita tidak akan lepas dalam konteks dimana atau ditempatkan dalam konteks yang bagaimana makna itu dipahami. Hal ini merupakan alasan mengapa pemilihan pilkada Depok menjadi penting untuk dilaksanakan, karena ada hubungannya dengan wacana politik, peran media dan bingkai individu dalam menginterpretasikan sebuah peristiwa politik dalam konteks *sociocultural* tertentu yang melingkupinya. Maka dengan ini akan dilakukan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi CDA (*critical discourse analysis*); dengan menggunakan metode *multi level analysis*; untuk memahami teks berita secara utuh tidak hanya level isi tetapi

pada makna yang lebih dalam yaitu pada level konteks dan level motivasi si pembuat teks serta lingkungan yang melatar belakangi lahirnya sebuah teks.

Pelaksanaan ini dilaksanakan pada surat kabar level nasional, yaitu *Tempo*, *Republika* dan *Kompas*. Untuk penelitian teks media dilakukan dengan menggunakan *framing analysis* dengan cara mengikuti pemberitaan Pilkada Depok pada ketiga harian tersebut yaitu pada tanggal 26 Juni 2005; yaitu ketika dilaksanakannya Pilkada secara langsung sampai dengan 26 Januari 2006 yaitu saat pelantikan walikota dan wakil walikota Depok terpilih periode 2005-2010.

Pemilihan penelitian Pilkada Depok dilakukan berdasarkan pertimbangan :

1. Pada pelaksanaan perhitungan suara muncul dua pasangan yang spektakuler dalam meraup suara yaitu calon yang diusung oleh Koalisi dan partai Golkar; Badrul Kamal – Syihabuddin Ahmad dan calon yang diusung oleh PKS; Nurmahmudi Ismail – Yuyun Wirasaputra.
2. Kedua Partai tersebut memiliki sejarah unik dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Golkar merupakan Partai Politik yang memang mapan dan memiliki konstituen yang signifikan dan berdasarkan pengalaman Golkar merupakan Parpol yang telah lihai dalam percaturan politik nasional dan dapat dukungan dari beberapa partai politik. Sedangkan PKS merupakan Partai yang masih terlalu muda dalam kancah perpolitikan di Indonesia, namun demikian sebagai partai baru keberhasilan partai ini cukup fenomenal. Partai ini dideklarasikan

beberapa waktu sebelum Pemilu 2004, PKS merupakan metamorfosis politik dari Partai Keadilan yang didirikan para aktivis dakwah Kampus beberapa saat setelah gerakan reformasi tahun 1998. Dengan kerja keras para anggota PKS melakukan kegiatan yang melibatkan diri dalam keseharian masyarakat yang membangun *brand image* yang cukup mengesankan. Yang menjadi perhatian dalam pilkada Depok, PKS berani tampil sendiri tanpa dukungan partai-partai politik yang lain.

3. Pemilihan kondisi sosial politik terhadap Kota Depok dengan alasan karena Depok merupakan salah satu kota penyangga Jakarta sebagai Ibu Kota Negara yang berkembang pesat secara ekonomi serta sebagai kawasan yang strategis, disamping itu mobilitas penduduknya sangat tinggi. Berdirinya beberapa Perguruan Tinggi di wilayah Depok juga menjadi alasan tersendiri, seperti beberapa Universitas Negeri salah satunya adalah UI (Universitas Indonesia). Dimana mahasiswa UI dari masa kemasa andil sebagai lokomotif gerakan, contohnya aksi menumbangkan rezim Orde Lama tahun 1966, aksi Golput tahun 1971, gerakan mengkritisi Orde Baru 1978, Gerakan Mahasiswa yang paling fenomenal yaitu Gerakan Reformasi 1998 yang memaksa Presiden Soeharto *lengser* dan lain-lain. Karena mahasiswa sebagai agen perubahan yang merupakan kelompok strategis, maka berbagai kekuatan politik pun tak mengherankan untuk berusaha membangun kekuatan atau

jaringan di wilayah ini terutama dengan para aktivis mahasiswa UI (Universitas Indonesia).<sup>12</sup>

4. Kedatangan utusan staff pada bagian *Political Officer First Secretary* dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. David R. Greenberg; yang bertujuan untuk mengikuti proses demokrasi secara langsung.<sup>13</sup> Hal ini juga menjadi catatan tersendiri mengapa Pilkada Depok menjadi pilihan.
5. persengketaan Pilkada (dalam perspektif otonomi daerah) penting menjadi diskusi public; terutama mengenai produk hukum yang melandasinya yang banyak menimbulkan perdebatan dan memberikan wacana aktual tentang pelaksanaan demokrasi lokal.

## **I.B Pertanyaan penelitian**

Studi ini mempertanyakan dan mengkritisi beberapa hal :

1. Bagaimanakah strategi framing yang dilakukan *KOMPAS*, Koran *TEMPO* dan *Republika* di dalam memberikan citra kepada Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail dalam pengkonstruksian berita Persengketaan Pilkada Depok 2005 ?
2. Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi “makna” dalam pengkonstruksian Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail pada berita Persengketaan Pilkada Depok 2005?

---

<sup>12</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok, Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, Bandung, HAKAKATUNA Publishing, 2006: 1-2.

<sup>13</sup> Koran Tempo 27 Juni 2005: *Perwakilan AS pun Ikut Melihat*.

3. Bagaimanakan strategi konstruksi yang dilakukan oleh *KOMPAS*, Koran *TEMPO* dan *Republika* yang berhubungan dengan konteks sosiokultural pada saat berita dimunculkan?
4. Adakah motivasi-motivasi ideology, ekonomi dan politik serta tujuan-tujuan tersembunyi institusi media di dalam Pencitraan Nurmahmudi Ismail dan Badrul Kamal, serta siapakah yang dirugikan dan siapakah yang diuntungkan?
5. Apakah media sebagai salah satu agen perubahan telah memenuhi aspek fungsi pendidikan politik di dalam masyarakat?

### **I.C Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan proses pengkonstruksian realitas oleh media dengan menggunakan analisis *framing* dalam membongkar adanya kepentingan ekonomi politik media dalam teks berita dengan menggunakan analisis wacana kritis pada *KOMPAS*, Koran *TEMPO*, *Republika*.

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk :

1. Memahami strategi flaming yang dilakukan *KOMPAS*, Koran *Tempo*, dan *Republika* di dalam memberikan citra kepada Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail pada berita Persengketaan Pilkada Depok 2005.
2. Mengetahui faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi “makna” dalam pengkosntruksian Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail pada berita Persengketaan Pilkada Depok 2005.



3. Mengetahui Strategi konstruksi yang dilakukan oleh KOMPAS, Koran TEMPO, Republika yang berhubungan dengan konteks sosiokultural pada saat berita dimunculkan.
4. Mengetahui motivasi-motivasi ideology, ekonomi dan politik serta tujuan-tujuan tersembunyi institusi media di dalam pencitraan Nurmahmudi Ismail dan Badrul Kamal, serta siapakah yang dirugikan dan siapakah yang diuntungkan.
5. Memberikan gambaran bagaimana “cerita” yang sebenarnya di balik teks berita.
6. Mempertanyakan media sebagai salah satu agen perubahan; apakah media telah memenuhi aspek fungsi pendidikan politik di dalam masyarakat.

#### **I.D Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

Dari segi *akademik* secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang komunikasi politik dan jurnalistik; memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap implikasi politik terutama dalam aspek perekayasaan isu dan opini serta penelitian terhadap tokoh-tokoh politik dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) dalam praktik demokrasi secara langsung.

Dari *segi praktis*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana cara mensikapi isu dan

wacana yang berkembang yang merupakan hasil konstruksi media dengan strategi framingnya. Dengan melibatkan kepentingan-kepentingan; ideology, politik, ekonomi dan nilai-nilai serta asumsi-asumsi yang merupakan budaya pada media sebuah institusi. Pilkada Depok 2005 merupakan salah satu pembelajaran politik bagi masyarakat dalam rangka pelaksanaan demokrasi yang kerap mengalami banyak konflik disebabkan karena belum tersosialisasikan dengan baik mengenai teknis pelaksanaannya di lapangan serta produk hukum yang mengaturnya.

Dari *Segi Sosial*, diharapkan adanya suatu perubahan terhadap fungsi media yang selama ini terlihat banyak mengalami distorsi oleh berbagai kepentingan, sehingga media belum optimal dalam rangka membangun kualitas kehidupan berpolitik di dalam masyarakat. Media yang merupakan salah satu agen perubahan di dalam masyarakat hendaknya dalam peliputan peristiwa-peristiwa politik harus mempertimbangkan objektivitas berita yang memberikan kepercayaan kepada pembacanya, bukan menjadi arena perang wacana yang membingungkan, media kedepannya diharapkan dapat mengarahkan fungsinya dan dapat membentuk opini publik yang kondusif yang mengarah kepada peningkatan kohesivitas dalam kehidupan masyarakat serta semoga tanggungjawab sosial media juga dapat berfungsi dalam menghadirkan berita dan peristiwa kepada pembacanya yang heterogen.

## **I.E Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini *pertama*, adalah karena peristiwa politik Pilkada Depok yang dilaksanakan pada tahun 2005, maka ada beberapa pihak; seperti tim sukses Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail telah dibubarkan dan ada beberapa saksi-saksi yang sudah merasa tidak berkepentingan, ketika diadakan wawancara mereka tidak mau lagi berkomentar mengenai sengketa tersebut. Sehingga peneliti hanya melakukan wawancara mendalam kepada beberapa saksi yang terlibat, seperti: pada anggota KPUD Depok, Ketua DPRD Depok, Anggota Fraksi PKS dan Golkar, DPD PKS, masyarakat Depok sebagai pembaca setia ketiga surat kabar tersebut, dan pada tim redaksional *Tempo*, *Republika* dan *Kompas*.

Keterbatasan penelitian *kedua*, adalah peneliti dibatasi dengan ketiadaan pengamatan terlibat, ketika proses pembuatan berita diruang redaksi. Padahal dengan pengamatan terlibat teks yang dianggap sebagai suatu wadah yang banyak menyembunyikan berbagai kepentingan dan realitas tidak hanya diinterpretasikan dan ditermahkan pada pembukaannya saja. Namun dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam dalam cara mengikuti dan memperhatikan konteks pada saat teks itu dibentuk melalui proses produksi. Namun demikian dari hasil wawancara mendalam peneliti kepada salah satu eksekutif redaksional, bahwa ketika membuat teks atau peristiwa yang akan diangkat; sebelumnya pada tahap ini akan melalui sebuah diskusi atau perbincangan yang panjang ada aturan atau regulasi

dalam perusahaan. Walaupun demikian keterbatasan ini dapat diatasi dengan cara melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan orang-orang yang terlibat dalam proses redaksional, dan bersamaan dengan itu peneliti berusaha memahami situasi sosial dan politik di luar organisasi media atau yang melingkupinya yang dimungkinkan berkaitan dan terhubung dengan pengkonstruksian sebuah berita dalam sebuah teks dengan bantuan literatur dan wawancara mendalam.

*Ketiga*, untuk mendapat keterangan konteks sosiokultural dan suasana politik pada waktu itu (saat terjadinya peristiwa politik; persengketaan pilkada Depok) peneliti juga tidak mengamati secara langsung ketika terjadi peristiwa itu di tempat kejadian, pada waktu itu peneliti mengikuti beritanya diberbagai media massa, namun demikian untuk mendapatkan gambaran yang hampir mendekati sebenarnya, dilakukan wacana mendalam pada penduduk Depok untuk mendapatkan keterangan konteks-konteks masyarakat pada waktu itu dan kronologi terjadinya peristiwa politik tersebut. Wawancara mendalam juga dilakukan oleh para pelaku atau saksi yang terlibat dalam sengketa pilkada untuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari berbagai pihak serta dari berbagai media massa. Keterbatasan peneliti yang lainnya adalah karena peneliti tidak beraktivitas secara langsung dalam media massa; sebagai wartawan atau bergerak di media massa, sehingga gambaran proses transformasi sosial oleh media secara utuh tidak terpenuhi, peneliti melakukannya hanya melalui pengamatan dari luar. Juga dimungkinkannya

adanya keterbatasan dalam pemahaman dalam sudut pandang peneliti dikarenakan dari ketidaktahuan yang berada diluar kemampuan. Boleh jadi tuntunan kesempurnaan dari peneliti ini tidak terpenuhi; mengenai hal-hal yang seharusnya dimasukkan akibat keterbatasan di dalam memahami dan memandang ruang lingkup penelitian. Hasil riset ini untuk mendorong pada terjadinya perubahan sosial, walaupun penelitian ini tidak mampu menjadikan pendorong perubahan seperti yang dikehendaki oleh aliran kritis, namun demikian dengan kerendahan hati dan niat yang tulus semoga dapat menyumbangkan suatu wacana sebagai pencerahan untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

#### **I.F Sistematika Penulisan**

Penulisan hasil penelitian ini tertuang dalam lima bab, yaitu :

1. Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi untuk mengenal Latar Belakang Masalah, Perumusan Pokok Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikasi Penelitian, keterbatasan penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II memuat tentang Tinjauan Kepustakaan, Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran yang menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan cara berpikir atau alur berpikir yang melandasi penelitian ini.
3. Bab III memuat tentang Metodologi Penelitian; yang menjelaskan tentang Paradigma yang dipakai dalam penelitian ini, pendekatan

penelitian, metode penelitian, obyek analisis, penelitian teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

4. Bab IV menjalankan dan mendeskripsikan hasil analisis dan pembahasan dengan metode analisi wacana kritis.
5. Bab V Penutup yang memuat Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN KEPUSTAKAAN, LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **II.1 Tinjauan Kepustakaan**

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan, dalam pengertian penelitian mengenai Pilkada Depok 2005 yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Saro Vika mahasiswa Universitas Indonesia. Dia membahas adanya atau ditemukannya adanya keberpihakan media masa lokal (Koran Monitor Depok) terhadap salah satu calon wali kota Depok, hal ini terlihat dalam pengemasan berita yang dimunculkan oleh media masa tersebut. Dengan demikian, ada hubungan antara proposal penelitian-ini dengan penelitian terdahulu, namun demikian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan media massa dalam level nasional (*Kompas, Koran Tempo dan Republika*). Alasan menggunakan media massa nasional, karena media massa nasional dalam hal ini Koran merupakan lebih berpengaruh di dalam membangun opini public yang lebih luas mengenai calon-calon yang sedang bertempur dalam meraih suara masyarakat untuk mendapatkan dukungan politik.

Persengketaan Pilkada Depok 2005 sangat menarik untuk dikaji karena ketika bergulirnya hak otonomi daerah dan Pilkada adalah salah satu sarana pelaksanaan demokrasi lokal, yang melibatkan perang wacana oleh aktor-aktor politik yang melibatkan media massa dengan memunculkan

aktor-aktor atau figur-figur yang merupakan wakil-wakil hasil dukungan dari partai politik. Disamping itu media massa juga merupakan sarana bagi elit-elit politik di dalam membangun *image* dan menanamkan makna; baik secara simbolik dan isyarat dengan menggunakan bahasa atau permainan bahasa di dalam proses menghadirkan wacana.

Pemilihan topik ini dilakukan dalam rangka memperkaya studi-studi komunikasi politik kritikal yang banyak dilakukan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan analisis wacana kritis. Urgensi penelitian analisis wacana kritis pada system pers seperti saat ini adalah mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses redaksional dalam sistem media massa yang sangat berhubungan dengan dinamika politik dan perseteruan partai-partai politik, sehingga kita dapat menganalisa dan mengungkap adanya hubungan media, *owner*, dan politik serta kaitannya dengan ekonomi politik media, hal ini akan mempengaruhi gambaran realitas hasil konstruksi media atau Koran terhadap salah satu kekuatan politik; yang dalam hal ini memiliki latar belakang ideologi, budaya dan pandangan politik yang berbeda.

Sebelumnya juga dilakukan penelitian oleh DR. Ibnu Hamad dalam disertasi beliau yang telah dibukukan mengenai Konstruksi Realialitas Politik Media Massa; Sebuah Studi *Critical Discourse Analysis* terhadap Berita-berita Politik, dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa efek konstruksi realitas Parpol oleh media massa sangat signifikan. Menurut beliau, pengkonstruksian Parpol di media atau pembentukan opini publik,



menjadi keniscayaan memberi sumbangan yang sangat berarti terhadap perolehan suara, seperti suara yang diperoleh Partai Demokrat dan PKS pada pemilu 2004 dan yang diperoleh PDIP pada pemilu 1999.

Sebuah kerangka teori dalam bentuk *theoretical framework* liputan politik yang dihasilkan oleh DR. Ibnu Hamad dalam disertasi beliau, memberikan gambaran yang signifikan mengenai peranan media di dalam kancah perpolitikan di Indonesia. Demikian juga ditemukannya keberpihakan media terhadap partai-partai tertentu melalui citra yang dibentuk dan dimunculkan media serta keterkaitan media pada pasar dan sistem politik di dalam sistem pers yang berlaku pada saat itu (masa transisi tahun 1999). Agaknya peranan media akan selalu menjadi yang terpenting di dalam kehidupan politik yang memang tidak dapat lepas dari media, untuk itu penelitian ini akan memberikan gambaran walaupun tidak terlalu besar tentang peranan media massa di dalam era keterbukaan saat ini, agaknya dapat menjadikan suatu perbandingan cara pengemasan pesan yang dilakukan media massa khususnya koran; di era Orde Baru, Era Reformasi dan Era Keterbukaan seperti saat ini.

## **II.2 Landasan Teori**

### **II.2.1 Demokrasi; Sebagai Sistem Nilai dan Prosesnya di Indonesia**

Proses demokrasi di Indonesia masih dalam taraf belajar demokrasi, hal ini terlihat dalam berbagai pelaksanaannya baik pemilu maupun pilkada selalu diwarnai dengan konflik dan kerusuhan akibat minimnya sosialisasi

peraturan dan undang-undang yang menjadi pijakannya dan kesadaran akan nilai-nilai demokrasi yang belum optimal dari setiap kita.

Menurut teori Cole (Lippmann, 1998 : 287), “kepenuhan martabat manusia terungkap dalam segala jenis dan bentuk kehendak dan tindakan sosial”. Hasrat hati untuk menguasai dan menentukan nasib orang lain adalah keinginan kuat tiap manusia. Namun demikian hasrat tersebut harus mengerem dirinya sendiri karena orang lain juga mempunyai keinginan yang sama kuatnya untuk hidup aman dan sejahtera, damai dan bebas dari beban yang tidak perlu. Oleh karena itu demokrasi selalu menekankan mekanisme untuk mengekspresikan kehendak. El Dorado melihatnya sebagai “surga” demokrasi selalu merupakan dunia yang sempurna dengan system pemungutan suara dan perwakilan yang sempurna dimana kehendak baik bawaan dan kewarganegaraan instingtual tiap orang dapat diwujudkan. Maka bisa terbayangkan dunia yang begitu indah, namun tidak demikian kenyataannya masyarakat bersifat heterogen dan kompleks, dengan ini maka manusia harus saling menyesuaikan dirinya dengan baik.

Kaum demokrat berupaya untuk merancang unit pemungutan suara yang lebih sempurna dengan harapan seperti yang dikemukakan Cole, akan “mendapatkan mekanisme yang tepat dan sedapat mungkin sesuai dengan kehendak sosial manusia”. Namun ketika ahli teori demokrasi sibuk dengan definisinya namun ia semakin jauh dari kepentingan kodrat manusia yang sesungguhnya. Karena kaum demokrat (Lippmann, 1998 : 298) selalu berasumsi bahwa jika kekuasaan politik dapat diperoleh dengan cara yang

benar dan konstitusional, itu akan bermanfaat. Maka seluruh perhatian akan diarahkan pada sumber kekuasaan, karena itu mereka terhipnotis oleh keyakinan; bahwa yang paling penting adalah mengungkapkan kehendak rakyat, pertama karena kehendak rakyat merupakan kepentingan tertinggi manusia, dan kedua, karena kehendak instingtual itu baik.

Namun demikian, tidak semua peraturan dapat dijalankan dengan baik dan dapat mengendalikan perilaku pemerintah dengan sempurna dan ketika orang-orang berusaha menyempurnakan mekanisme pemungutan suara dan perwakilan, mereka melupakan hampir semua kepentingan manusia yang lain. Sebab demokratis apapun kekuasaan itu muncul, kepentingan yang paling menentukan adalah bagaimana kekuasaan itu diterapkan. Yang dapat menentukan kualitas sebuah peradaban ialah bagaimana kekuasaan itu dipakai, sebab pemakaian kekuasaan tidak dapat dikendalikan oleh sumbernya. Karena pada prakteknya tidak ada insting yang secara otomatis membuat keputusan-keputusan politik yang menghasilkan kehidupan lebih baik, kebanyakan mereka yang defakto menjalankan kekuasaan tidak hanya gagal mengungkapkan kehendak rakyat tetapi juga mereka menjalankan kekuasaan menurut opini yang tersembunyi di daerah pemilihan.

### **II.2.1.A Pemilu di Indonesia**

Pemilihan umum yang secara langsung diikuti oleh setiap warga Negara atau rakyat merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat guna

menghasilkan pemerintahan Negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. pemilu dilaksanakan secara efektif ini berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Partai politik sebagai peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten.kota. dan kampanye yang dilaksanakan yang merupakan wujud dari prinsip bertanggung jawab merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Pelaksanaan pemilu ini akan sukses jika terselenggara dengan dukungan dan partisipasi masyarakat yang diawali dengan sosialisasi pemilu, pendidikan politik, survei dan jejak pendapat tentang pemilu, serta perhitungan-perhitungan cepat hasil pemilu. Partisipasi masyarakat diharapkan dilakukan dengan atau tanpa adanya keberpihakan yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Masyarakat dan peserta pemilu diharapkan dapat meningkatkan partisipasi secara maksimal dan harus mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggara pemilu yang adil.

Biasanya dalam proses pemilu, kampanye adalah waktu yang paling banyak menimbulkan konflik. Karena ini semua pada akhirnya akan diakhiri dengan tindakan pemberian suara pada pemilu atau hari penjoblosan. Maka pada saat ini ibarat kontes para kecantikan aktor politik dan partai berdandan dan bermain wacana dengan visi dan misi yang mereka jual untuk meraih

suara, maka tidak dapat dielakkan media massa kebanjiran order liputan maupun pesanan dari berbagai partai politik guna memunculkan citra positif bagi dirinya.

Pemilihan umum (dalam R. Soeprapto : *Kritis Reformasi, Kembali ke UUD 1945*. 2006:71) merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi kalau tidak dapat disebut yang terutama. Sentralitas dari posisi pemilihan umum dalam membedakan *system* politik yang demokratis dan bukan tampak jelas dari beberapa definisi demokrasi. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara RI berdasarkan atas kedaulatan rakyat, hal ini berarti mencerminkan Negara demokrasi; yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, “*Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR,*” Kekuasaan negara yang lahir melalui pemilu menjadi kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan digunakan sesuai dengan keinginan rakyat berdasarkan permusyawaratan perwakilan. Maka pemilu dengan ini berarti tidak hanya sekedar pemilihan wakil rakyat untuk duduk dalam DPR, akan tetapi nurani rakyat dalam perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Pemilu pertama kali di Indonesia (dalam R Soeprapto, 2006:72-73) dilaksanakan pada tahun 1955. pada 29 September 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota konstituante. Tercatat puluhan partai, organisasi massa dan perorangan, ikut serta dalam pemilu pertama sejak Indonesia merdeka. Pemilu 1955 menghasilkan 272 orang anggota DPR dengan perhitungan satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang

penduduk. Sedangkan anggota konstituante berjumlah 542 orang. Dalam pemilu tersebut empat parpol memperoleh suara terbanyak, yaitu :

1. Partai Masyumi (60 kursi di DPR)
2. Partai Nasional Indonesia (58 kursi)
3. Partai NU (47 kursi)
4. Partai PKI (32 kursi)

Hasil Pemilu 1955 menggambarkan pengaruh parpol dari berbagai aliran, yang menonjol adalah kemunculan NU dan PKI sebagai parpol yang besar yang saling bertolak belakang, disamping PNI dan Masyumi.

Pada masa orde baru (dalam R Soeprapto, 2006:73-74) Indonesia telah menggelar pemilu enam kali dimana Golkar tampil sebagai juara dengan dukungan suara mutlak. Pemilu I (1971) diikuti sembilan parpol dan Golkar. Pemilu II (1977), Pemilu III (1982), pemilu IV (1987), Pemilu V (1992), dan Pemilu (1997), hanya diikuti oleh tiga partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Kemenangan Golkar yang dominan di setiap pelaksanaan pemilu Orde Baru ini banyak ditentukan karena dominasi peran pemerintah dalam berusaha dan berhasil memobilisasi massa sampai ke daerah-daerah pedesaan. Jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998 menandai berakhirnya Orde baru. Pada saat itu kekuasaan negara beralih ketangan B.J. Habibie yang sebelumnya sebagai Wakil Presiden. Salah satu mandate penting Presiden Habibie adalah melaksanakan pemilu secepatnya, ini sesuai dengan agenda reformasi yang menjadi tuntutan masyarakat Indonesia. Reformasi telah

dibuka, kebebasan dimana-mana, maka muncullah sistem multi partai yang muncul dalam pemilu pertama di era reformasi. Tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilu yang diikuti oleh 48 parpol. Pemilu ini menghasilkan enam parpol yang meraih suara terbanyak yaitu : Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PAN, dan PBB. Hasil pemilu menunjukkan 21 partai masuk DPR. Terdapat diantaranya yang digolongkan sebagai partai besar (PDI-P, Golkar, PKB, PPP, PAN), sedangkan 27 partai tidak lagi memperoleh kursi di DPR. Lima besar partai ini memborong 417 kursi di DPR (90, 26%) dari 462 kursi yang diperebutkan.

Pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2004 adalah pemilu yang kesembilan yang telah diselenggarakan oleh Bangsa Indonesia. Pemilu ini diikuti oleh 16 partai. Berikut ini Partai peserta Pemilu 2004 :

1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Bintang Reformasi
3. Partai Bulan Bintang
4. Partai Damai Sejahtera
5. PDI Perjuangan
6. Partai Demokrasi kebangsaan
7. Partai Demokrasi
8. Partai Golakr
9. Partai Karya Peduli Bangsa
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. Partai Keadilan Sejahtera

12. Partai Kebangkitan Bangsa
13. PNI Marhaenisme
14. Partai Pelopor
15. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
16. Partai Persatuan Bangsa

*(Sumber dari berbagai medi; Televisi dan Koran Nasional; 2004)*

### **II.2.1.B Pilkada**

Pemilihan kepala daerah (pikada) secara langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Kebangkitan demokrasi politik di Indonesia yang diawali oleh pikada langsung merupakan suatu upaya dalam membangun pondasi demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan pikada yang terjadi begitu dinamis yang dilakukan untuk mewujudkan demokrasi secara langsung dalam domain otonomi daerah, meskipun demikian bersamaan dengan perkembangannya setproblematika muncul dan banyak menjadikan perhatian politik.

Seperti yang tercatat dalam *The Wahid Institute* (2006) terdapat tiga varian pikada bermasalah, hal ini bila dilihat cara penyelesaian terhadap konflik yang ditempuh. *Pertama*, melalui kekerasan massa; seperti yang terjadi di kabupaten Sukoharjo (Jawa tengah) dan Tuban (Jawa Timur). Varian *kedua* yang penyelesaiannya melalui jalur hukum, seperti yang telah terjadi pada kasus Pilkada Depok (Jawa Barat) dan Kabupaten Mappi (Papua). Varian ketiga, pelaksanaannya ditunda, seperti yang terjadi di



kabupaten Seram bagian Barat (Maluku Tengah). JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilihan Untuk Rakyat), melihat ada enam masalah yang menghinggapi pelaksanaan pilkada yang berjalan belum baik, yaitu pertama, berhubungan hak memilih, kedua pencalonan dan penetapan calon kepala daerah, ketiga, akses informasi dan kampanye, keempat, kinerja KPUD, kelima, panitia pengawas pilkada dan aturan hukum yang tidak tegas, juga kedewasaan berpolitik dari para elit politik.<sup>1</sup>

Dua pokok aspek permasalahan seputar pilkada meliputi dalam menempatkan dan memahami pilkada dalam konteks desentralisasi. Kedua, penyelenggaraan pilkada itu sendiri yang mencakup beberapa isu (isu sistem pelaksanaan, isu aspek penyelenggaraan dan pengawas, aspek teknis pendukung dan terakhir permasalahan-permasalahan sistem penegakan hukum pilkada).

Pelaksanaan pilkada secara langsung dilaksanakan dengan adanya otonomi kepada daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. otonomi yang diberikan kepada daerah berhubungan dengan teori-teori dasar tentang desentralisasi dan politik lokal. Desentralisasi dapat dilihat dalam dua perspektif (administrative dan politik). Berdasarkan perspektif administrative definisi desentralisasi adalah sebagai *the transfer of administrative responsibility from central to local government* (Romli, 2005). Yang dalam perspektif otonomi daerah yang diberlakukan oleh Indonesia, yang diartikan menjadi pelimpahan wewenang dari pusat ke

---

<sup>1</sup> M. Amin Nurdin: Makalah; *Pengaturan dan Sengketa Hukum Pilkada*, Seminar Setengah Hari KPU Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, 2006.

daerah. Dan dari perspektif politik, yang dikatakan oleh Smith desentralisasi sebagai *the transfer of power, from top level to lower level, in interterritorial hierarchy, which could be one of governments within a state, or office within a large organization*. Mawhood mengatakan desentralisasi politik adalah *devolution of power from central government to local government* (Prasojo. 2006).<sup>2</sup>

Dalam negara kesatuan pelimpahan otonomi kepada daerah tidak dalam bentuk kebebasan asli, melainkan kebebasan yang diberikan dari pemerintahan pusat terkait dan berhubungan dengan bentuk Negara dan pembagian wewenang atau kekuasaan yang ada di negara tersebut. Berdasarkan teori ketatanegaraan ada dua macam bentuk negara, yaitu negara kesatuan dan negara federal; ini berdasarkan pembagian kekuasaan secara vertikal. (Dalam Prasojo; 2006; Kusnardi dan Ibrahim 1988).

Pilkada sebagai proses social politik memiliki aspek prosedural; mengenai bagaimana berjalannya seluruh tahapan dan tatacaranya. Aspek substatif; memenuhi prinsip-prinsip dalam pemilu. Dalam hal ini proses dan hasil pilkada selalu memiliki perbedaan sesuai dengan keadaan masyarakat dan situasi politiknya. Pilkada juga merupakan arena pembelajaran demokrasi yang ditentukan oleh regulasi (kerangka yuridisnya).

Kerangka yuridis Pilkada Depok yaitu; UUD 19945 Pasal 18 (4), Undang-Undang Nomor 32/2004 jo Perpu No 3/2005 jo PP No. 17/2005 , Permendagri 12/2005, Perma Nomor 2/2005. <sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia ([www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)): Bab IV. *Pemilihan Kepala Daerah* 2006.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota KPU Kota Depok, M. Amin Nurdin, 30 Agustus 2007 dan Makalah beliau mengenai: *Pengaturan dan Sengakta Hukum Pilkada*.

Ada beberapa ketentuan pilkada yang cenderung menyulitkan seperti; konsepsi pilkada bukan pemilu, regulasi Juklak dan juknis jangka untuk penyelenggaraan yang hanya 6 bulan, Pantarlih dan kartu pemilih, penggandaan logistic, masa kampanye (dua minggu), audit dana kampanye, administrasi perhitungan suara, mekanisme penyelesaian sengketa (jika terjadi), batasan *money* politik yang kurang jelas.<sup>4</sup>

Tahapan dan aspek teknis yang berpotensi memunculkan sengketa seperti; sosialisasi, pantarlih, pencalonan, kampanye, rekapitulasi, perhitungan suara, penetapan hasil, penegakkan larangan *money politic*.

Faktor-faktor terjadinya sengketa antara lain; masih terdapatnya celah regulasi, adanya ketidakpuasan pasangan calon, ketidaksiapan peserta untuk kalah, kesalahan penyelenggaraan, kedekatan emosional pasangan calon dengan pendukung.

Obyek sengketa pilkada; misalnya pada penetapan perhitungan suara, berdasarkan pada bukti otentik (berita acara hasil perhitungan), jumlah yang disengketakan signifikan (mempengaruhi terpilihnya calon). Beberapa aspek krusial penyelesaian sengketa pilkada, diantaranya; adanya keterbatasan jangka waktu persidangan (hanya 14 hari), kesiapan dan kesediaan saksi, penyediaan bukti otentik, kesiapan dan kemampuan Tim Hukum, pemahaman dan profesionalitas serta independensi hakim, tekanan-tekanan oleh masa pendukung, keterbatasan pembiayaan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota KPU Kota Depok, M. Amin Nurdin, 30 Agustus 2007  
<sup>5</sup> M. Amin Nurdin: Makalah; *Pengaturan dan Sengketa Hukum Pilkada*, Seminar Setengah Hari KPU Pangkal Pinang Provinsi Bangka Belitung, 2006.

**Tabel 1: Prosentase Hak Suara yang hilang pada Sejumlah Pilkada<sup>6</sup>**

No.	Daerah Pilkada	Prosentase Hak Suara Yang Hilang
1.	Bangka Tengah	41
2.	Surabaya	48,32
3.	Depok	39,49
4.	Inhu	31
5.	Pessel	41,23
6.	Kutai Kartanegara	29,3
7.	Pekalongan	32
8.	Sumbar	35,74

**Tabel 2: Perbandingan (Dalam Prosentase) Hak Suara yang Hilang dengan Suara Pemenang Pilkada<sup>7</sup>**

Nama Daerah Penyelenggara Pilkada	Hak Suara Yang Hilang	Pemenang Pilkada
Depok	39,49	30,6
Pessel	41,23	38,72
Surabaya	48,32	25,48
Ponorogo	31,7	30,8

<sup>6</sup> Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia ([www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)): Bab IV. *Pemilihan Kepala Daerah* 2006; dalam bentuk grafik batang diterjemahkan dalam bentuk tabel.

<sup>7</sup> Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia ([www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)): Bab IV. *Pemilihan Kepala Daerah* 2006; dalam bentuk grafik batang diterjemahkan dalam bentuk tabel.

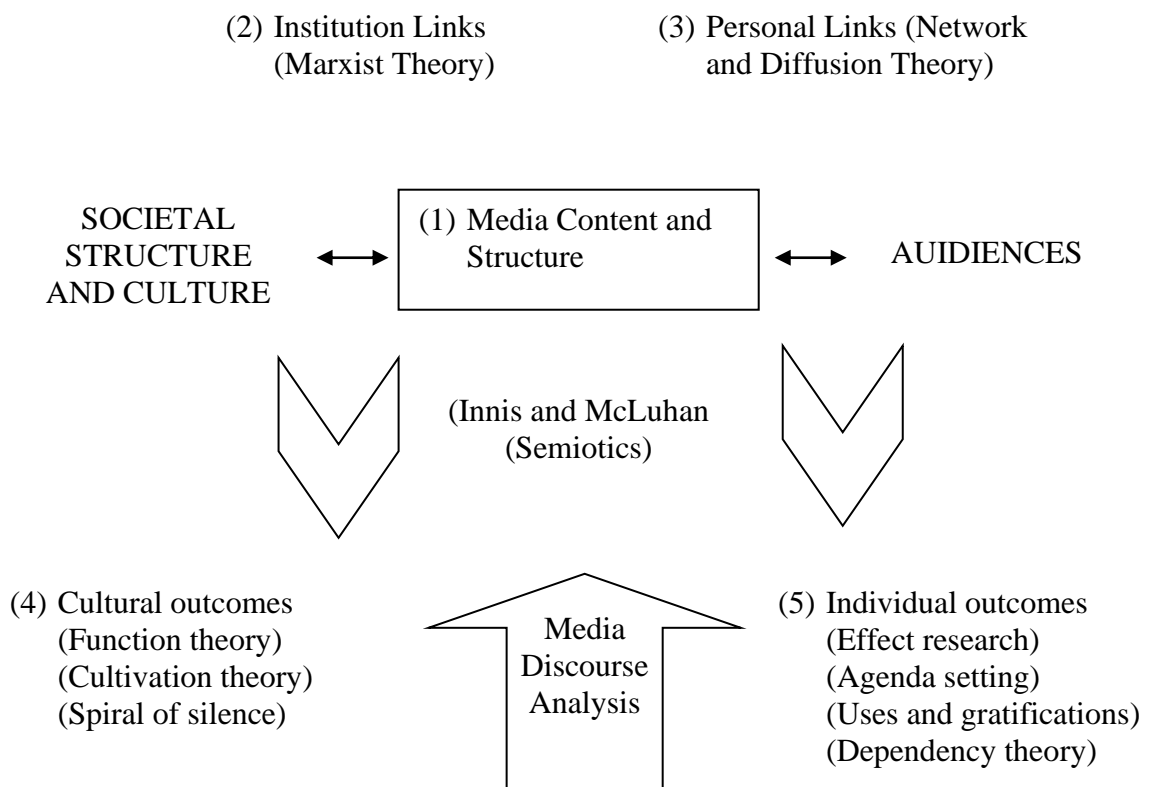
## II.2.2 Media Massa dan Realitas Politik

Media komunikasi moderen telah memungkinkan berjuta-juta orang di dunia untuk saling berhubungan. Apa yang disebut oleh Marshall McLuhan dalam Littlejohn, 1999; sebagai “lingkungan global” (*global village*).

Komunikasi massa adalah proses dimana lembaga-lembaga media membuat dan menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak ramai dan proses dimana dicarinya pesan-pesan tersebut, dimanfaatkan dimengerti, dan dipengaruhi oleh para audience (pembaca, pendengar dan pemirsa). Namun pusat perhatian dari komunikasi massa adalah media, karena lembaga-lembaga media menyebarluaskan pesan-pesan yang mempengaruhi dan mencerminkan budaya masyarakat, dan mereka, menyediakan informasi secara seragam kepada sejumlah besar orang yang heterogen, dan menjadi media sebagai bagian dari kekuatan institusional masyarakat.

Dennis McQuail dalam Littlejohn menyebutkan; beberapa perumpamaan untuk memperjelas gagasan tersebut; media adalah jendela yang memungkinkan kita untuk melihat apa yang ada di luar lingkungan langsung kita, penterjemah yang membantu kita dalam memahami pengalaman, landasan atau pembawa interaktif yang mengikutsertakan umpan balik dari para audience, rambu-rambu yang memberikan instruksi dan arahan, penyering, cermin yang memantulkan bayangan kita kembali kepada kita sendiri, dan penghalang yang merintangai kebenaran.

Gambar dibawah ini melukiskan model pengorganisasian yang menampilkan komunikasi massa dan kedua wajahnya; yang pertama; wajah yang memandang dari media ke arah masyarakat yang lebih luas dan institusi-institusinya (sisi makro dan komunikasi massa). Yang kedua, memandang orang-orang sebagai kelompok dan individu; wajah ini menggambarkan hubungan antara media dan audiens memusatkan perhatiannya pada pengaruh-pengaruh kelompok dan individu dan hasil dari transaksi media (sisi mikro dari teori komunikasi massa). Seperti gambar 1 berikut ini; **Model Pengorganisasian: Peta Studi Media Massa**<sup>8</sup>



<sup>8</sup> Diambil dari Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*, (California: Wadsworth Publishing, 1999: 328). Dilengkapi area penelitian tentang Media Massa; Ibnu Hamad. 2004: 32.

Media massa dan peristiwa politik akan selalu berhubungan. Peristiwa politik yang dianggap selalu menarik perhatian publik menjadi bernilai ketika media ikut serta dalam mengkonstruksi pesannya sehingga maknanya pun tergantung menjadi bercabang tergantung kepentingan apa yang diembankan media teks berita dan wacana yang dibentuknya. Pada saat ini ketika teknologi dan informasi mengalami perkembangan yang pesat, maka berita politik menjadi semakin memiliki nilai jual. Peristiwa politik berada di era uliti media, dan media menjadi sarana perebutan untuk membentuk opini, maka politik dengan media akan selalu terhubung.

Saat ini berlaku multi partai, maka peranan media massa menjadi yang terdepan untuk mendukung tujuan politik partai-partai melalui penggunaan simbol-simbol politik kepada tokoh atau aktor-aktor politik. Disamping itu aktor politik pun bermain wacana diberbagai media, maka media menjadi gelanggang perang wacana; menjadikan beragam makna.

Liputan politik media massa memiliki kecenderungan lebih sulit daripada liputan peristiwa lainnya, karena ini berhubungan dengan aktor-aktor politik dan system politik. Liputan politik yang memiliki dimensi pembentukan opini publik itu juga mengemban banyak kepentingan bahkan kepentingan institusi itu sendiri. Di sini media massa juga menggunakan simbol-simbol, media menjadi alat bagaimana politisi menciptakan bahasa dan *symbol* politik untuk mempengaruhi opini publik. Politik (Eriyanto: 2005:159-160) dalam kacamata Edelman, tidak lain adalah permainan simbol-simbol. Melalui simbol tersebut, realitas sengaja diciptakan dan

dibentuk. Audience diajak berpikir dengan kata dan simbol yang dibuat untuk memenangkan dukungan politik. Salah satu gagasan Edelman adalah dapat mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu dan membentuk pengertian mereka akan sesuatu isu tersebut. Di sini dalam melihat peristiwa, elemen terpenting adalah bagaimana orang membuat kategorisasi atas suatu peristiwa. Dan opini harus dilihat menjadi sesuatu yang dinamis, karena melalui penciptaan yang terus menerus. Peristiwa bisa berubah secara radikal dengan menggunakan kategori tertentu. Ini menentukan bagaimana peristiwa itu dilihat dan bagaimana pengamatan-pengamatan difokuskan pada titik tertentu saja. Sehingga kategorisasi ini dapat mendukung dan mengarahkan pada kebijakan dan kepercayaan tertentu.

Dalam praktik pemberitaan media (Eriyanto: 2005:160-169), dijelaskan kategorisasi atas suatu peristiwa umumnya di tindaklanjuti dengan mengarahkan pada kategori yang dimaksud. Maka ini seperti di pemilu atau pilkada tentang nara sumber yang diwawancarai, pertanyaan yang diajukan, kutipan yang diambil dan bagaimana yang dimanfaatkan, semua akan diarahkan kepada kategori yang telah dibuat dengan perencanaan yang matang. Dalam pembentukan opini politik (Hamad, 2004:2) media massa melakukan tiga kegiatan sekaligus; Pertama, menggunakan simbol-simbol politik (*language of politic*). Kedua, menggunakan strategi pengemasan pesan (*framing strategies*). Ketiga, melakukan fungsi agenda setting (*agenda setting function*). Dengan ini juga faktor-faktor internal ikut mempengaruhi konten pemberitaan, seperti aktor-



aktor politik, system politik yang berlaku, persaingan, pasar dan ekonomi secara global. Maka tak heran satu peristiwa politik akan menimbulkan berbagai macam opini berperan dalam pembentukan isi media. Tak ayal kita setiap hari dihadapkan pada fakta dari peristiwa yang direkayasa dengan kejahatan simbolik dan stereotip-stereotip yang dibentuk untuk mempengaruhi *frame* kita dalam memahami suatu isu atau citra aktor politik tertentu. Kini perspektif politik kita berada pada era perang wacana, simbol-simbol dan tanda-tanda yang beragam, kompleks, tak beraturan dan selalu berubah.

### **II.2.3 Teori Ekonomi Politik**

Teori-teori ekonomi politik membahas tentang kontrol para elit terhadap institusi-institusi seperti bank, pasar-pasar bursa dan upaya mereka untuk mengontrol pada institusi-institusi sosial, dalam hal ini yang termasuk dilakukannya terhadap media massa. Ekonomi politik menerima asumsi dari *Marxis classic* yang mendasari adanya dominasi dari superstruktur. Seperti telah ditunjukkan di mana ekonomi politik mempunyai sesuatu yang sudah teruji bagaimana memaksa batas-batas ekonomi atau bentuk-bentuk budaya massa yang mereka distribusikan pada media, dan kurang memperhatikan pada pemahaman bagaimana pemrosesan dan distribusi dari produksi isi pesan, seperti dengan mendominasi jadwal harian audiens dengan mengkonsumsi seluruh acara televisi; hal ini merupakan bentuk dominasi budaya.

Domonasi ekonomi untuk menghidupkan budaya dominan, maka dalam hal ini ekonomi politik secara perlahan diakui memberikan perubahan budaya yang dapat mempengaruhi istitusi-institusi ekonomo. Selamanya ekonomi dan politik selalu terhubungkan oleh perbedaan dari budaya populer sehingga menimbulkan peluang-peluang di dalamnya dalam rangka membuat pengertian mengenai konten budaya. Maka dengan adanya dominasi superstruktur terhadap media dan kepemilikan media oleh elit hal inilah yang membangkitkan studi-studi kritikal pada status quo. Teori ekonomi politik media; penekanannya dengan pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan atau isi ideologis media. Dalam arti, institusi media harus merupakan bagian dari sistem eknomi yang terhubungkan secara erat dengan sistem ekonomi yang juga terhubungkan secara era dengan sistem politik.<sup>9</sup>

#### **II.2.4 Teori Struktural Vincent Moscow**

Selama beberapa dekade perdebatan yang dimunculkan untuk kepentingan militer dan komersial dalam rangka menyambut kedatangan masyarakat informasi telah menjadi situs utama untuk perjuangan-perjuangan budaya, ekonomi dan politik internasional. Perjuangan-perjuangan ini pada gilirannya dilengkapi dengan bantuan-bantuan dan

---

<sup>9</sup> Reader. *Approacehs to media*, 1995. Bab 4. *The Political Economy Approaches*, hlm. 186-187. dalam buku; *Global Political Economic; Theory and Practices*; Theodore H. Chon: Second Edition, New York, 2002: 10-11 dijelaskan mengenai dampak globalisasi yang sangat mempengaruhi pasar dan persaingan internasional. Globalisasi merupakan basik untuk mempengaruhi politik dengan cara-cara menciptakan ketergantungan ekonomi.

dorongan untuk agenda-agenda yang ambisius dari riset komunikasi kritikal secara politik. Namun demikian bagian teori dan pengujian secara empiris telah menghasilkan suatu hal yang besar namun tidak diperhatikan yaitu tentang dimensi krusial dari pengetahuan tentang kekuatan abad informasi.<sup>10</sup>

Anthony Giddens (1984) mengemukakan teori strukturisasi dalam suatu usaha yang menjembatani apa yang dia rasakan telah menjadi suatu perbedaan antara perspektif teori yang melatar belakangi struktur dan yang menitikberatkan kepada aksi dan agen. Ini menimbulkan jurang pemisah antara cakupan teori-teori struktur yang ditemukan dalam kerja Durkheim, Levi-Strauss, dan Althusser dengan perspektif teori aksi mereka yang memperluas para sosiolog termasuk di dalamnya Max Weber dan teori-teori yang berorientasi kepada fenomenologi seperti yang dikemukakan oleh Schutz dan Gadamer.<sup>11</sup> Di dalam rangka untuk menyempurnakannya Giddens mengusulkan bahwa ia mempertimbangkan struktur sebagai dualitas termasuk di dalamnya aturan-aturan yang memaksa (*constraining rules*) dan sumber-sumber daya yang memungkinkan (*enabling resources*). Tidak lebih lama perancah yang kaku (*the right scaffolding*) yang mengontrol dan memberikan bentuk kepada kehidupan sosial, struktur aksi dan yang dihasilkan oleh aksi tersebut.

Di dalam hubungannya, struktur dan aksi dihubungkan dalam patron kehidupan sosial yang sedang berjalan. Oleh karenanya strukturisasi menjelaskan suatu proses dimana struktur merupakan *human agency*,

---

<sup>10</sup> Reader. *Approaches to media*, 1995. Bab 4. *The Political Economy Approaches*, hlm. 186

<sup>11</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 212-213.

sebagai mereka melengkapinya sebagai 'media' dari peraturan (*a process by which structures are constituted out of human agency, even as they provide the very 'medium' of constitution*). Kehidupan sosial dibentuk oleh aturan-aturan bersama tentang struktur dan *agency*. Sebagaimana Giddens telah memperkenalkan konsep strukturasi adalah bukan hal baru di dalam berfikir sosial. Ini tentu saja merupakan komponen sentral dari Marx yang digambarkan dan sangat terkenal di dalam kisah Louis Bonaparte XVIII, dimana Giddens mengelaborasi tentang rakyat yang membuat sejarah tetapi tidak di bawah kondisi yang dibentuk oleh mereka sendiri.<sup>12</sup>

Salah satu karakter penting teori strukturisasi adalah keutamaannya dalam memberikan perubahan sosial, terlihat di sini sebagai suatu proses dimana-mana yang menguraikan bagaimana struktur dihasilkan dan diproduksi kembali oleh *human agency* yang menetapkan melalui medium struktur tersebut. Konsep strukturisasi merespon kritik langsung pada para fungsionalis institusional dan para strukturalis berpikir tentang kecenderungan mereka untuk mempresentasikan struktur-struktur sebagai entitas tertentu yang diperkuat. Pendekatan-pendekatan ini memberikan kontribusi yang penting untuk memahami operasi struktur, tetapi hal ini tidak memberikan perhitungan yang cukup untuk proses formasi struktural sebaik aksi sosial dan *human agency*. Seperti argumentasi yang diberikan oleh Hobsbawm; Sebuah model struktural yang hanya mempertimbangkan untuk sebuah sistem adalah tidak cukup, ini adalah suatu keadaan bersama

---

<sup>12</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 212.

yang merupakan elemen-elemen harus merefleksikannya, sehingga suatu dual model (*dialectical*) adalah sulit di dalam prakteknya karena akan menghadapi tantangan yang benar dalam pengoperasiannya. Namun demikian dengan berkembangnya masyarakat global sangat diperlukannya sebuah tantangan sosial yang mengatur institusi-institusi sebagai sebuah kebebasan. Teori strukturisasi yang berkembang merupakan jalinan dari teori modifikasi yang dalam prakteknya sangat bergantung pada budaya populer yang hanya bersifat sementara, hal ini selalu berlaku demikian untuk setiap trend, sehingga dalam prakteknya sangat bergantung pada konsumen yang hanya dibatasi kesenangan-kesenangan yang dengan ini tergantung pada selera atau musiman, keduanya juga sebagai suatu fungsi untuk menstabilkan atau sebagai satu perubahan revolusioner dimana hal yang sangat penting mengenai ini adalah yang keduanya.<sup>13</sup>

Pada pembicaraan ini menganjutkan bagaimana teori strukturisasi memungkinkan bekerjasama proses komodifikasi dan spesialisasi mendahului ekonomi politik komunikasi. Secara spesifik, keseimbangan strukturisasi menuju ke arah analisis ekonomi politik untuk ciri-ciri struktur, jenis-jenis bisnis dan institusi-institusi pemerintah sebagai sesuatu yang menunjukkan ide-ide agency, hubungan sosial, proses sosial, dan praktek sosial. Pada waktu yang sama bersamaan Garnham (1990), menolak secara ekstrim dugaan bahwa seseorang dapat menganalisis *agency* yang beroperasi. Konsekuensinya, sementara ekonomi politik oleh Laclaw dan

---

<sup>13</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 213.

Mouffe ketika mereka berpendapat dengan kuat bahwa sosial itu sendiri tidak memiliki esensi, ini sesuai dengan konklusi yang dikatakan oleh mereka; dalam hal menempatkan diri kita secara sungguh-sungguh di dalam artikulasi, kita harus mulai dengan memperkenalkan kembali konsepsi masyarakat (*society*) sebagai sosialitas awal proses sosialnya. Namun demikian kita harus mempertimbangkan keterbukaan sosial sebagai sesuatu yang berbahaya untuk melaksanakan atau medomestikan perbedaan-perbedaan sehingga tidak ada lagi ruang hal-hal yang aneh-aneh di dalam masyarakat. Sejak sosial itu sendiri tidak memiliki esensi.<sup>14</sup>

Menurut Maclau dan Mouffe, teori strukturisasi adalah suatu pendekatan terhadap kehidupan sosial yang bertujuan kepada *goal oriented*, refleksi *human action*, tanpa menyerah kepada atau terhadap pemahaman ikatan-ikatan kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk aksi sosial. Suatu problema utama di dalam teori strukturisasi Giddens, adalah cenderung untuk mengaksentuasikan *agency*, meninggalkan kita dengan suatu konsepsi struktur terbatas dalam menyusun *operating rules* dan penyimpanan sumber-sumber daya (*store of resources*) dimana agen-agen individual menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. alih-alih mengelaborasi kritik Thompson secara detail memenuhi apa yang dikatakan dikatakan bahwa konsep strukturisasi Giddens<sup>15</sup> (sebuah sumber kritik yang dia memiliki beberapa konsepsi) mempercayakan kepada term-term yang mempunyai rasa segan berpikir tentang kekuasaan dengan secara umum

---

<sup>14</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 213.

<sup>15</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 213.

mundur dari suatu pendekatan kritikal terhadap analisis sosialis. Ada beberapa perbedaan dari *operating rule* termasuk catatan Thompson yaitu *moral rules, traffic rules, bureaucratic rules, rules of grammar, rules of etiquette, rules of football*. Mengakui adanya keancuan dari rentang acuan yang memungkinkan, Giddens tidak menyiapkan suatu tanggapan yang nyaman, juga tidak menawarkan suatu jawaban yang jelas tentang aturan-aturan sosial secara jelas, sebab secara spesifik akan membuat lebih sulit baginya untuk menetapkan teori transhistoris yang secara esensi beroperasi terhadap Marx.<sup>16</sup>

Menyusun sumber daya dalam suatu bentuk yang biasa akan menjadikan jenis hak istimewa seseorang seperti sumber daya kekuasaan (*power resources*) terhadap yang lain, dengan memutar sebuah teori general umum tentang kehidupan sosial yang lebih spesifik. Suatu ekonomi politik membaca strukturisasi lebih cenderung untuk menerimakebutuhan sejarah secara spesifik. Ini yang menyebabkan lebih comfort atau nyaman dengan memperkuat dugaan-dugaan Giddens atas dualitas struktur dan aksi, tetapi menambah bobot kepada kekuasaan (*power*) dan untuk memberi bobot kepada kekuasaan (*power*)<sup>17</sup> dan untuk memberi bobot kepada kekuasaan dan kepada penggabungan strukturisasi terhadap suatu pendekatan kritikal analisis sosial.

---

<sup>16</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 213-214. dalam buku: *Mass Media and Society*, James Curran and Michael Gurevitch. 1992: 15-17: dijelaskan mengenai power yang menguasai pesan dalam media; tentang bagaimana mereka secara nyata beroperasi sebagai suatu industri bagaimana industri, organisasi ekonomi mereka menangani produksi dan sirkulasi isi pesan.

<sup>17</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 214.

Sebagaimana perhatian terhadap kedalaman substantif dan pendekatan secara metodologi terhadap kekuasaan di dalam ekonomi politik. Menganjutkan membuat suatu kontribusi terhadap substantif untuk riset sosial, termasuk penjelasan praktek-praktek komunikasi dengan suatu analisa yang berkesinambungan atas komoditas praktek-praktek konstitusi, dan memberikan konsekwensi terhadap produksi, distribusi dan pemanfaatan atau penggunaan kekuasaan. Ekonomi politik telah menyempurnakannya dengan konsep dan metodologi-metodologi yang tersedia untuk menguji, contohnya bagaimana melakukan, menggabungkan akuisisi, praktek perburuan dan pinjaman yang telah memungkinkan perusahaan berita Rupert Murdoch's memasukkan kekuasaan untuk mengembangkan komoditas media informasi dan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Penggunaan metodologi untuk melaksanakan riset yang berkonsentrasi pada ringkasan data penghasilan, struktur organisasi kepegawaian sebagaimana kepatuhan kepada badan pemerintah pengaturan *agency*.<sup>18</sup>

Tekanan kepada *agency* yang menginformasikan pendekatan strukturisasi untuk pengembangan konsepsi kekuasaan ini dengan pengujian bagaimana dia beroperasi pada tindakan, interaktif atau level mikro kekuasaan. Contohnya dari antara rentang tekanan-tekanan makro yang berhadapan atau berkonfrontasi terhadap *Time Winner Board*, bagaimana perusahaan ini melakukan menyusun suatu agenda prioritas yang mendahuluinya untuk memasuki sebuah pasar yang lebih spesifik dari pasar

---

<sup>18</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 214.



lainnya. Keputusan-keputusan tersebut cenderung dinormalisasikan sebagai tujuan pengujian dasar. Dimana efek atau yang diukur adalah keseimbangan tekanan-tekanan makro. Tetapi tujuan pengujian selalu mengabaikan perjuangan-perjuangan makro *power* yang dapat menumbuhkan kepentingan-kepentingan spesifik yang sempit daripada eksekutif-eksekutif yang merupakan anggota suatu badan (*board member*). Bangunan pengujian adalah suatu kontes yang mengontrol sumber-sumber daya simbolik yang bergerak dibidang analisis ekonomi secara luas telah memulai jalan ini menuju kekuasaan. Hal ini juga melibatkan perlengkapan seseorang dengan alat riset yang berbeda mulai dari para ahli ekonomi poliotik yang dilatih untuk mengoparsikan. *Tools* antara lain : etnographi, etnometodologi, observasi (*partisipan observation*), dan hal-hal lain tentang pengamatan praktek-praktek sosial yang menyusun makna kekuasaan untuk sekumpulan aktor-aktor.<sup>19</sup>

Tekanan sosial di sini sebagaimana tekanan pada mikro. Salah satu problem dengan beberapa konsepsi *agency* saat ini adalah bahwa mereka menarik seseorang untuk memperkenalkan analisis individual sampai analisis sosial. Tidak ada yang dapat berlanjut dari makna strukturisasi termasuk konsep Giddens tentang ini. *Agency* adalah sebuah konsepsi sosial yang mendasar yang mengacu kepada para individual sebagai aktor-aktor sosial yang perilakunya disusun dari matrik hubungan sosial mereka dan posisinya (kedudukan sosial) kelas, ras, dan gender. Namun, dengan

---

<sup>19</sup> Mosco, Ibid, hlm. 215.

memanfaatkan strukturisasi *agency* sebagai sosial daripada individual atau aktor-aktor individual, diakui adanya signifikansi atau pentingnya sebuah proses sosial individu konsep ini diambil dari Poelantzas, mengacu pada praktek redefinisi aktor-aktor sosial, model dan perburuan sebagai subyek-subyek individual yang bernilai dihubungkan kepada pihak-pihak politik untuk memilih dan hak-hak individu untuk mendapatkan konsumsi. Aksi-aksi ini dilakukan atas nama Negara tetapi dibatasi oleh pelaksanaan kelas (*class rule*), isolasi individual dari yang satu dengan yang lainnya, dari identitas sosial mereka dan mereka yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan (individuasi). Salah satu tekanan pusat dalam proses strukturisasi atau terjadi antara proses sosial ini kecenderungan individuasi. Oleh karenanya strukturisasi adalah sebuah *entry point* atau titik masuk untuk menguji konstitusi struktur bersama dan *agency* di dalam ekonomi politik. Ini adalah suatu titik awal untuk mengembangkan konsepsi kekuasaan dan sebagai alat untuk memahami bentuk-bentuk bahwa hubungan-hubungan sosial memerlukan ekonomi politik.<sup>20</sup>

Ketika ekonomi politik memberikan perhatian kepada *agency*, proses, dan praktek sosial ia telah memutuskan perhatian kepada kelas sosial adalah alasan-alasan kuat untuk mempertimbangkan strukturisasi kelas

---

<sup>20</sup> Mosco, Ibid, hlm. 215. dalam buku: Who Owns The Media?; Global Trends and Local Resistances, Edited by Pradip N. Thomas and Zaharom Nain, with a Foreword by Peter Golding, London, 2002:23-25: Institusi Global dan Demokrasi Media: Adanya suatu keperluan yang mendesak mengapa media harus diatur; karena lingkungan global yang tidak mendukung pada generasi kita, dimana lingkungan tersebut menarik media dan komunikasi hanya pada satu jalur yaitu komersialisasi; dimana produk media dan komunikasi dikendalikan oleh pasar, oleh karena itu diadakan scenario ke dua yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan penegakan HAM serta aspirasi masyarakat yang dilibatkan dalam struktur pengaturan global.

menjadi suatu titik masuk untuk memahami kehidupan sosial sebagai studi yang mendokumentasikan pembagian kelas secara terus-menerus di dalam ekonomi politik komunikasi. Namun demikian dimensi-dimensi lain terhadap strukturasi yang melengkapi dan mengacaukan (*clash*) dalam analisis *class* termasuk di dalamnya gender, ras, *class*, dan gerakan-gerakan sosial yang berbasis kepada isu-isu publik seperti environmentalism, sepanjang hubungan dengan kelas akan menyusun hubungan sosial komunikasi. Dari penggunaan strukturisasi seseorang mungkin berpikir yang dimulai tentang masyarakat sebagai satu susunan (*esamble*) aksi struktur yang dimulai oleh para agen yang secara bersama memperuncing kelas, gender, ras, dan hubungan-hubungan gerakan sosial. Berdasarkan pandangan ini masyarakat eksis, bila tidak sebagai suatu jaringan paling tidak sebagai suatu bidang atau lapangan dengan berbagai proses-proses bersama menyusun yang dapat diidentifikasi, berfokus kepada kelas, gender, ras, dan hubungan-hubungan gerakan sosial adalah tidak diharapkan untuk dianjurkan bahwa adalah penting bagi orang-orang untuk yang lainnya dapat di reduksi. Daripada itu, formulasi ini menganjurkan bahwa semua yang tadi adalah merupakan gerbang pusat untuk menganalisis strukturasi dan bidang sosial tidak hanya merupakan satu rangkaian kesatuan subjektivitas-subjektivitas yang ditunjukkan oleh kategori-kategori yang bernilai nominal. Kelas sosial adalah nyata sebagai suatu hubungan sosial dan suatu instrumen analisis. Proses strukturasi membentuk hegemoni yang didefinisikan sebagai *taken of granted, common sense, naturalized* atau cara berpikir yang alamiah

tentang dunia termasuk segala sesuatu dari kosmologi, melalui etik, untuk praktek-praktek sosial yang digambarkan dan dipertunjukkan dalam kehidupan setiap hari. Hegemoni adalah satu jaringan kerja bersama langsung yang menyusun makna-makna dan nilai-nilai atas apa yang mereka alami dan lakukan, nampak sebagai *mutually* atau sebagai sesuatu yang dikonfirmasi bersama-sama.<sup>21</sup> Uraian di atas adalah penjelasan dari buku ekonomi politik komunikasi dari Vincent Mosco untuk analisis kelas, gender, ras dan hegemoni dengan cara mendemonstrasikan bagaimana terminologi term-term di atas telah digunakan dalam riset ekonomi politik dengan hasil akhir pergerakan dalam batasan-batasan dugaan-dugaan dimana kategori-kategori sederhana tersebut yang dibawakan oleh media akan memiliki akibat. Ini mengusulkan untuk menguji mereka melayani *agency individual* yang memproduksi mereka. Di luar tekanan-tekanan dan perselisihan dalam berbagai proses-proses strukturasi media datang untuk mengorganisasikan arus utama mereka opsional dan bentuk-bentuk alternatif.

Jadi teori strukturasi adalah sebuah pendekatan terhadap kehidupan sosial yang bertujuan kepada hasil, *reflexive human action*, tanpa menghentikan atau membuang pengertian jalinan atau kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk aksi sosial tersebut. Struktur mengangkat aksi dan yang dihasilkan oleh aksi sosial tersebut. Yang menjadi perhatian,

---

<sup>21</sup> Mosco, *The Political Economy of Communication*, 1996, hlm. 215-216.

struktur dan aksi adalah saling berhubungan di dalam pola atau susunan yang dilakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan sosial.

Jadi teori strukturalisasi adalah sebuah pendekatan terhadap kehidupan sosial yang bertujuan kepada hasil, *reflexive human action*, tanpa menghentikan atau membuang pengertian atau jalinan kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk aksi sosial tersebut. Struktur mengangkat aksi dan yang dihasilkan oleh aksi tersebut. Yang menjadi perhatian, struktur dan aksi adalah saling berhubungan di dalam pola atau susunan yang dilakukan secara terus-menerus di dalam kehidupan sosial. Strukturalisasi menggambarkan *a process by which structures are constituted out of human agency, even as they provide the very "medium" of that constitution*".<sup>22</sup>

## **II.2.5 Media Massa; Sebagai Institusi dan Sistem Produksi Teks**

### **II.2.5.A Media Sebagai Institusi Sosial**

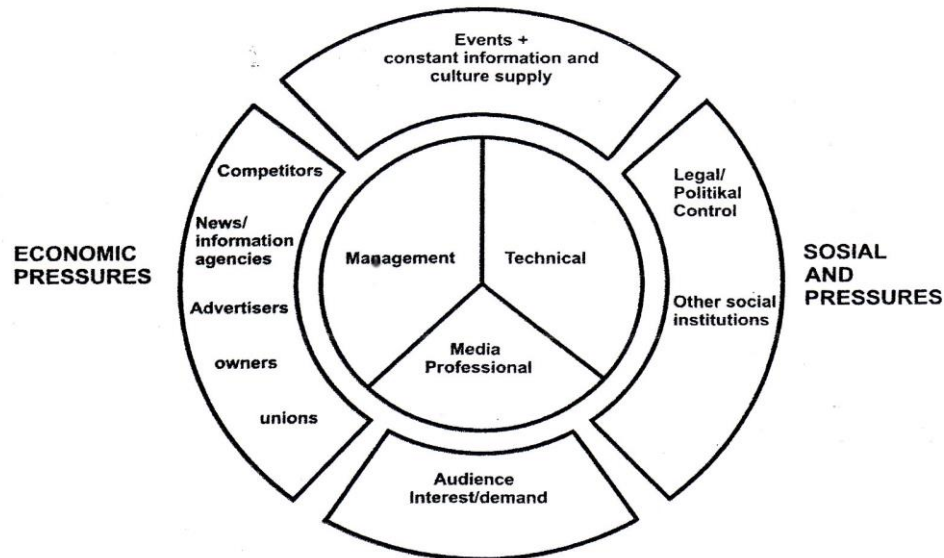
Media tidak hanya sekedar mekanisme biasa dalam rangka menyebarkan informasi. Mereka merupakan organisasi kompleks dan suatu institusi masyarakat sosial yang sangat penting. McQuail menampilkan kaitan-kaitan besar, seperti yang terlihat dalam gambar dibawah ini, di sini, media-media itu sendiri berada di tengah-tengah dan mencakup fungsi manajemen, personil profesional, serta aspek teknis. Media terlihat di dalam diagram ini berinteraksi dengan berbagai organisasi ekonomi, sosial, dan

---

<sup>22</sup> Diambil dari Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication*, California Wadsworth Publishing, 1999:33. Disini Littlejohn membicarakan tentang interaksi media dengan berbagai organisasi ekonomi, sosial dan politik; peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di dalam masyarakat dan keterkaitannya dengan audiens.

politik; peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang berlangsung di masyarakat dimana-mana; dan para audiens.

**Gambar 2: Organisasi Media Dalam Suatu Bidang Kekuatan Sosial<sup>23</sup>**



Teori kritis marxis banyak membahas masalah ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Teori kritis yang berhubungan dengan persebaran kekuatan dalam masyarakat dan dominasi dari beberapa kepentingan atas yang lainnya. Dalam media merupakan pemain utama dalam perjuangan ideologis ini. Dalam media massa banyak dibahas mengenai kritik adanya peluang yang besar media dalam menyebarkan ideologi-ideologi yang

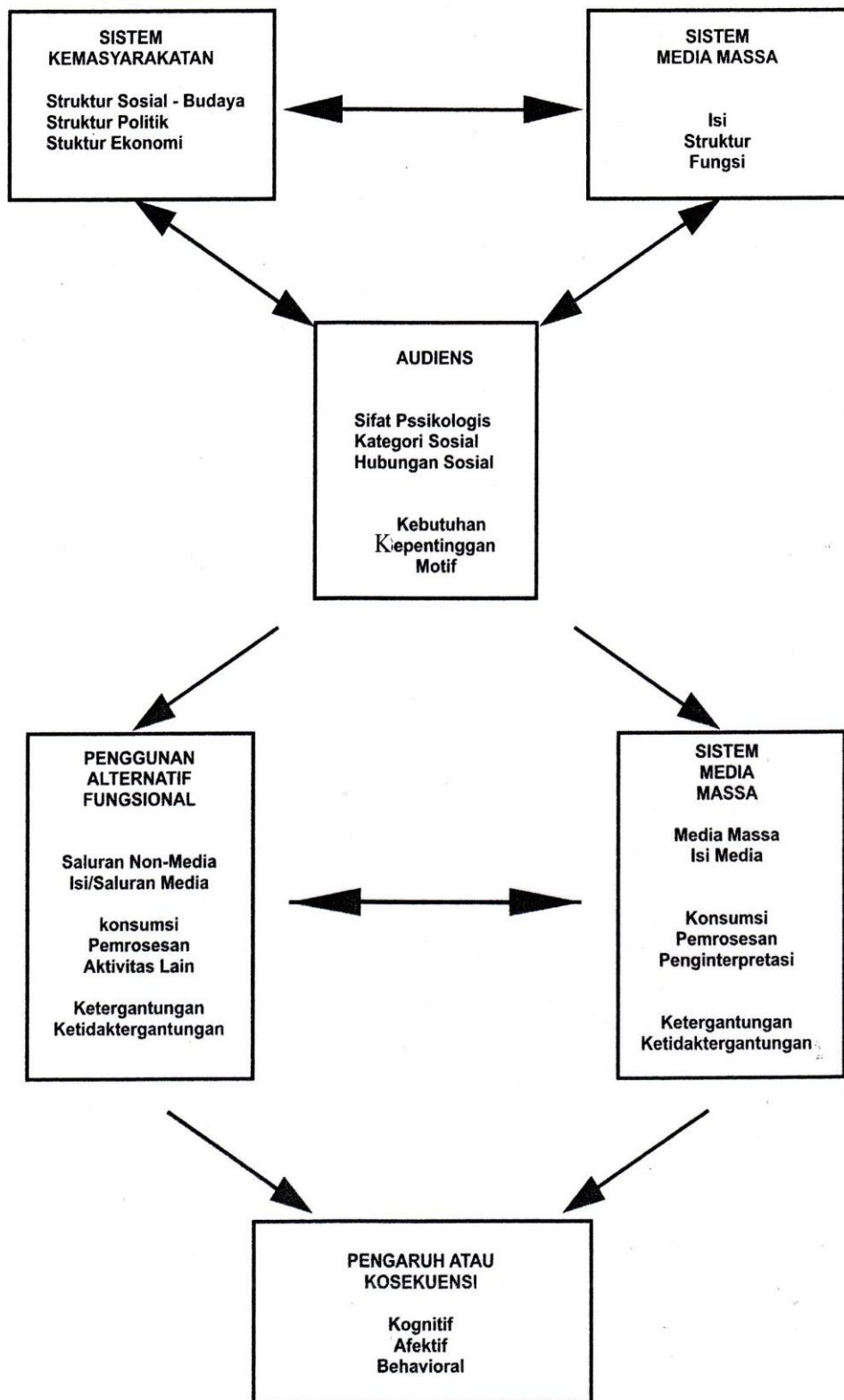
<sup>23</sup> Littlejohn, Stephen W. 1999:353. Dijelaskan bahwa model ini menunjukkan institusi sosial dan sistem media berinteraksi dengan audience untuk menciptakan kebutuhan, kepentingan dan motif dalam diri setiap individu. Dimana pada gilirannya akan mempengaruhi individu tersebut untuk memilih berbagai sumber pemuasan media dan non media, yang pada akhirnya mengarahkan pada ketergantungan. Dalam buku: Craig Allen Smith: *Political Communication*, USA, 1990: 80: dijelaskan menyangkut dua hal dalam komunikasi politik para pembicara lama dan komunikasi massa, walaupun tidak selalu demikian. Tetapi dalam kehidupan politik kontemporer di USA media massa sellau memegang peranan yang krusial.

dominan dan potensinya dalam mengekspresikan ideologi-ideologi alternative dan saling bertentangan. Bahkan ada teoritikus yang kritis, yaitu media merupakan bagian industri budaya yang secara harfiah menciptakan simbol-simbol dan citra-citra yang dapat menekan kelompok-kelompok yang kecil.

Kita telah menyadari bahwa audiens dapat dipengaruhi oleh media dengan tingkat yang berbeda-beda; sejauhmana terpengaruhnya mereka bergantung pada seberapa besar ketergantungan mereka terhadap media. Rubin dan Windahl telah menyusun suatu modal yang menggambarkan proses ini. Di sini dijelaskan, bahwa institusi sosial dan *system* media berinteraksi dengan audiens untuk menciptakan kebutuhan, kepentingan, dan motif dalam setiap individu. Pada gilirannya akan mempengaruhi individu tersebut untuk memilih berbagai sumber pemuasan media dan non media, yang pada akhirnya mengarahkan kepada berbagai ketergantungan. Seperti **Gambar 3** berikut : **Model Penggunaan dan ketergantungan Komunikasi Massa.**<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Diadopsi dari Littlejohn, 1999:356, *Theories of Human Communication*, Six Edition, Belmont California: Wadsworth Publishing. Merupakan model yang disusun oleh Rubin dan Windahl untuk menjelaskan bahwa institusi sosial dan system media berinteraksi dengan audiens untuk menciptakan kebutuhan, kepentingan, dan motif dalam diri setiap individu. Pada gilirannya akan mempengaruhi individu tersebut untuk memilih berbagai sumber pemuasan media dan non-media, yang akhirnya mengarah pada berbagai ketergantungan. Dan akan terpengaruh baik secara kognitif, afektif dan perilaku oleh segmen tersebut.





Menurut McQuail teori media Marxcis dan lima cabang utama. Pertama adalah Marxisme klasik. Di sini media dipandang sebagai aparat dari kelas dominan dan suatu cara sebagai kaum kapitas untuk mempromosikan kepentingan pencarian keuntungan mereka. Media menyebarkan ideologi dari kelas yang berkuasa dan oleh karenanya menekan kelas-kelas, tertentu

Yang kedua adalah teori media politis-ekonomis, seperti juga Marxisme klasik, mempermasalahkan kepemilikan media atas penyakit-penyakit masyarakat. Yang mendasari pemikiran ini, isi media merupakan komoditi untuk dijual di pasar, dan informasi yang disebarkan dapat dikendalikan oleh apa yang ada di pasar. Sistem ini mengarah ketindakan yang konservatif dan kecenderungan menghindari kerugian, yang membuat beberapa jenis *programming* tertentu dan beberapa media menjadi dominan sementara yang lainnya menjadi kecil dan terbatas. Teori yang ketiga adalah Frankfurt School. Pemikiran ini memandang media sebagai suatu cara untuk membangun suatu budaya yang lebih menekankan gagasan pada benda material. Dengan cara berpikir ini, media mengarah pada pendominasian kaum elit. Hasil ini didapat dengan memanipulasi media atas citra-citra dan simbol-simbol untuk menguntungkan kepentingan kelas masyarakat.

Teori yang keempat adalah teori hegemonis. Hegemonis merupakan dominasi dari suatu ideologi atau cara berpikir yang salah atas kondisi-kondisi yang sebenarnya. Menurut pemikiran ini bahwa ideologi tidak ditimbulkan oleh sistem ekonomi saja tetapi tertanam jauh di dalam seluruh

kegiatan masyarakat. Jadi, ideologi tidak dipaksakan oleh suatu kelompok tetapi memang ada di mana-mana dan tanpa disadari. Ideologi yang dominan menyampaikan kepentingan kelas-kelas tertentu atas yang lainnya, dan media sangat jelas memegang peranan penting dalam proses ini.

Pendekatan terakhir terhadap penelitian media Marxis adalah sosial budaya, yang biasanya hanya disebut sebagai “bidang ilmu budaya”, sangat bergantung pada arti budaya dari produk-produk media, dengan memperhatikan bagaimana isi media diinterpretasikan, termasuk di dalamnya interpretasi yang dominan maupun yang berlawanan. Bidang ilmu budaya memandang masyarakat sebagai suatu lahan gagasan-gagasan yang saling bersaing di dalam sebuah perjuangan di antara arti-arti. Bidang ilmu budaya semakin disukai sebagai pendekatan untuk memadukan pemahaman dari berbagai cara berpikir.<sup>25</sup>

#### **II.2.5.B Perbedaan Media dalam Memproduksi Pesan**

Perkembangan komunikasi massa dalam konteks sosial produksi dan reproduksi masyarakat adalah salah satu faktor yang bisa menjelaskan lahirnya model analisis semiotik. Pada analisis media digunakannya semiotik berdasarkan asumsi bahwa media dikomunikasikan oleh seperangkat tanda. Dengan mempertanyakan bagaimana tanda itu bekerja, adalah dengan semiotik untuk menganalisisnya. Dapat kita perhatikan dan kita sadari bahwa teks dalam media yang tersusun atas seperangkat tanda

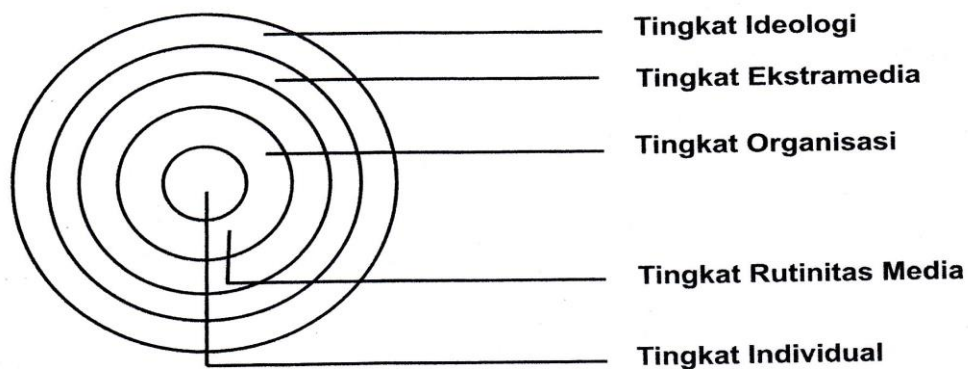
---

<sup>25</sup> Littlejohn, 1999:574-575, *Theories of Communication*, Six Edition, Belmont, California: Wadsworth, Publishing.

yang membentuk bahasa tidak pernah membawa terdapat makna tunggal di dalamnya. Seperti yang kita pahami dalam kenyataannya teks media selalu didominasi oleh *ideology* tertentu yang terbentuk melalui tanda tersebut. Ini dapat dipahami bahwa teks media membawa kepentingan-kepentingan tertentu yang lebih luas dan sangat kompleks.

Adanya kecenderungan dan perbedaan setiap media dalam memproduksi informasi kepada khlayak dapat diketahui dari pelapisan-pelapisan yang melingkupi institusi media. Berikut ini menggambarkan model “*hierarchy of influence*” dari Pamela Shoemaker dan Stephen D. Reese, yang dikutip Susilo (200:9, dalam Sobur, 2001 : 138): **Gambar 4 :**

**“Hierarchy of Influence” Shoemaker & Reese<sup>26</sup>**



<sup>26</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 138, Remaja Rosdakarya Bandung. Dalam buku; *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*: Thompson (terjemahan), 2003, hlm. 54-55. dijelaskan interpretasi Lefort mengenai analisis provokatif Baudrillard tentang masyarakat konsumtif. Apa yang dikonsumsi selalu sesuatu yang ‘baru’, tapi sesuatu yang baru ini hanyalah perbedaan belaka yang meandakan pengembalian yang abadi dari hal yang sama, pengembalian abadi dari objek keinginan konsumtif. Konsumen dihadapkan pada dunia dimana setiap sesuatu dapat dicapai, seperti rumah impian kita yang sedang menunggu. Dengan demikian ideologi baru membangun suatu dunia yang tertutup, berulang dan sudah pernah dibuat sebelumnya, tapi ia memberikan pengakhiran ketidaktampakan ini dengan meniadakan wacana totalisasi.

1. Pengaruh individu-individu pekerja media. Diantaranya adalah karakteristik pekerja komunikasi, latar belakang personal, latar belakang dan profesional.
2. Pengaruh rutinitas media. Apa yang dihasilkan oleh media massa dipengaruhi oleh kegiatan seleksi-seleksi yang dilakukan oleh komunikator, termasuk tenggat (*deadline*) dan rintangan waktu yang lain, keterbatasan tempat (*space*), struktur piramida terbalik dalam penulisan berita dan kepercayaan reporter pada sumber-sumber resmi dalam berita yang dihasilkan.
3. Pengaruh organisasional. Media mempunyai salah satu tujuan yang penting yaitu mencari materiil. Tujuan secara ekonomi media ini akan berpengaruh pada isi teks berita atau peristiwa yang dihasilkan.
4. Pengaruh dari luar organisasi media. Adanya lobi-lobi dari kelompok yang berkepentingan terhadap isi media, *pseudovent* dari praktisi *publicrelations* dan pemerintah sebagai institusi yang membuat peraturan-peraturan di bidang pers.
5. Pengaruh ideologi. Ideolgi merupakan sebuah pengaruh yang paling menyeluruh dari pengaruh yang lainnya. Ideologi di sini yang diartikan sebagai mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang dapat mempersatukan di dalam masyarakat. (Shoemaker, Reese, 1991 yang dikutip Susilo : 200: 19-20, dalam Sobur 2000: 138-139).

Jadi pokok perhatian studi mengenai teks atau isis media dan merupakan tingkatan yang paling menyeluruh adalah ideologi. Berkaitan dengan peranan penting media dalam menyebarkan ideologi. Umberto Eco (Sobur, 2001:138) melihat dalam dekade terakhir terdapat kecenderungan untuk melihat permasalahan komunikasi dalam perspektif *semiotic*. Pernyataan ini berdasarkan argumentasi, dengan melihat adanya tiga fenomena seperti berikut :

*1) an industrial society which seems to be comparatively homogeneous but is in reality full of differences and contrasts; 2) Channel of communication which make it possible to reach not determined groups but an indefinite circle or receivers in various sociological situations; 3) productive group which work out and send out given messages by industrial means* (Eco: 1976:13, dalam Sobur, 2001:139).

Menurut Eco masyarakat industri yang terlihat homogen sebenarnya memiliki banyak perbedaan dan pertentangan-pertentangan. Komunikasi tidak ditujukan hanya dalam satu jalur kelompok tertentu, tetapi pula berbagai lingkaran penerima yang beraneka ragam tidak tertentu dan beragam situasi sosial. Kelompok produktif yang mengirimkan pesan yang ditentukan melalui sarana industri pers, walaupun pada dasarnya industrialisasi komunikasi tidak hanya mengubah pada kondisi pengiriman dan penerimaan pesan akan tetapi lebih menekankan pada makna pesan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 138-141, Remaja Rosdakarya Bandung.

Maka seperti yang dibayangkan oleh Joseph A. Devito (1996) menurutnya bahasa sebagai kode, atau *system symbol*, yang kita gunakan untuk membentuk pesan-pesan verbal kita. Kata Devito, kita dapat mendefinisikan bahasa sebagai sistem produktif yang dapat dialih-alihkan dan terdiri atas simbol-simbol yang cepat lenyap (*rapidly fading*), yang bermakna bebas (*arbitrary*)<sup>28</sup> serta dipancarkan secara kultural.

Komunikasi manusia yang menggunakan bahasa (menggunakan alat ucap) dan bentuk lain, yaitu, menggunakan simbol-simbol yang dapat berbentuk naskah, surat (bahasa tulis) dan lain sebagainya. Dalam hal ini banyak terjadi pada perbedaan politik; dimana pers menempatkannya sebagai *headline* karena di dalamnya memunculkan faktor konflik sebagai salah satu nilai berita (*news value*) yang memiliki nilai jual yang tinggi. Dan ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang sah-sah saja, namun demikian melihat fungsi pers sebagai pendidikan politik dan konteks ruang publik dengan pertemuan berbagai pihak yang memiliki perbedaan dalam kepentingan, latar belakang, sudut pandang yang berbeda-beda, maka keberpihakan pers menjadi sesuatu yang harus dikritisi.

Pada analisis semiotik ada tiga jenis masalah yang hendak dibahas, yaitu masalah yang hendak dibahas, yaitu masalah makna (*the problem of meaning*), yaitu terkait bagaimana orang memahami pesan, informasi apa yang dikandung dalam struktur sebuah pesan. Kedua, masalah tindakan (*the problem of action*) atau pengetahuan bagaimana memperoleh sesuatu

---

<sup>28</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 140, Remaja Rosdakarya Bandung.

melalui pembicaraan. Ketiga, masalah koherensi (*problem of coherence*), yang menggambarkan bagaimana membentuk suatu pola pembicaraan dapat diterima secara masuk akal (*logic*) dan dapat dipahami (*sensible*).<sup>29</sup> Untuk melihat perlakuan tertentu atas fakta, di dalam semiotik sosial ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian penafsiran teks secara tekstual, yaitu (Sudiby, Hamad, Qodari, 200:23, dalam Sobur, 2001: 148):

1. Medan Wacana (*field of discourses*): menunjuk pada hal yang terjadi: apa yang dijadikan wacana oleh pelaku dalam hal ini media massa mengenai sesuatu yang sedang terjadi di lapangan peristiwa.
2. Pelibat wacana (*tenor of discourse*) menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks (berita); sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka. Dengan kata lain; siapa yang dikutip dan bagaimana digambarkan sifatnya sumber tersebut.
3. Sarana wacana (*mode of discourse*) menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa : bagaimana komunikator (media massa) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan bahasa yang diperhalus, hiperbolik, eufemistik atau vulgar.

Seperti dalam penelitian ini perbandingan sejajar mengenai suatu peristiwa di antara media yang satu dengan media lainnya, yaitu dengan menggunakan satu *sample* dengan liputan berita yang sama.

---

<sup>29</sup> Littlejohn, 1999:83-84, *Theories of Communication*, Six Edition, Belmont, California: Wadsworth, Publishing.

### II.2.5.C Media dan Politik Pemaknaan

Walter Fisher mengemukakan bahwa makna merupakan konsep yang abstrak, yang telah menarik perhatian para ahli filsafat dan para teoritis ilmu sosial selama 2000 tahun silam. Menurut DeVito makna ada dalam diri manusia, makna tidak terletak pada kata-kata melainkan pada manusia. Menurut DeVito kita menggunakan kata-kata untuk mendekati makna yang ingin kita komunikasikan.<sup>30</sup> Namun demikian, kata-kata tidak secara sempurna dan lengkap menggambarkan apa yang kita maksudkan. Demikian pula, makna yang didapat pendengar dari pesan-pesan kita akan sangat berbeda-beda dengan makna yang ingin kita komunikasikan. Komunikasi adalah proses yang kita gunakan untuk mereproduksi, dibenak pendengar, apa yang ada di dalam benak kita. Reproduksi ini hanya sebagai proses parsial dan selalu bisa saja salah.

Banyak jenis makna yang dikemukakan para ahli, namun pada umumnya makna kata dibedakan atas makna yang bersifat denotatif dan makna kata yang bersifat konotatif. Denotatif adalah kata yang tidak mengandung makna atau perasaan-perasaan tambahan atau disebut makna denotatif. Makna konotatif atau konotasi adalah makna kata yang mengandung arti tambahan, perasaan tertentu, atau nilai dasar tertentu di samping makna dasar yang umum.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Fairelough, *Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language*, Longman, London, 1995, hlm: 100.

<sup>31</sup> Fairelough, *Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language*, Longman, London, 1995, hlm: 100-102.



Pemberitaan media dalam banyak kasus, selalu ada penggambaran buruk dan baik, terutama pada pihak yang dominan; media akan menggambarkan sisi baiknya. Memang yang menjadi persoalan adalah media *ideology* dan kepentingan-kepentingan maka media sangat sulit untuk bersifat netral. Misalnya dengan menggunakan atribut-atribut tertentu dari media dapat mengkondisikan pesan-pesan yang dikomunikasikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Marshall dan McLuhan, "*the medium is the message*,"<sup>32</sup> yang artinya media itu sendiri merupakan pesan. "Apa-apa yang dikatakan" ditentukan secara mendalam, maka dibalik pesan-pesan yang disalurkan lewat media niscaya tersembunyi berbagai mitos dan cerita, dan mitos sebagai *system* yang mengandung muatan ideologis yang berpihak kepada kepentingan mereka yang berkuasa. Pada saat pasar bebas saat ini, maka tak mengherankan jika media juga berpegang pada pasar yang penuh dengan persaingan.

Media pada dasarnya adalah cermin dan refleksi dari masyarakat secara umum. Karena itu media bukanlah saluran yang bebas; dia juga subjek yang mengkonstruksikan realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Dalam banyak kasus, pemberitaan media ada kecenderungannya untuk memarjinalkan kelompok masyarakat bawah. Dan terkadang ada pembelaan pada kelompok atau tokoh tertentu. Semua ini dapat terjadi karena berkaitan dengan politik pemberitaan media. Dan ada hubungannya dengan strategi media dalam meliputi peristiwa, memilih dan

---

<sup>32</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 19-21, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

menampilkan fakta serta dengan cara bagaimana fakta itu disajikan; yang secara langsung hal ini dapat berpengaruh dalam mengkonstruksi peristiwa.<sup>33</sup>

Hal yang terpenting dalam memahami media adalah media mengenai bagaimana media melakukan politik pemaknaan. Menurut Stuart Hall, makna tidak tergantung pada struktur makna itu sendiri. Tetapi lebih kepada praktik pemaknaan. Hall memandang, makna adalah suatu produksi sosial, suatu praktik konstruksi. Media massa, menurut Hall, pada dasarnya bukannya memproduksi, akan tetapi menentukan (*to define*) realitas melalui pemakaian kata-kata yang sudah dipilih. Makna tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai reproduksi dalam bahasa, tetapi makna adalah sebuah pertentangan sosial (*social struggle*),<sup>34</sup> sebuah perjuangan dalam memenangkan wacana. Maka dikatakan oleh Hall, pemaknaan yang berbeda merupakan arena pertarungan tempat memasukan bahasa di dalamnya. Ketika bahasa digunakan oleh media massa, maka sebenarnya ia memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena ketersebarannya yang luas dalam menanamkan stereotip atau prasangka tertentu. Di sini pendeskrisian serta kata-kata yang digunakan oleh wartawan dapat menjadi pilihan untuk memperluas cakrawala berpikir kita, sebagai pengaruh secara psikologis.

---

<sup>33</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 25, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

<sup>34</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 21. dalam buku: *Perbandingan Sistem Politik*, karangan: Mochtar Mas'ood dan Colin Mac Andrew, Penerbit: Gadjah Mada University Press. 1978;75; dijelaskan kekuasaan dan elit politik, bahwa studi tentang elit politik yang tepat adalah mendefinisikan kekuasaan dalam artian kekuasaan atas hasil.

## II.2.5.D Ideologi dan Peta Ideologi Media

### Ideologi

Aart van Zoest mengatakan sebuah teks tak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu ideologi. Istilah *ideology* adalah salah satu istilah yang sangat banyak dipergunakan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial; akan tetapi artinya sangat beragam dan kurang jelas. Istilah *ideology* mempunyai pengertian yang bertolak belakang. Secara positif, ideologi dipersepsi sebagai suatu pandangan dunia (*worldview*) yang menyatakan nilai-nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Dan secara negatif, ideologi dilihat sebagai suatu "kesadaran palsu", yaitu suatu kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkan pemahaman orang mengenai realitas sosial.<sup>35</sup>

Sargent (dalam Sunarto, 2001:34) berpendapat bahwa *ideology*; memberikan suatu gambaran mengenai dunia, baik kini maupun di masa depan, serta bagaimana menyusun kompleksitas dunia menjadi sederhana dan dapat dipahami. James Lull berpendapat, *ideology* merupakan ungkapan yang paling tepat untuk mendeskripsikan nilai dan agenda publik dari bangsa, kelompok agama, kandidat dan pergerakan politik. Organisasi bisnis, sekolah, serikat buruh, bahkan regu olah raga profesional dan orkes rock. Menurut Lull, akan tetapi istilah itu paling sering untuk menunjukkan hubungan antara informasi dan kekuasaan sosial dalam konteks ekonomi-

---

<sup>35</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 60-61, PT. Remaja Rosdakarya Bandung.

politik berskala besar;<sup>36</sup> cara-cara berpikir yang terpilih didukung melalui berbagai macam saluran oleh mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan ekonomi dalam masyarakat.

### **Peta Ideology Media**

Kehidupan media mempunyai peran penting, dimana media memegang peranan dalam mendefinisikan bagaimana sebuah realitas seharusnya dipahami, dengan menggunakan cara-cara tertentu kepada khalayaknya. Pendefinisian ini berlaku juga pada peristiwa dan aktor-aktor sosial. Fungsi yang utama dalam ideology adalah media sebagai integrasi sosial. Media di sini melaksanakan fungsi menjaga nilai-nilai kelompok dan bagaimana nilai-nilai itu dijalankan. Untuk mengintegrasikan masyarakat dalam suatu tatanan nilai yang disepakati, pandangan atau nilai didefinisikan sehingga keberadaan nilai itu dapat diterima dan diyakini kebenarannya. Dalam kerangka ini media berperan mendefinisikan nilai dan perilaku yang sesuai dengan nilai kelompok dan perilaku atau nilai yang dipandang sebagai suatu yang menyimpang. Perbuatan, sikap atau nilai yang menyimpang tersebut bukanlah sesuatu yang secara alami terjadi dengan sendirinya, dan dapat diterima begitu saja. Tetapi pandangan atau nilai tersebut merupakan hasil konstruksi. Dengan konstruksi tersebut, media aktif mendefinisikan peristiwa dan realitas sehingga membentuk kenyataan

---

<sup>36</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 62, Remaja Rosdakarya Bandung.

apa yang layak, dianggap baik, apa yang sesuai , dan apa yang dipandang menyimpang.

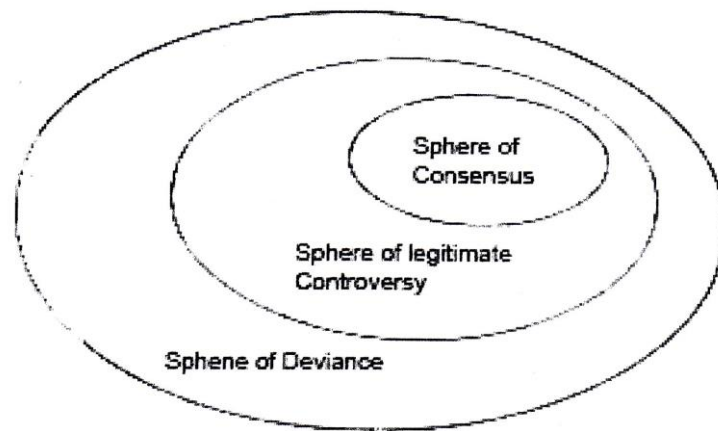
Dalam proses produksi berita dikenal semacam konsensus; yaitu bagaimana suatu peristiwa dipahami bersama dan dimaknai. Melalui konsensus ini realitas yang beragam dan tidak beraturan dirubah menjadi realitas yang mudah dipahami dan dikenali, sesuatu yang tadinya nampak beragam menjadi tunggal, maka di sini terjadi proses homogenisasi bahwa kita adalah satu; dimana kita mempunyai ketertarikan, minat dan kekuasaan yang sama dalam masyarakat. Dalam model konsensus ini maka terjadi *share* politik, ekonomi dan budaya di dalam masyarakat dimana masing-masing orang menyerap nilai-nilai yang sama sebagai anggota atau komunitas politik, ekonomi, dan budaya tertentu. Sehingga merubah yang tadinya institusional menjadi personal. Setiap orang dianggap mempunyai akses yang sama untuk mengekspresikan pendapat dan gagasannya dalam struktur dan institusi sosial. Daniel Hallin menyebutnya sebagai asumsi latar (*background assumption*). Hall memakainya untuk menyebutkan bagaimana anggota komunitas *share* terhadap pengetahuan dan bahasa yang sama, sehingga mereka seakan-akan terikat oleh budaya dan komunitas yang sama sebagai sesama anggota. Dasar kepercayaan dan budaya yang sama tersebut menyediakan budaya yang sama dan diasumsi hanya ada satu persepektif dalam melihat suatu peristiwa: menyediakan suatu pandangan yang dapat disebut sebagai budaya atau sistem nilai. Melalui ini, perilaku atau berita yang dihasilkan wartawan berada dalam nilai-nilai yang telah disepakati

bersama. Peristiwa dibingkai dan dilihat menggunakan kerangka dan tata nilai tersebut. Maka kelompok yang berada di luar akan dipandang sebagai yang menyipang (*deviant*) dan dipinggirkan dalam pembicaraan. Peristiwa atau aktor dapat dipandang dengan ketidaksetujuan dan dimarginalkan dalam pembicaraan. Pandangan negatif atau marginal ini mengenai sesuatu didasarkan pada konsensus yang bekerja dalam suatu proses pemberitaan.

Dalam pandangan Hall, perilaku berbeda (*dissent*) ini bukanlah hasil dari sikap personal wartawan ketika memandang dunia. Melainkan penantang ini dibentuk lewat *share* dengan nilai budaya yang ada dalam komunitas ia ditentukan oleh proses impersonal dari proses pembuatan berita itu sendiri, sebagai sebuah praktek profesional, mereka para pekerja media terbentuk dalam proses mental dan proses kerja dimana seseorang akan *share* dengan nilai yang ada dalam masyarakat. Dalam model Hall, penantang atau orang yang menyimpang tidaklah diciptakan atau dibentuk secara sengaja oleh otoritas tertentu, tetapi melalui kesepakatan bersama. Ketika mereka menciptakan penentang (*dissent*), tidaklah cukup dikatakan sebagai bentuk dari pemberitaan media akan tetapi mereka dibentuk dan diciptakan lewat peta dan konsep mental tertentu. Seperti **Gambar 5** berikut: **Ilustrasi Daniel Hallin**<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Diambil dari Eriyanto, hal. 127; dikutip dari Pamela J. Shoemaker and Stephen D. Reese *Mediating the Message; Theories of Influence on Massa Media Content*, Second Edition, Longmann, Ney York, hlm. 227.



Daniel Hall membuat ilustrasi diatas memberikan gambaran menarik yang membantu menjelaskan bagaimana berita kita tempatkan dalam bidang atau peta ideologi. Ia membagi dunia jurnalistik ke dalam tiga bidang penyimpangan (*sphere of deviance*), bidang kontroversi (*sphere of legitimate controversy*), dan bidang konsensus (*sphere of consensus*). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa ini dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis. Sehingga peristiwa dibingkai dan dimaknai sebagai wilayah penyimpangan, kontroversi, atau konsensus.

Sebagai wilayah ideologis, peta seperti ini dapat dipakai untuk menjelaskan bagaimana perilaku dan realitas yang sama bisa dijelaskan secara berbeda, karena menggunakan kerangka yang berbeda. Intinya, ada banyak cara bagaimana perilaku dikonstruksi dan dibentuk menjadi perilaku yang menyimpang, sekaligus dengan menggunakan cara yang halus dan tidak langsung. Dengan membuat seleksi, memilih peristiwa tertentu,

mbingkai peristiwa dengan bingkai tertentu, maka peristiwa yang hadir ditengah publik bisa jadi berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi.

#### II.2.5.E Fungsi Bahasa Sebagai Sistem Simbol

Menurut pandangan Burke, bahasa sesuai diisi secara emosional, menurutnya tidak ada kata yang benar-benar netral. Maka akibatnya sikap, penilaian, dan perasaan kita selalu tercermin dalam bahasa yang digunakan. Bahasa secara alami mempunyai sifat selektif dan abstrak, yang terkadang memfokuskan perhatian pada aspek-aspek tertentu dengan mengorbankan aspek-aspek yang lain. Bahasa selalu tidak pasti dan meragukan.<sup>38</sup>

Sebuah kata-kata atau *symbol* terkadang dapat melukai orang atau kelompok tertentu, sebuah simbol dan kata-kata yang tajam dapat menjadikan sebuah ancaman, provokasi bahkan terjadinya sebuah pembunuhan dan perang, baik perang secara *ideology*, wacana maupun perang secara diplomasi dan fisik. Bahkan sebuah makna mungkin dapat menghancurkan sebuah bangsa.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dalam buku; *Opini Umum* (terjemahan); Walter Lippmann, 1998:60; Mereka hanya menguasai lebih sedikit kata-kata daripada ide-ide yang ingin mereka ungkapkan, dan bahasa, menurut Jean Paul Sartre, ialah kamus metafora-metafora yang memudar. Wartawan yang menghadapi setengah juta pembaca dan tentang mereka hanya mempunyai gambaran yang samar-samar. Sedangkan masyarakat mempunyai pola berpikir yang berbeda.

<sup>39</sup> Thompson, Jhon B: *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia* (terjemahan) 2003: 77-79; Dijelaskan bahwa kita memiliki sejumlah strategi dan kecerdikan untuk menjadikan kata-kata dapat digunakan sebagai alat melakukan kekerasan dan paksaan, sebagai alat intimidasi dan penyelewengan, sebagai tanda dan keadaban, sikap merendahkan diri dan jijik. Konsep kekerasan simbolik mengarahkan kita untuk merefleksikan bentuk-bentuk relasi komunikasi yang saling berhubungan dengan relasi kekuasaan.



Penggunaan bahasa dalam surat kabar terkadang ada pesan provokatif, hal ini berhubungan dengan penggunaan kata-kata, kosa kata, simbol, dan pemaknaan yang juga memberikan peluang terjadinya sintimen negatif terhadap etnis tertentu. Sebuah konstruksi makna yang dapat menggiring pemahaman publik pada aktor atau peristiwa dan isu-isu tertentu. Lewat penggunaan istilah-istilah yang mengumbar kekerasan terkadang juga digunakan tanpa memperhitungkan efek yang akan terjadi.

Fakta dan peristiwa kekerasan terkadang dihadirkan hampir secara utuh oleh media, yang memberikan efek pembelajaran kepada seseorang untuk membuat atau terinspirasi berperilaku seperti dia lihat, dengar, dan dia baca. Bahkan Alwy Rachman, Direktur Lembaga penerbitan, dalam kutipan yang diambil dari (Anto, 2001 : 27 dalam Sobur, 2001, 41) mengatakan "bahwa konfliketnis secara tidak disadari telah berpindah dari ruang sosiokultural ke ruang media".<sup>40</sup>

Tubbs dan Moss (1994:66) (Dalam Sobur, 2001:41) mengatakan dalam *Human Communication*, "*Involves sending messages from one person's nervous system to another's with the intention of creating a meaning similar to the one in the sender's mind. The verbal message does this thourgh world, the basic elements of language, and words, of course, are verbal symbols*". Sebenarnya proses komunikasi mencakup pengiriman pesan dari *system* saraf seseorang kepada *system* saraf orang lain, dengan

---

<sup>40</sup> Dalam buku; *Opini Umum* (terjemahan); Walter Lippmann, 1998:92-93; bahwa stereotip ini mendahului pemakaian nalar; bentuk persepsi memaksakan sifat tertentu pada data perasaan kita sebelum data itu mencapai intelegensi. Jadi begitu banyak konflik etnis yang terjadi akibat stereotip dan media massa dalam hal ini memiliki kekuasaan dalam membangun streotip; baik negatif atau positif tentang kelompok atau etnis tertentu.

maksud untuk menghasilkan sebuah makna yang sama dengan yang ada dalam benak di pengirim. Pesan verbal melalui kata-kata, yang merupakan unsur dasar bahasa, dan kata-kata, yang merupakan simbol verbal. Hubungannya dalam hal ini bagaimana penggunaan simbol-simbol verbal yang merujuk pada peristiwa, tindakan, hubungan dan konsep-konsep.<sup>41</sup>

Simbol adalah suatu istilah dalam logika, matematika, semantik, semiotik, dan epistemologi. Unsur utama ini dalam aneka penggunaannya adalah sifat simbol untuk mewakili sesuatu yang lain.

Pada dasarnya kemampuan manusia dalam menciptakan simbol adalah sebagai bukti bahwa manusia sudah memiliki kebudayaan yang tinggi dalam berkomunikasi. Simbol-simbol itu diciptakan mulai dari yang sederhana (seperti bunyi dan isyarat) sampai kepada simbol yang dimodifikasi dalam bentuk signal-signal melalui gelombang udara dan cahaya. Simbol dalam pendekatan ini yang digunakan adalah simbol yang mempunyai makna ganda. Simbol dalam arti ganda diperoleh dengan menganalogikan arti pertama dengan arti kedua. Analogi pada simbol bersifat subjektif dan biasanya arti kedua diperoleh melalui arti pertama.<sup>42</sup>

Simbol-simbol harus memiliki arti yang dapat dibagi di antara masyarakat agar keberadaannya dapat diakui. Mead menyebutkan suatu gerakan tubuh dengan arti yang dapat dibagi sebagai sebuah *significant symbol*. Masyarakat Bangkit dalam simbol-simbol signifikan dari

---

<sup>41</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 11, Remaja Rosdakarya Bandung.

<sup>42</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 12-13, Remaja Rosdakarya Bandung.

kelompoknya. Karena adanya kemampuan untuk melafalkan simbol-simbol itu. Kita secara harfiah dapat mendengarkan diri kita sendiri dan kemudian menanggapi seperti halnya orang-orang lain menanggapi kita. Kita dapat merasakan adanya pesan-pesan dalam diri kita, dan kita dapat berempati dengan para pendengar dan berperan sebagai mereka atau merasakan sebagai diri mereka untuk saling melengkapi tanggapan orang lain.<sup>43</sup>

#### **II.2.5.F Wacana, Teks, Konteks dan Analisis Wacana**

Istilah wacana sekarang ini dipakai sebagai terjemahan perkataan dari bahasa Inggris yaitu *discourse*. Mengenai wacana atau *discourse* ini dapat kita baca keterangan sebagai berikut :

Kata *discourse* berasal dari bahasa Latin *discursus* yang berarti larian kemari (yang diturunkan dari *dis-* 'dari, dalam arah yang berbeda', dan *curre* 'lari').

1. Komunikasi pikiran dengan kata-kata; ekspresi ide-ide atau gagasan-gagasan; konversi atau percakapan.
2. Komunikasi secara umum, terutama sebagai suatu subjek studi atau pokok telaah.
3. Risalah tulis; disertasi formal; kuliah; ceramah; khotbah (Webster, 1983:522), (Sobur, 2001: 9-10)

---

<sup>43</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 50-51, Remaja Rosdakarya Bandung.

Dalam pengertian yang lebih sederhana, wacana berarti cara objek atau ide diperbincangkan secara terbuka kepada publik sehingga menimbulkan pemahaman tertentu yang tersebar luas (Lull, 1998:2250). Kleden menyebutkan wacana sebagai *"ucapan dalam mana seseorang pembicara menyampaikan sesuatu tentang sesuatu kepada pendengar"* (Kleden, 1997:34). Wacana selalu mengandaikan pembicara/penulis, apa yang dibicarakan, dan pendengar/pembaca. Bahasa merupakan mediasi dalam proses ini. Wacana itu sendiri seperti apa yang dikatakan Tarigan (Sobur 2001:11); mencakup keempat tujuan penggunaan bahasa, yaitu *"ekspresi diri sendiri, eksposisi, sastra, dan persuasi"*.

Berdasarkan berbagai pendapat-pendapat di atas maka dapat dirangkum bahwa pengertian wacana itu sebagai *"rangkaiannya ujar atau rangkaian tindak tutur yang mengungkapkan suatu hal (subyek) yang disajikan secara teratur, sistematis, dalam satu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun nonsegmental bahasa"*.<sup>44</sup>

Milss (1994), dengan mengacu pada pendapat Foucault, membedakan pengertian wacana menjadi tiga macam, yakni wacana dilihat dari level konseptual teoritis, konteks penggunaan, dan metode penjelasan.

Secara ringkas dan sederhana, teori wacana adalah menjelaskan sebuah peristiwa terjadi seperti terbentuknya sebuah kalimat atau pernyataan (Heryanto, 2000:344). Maka ia dinamakan analisis wacana. Sebuah kalimat dapat terungkap atau dipahami bukan hanya karena ada orang yang

---

<sup>44</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 52-55, Remaja Rosdakarya Bandung.

membentuknya dengan motivasi atau kepentingan subyektif tertentu (rasional atau irasional). Terlepas dari apa motivasi orang tersebut, kalimat yang dituturkannya tidak dapat dimanipulasi semau-maunya oleh orang yang bersangkutan. Ariel Heriyanto, mengatakan ”hanya dibentuk, hanya akan bermakna, selama ia tunduk pada sejumlah ’aturan’ gramatika yang di luar kemauan atau kendali si pembuat kalimat. Aturan-aturan kebahasaan tidak dibentuk oleh seseorang secara individual bagaimanapun pandainya orang tersebut. Bahasa selalu menjadi milik bersama ruang publik.<sup>45</sup>

### **Wacana Tertulis**

Ricoeur mempunyai pandangan, bahwa wacana tertulis atau wacana tulis, lebih fiksasi yang material sifatnya. Menurutnya melalui tulisan dapat tercipta kemungkinan panerusan tata aturan ke ruang dan waktu yang berbeda dengan tanpa distorsi. Dampak yang begitu luas menunjukkan bahwa wacana manusia bukan hanya terselamatkan dari kelenyapan dan keterlupaan dengan cara menuangkannya kedalam bentuk teks tertulis, tetapi bahwa kemanusiaan itu sendiri terpengaruh dan tertransformasikan secara mendalam bahkan sampai ke tahap eksistensial. Transformasi eksistensial ini menjadi mungkin karena kebebasan yang dimiliki oleh pembaca ketika ia membaca teks tertulis. Derrida menyebut tulisan sebagai *cybernetic* program yang mencakup konsep jiwa, konsep hidup, nilai, pilihan, dan memori.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm.56, Remaja Rosdakarya Bandung.

<sup>46</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 56-60, Remaja Rosdakarya Bandung.

## Teks

Dalam teori bahwa teks merupakan huruf yang membentuk kata dan kalimat yang dirangkai dengan *system* tanda yang disepakati oleh masyarakat, sehingga sebuah teks ketika dibaca dapat mengungkapkan makna yang dikandungnya. Dalam membaca seseorang diharapkan untuk melakukan dialog imajinatif dengan pengarangnya, meskipun mereka hidup, dalam kurun waktu serta tempat yang berbeda. Di sini kita dihadapkan pada prasangka hermeneutik. Jika sebuah teks tidak diteliti dan diinterogasi secara kritis, bisa-bisa kesadaran kognitif kita akan terjajah oleh teks. Meski demikian orang tidak mudah untuk memperoleh data mengenai asal-usul sebuah teks dan juga pengarangnya. Maka Gadamer mengatakan; seseorang sudah terlahir dalam kebun prasangka dan cenderung untuk menerima sumber otoritas tanpa argumentasi kritis. Maka ada benarnya seperti yang disarankan oleh Komaruddin Hidayat, agar pembaca tidak terbawa oleh subjektivitas pengarangnya dalam menelaah teks, maka diperlukan *counter-prejudice*; pembaca perlu "curiga" (untuk tujuan positif) atau kritis terhadap diri sendiri dan terhadap teks, supaya terjadi wacana yang cerdas dan subyektif mungkin antara pihak pembaca dan penulis.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Dengan ini maka lahirlah isu dan opini yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap media, melalui strategi yang telah ditentukan oleh tim redaksional yang berdasarkan ideologi media yang dianutnya. Hasil pengamatan dan wawancara peneliti juga menemukan politik dan kerja dalam budaya media yang mendasari perbedaan mereka dalam meliputi berita dan menentukan sebuah isu yang dimunculkan dan relevan menurut mereka. McQuail menggambarannya; dalam Littlejohn, hlm. 334.

## Konteks

Gut Cook, menyebut ada tiga hal yang sentral dalam pengertian wacana: teks, konteks, dan wacana. Menurut Cook, pengertian teks adalah sebagai semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi mencakup semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek, suara, citra, dan sebagainya. Konteks memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks tersebut diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan sebagainya. Dan wacana di sini, dimaknai sebagai teks dan konteks secara bersama-sama. Dan titik sentral dari analisis wacana adalah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi. Maka di sini tidak hanya membutuhkan proses kognisi tetapi juga gambaran spesifik dari budaya yang dibawa. Hal inilah yang menjadi perhatian, mengapa studi mengenai bahasa selalu memasukkan konteks, karena bahasa akan selalu berada dalam konteks, dan tidak satupun tindakan komunikasi tanpa partisipan, interteks, situasi, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Mengenai teks dalam suatu konteks Fillmore mengemukakan : *The task is to determine what we can know about the meaning and context of an utterance given only the knowledge that the utterance has occurred...I find*

---

<sup>48</sup> Dalam Sobur, 2001, hlm. 87; Paul Watson salah seorang pendiri Greepeace, mengemukakan tentang perilaku media massa dan pemahamannya tentang kebenaran; menurutnya kebenaran yang dianut media massa bukan kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran.

*whenever I notice some sentences in contexts, immediately find myself asking what the effect would have been in the contexts had been slightly different.*

Pendapat Fillmore adalah menegaskan betapa pentingnya sebuah konteks dalam menentukan makna suatu ujaran. Dan ketika konteks berubah, maka berubahlah maknanya.<sup>49</sup>

### **Analisis Wacana**

Littlejohn melihat, banyak tujuan-tujuan komunikasi kita diselesaikan secara bersama-sama dengan cara ulang alik. Pada analisis wacana tertarik pada aturan-aturan transaksi pesan. Dari segi analisisnya, ciri dan sifat wacana itu dapat dikemukakan sebagai berikut : (Syamsuddin 1992:6), (Sobur, 2001:49):

1. Analisis wacana membahas kaidah memakai bahasa di dalam masyarakat (*rule of use*)
2. Analisis wacana merupakan usaha memahami makna tuturan dalam konteks, teks, dan situasi (Firth).
3. Analisis wacana merupakan pemahaman rangkaian tuturan melalui interpretasi semantik (Beller).
4. Analisis wacana berkaitan dengan pemahaman bahasa dalam tindak berbahasa (*what is said from what is done* – menurut Labov)
5. Analisis wacana diarahkan kepada masalah memakai bahasa secara fungsional (*functional use language* – menurut Coulthard)

---

<sup>49</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 88-89, Remaja Rosdakarya Bandung.



### **II.2.5.G Konstruksi Realitas Politik Media Massal Strategi dan Efek**

Politik dan media massa tidak dapat dipisahkan, apa yang dikatakan sebagai peristiwa politik; ini akan menjadi berita yang bernilai bagi media massa. Hubungan antara para aktor dengan pekerja media pada beberapa mediaupun terlihat sangat mesra, terutama pada media atau koran-koran partisipan.

Independen dan objektif merupakan klaim setiap jurnalis. Namun pada kenyataannya tidak demikian. Berangkat dari sebuah peristiwa yang sama, media akan sangat berbeda dalam hal menonjolkan sisi atau aspek tertentu, bahkan terkadang menenggelamkannya atau menutupnya. Bagaimana realitas dibingkai sehingga realitas dapat dipahami, dimaknai, dikonstruksi dengan makna yang baru. Jadi bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan dalam bentuk teks berita. Gambaran seperti inilah realitas politik, bagaimana media membangun, menyuguhkan mempertahankan, dan memproduksi suatu peristiwa kepada pembaca setianya.

Dalam menanggapi peristiwa politik, biasanya media akan mengangkat tingkah laku dan pernyataan-pernyataan mereka yang mempunyai nilai berita. Apalagi jika peristiwa itu berupa persengketaan dua kubu yang memiliki kekuatan yang sama dalam memperebutkan kursi wali kota. Maka seluruh media pun setiap hari menghadirkannya sebagai hasil liputan yang telah direkayasa dan dibingkai dengan *focus* sudut pandang yang berbeda-beda. Dengan demikian suatu peristiwa politik akan

menimbulkan opini publik yang berbeda-beda, tergantung strategi pengemasan yang dilakukan media tersebut.

Berita politi memang sangat menarik dan actual, karena menyangkut minat masyarakat yang luas, seperti pembentukan opini dari aktor-aktor politik. Dengan demikian para aktor politik dapat menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat dalam bentuk wacana yang melibatkan seluruh masyarakat, hal ini berhubungan dengan strategi dan tujuan politik si aktor.

Peranan media saat inipun bergeser telah menajdi industri, dengan peranan para pemilik modal yang berorientasi pasar maka tak jarang media menjadi tidak sungguh-sungguh dalam memberitakan peristiwa politik karena di dalamnya ada banyak tekanan.

Semiotik sebagai suatu model dari ilmu pengetahuan sosial yang memahami duani sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan 'tanda'. Maka semiotika merupakan ilmu yang mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Umberto Eco (Sobur, 2001, hal: 87) menyebut tanda tersebut sebagai "kebohongan". Menurut (Gottdiener, 1995, dalam Sobur, 2001:87); dalam tanda ada sesuatu yang tersembunyi dibalikny dan bukan merupakan tanda itu sendiri. Menurut Saurssure, persepsi dan pandangan kita tentang realitas, dikonstruksikan oleh kata-kata dan tanda-tanda lain yang digunakan dalam konteks sosial. Pendapat ini dianggap revolusioner dan mengejutkan, karena berarti tanda membentuk

persepsi manusia, lebih dari sekedar merefleksikan realitas yang ada (Bignel, 1997 dalam Sobur, 2001).

Paul Watson (Sobur, 2001) sebagai salah seorang pendiri *Greenpeace*, mengemukakan mengenai perilaku media massa. Menurut Paul, konsep kebenaran yang dianut media massa bukanlah kebenaran sejati, tetapi sesuatu yang dianggap masyarakat sebagai kebenaran. Ringkasnya, bahwa kebenaran ditentukan oleh media massa (Abrar 1995:59) (Sobur, 2001). Jika ini memang merupakan kebenaran, maka bisa kita bayangkan betapa beratnya tugas pembaca dalam menyikapi sebuah berita. Pembaca sebuah berita teks harus memiliki kemampuan yang memadai untuk menyaring sebuah berita untuk menemukan kebenaran, setidaknya apa yang disebut mendekati kebenaran.<sup>50</sup>

Salah satu cara untuk membantu pembaca menyikapi berita pers adalah konteks pemberitaan. Lewat konteks pemberitaan ini, pembaca dapat memahami masalah yang ada dan pemecahan masalah yang ditampilkan tidak berlaku untuk konteks yang lain. Melalui konteks pemberitaan ini pembaca mengerti bahwa berita yang buruk bisa dibungkus dengan bahasa

---

<sup>50</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 89. Dalam buku *Orientalisme*, 1985, hlm. 263-264 (terjemahan), karya; Edward W. Said; dijelaskan mengenai pencitraan tentang negara timur oleh negara barat, bagaimana “Timur” diorientalisasi (yang dibuat atau diatur) yang didominasi oleh imperatif-imperatif, perspektif-perspektif serta bias-biasa ideologis, yang dianggap cocok bagi Timur menurut mereka. Di sini penggunaan bahasa dan media massa sangat berperan besar. Mereka menentukan bagaimana mengajarkan tentang Timur, diriset, diatur dan dinilai dengan cara-cara khas tertentu. Dengan demikian Edward berpendapat; bahwa orientalisme merupakan satu doktrin politis yang ditetapkan terhadap Timur, karena Timur lebih lemah daripada Barat, yang menyatukan perbedaan Timur dengan kelemahannya.

yang manis sehingga tampak samar-samar dan menyenangkan. Artinya konteks pemberitaan menjadi alat yang sangat penting.

Pekerjaan media pada hakikatnya adalah mengkonstruksikan realitas. Isi media merupakan hasil karya para pekerja media mengkonstruksikan berbagai realitas yang dipilihnya seperti realitas politik. Maka yang diliput adalah mengenai kegiatan orang yang berkumpul di lapangan, untuk mendengarkan pidato-pidato politik pada masa Pemilu ini adalah hasil konstruksi realitas mengenai peristiwa yang disebut kampanye Pemilu.

Pekerjaan media (Tucman, 1980 dalam Sobur, 2001) berdasarkan sifat dan faktanya adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan (*constructed reality*).

Maka ini semua dapat dipahami isi media pada hakikatnya adalah hasil konstruksi realitas bahasa sebagai perangkat dasarnya. Sedangkan bahasa tidak hanya sebagai alat untuk mempresentasikan realitas, namun juga bisa menentukan relief seperti apa yang akan diciptakan oleh bahasa tentang realitas tersebut. Maka akibatnya, media massa mempunyai peluang yang sangat besar di dalam mempengaruhi makna dan gambaran yang dihasilkan dari realitas yang dikonstruksikannya. Begitu pula dengan profesi wartawan. Pekerjaan utamanya adalah mengisahkan hasil reportasenya kepada khalayak. Mereka selalu terlibat dengan usaha-usaha mengkonstruksikan realitas, yaitu dengan cara menyusun fakta yang dikumpulkan dalam suatu bentuk laporan jurnalistik berupa berita (*news*), karangan khas (*feature*), atau gabungan keduanya (*news feature*). Dengan ini

maka dapat membenarkan yang dikatakan Tuchman bahwa berita pada dasarnya adalah realitas yang telah dikonstruksikan.<sup>51</sup>

Dalam media bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi yang berfungsi menyampaikan fakta, informasi, atau opini. Bahasa tidak hanya menggambarkan realitas, tetapi juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan oleh publik. Ketika konstruksi media berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat, ketika pada hakikatnya telah terjadi kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik dapat berupa penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. Kekerasan simbolik tidak hanya beroperasi lewat bahasa, tetapi juga pada isi bahasa (*language content*); apa yang diucapkan, apa yang disampaikan dan diekspresikan. Contohnya, ketika Orde Baru masyarakat menerima realitas lewat kampanye yang menyembunyikan kepahitan realitas itu sendiri melalui bahasa dan rangka "mencuci" kesadarannya untuk menerima realitas, misalnya sumber berita pada waktu itu menggunakan kata-kata "penyesuaian harga", "kesalahan prosedur" dan lain-lain. Banyak kosa kata politik yang tampak bersifat *eufimis* (sopan) dimunculkan ke masyarakat dengan makna yang salah. Maka masyarakat sebagai pemakai bahasa mengalami kesulitan untuk membedakan makna kata yang memiliki arti

---

<sup>51</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 90-91, Remaja Rosdakarya Bandung. Dalam Littlejohn, 1996:236; Dijelaskan; bahwa peran media sangat penting karena menampilkan sebuah cara dalam memandang realita. Bagaimana para produser mengendalikan medianya melalui cara-cara tertentu untuk menyandikan pesan-pesan Gambaran Becker bahwa proses tersebut adalah; 'peristiwa tidak dapat menunjukkan...supaya bisa diterima akal peristiwa harus dijadikan bentuk-bentuk simbolis... si komunikator mempunyai pilihan kode-kode atau kumpulan simbol-simbol. Pilihan yang akan dipilihnya akan mempengaruhi pengertian dari peristiwa bagi penerimanya. Karena setiap bahasa-setiap-simbol-hadir bersamaan dengan *ideology*, pilihan akan seperangkat *symbol*.

lain. Tidak jarang penguasa atau elit politik menggunakan eufisme bahasa sebagai alat memantapkan citra, mereka mencoba merasionalkan penggunaan bahasa bagi kepentingan politik.<sup>52</sup> Maka di dalam mengamankan kekuasaannya para elit selalu berusaha melakukan konsolidasi kekuasaan dalam segala bidang, dalam hal ini termasuk dengan melakukan rekayasa bahasa untuk kepentingan konsolidasi kekuasaan, termasuk dengan menggunakan wacana sebagai kekuatan.

Oleh sebab itu dalam banyak kasus, kita menemukan berbagai kelompok yang memiliki kekuasaan mengendalikan makna ditengah-tengah lingkungan sosial melalui media massa. Kelompok ini memegang peranan amat penting dalam mengarahkan opini, atau citra tertentu pada *frame* individu dan pendapat umum masyarakat. Kekuatan ini begitu signifikan di dalam praktik sosial Bahasa dipakai media mempunyai kemampuan mempengaruhi cara melafalkan (*pronunciation*), tata bahasa (*grammar*), susunan kalimat (*syntax*), perluasan dan modifikasi perbendaharaan kata, dan pada akhirnya mengubah dan atau mengembangkan percakapan (*speech*), bahasa (*language*), dan makna (*meaning*), (DeFleur dan Bali, Rokeach dalam Sobur, 2001).

Menurut DeFleur dan Bali-Rokeach (1989:267), dari berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan maknanya, antara lain : dengan cara mengembangkan kata baru beserta makna asosiatifnya; memperluas makna dari istilah-istilah yang ada; mengganti makna lama sebuah istilah dengan

---

<sup>52</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 115-119, Remaja Rosdakarya Bandung

makna baru; memataapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa.

Menurut Berger dan Luckmann, realitas sosial di konstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivitas, dan internalisasi. Konstruksi sosial, dalam pandangan mereka, tidak berlangsung dalam ruang hampa, namun sarat dengan kepentingan-kepentingan.<sup>53</sup> Namun demikian gagasan kontruksi sosial mendapat koreksi oleh gagasan dekontruksi yang melakukan interpretasi terhadap teks, wacana, dan pengetahuan masyarakat. Gagasan *desconstruction* yang terkenal adalah Derrida (1978) yang pertama kali memulainya. Gagasan ini kemudian melahirkan tesis-tesis keterkaitan antara kepentingan (*interest*) dan metode penafsiran (*interpretation*) atas realitas sosia (Nugroho, 1999 dan Gregen, 1999, dalam Sobur, 2001).

Dalam dekonstruksi, kepentingan tertentu selalu mengarah kepada pemilihan metode penafsiran. Derrida (1978) menjelaskan bahwa interpretasi yang di gunakan individu terhadap realitas sosial bersifat sewenang-wenang. Gagasan Derrida (1979) sejalan dengan Habermas (1972) bahwa terdapat hubungan strategis antara pengetahuan manusia (baik empiris, analitis, historis hermeneutik, maupun kritis) dengan kepentingan (teknis, praktis, atau yang bersifat emansipatoris), walaupun ada kemungkinan yang terjadi adalah sebaiknya, bahwa pengetahuan merupakan produk kepentingan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 96-99, Longman, London.

<sup>54</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 93-94, Longman, London.

Dari peneliti yang dilakukan Muhammad Edy Susilo terhadap pemberitaan pers selama masa kampanye 1999, misalnya membuktikan bahwa setiap pers memiliki "preferensi politik"-nya masing-masing. Teks media, menurut Susilo, merupakan *second hand reality* yang hanya menyajikan "potongan-potongan" realitas, dan bukan merupakan keseluruhan dan realitas. Oleh sebab itu, media lebih merupakan alat transformasi ketimbang menjadi semacam cermin bagi realitas (Susilo, 2000 dalam Sobur, 2001).

Isi media massa terdiri dari elmen-elman. Keseluruhan dari elmen-elman itu merupakan hasil analitis yang memadukan bahasa verbal dan non-verbal. Dalam media cetak menggunakan bahasa, baik dalam bentuk kata-kata, angka, gambar maupun grafis. Dengan menggunakan bahasa para wartawan atau pekerja media mengkonstruksikan setiap realitas yang diliputnya (Hamad, 2004).

Maka bahasa dalam media massa merupakan urat nadi yang memberi ruh, bagaimana memilih dan menggunakannya dalam berbagai bentuk, baik verbal maupun non-verbal. Dengan bahasa para komunikator media massa berbicara dengan publik atas peristiwa yang merupakan hasil liputan atau reportasenya. Dengan ini maka mereka mempunyai ranah mengenai gambaran realitas yang akan disampaikan kepada khalayak akan menggapainya dengan persepsi yang beragam.

Bagaimana tindakan yang akan dilakukan oleh media massa dalam hal ini pekerja media sebagai komunikator dalam mengkontruksi realitas,



pertama; adalah dengan menggunakan simbol (fungsi bahasa); pemilihan fakta yang akan di sajikan dengan menggunakan strategi framing, dan kesediaan media memberikan tempat.

*Pertama*, memilih kata atau penggunaan simbol bahasa politik. Walaupun media hanya bertugas menghadiri informasi dan laporan, tetapi dalam membicarakan hal yang berkenaan dengan politik, media akan memilih simbol-simbol politik yang relevan dan yang menarik bagi publik. Menurut Dan Nimmo; (Dalam buku Komunikasi Politik 2005): para komunikator bertukar citra-citra atau makna-makna dengan menggunakan lambang-lambang politik. Mereka saling menginterpretasikan pesan-pesan (simbol-sombol) politik yang diterimanya. Dalam hal ini, dalam memilih dan menentukan seorang komunikator politik sebagai sumber berita, media tidak dapat berlaku objektif. Media akan tetap melakukan interpretasi secara subjektif, yang tentunya dalam hal ini dengan mempertimbangkan berbagai hal dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi baik sang wartawan maupun institusinya. Sehingga semua pilihan nara sumber dan apa yang mesti ditekankan serta ucapan atau kata-kata yang akan dikutip; semua merupakan hasil pertimbangan pekerja media tersebut.

Bila nilai berita berhubungan dengan prosedur apa yang bisa disajikan media kepada khalayak, maka jaminan standar profesional yang diutamakan pada khalayak bahwa apa yang disajikan merupakan suatu kebenaran. Mengenai objektivitas berita Tuchmann berpendapat objektivitas adalah "ritual" dalam proses pembentukan dan produksi berita. Objektivitas

merupakan kepercayaan, yang menjadi bagian dari ideology yang disebarkan oleh dan dari wartawan. Sedangkan realitas di sini begitu kompleks, acak dan tidak beraturan. Dalam menjalankan tugasnya, wartawan dihadapkan pada standard dan prosedur objektivitas, dan seringkali objektivitas mengalami benturan-benturan baik disengaja maupun tidak.

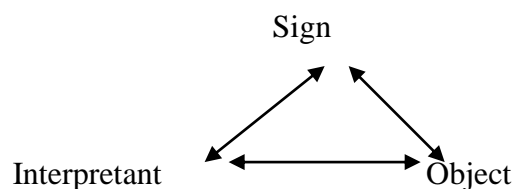
Pemilihan *symbol* dalam berita mempengaruhi makna yang akan dimunculkan. Teori tentang *sign* dijelaskan dalam teori semiotika, yang disebut juga ilmu tentang tanda; yang di pahami bahwa simbol merupakan satu dari tiga bentuk tanda. Dalam pandangan semiotika, berita yang merupakan teks dipahami penuh dengan tanda-tanda, mulai dengan penggunaan kata-kata atau istilah, frase, angka, foto dan gambar-gambar, bahkan strategi pengemasan yang digunakan adalah tanda. Tanda di sini membuat banyak makna dan mengemban kepentingan sesuai dengan apa yang akan disampaikan oleh sang subjek. Jadi, bila kita pahami keseluruhan dari konstruksi berita adalah memuat tanda-tanda, sehingga bekerjanya tanda-tanda tersebut akan membentuk persepsi yang beragam. Secara semiotik, fakta secara implisit maupun eksplisit adalah tanda. Sehingga dalam semiotika, segala sesuatu yang teramati, mengacu pada hal yang dirujuknya, serta dapat diinterpretasikan, adalah tanda (*sign*).

Pierce (Hamad, 2004); membagi tanda dan cara kerjanya kedalam tiga kategori seperti terlihat dalam gambar 6. dalam konteks-konteks tertentu ikon dapat menjadi simbol. Banyak pula simbol yang berupa ikon.

Disamping menjadi indeks, sebuah tanda juga dapat sekaligus berfungsi sebagai simbol.

Fungsi tanda yang pertama adalah untuk membangkitkan makna; karena tanda selalu dapat dipersepsi oleh perasaan (*sense*) dan pikiran. Biasanya orang dalam hal ini akan menghubungkan sebuah tanda dengan apa yang menjadi jurukannya (*reference*); untuk menemukan makna apa yang akan dimaksud oleh tanda tersebut. Hubungan ketiganya, antara tanda, pikiran akan menimbulkan makna seperti yang diilustrasikan oleh Charles S. Peirce dan Ivor A. Richard. Menurut Peirce (lihat gambar elemen makna Peirce di bawah ini), salah satu bentuk tanda adalah kata-kata. Objek adalah sesuatu yang dirujuk oleh tanda. Dan interpretan merupakan tanda yang terdapat pada benak seseorang mengenai objek yang dirujuk oleh sebuah tanda. Jika ketika elemen itu berinteraksi dalam benak atau pikiran seseorang, munculah makna mengenai sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Segitiga Peirce ditampilkan dalam gambar berikut ini (Fiske, 1990:42) (Dalam Sobur, 2001:115):

**Gambar 6: Elemen Makna Peirce<sup>55</sup>**



---

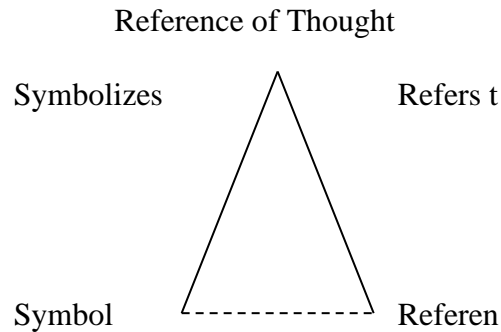
<sup>55</sup> Fairelough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 93, Longman, London.

Semiotik untuk studi massa tidak terbatas sebagai kerangka teori, namun dapat juga digunakan sebagai metode analisis (Hamad,200:83) (Dalam Sobur, 2001:117). Teori segitiga makna (*triangle meaning*) Peirce yang terdiri atas tiga *sign* (tanda), *object* (objek), dan interpretan (*interpretant*). Menurut Peirce, kata adalah salah satu bentuk tanda. *Interpretan* adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang rujuk sebuah tanda. Ketiga elemen makna bila berinteraksi di dalam benak seseorang, maka muncul makna tentang sesuatu yang diwakili oleh tanda tersebut.

Dalam model Richard (lihat gambar: Sematik Triangle Richard); *Reference* menunjuk pada munculnya kembali ingatan peristiwa masa lalu mengenai suatu realitas dalam konteks yang sekarang. *Reference* menunjuk pada munculnya kembali ingatan peristiwa masa lalu mengenai suatu realitas dalam konteks yang sekarang. *Reference* adalah objek yang dipersepsikan dan menimbulkan kesan dalam ingatan. *Symbol* adalah kata-kata yang digunakan untuk menyebut *reference* atau objek. Garis putus-putus menunjukkan bahwa hubungan antara *symbol* dan objek atau referent bisa bersifat tidak langsung.

Jadi kehadiran objek yang dirujuk tidak selalu harus ada ketika objek itu dibicarakan.

**Gambar 7 : SemantikTriangle Richard**



Perbedaan akan terjadi pada setiap orang dari makna yang muncul sebagai akibat hubungan segi-segi tersebut. Hal ini diakibatkan ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain; pertama, konteks dimana tanda itu bekerja yang menimbulkan berbagai makna; baik makna konotatif maupun denotatif dari tanda tersebut. Kedua, cara tanda diciptakan yang menghasilkan metafora. Dan yang ketiga, cara memahami tanda yang terdiri dari analisis sintagmatis dan analisis paradigmatik (Hamas. 2004:19).

Di sini juga dijelaskan, bahwa fungsi tanda yang lainnya adalah untuk mencapai suatu tujuan. Bagi si komunikator tanda berfungsi, untuk menyadarkan (*sense*) si komunikan mengenai sesuatu yang dinyatakannya untuk kemudian memikirkannya. Kedua, untuk mengungkapkan perasaan (*felling*) atau sikapnya mengenai suatu objek. Ketiga, untuk memberitahukan atau menginformasikan (*convey*) sikap komunikator terhadap khalayaknya, dan keempat, untuk menunjukkan hasil akhir yang diinginkan oleh si komunikator atau penulis.

Bagi kominkan, tanda berfungsi; pertama, untuk menunjukkan (*indicating*) yang menjadi pusat perhatian. Kedua, memberikan ciri (*chataracterizing*). Ketiga, memberikan kesadaran pada dirinya akan permasalahan (*realizing*). Keempat, memberikan penilaian. Kelima, mempengaruhi (*influencing*). Keenam, untuk mengendalikan suatu aksi atau fungsi, dan ketujuh, untuk mencapai suatu tujuan (*purposing*).

Dalam analisis semiotik juga memperhatikan "ideology" yang menguasai budaya sebagai kelompok pengguna tanda. Dijelaskan dalam ideologi juga ada asumsi-asumsi yang dimungkinkan penggunaan tanda. Ideologi dapat mengarahkan budaya. Ideologi dapat menentukan visi dan kesimpulan suatu keolompok masyarakat atau budaya terhadap suatu realitas tertentu. Maka itu dapat dipahami ketika kita berbicara mengenai tanda atau simbol maka kita sedang membicarakan mengenai *ideology*.

Dalam cara kita guna menemukan *ideology* (Hamad, 2004:20) dalam suatu tanda, maka menjadi perlu untuk mengetahui konteks dimana tanda itu berada berdasarkan budaya si pemakai. Karena, tanda dapat berubah-ubah maknanya sesuai dengan konteksnya (tempat, kalimat, waktu, maupun budaya). Dikatakan juga, bahwa sebuah *symbol* akan berubah maknanya bahkan dalam konteks (waktu atau tempat) yang relatif sama tetapi dalam konteks budaya (peradaban) yang berbeda. Konteks di sini juga dapat berupa bahasa verbal dan non-verbal.

Dalam metode semiotika, operasi penerapannya adalah memperhatikan seluruh aspek sebuah teks yang dapat disebut tanda, baik berupa kata, istilah, frase, gambar, serta cara penulisan, bahkan fakta yang disembunyikan. Dan itu berurut dari judul hingga kata penutup paling akhir dalam sebuah *issue*.

Kedua, dalam menerapkan strategi pembingkaihan (*framing*) pada peristiwa politik. Karena adanya keterbatasan-keterbatasan biasanya peristiwa tidak dihadirkan secara utuh, dengan teknik jurnalistik peristiwa yang panjang dan lebar dapat disederhanakan melalui cara pembingkaihan mengenal fakta-fakta dalam bentuk berita yang dapat dikatakan layak terbit atau layak tayang.

Untuk menjadikan berita agar terlihat penting, komunikator akan menyoroti hal-hal yang dianggap penting, yaitu yang mempunyai nilai berita. Organisasi media tidak hanya mempunyai struktur dan pola kerja, tetapi juga *ideology* profesional. Nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, akan tetapi juga bagaimana peristiwa didefinisikan. Hanya peristiwa yang memiliki ukuran-ukuran tertentu saja yang layak dan dapat dilakukan sebagai berita. Ini merupakan prosedur pertama dan bagaimana peristiwa dikonstruksi. Maka dari hal-hal yang dimunculkan yang dianggap penting dari peristiwapolitik, dari sini kita dapat memahami ke arah mana pembentukan sebuah berita. Kemudian kepentingan-kepentingan yang membebani. Serta bermainnya relasi-relasi yang memiliki kepentingan maka konstruksi realitas akan

dipengaruhinya. Biasanya dari pihak-pihak yang diuntungkan dan ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pembicara tersebut, hal ini sangat bergantung pihak-pihak yang memiliki hubungan yang dekat dengan media tersebut.

*Framing* yang dilakukan oleh media adalah berdasarkan kepentingan-kepentingan itu, baik internal maupun eksternal media, teknis, ekonomis, politis, dan ideologis. Di sini pembuatan sebuah wacana dipahami tidak saja pada tataran yang mengindikasikan adanya kepentingan-kepentingan itu, akan tetapi bisa mengarahkan *issue* yang diangkat dan dimunculkan dalam wacana itu.

Dalam analisis wacana ada tiga jenis masalah yang dibahas, pertama, masalah makna (*the problem of meaning*). Yang mencakup tentang cara pemahaman orang mengenai pesan dan informasi yang terkandung dalam struktur pesan tersebut. Kedua, masalah koherensi (*problem of coherence*), yang menggambarkan bagaimana membentuk suatu pola agar pembicaraan dapat diterima akal atau logic dan dapat dimengerti (*sensible*).

Yang terakhir (Hamad, 2004) yang juga dianggap penting, adalah kesediaan media massa memberitakan tempat pada suatu peristiwa politik. Bagaimana penempatan atas suatu peristiwa pada halaman utama dan berita utama akan menjadi penting dan mendapat perhatian dari masyarakat. Semakin besar tempat yang disediakan, maka semakin dianggap penting oleh khalayak dan mendapat perhatian yang besar.



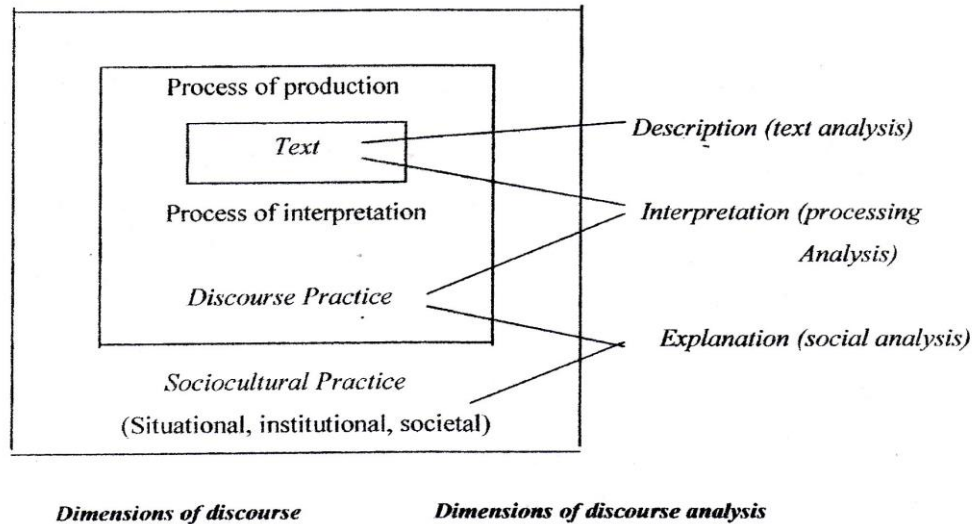
## II.2.6 CDA Norma Fairclough: Sebuah Pendekatan Analisis Wacana Kritis<sup>56</sup>

Teori wacana kritis ada beberapa diantaranya teori yang dikembangkan oleh N. Fairclough. Teori ini mengatakan percaya bahwa teks itu lahir dari tangan pembuatnya yang tak lepas dari konteks sosial budayanya. Karena itu di dalam memahami suatu teks atau wacana hendaknya kita memperhatikan siapa (subyek) pembuatnya dan di dalam kondisi sosio-kultural (eksternal) yang bagaimana sehingga teks lahir seperti itu. Menurut Norman Fairclough mengatakan bahwa : "*critical discourse analysis (CDA) is viewed as integrating (a) analysis of text, (b) analysis of process text production, consumption, and (c) sociocultural analysis of the discursive event (be it an interview, a scientific paper, or a conversation)*". (memperlihatkan keterpaduan analisis teks, analisis proses produksi, konsumsi dan distribusi teks, serta analisis sosiokultural yang berkembang di sekitar wacana itu). **Gambar 8 :**

---

<sup>56</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 93-94, Longman, London.

## Kerangka Analisis Wacana Fairclough



Sumber : Fairclough Norman *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, hal:98.

### Wacana dan Hegemoni

Dunia dan bahasa merupakan di dalam satu ruang lingkup, sebuah sifat dari formasi kebijakan umum dan implementasi yang selalu berubah-ubah sesuai dengan situasi politik dan organisasi yang terbentuk dimana dia berada. Misalnya model-model simple dari hubungan-hubungan yang menyebar ke luar dan ke bawah, bagi pemerintah pusat tidak dapat menyatu dengan kerumitan dari negara-negara moderen di dalam bangunan masyarakat kapitalis. Seperti Inggris dan USA. Kasus dari pengteknologian wacana, kecenderungan mereka secara jelas pada nasional dan pada level-level yang dinasionalisasikan yang mana dapat menjadi jalinan erat untuk negara dan dominan kelas (termasuk kapitalis multinasional) kepentingan-kepentingan tanpa terlalu banyak kesulitan; ini tidak mungkin untuk

melangkah mereka sebagai momen khusus satu atau beberapa orang dari lokasi-lokasi formasi kebijakan pusat. Cukup, kebohongan proses-proses dari pengteknologian wacana menjadi tekad pada level yang berbeda dan pada waktu-waktu yang berbeda di dalam banyak institusi-institusi yang berbeda dan organisasi-organisasi dalam domain khusus sama dnegan wilayah public. Sudah tentu, kejadian itu berpautan bersama di dalam berbagai macam cara-cara untuk memperoleh hubungan-hubungan yang baik pada ahli-ahli *scientific social* yang mana mereka tergantung pada pengteknologian wacana. Tetapi pembuatan keputusan dalam proses-proses implementasional adalah domain mereka.<sup>57</sup>

Teori kekuasaan, kelas dan Negara di dalam masyarakat kapitalis moderen yang mana dapat menjadi catatan untuk hubungan-hubungan seperti pemerintahan-pemerintahan sebagai pengteknologian wacana pada kelas dan kepentingan Negara, institusi-institusi dan level-level sebagai "roda berjalan" jika dilihat dari kekuasaan negara. Seperti dalam sebuah teori studi-studi Gramsci, pada struktur-struktur dari kekuasaan di dalam masyarakat-masyarakat kapitalis Barat sesudah perang dunia pertama, dan bermacam,-macam strategi-strategi secara revolusi yang mereka nyatakan secara tidak langsung. Gramsci, pada struktur-struktur secara revolusi yang mereka nyatakan secara tidak langsung. Gramsci mengatakan kekuasaan secara politik dari dominant kelas seperti di dalam masyarakat-masyarakat adalah berpangkal pada sebuah kombinasi dari "dominasi" kekuasaan negara

---

<sup>57</sup> Fairelough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 93-94, Longman, London.

di dalam pengertian secara sempit. Kontrol kekuatan-kekuatan kapitalis yang menindas untuk digunakan secara paksa bagi yang menentang dari *group-group social* yang lainnya dan "intelektual dan moral *leadership*" atau "*hegemony*" secara tak beradab. Sebuah negara adalah kombinasi dari '*political society*' (domain public, domain kekuasaan Negara di dalam pengertian yang sempit) dan '*civil society*' (domain khusus, domain dari *hegemony*) atau seperti Gramsci gambarkan secara jelas, "hegemoni melindungi kekerasan yang tersembunyi. Ini adalah kontrol hegemoni pada domain kelas melalui institusi-institusi pada civil society (pendidikan, pekerjaan, keluarga, waktu luang dan lain-lain) melalui alam bawah sadar atau ketidaksadaran dengan menekan aparat-aparat negara untuk mengadakan perubahan secara tepat dari ideologi lama yang dianut dan pertahanan-pertahanan *hegemonic* pada sebuah "Perang Posisi" cukup dengan mengarahkan konfrontasi dengan negara di dalam "perang dengan siasat licik".<sup>58</sup>

Gramsci menghubungkan hegemoni terhadap berfungsinya suatu negara yang disebut "*ethical state*" (kelayakan negara); setiap negara selayaknya merupakan suatu fungsi yang sangat penting di dalam memperoleh atau meraih kepercayaan dan penghargaan massa pada level moral dari populasi sebuah budaya-budaya khusus. Sebuah level atau tipe yang dibutuhkan yang mana ada kecocokan sehingga dapat menghasilkan kekuatan-kekuatan suatu pemerintahan yang merupakan kepentingan-

---

<sup>58</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 93, Longman, London.

kepentingan dari golongan-golongan yang berkuasa, contohnya seperti Fordism dan Tay Lorism di USA. Pendapat Gramsci "*the need to elaborate a new type of man suited to the new type engineering* (kelayakan keahlian tehnik), memperbaiki kembali subjektifitas-subjektifitas atau "*selves*" (individualistis),<sup>59</sup> dan pengteknologian dari wacana adalah salah satu aspek dari pemrosesan yang dari pemrosesan yang dapat menantang untuk diperdebatkan secara detail. Wacana dan hegemoni memiliki keterkaitan hubungan yang tidak dapat disahkan seperti satu mata uang memiliki dua sisi, seperti halnya praktek-praktek politik di dalam membangun kekuasaan melalui media massa dengan mengarahkan opini publik yang luas.

Praktek hegemoni dan kekuasaan hegemoni pada tingkat substansial meletakkan praktek-praktek atau kebiasaan yang berkaitan satu dengan yang lainnya, di dalam interaksi antara pembicara (ucapan) dan tulisan.

Term (*discourse*) digunakan untuk menunjukkan sebuah pelengkap pembicara atau perkataan dan tulisan, seperti apa yang dihasilkan dari negosiasi-negosiasi dari relasi-relasi kekuasaan, di dalam pemrosesan *ideology* dan perang *ideology*. Konsep dari hegemoni menunjukkan di dalam sebuah pemerintahan yang terdiri dari domain-domain yang beragam dari *civil society* (seperti : *work education, leisure activity*) yang menggambarkan relasi-relasi khusus yang tersembunyi yang terlihat tampak alamiah dari ideologi-ideologi, dan ini merupakan hal yang selalu menjadi kebiasaan

---

<sup>59</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 94, Longman, London.

sebagian besar mereka yang terjadi di dalam sebuah institusi bisnis maupun negara serta dalam kehidupan berpolitik.

Sebuah set kekhususan dari wacana contohnya seperti yang dilakukan dalam konsultasi medis atau di dalam suatu media wawancara, bisa juga dalam penulisan laporan-laporan kejahatan di koran-koran. Hal ini menunjukkan secara mutlak bahwa ideologi-ideologi tertentu menanamkan pengetahuan khusus dan kepercayaan-kepercayaan. Kekhususan posisi-posisi dari tipe-tipe subjek sosial yang berpartisipasi di dalam praktek atau kebiasaan dari relasi-relasi kekhususan antara kategori-kategori tertentu dari partisipan-partisipan di dalam dunia politik. Ini tidak jauh dari adat atau kebiasaan yang dianggap pantas dan dapat diterima sebagai pemikiran dan juga prasangka secara ideologi. Kebiasaan-kebiasaan diwacanakannya tanpa disadari digunakan sebagai alat yang lebih efektif melalui program-program yang tidak bermutu yang menghasilkan budaya dan ideologi yang menunjukkan besarnya dari sebuah hegemoni. Secara eksplisit, target-target yang signifikan dari perjuangan hegemoni adalah mengadakan perubahan-perubahan sifat yang mendasar dari kebiasaan atau aturan-aturan yang ada dan menggantinya dengan yang mereka inginkan.<sup>60</sup>

Seperti yang terjadi dalam praktek konsultasi antara dokter dan pasiennya. Contohnya yang terjadi pada masyarakat di Inggris pada mode-mode dominan konsultasi yang bersifat tradisional, dan kemunculan mode-mode alternatif di dalam model yang *dominant* tersebut. Dokter akan

---

<sup>60</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 95-96, Longman, London.

menyanyi pasien sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah disusun dalam agenda-agenda, dan pasien hanya pada terbatas menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan berusaha untuk tidak menyinggung dokter dalam mengelaborasi jawaban-jawaban mereka. Ini diajukan pada perseorangan dan seringkali terlihat kasar. Pasien akan merasa senang bila berkas-berkas diagnosa dari gejala-gejala penyakitnya tersebut diberikan individu atau personal. Mode konsultasi yang tradisional secara ilmu kedokteran ini dapat disamakan dengan relasi hegemonik konvensional, ini asumsi hubungan yang alami sifatnya. Sebaliknya, mode-mode alternatif yang sifatnya lebih kepada percakapan, seringkali menggambarkan model dari penyuluhan, hal ini menggambarkan bagian dari tantangan kekuasaan dan pengaturan kembali. Relasi-relasi hegemoni yang ada. Ini adalah analisis dari hegemoni dan kekuasaan hegemoni di dalam institusi berdasarkan ilmu kedokteran dan lebih kepada analisis dari praktek-praktek yang tidak berkaitan satu dengan yang lainnya tetapi merupakan hubungan-hubungan (*of dominance, or of opposition and confrontation*) antara bermacam-macam kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek yang diskursif.<sup>61</sup>

Aspek dari kedua hubungan rangkap antara wawancara dan hegemoni adalah karena wacana itu sendiri merupakan lingkungan dari *cultural hegemoni*, dan hegemoni adalah kelas dari grup di atas dari masyarakat keseluruhan atau lebih dari seksi-seksi swasta (pada skala

---

<sup>61</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 96-100, Longman, London.

transnasional). Ini adalah di dalam bagian kapasitas untuk membentuk praktek-praktek diskursif pesan-pesan atau perintah dari sebuah wacana. Perintah atau pesan-pesan wacana merupakan hal terpenting di dalam *cultural* hegemoni, kekuatan secara ideologi praktek-praktek diskursif dan konvensi-konvensi. Hegemoni di dalam suatu hubungan-hubungan relationship yang terbentuk antara perbedaan bermacam-macam bahasa (dengan bahasa-bahasa yang berbeda, dialek-dialek yang berbeda), dan kemunculan dari berbagai macam standard dominan. Hegemoni dari sebuah kelas satu grup di atas merupakan dalam bentuk wacana yang merupakan pesanan dari pejabat dengan atau lebih kurang tidak adanya keseimbangan antara yang dimunculkan oleh praktek-praktek diskursif yang mana boleh menjadi bahwa ketidakseimbangan dan keterbukaan untuk mengadakan perbaikan di dalam bagian dari kekuatan hegemoni.<sup>62</sup>

Dua aspek dari hubungan wacana dan hegemoni yang terkenal di atas, ini merupakan bagian hubungan yang tertutup di dalam praktek-praktek discursive secara konkret yang merupakan perintah-perintah hegemoni yang terstruktur dari produksi wacana, hasil akhirnya dan perubahan. Ada praktek-praktek discursive yang sesaat dapat diterjemahkan di dalam term-term dari hubungan-hubungan untuk pesanan-pesanan yang ada dari wawancara dan praktek-praktek discursive. Sebagaimana sebaik hubungan untuk struktur-struktur sosial yang sudah ada, ideologi-ideologi dan relasi-relasi kekuasaan.

---

<sup>62</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 95-96, Longman, London.



Hubungan-hubungan antara wacana dan hegemoni yang mengacu pada pertahanan hegemoni: kekuatan hegemoni di dalam mengambil tempat untuk berperan di dalam membuat wacana secara luas dan signifikan. Hal terpenting secara teori dan metodologi, implikasi-implikasi dan studi-studi budaya serta perubahan sosial; merupakan sesuatu yang harus dibayar dari perubahan sosial yang membutuhkan lebih kepada perhatian-perhatian yang serius untuk wacana dimana mereka pada akhirnya dapat melakukannya dan untuk pertanyaan bagaimana perubahan relasi-relasi diskursive (hubungan-hubungan sesuai, pejabat-pejabat atau *reflects*) perubahan sosial dan budaya; dan analisis wacana membutuhkannya untuk dapat dipakai secara lama pada tipe-tipe analisis yang lain (sosiologi, ethnographi) di dalam penelitian-penelitian perubahan. Poin secara umum dari investigasi perubahan memerlukan sebuah kombinasi dari mikro analisis (*discourse analysis is one*) dan lebih besar yaitu mikro analisis. Kesimpulan ini sangat berhubungan dengan keadaan sekarang, sebab dari perubahan-perubahan yang radikal yang utama mempengaruhi masyarakat secara contemporary, sebab wacana akan menjadi menonjol dan lebih penting dalam mendefinisikan elemen area-area tertentu dari kehidupan sosial seperti beberapa tipe-tipe dari kerja (seperti catatan-cacatan industri jasa). Sehingga perubahan sosial dan budaya secara luas dapat merubah di dalam praktek-praktek discursive. Pada konteks ini yang mana bagian teknologi dari wacana menjadi lebih terkenal adalah sebuah strategi intervensi yang

dibentuk secara sadar dan praktek-praktek discursive sebagai dasar dari kalkulasi-kalkulasi yang lebih luas dari hegemoni dan efek-efek ideologi.<sup>63</sup>

Pendekatan untuk analisis wacana yang berpangkal pada kerangka teoritis. Menurut Fairlough, merupakan pendekatan yang dianggap sesuai dan dapat dipergunakan bagi bermacam-macam penelitian, seperti pada masalah-masalah sosial dan perubahan budaya. Fakta-fakta dan keterangan dibuat sesuai fungsi kerja yang merupakan wilayah terdepan hubungan antara praktek-praktek sosial di dalam masyarakat dan penggunaan-penggunaan bahasa, serta sistematika investigasi para relasi-relasi sosial antara proses-proses sosial dan pemilik dari teks-teks bahasa secara mendasar (menggunakan bahasa bagi 'produksi' 'teks' dari proses-proses discursive, baik secara tertulis, melalui penggunaan bahasa dalam ucapan-ucapan; pembicaraan dalam 'teks' dapat merubah kata-kata dalam bentuk tulisan dalam teks dengan tertulis dan terekam). Dan juga memudahkan penggabungan dari analisis mikro (dari wacana) dan analisis makro (termasuk analisis mengenai hukum dan aturan bahasa serta perencanaan). Selain itu pendekatan kritikal untuk analisis wacana disusun agar dapat dipahami sungguh-sungguh dengan analisa yang lebih telitim untuk mengupas hubungan-hubungan pada proses sosial (ideologi-ideologi, hubungan-hubungan kekuasaan), yang secara umum subyek sebagai

---

<sup>63</sup> Fairlough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 96-97, Longman, London.

pembuat dan penterjemah dari teks-teks tersebut, dan keefektifan hubungan ini tergantung dari sejauh mana kapasitas yang dimilikinya.<sup>64</sup>

Pendekatan ini merupakan adopsi dari tiga konsepsi dimensional dan cara metode tiga konsepsi dimensional dari analisis wacana. Wacana, dan khususnya dalam hal ini pada praktek-praktek diskursif terlihat secara serempak atau bersamaan diantaranya; bahasa dalam teks, tulisan dan perkataan, praktek-praktek wacana (produksi teks dan interpretasi dari teks), praktek-praktek sosiokultural. Bagian dari wacana adalah menanamkan pada anggota-anggota dalam praktek-praktek sosial dari level-level masyarakat; dalam situasi yang segera atau sangat cepat dan dalam skala yang lebih luas dan besar secara institusi maupun organisasi juga melalui struktur-struktur sosial di dalam masyarakat; hal ini dapat digambarkan bagaimana sebuah penghargaan pasangan-pasangan dalam perkawinan dalam masa hubungan-hubungan khusus mereka, hubungan-hubungan yang terjaga sebagai sebuah keluarga secara institusi, atau pada hubungan-hubungan gender di dalam masyarakat yang luas.

Metode analisis wacana mencakup *linguistic description* pada bahasa dalam teks, *interpretation* pada hubungan-hubungan antara (proses produksi teks dan yang menterjemahkan) proses-proses discursive dan teks, dan *explanation* adalah hubungan antara proses-proses diskursif dan proses-proses sosial. Keistimewaan dari pendekatan ini terlihat bahwa hubungan-hubungan yang saling terkait antara praktek-praktek sosial dan teks

---

<sup>64</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 97-98 Longman, London.

bagaimana media dari praktek-praktek wacana; bagaimana teks diproduksi dan diterjemahkan di dalam memberikan pengertian atau penanaman dari apa yang dinamakan praktek-praktek diskursif dan beberapa kebiasaan-kebiasaan yang menggambarkan dari 'pesan-pesan' pada wacana dan bagaimana mereka menterjemahkannya bersama, hal ini tergantung kepada sifat-sifat dan praktek-praktek sosial budaya yang merupakan bagian dari wacana tersebut (termasuk hubungan-hubungan untuk memelihara kekuasaan/hegemoni); secara mendasar praktek-praktek wacana dalam segala bentuk produksi teks membebaskan 'traces' atau berbuat sekehendak hati dengan menggunakan tulisan-tulisan pada teks; sifat dari praktek-praktek wacana yaitu pada keputusan-keputusan dari interpretasi pada teks; bagaimana permukaan tulisan-tulisan atau bahasa pada teks akan diterjemahkan.<sup>65</sup>

Norman Fairclough, mengilustrasikan dalam teori tentang wacana sebagai berikut :

- (1) Teks dengan beraneka ragam berita atau peristiwa yang dimunculkan atau dianggap istimewa yang bertentangan.
- (2) Dan hubungan-hubungan yang kompleks antara praktek-praktek wacana (produksi teks) dan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan wacana; orang sama-sama dapat melihat hubungan-hubungan yang kompleks antara interpretasi dalam teks dan dalam budaya tertentu, tetapi mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan atau tidak.

---

<sup>65</sup> Fairclough. *Critical Discourse Analysis. The Critical Study of Language*, 1995, hlm: 97-99, Longman, London.

(3) Kompleksitas hubungan seperti itu antara peristiwa-peristiwa dalam teks dan kerumitan pemrosesan wacana, serta proses-proses dari perubahan sosial budaya.<sup>66</sup>

Teks memberikan ciri kepada sebuah konfigurasi atau bentuk susunan dari keanekaragaman dari sifat-sifat yang bertentangan yang terlihat kontras. Kekontrasan ini terlihat antara kenyataan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dengan cara mereka mengangkat atau memunculkan peristiwa.

Syarat-syarat praktek-praktek wacana dapat dilihat pada kreativitas atau keahlian penggunaan kata-kata. Seperti kata-kata yang dipergunakan dari beberapa percakapan-percakapan yang melibatkan keahlian, dimana dialog yang terjadi melibatkan keahlian berwacana antara dua orang, seperti contoh seorang dokter; dua perbedaan konvensi-konvensi wacana, dimana di sini dokter terlibat dan ikut dalam suatu interaksi dalam pemberian nasehat.

Ciri-ciri dasar dari proses produksi wacana dapat dilihat sangat luas pada praktek-praktek sosial yang banyak terjadi di dalam masyarakat, seperti pada level institusional; dokter seharusnya untuk group oposisi minoritas di dalam kantor atau rumah sakit negeri yang membuka praktek-praktek pengobatan dan konsultasi. Di sini, anggota institusi dengan memiliki pengetahuan dan hubungan-hubungan dan kekuasaan-kekuasaan di dalam ilmu kedokteran diperbolehkan menterjemahkan perkataan-perkataan dokter

---

<sup>66</sup> Strategi framing adalah sebuah bagian proses yang tidak dapat dipisahkan dari cara bagaimana awak media mengkonstruksi media. Maka di dalamnya framing sangat berhubungan dengan editing, yang melibatkan seluruh tim pada bagian redaksional. Maka akan muncul sikap reporter mengenai vigur yang menjadi penting untuk diwawancarai atau tidak, dan pertanyaan apa yang harus diajukan dan apa yang tidak. Redaktur bertugas memutuskan apakah laporan reporter dimuat atau tidak akan memberikan pendapatnya.

pada bermacam-macam konvensi-konvensi di dalam berbagai hal sebagai anti terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan, disamping itu kewenangan dokter melebihi pasien, dan kewenangan perusahaan rumah sakit lebih dari profesi seorang dokter; hal ini memecah dari paham elitis profesional dari dokter akan memberikan kontrol yang besar pasien di dalam konsultasi dan akan menghasilkan sanksi via konsultasi dan lebih dari informal dan pembicaraan pada praktek-praktek diskursif yang mana pasien-pasien sangat mengenal kebersamaan ketika dokter sedang melakukan pemeriksaan secara profesional tidak secara individual.<sup>67</sup>

Meskipun keterangan-keterangan penggabungan pada wacana secara media dan wacana secara institusi lokal sebagai kelengkapan global sebuah pesan dari wacana yang sudah dikenal dimasyarakatnya; pembentukan koloni pada institusi-institusi pada wilayah publik dengan berbagai tipe wacana yang berasal dari wilayah privat. Kecenderungan ini dapat dikatakan sebagai 'hal yang menjadi pembicaraan' dari institusi wacana. Pembentukan pembicaraan atau isu-isu memerlukan keahlian secara informal dalam interaksi-interaksi hubungan yang dimiliki untuk ditujuka kepada orang yang dianggap berkualitas dan dalam pertentangan dengan interaksi antara aturan-aturan atau status-status yang mengkarakterkan lebih kepada institusi wacana tradisional, ini juga secara demokratis. Dengan keunggulan *sharing*

---

<sup>67</sup> Strategi framing adalah sebuah bagian proses yang tidak dapat dipisahkan dari cara bagaimana awak media mengkonstruksi media. Maka di dalamnya framing sangat berhubungan dengan editing, yang melibatkan seluruh tim pada bagian redaksional. Maka akan muncul sikap reporter mengenai figur yang menjadi penting untuk diwawancarai atau tidak, dan pertanyaan apa yang harus diajukan dan apa yang tidak. Redaktur bertugas memutuskan apakah laporan reporter dimuat atau tidak, dan memberikan judul pada yang dia anggap relevan dan seterusnya.

pada control dan sebuah penurunan yang berhubungan dengan banyak tanda, penggunaan kata-kata. Seperti hubungan konvensional dokter dan pasiennya.

Meskipun perkembangan ini tidak dapat dikatakan secara sederhana pada paham *consumer*, namun mereka juga dapat menjadi terikat di dalamnya dengan seorang yang mempunyai wewenang dan hak bicara untuk keuntungannya sendiri dengan paham *consumer* untuk menyampaikan. Adanya keterkaitan, organisasi-organisasi komersial, termasuk makin meluasnya organisasi-organisasi seperti profesi-profesi, pelayanan-pelayanan sosial, waktu dan seni yang dapat menjadi gambaran di dalam operasi komersial dari model-model *consumer*, ini semua terjadi dibawah tekanan untuk perubahan praktek-praktek organisasi mereka dan '*cultures*' merupakan usaha pimpinan atau direksi di dalam banyak persoalan strategi-strategi sistematis dari pelatihan-pelatihan dan juga merupakan intervensi mencapai yang sangat jauh. Wacana secara teknologi adalah bagian dari proses-proses, dan di dalam banyak kasus sentral obyektif pada wacana secara teknologi adalah sebuah prestasi dari sebuah perubahan ke arah lebih kepada apa yang dimunculkan pada praktek-praktek diskursif adalah bagian dari sesuatu yang sangat luas dari organisasi dan *cultural change*. Hal-hal yang menjadi pembicaraan atau isu-isu pada praktek-praktek diskursif membuka peluang investasi yang kontradiktif menjadi terkait dan berhubungan untuk kebebasan atau strategi-strategi baru dari *control*, serta dalam hal ini akan menjadi perhatian-perhatian mereka pada institusi pada

diri mereka untuk focus terhadap kekuatan-kekuatan hegemoni. Dapat diambil point yang penting yaitu ketergantungan dari analisis-analisis mikro pada sample-sample wacana secara spesifik dan lebih dari itu analisis makro yang lebih luas kecenderungannya mempengaruhi pesan-pesand ari wacana, konstruksi dan penyusunan kembali dari kekuasaan-kekuasaan (*hegemoni*)di dalam ruang lingkup pada praktek-praktek diskursiv, dan kebijakan penggunaan bahasa serta perencanaan, hal ini secara makro membentuk dimensi-dimensi bagian-bagian dari konteks dari beberapa event diskursiv dan diperlukan juga untuk menginterpretasikannya. Di dalam ruang lingkup pada praktek-praktek diskursiv, dan kebijakan penggunaan bahasa serta perencanaan, hal ini secara makro membentuk dimensi-dimensi bagian-bagian dari konteks dari beberapa event diskursiv dan diperlukan juga untuk menginterpretasikannya.<sup>68</sup>

### **II.2.7 Analisis *Framing* Sebagai Pendekatan Analisis Teks Media**

Analisis framing merupakan salah satu pendekatan analisis wacana, khususnya dalam menganalisis teks media. Penggagas framing yang pertama adalah Beterson tahun 1955 (Sudibyo, 1999 a:23) (Sobur, 2001 : 161). Dijelaskan, mulanya frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun

---

<sup>68</sup> Sobour. *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*, 2001, hlm. 176-179, Remaja Rosdakarya Bandung.



1974, yang mengandaikan bahwa frame sebagai kepingan-kepingan perilaku (*strips of behavior*) yang membimbing individu dalam membaca realitas. Dan saat ini, framing telah banyak digunakan secara luas dalam ilmu komunikasi untuk mendiskripsikan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita oleh media.<sup>69</sup> Dalam perspektif komunikasi analisis framing dipakai untuk membedah cara-acara atau ideologi media saat ini mendeskripsikan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realita media. Dalam perspektif komunikasi analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideology media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini memperhatikan dan mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih bernilai, lebih berarti dan mudah diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya.

### **Analisis *Framing* Gamson dan Modigliani**

Gagasan Gamson mengenai *frame* media ditulis bersama Andre Modigliani. Menurut Gamson sebuah *Frame* memiliki struktur internal. Pada titik ini terdapat sebuah pusat organisasi atau ide, yang membuat peristiwa dapat dipahami dan terlihat relevan serta menekankan suatu isu tertentu. Sebuah frame umumnya menggambarkan dan menunjukkan *range* posisi, bukan hanya satu posisi saja. Gamson dan Modigliani dalam formulasinya memandang *frame* sebagai cara bercerita (*story line*) atau

---

<sup>69</sup> Eriyanto. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*, 2002, hlm. 224-225. LkiS, Yogyakarta.

penggunaan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan sebuah konstruksi makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana.

Menurut Gamson wacana media dalam hal ini khususnya berita terdiri dari sejumlah kemasan (*package*) melalui mana konstruksi peristiwa itu dibentuk.<sup>70</sup> Kemasan tersebut dipahami sebagai skema atau struktur pemahaman yang dipakai seseorang, ketika ia mengkonstruksi pesan-pesan yang ingin disampaikannya dan menafsirkan pesan yang diterimanya.

Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui mengenai bagaimana cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menseleksi isu yang dianggap penting dan menulis berita. Dengan demikian cara pandang ini pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang dimunculkan atau ditonjolkan dan bagian mana yang akan dihilangkan atau dimampatkan, dan hendak mengarah ke mana berita tersebut. Cara pandang ini Gamson dan Modigliani menyebutnya sebagai kemasan (*package*). Menurut mereka, frame merupakan cara bercerita atau gugusan ide-ide yang mengorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan obyek suatu wacana. *Package* adalah semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan individu untuk mengkonstruksi makna dari pesan-pesan yang dia sampaikan, serta untuk menafsirkan dan memahami makna pesan-pesan yang dia terima.

---

70

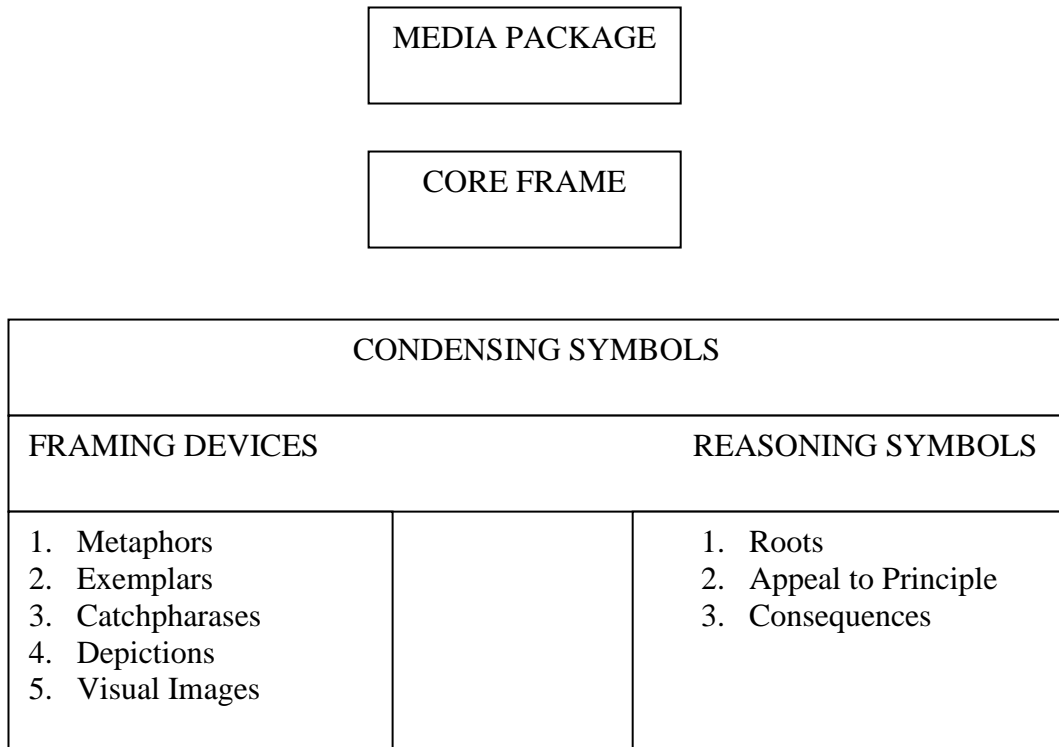
Disadarkan pada pendekatan konstruksionis yang melihat representasi media berita dan artikel, terdiri atas *package* interpretatif yang mengandung konstruksi makna tertentu. Di dalam *package* ini terdapat dua struktur yaitu *care frame* dan *condensing symbols*. Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. Struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu *framing devices* dan *reasoning devices*.

Menurut Gamson mendefinisikan frame sebagai organisasi gagasan sentral atau alur cerita mengarahkan makna peristiwa-peristiwa yang dihubungkan dengan suatu isu. Frame merupakan inti sebuah unit besar wacana publik yang disebut *package*. *Framing analysis* yang dikembangkan Gamson dan Modigliani memahami wacana media sebagai satu gagasan perspektif interpretasi (*interpretative package*) saat mengkonstruksi dan memberikan makna suatu isu.<sup>71</sup> Analisis Gamson dan elemen-elemen tampak pada model atau gambar berikut ini :

---

71

**Gambar 9 : Model Analisis Framing Gamson dan Modigliana**



*Sumber:* diadopsi dari William A. Gamson dan Andre Mogliani, “*Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power a Constructionist Approach,*” *Journal of Sociology*, Vol.95, No. 1, July 1989, hlm. 3 Teori ini diambil dalam buku *Analisis Teks Media, suatu pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, 2001, Karya: Drs. Alex Sobur, M.Si., PT Remaja Rosdakarya, hal: 176-178.

**Perangkat Framing**

*Package* atau kemasan dibayangkan sebagai sebuah wadah atau struktur data yang mengorganisir sejumlah informasi yang dapat menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, juga dapat membantu komunikator untuk menjelaskan muatan-muatan di balik suatu isu atau peristiwa. Keberadaan suatu kemasan ini dapat dilihat dari gagasan sentral yang didukung oleh perangkat-perangkat wacana; seperti: kata, kalimat,

pemakaian gambar/grafik, proposisi dan sebagainya. Keseluruhan elemen tersebut mengarah pada suatu ide yang mendukung ide sentral suatu cerita. Gambar 10 Perangkat Framing Gamson dan Modigliana di bawah ini. Dalam pandangan Gamson, *framing* dapat dipahami sebagai perangkat gagasan atau ide sentral bilamana seseorang atau media memahami dan memakai suatu isu. Ide sentral ini akan didukung oleh seperangkat wacana yang memiliki keterhubungan dan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam pemakaian kata, metafora dan kalimat serta gambar atau grafik harus merupakan elemen-elemen yang saling mendukung, yang akhirnya menuju pada satu titik : yaitu ide sentral suatu berita. Dua perangkat yang menterjemahkan ide sentral dalam teks berita, adalah *framing device* dan *reasoning device*. Gagasan atau bingkai tersebut didukung dengan perangkat *framing* hal ini untuk tampak menyakinkan, yang ditandai dengan menggunakan kata, kalimat, gambar, metafora atau menggunakan ilustrasi tertentu tujuannya untuk menekankan gagasan tertentu. Sedangkan tujuan gagasan itu terlihat wajar atau terlihat besar.

**Gambar 10. perangkat *Framing* Gamson dan Modigliani**

Frame Centrak organizing idea for making sense of relevant events, seggesting what is at issues	
Framing Devices (perangkat framing)	Reasoning Devices (perangkat penalaran)
Metaphor Pengumpaaan atau pengandaian	Roots Analsis kausal atua sebab akibat
Catchprases Frase yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana. Ini umumnya berupa jargon atau slogan	Consequences Efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai

Exemplar Mengaitkan bingkai dengan contoh uraian (teori, perbandingan) yang memperjelas bingkai	
Depiction Penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif, umumnya berupa kosakata, leksikon untuk melabeli sesuatu	
Visual images Gambar, grafik, citra yang mendukung bingkai secara keseluruhan. Bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan	

Teks berita tersebut didukung oleh perangkat penalaran, sehingga seakan-akan gagasan dalam teks tersebut tampak beralasan yang kuat, tidak mengada-ada, tampak alamiah dan memang benar adanya. Hal ini dilakukan dalam teks berita dengan adanya hubungan sebab akibat, terdapat fakta yang juga mendasari fakta yang lain, dan seterusnya. Intinya adalah ada gagasan utama yang didukung oleh elemen dan seperangkat wacana yang satu dan yang lainnya ada keterkaitan dan mendukung serta mengarah pada gagasan utama.<sup>72</sup>

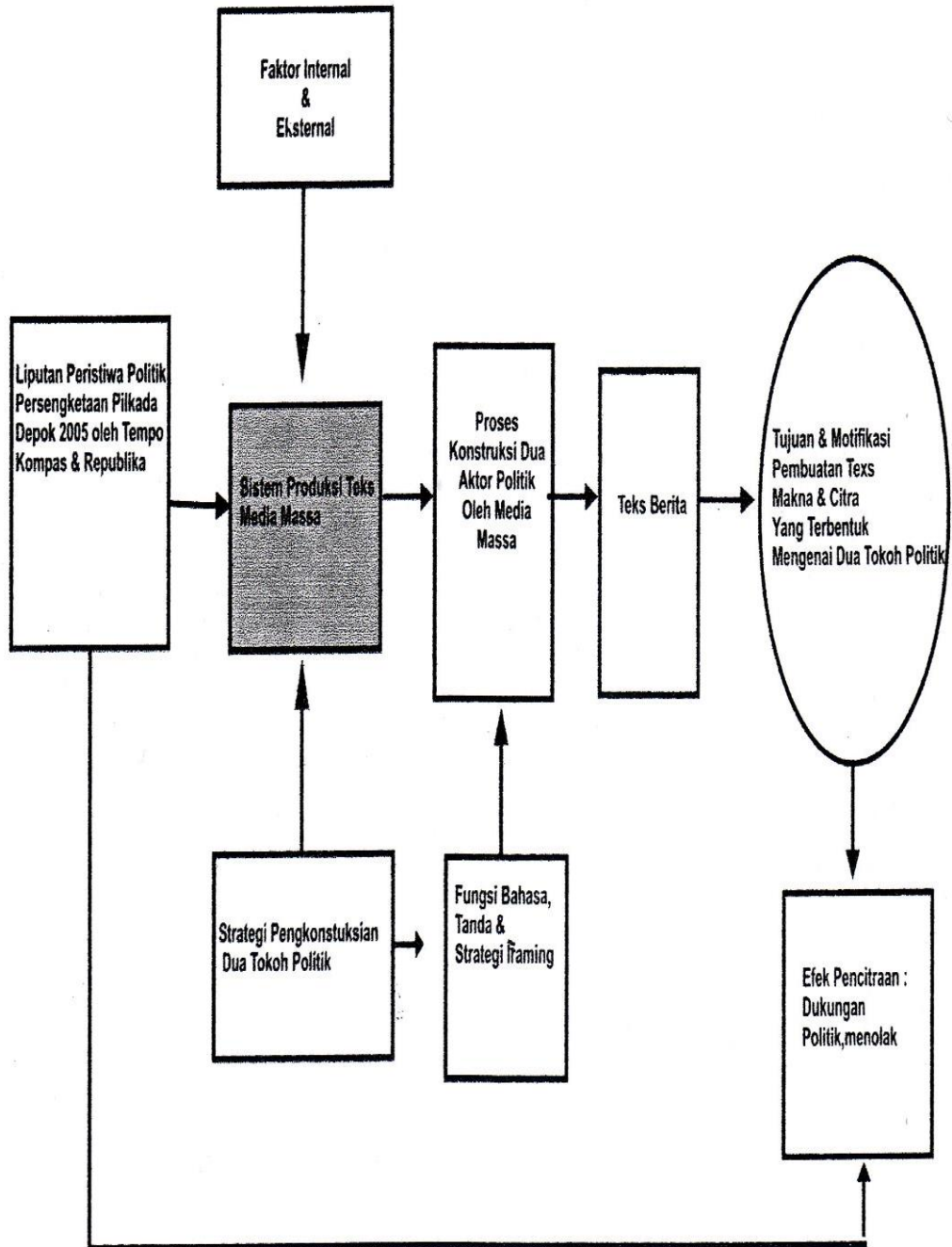
### II.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian yang mendasari alur berpikir dalam menganalisa dan menerapkan metode penelitian ini adalah seperti yang tertuang pada gambar 11 berikut :

---

72

Gambar 11 : Kerangka Pemikiran Analisis



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **III.1 Paradigma Kritis**

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis seperti yang telah diuraikan pada tujuan penelitian, dimana paradigma dan pendekatan kritis memberikan perhatian yang sangat besar pada kehidupan manusia dan memfokuskan isu ketidakadilan dan tekanan. Sebagian teori ini berkaitan dengan konflik kepentingan di dalam masyarakat dan cara-cara berkomunikasi yang didominasi oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya.<sup>1</sup>

Pendekatan-pendekatan kritis menyelidiki kondisi-kondisi sosial untuk mengungkapkan peraturan-peraturan yang merusak yang biasanya tersembunyi di balik peristiwa sehari-hari. Karena itulah teori-teori kritis juga meminjam dari strukturalisme. Teori kritis kebanyakan mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, karena pemahaman cara-cara anda dipaksa memungkinkan anda untuk mengambil tindakan dan merubah kekuatan-kekuatan yang menekan. Penelitian kritis bertujuan mengungkapkan cara-cara dimana konflik-konflik diselesaikan dengan keuntungan kelompok-kelompok tertentu terhadap yang lain. Proses-proses dominasi yang terkadang tersembunyi dari pandangan, dan untuk itu teori kritis bertujuan mengungkap proses-proses tersebut. Dan maka sebab itu

---

<sup>1</sup> Littlejohn, 1999, hlm: 226-227.



teori-teori kritis sering kali bersatu menggabungkan diri dengan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok marginal.<sup>2</sup>

Paradigma kritis sangat menaruh perhatian terhadap pengungkapan dan pembongkaran aspek-aspek (*virtual reality*),<sup>3</sup> hal ini untuk dilakukan sebagai kritik dan perubahan terhadap struktur sosial, dalam hal ini berhubungan dengan yang dilakukan media khususnya surat kabar dalam mengkonstruksikan tokoh-tokoh politik (calon wali kota) dan partai-partai pendukungnya.

Pada paradigma kritikal (secara ontologis) melihat realitas adalah merupakan realitas semu; dimana realitas tersebut telah dibentuk dan dipengaruhi oleh kekuatan politik, social, budaya, ekonomi, nilai gender, etnik dan yang lainnya yang telah mengkristal dalam waktu yang panjang.<sup>4</sup>

Dari sudut epistemologis paradigma kritis melihat hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti selalu menjembatani oleh nilai-nilai tertentu (*subjectivist*). Untuk memahami suatu realitas si peneliti menggunakan perspektif atau cara pandang si pembentuk realitas atau si subyek pembuat berita. Disini realitas akan dipahami sebagai kenyataan

---

<sup>2</sup> Littlejohn, 1999, hlm: 226. Dijelaskan bahwa ilmu sosial kritis seringkali bersifat ekonomis dan banyak dari penelitian ini menyangkut komunikasi. Dan adanya keterhubungan komunikasi dan elemen-elemen lainnya dari keseluruhan sistem dan merupakan bagian dari analisis masyarakat sebagai satuan kesatuan yang tak terpisahkan.

<sup>3</sup> Hamad, Ibnu, dalam bukunya Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik. 2004. Bab VI; dijelaskan ternyata dibalik realitas yang teramati (*virtual reality*) sehingga dengan menggunakan paradigma kritikal dalam analisis wacana dapat membuat berita bercerita.

<sup>4</sup> Lihat dalam, Hamad, 2004, hlm: 43. *Values mediated findings* adalah metode wawancara mendalam dengan pengelola media untuk mendapatkan informasi mengenai adanya nilai-nilai ideologis, idealis, politis dan ekonomis (dalam paradigma kritikal).

yang telah disatukan oleh nilai-nilai (*values mediated finding*)<sup>5</sup> antara si subjek dengan realitas yang terjadi yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti berusaha bersikap seperti metode penelitian yang dipergunakan (*CDA*) analisis wacana kritis, melalui wacana mendalam dengan redaksi atau pengelola media yang bersangkutan, hal ini diupayakan untuk menemukan nilai-nilai yang telah mereka tanamkan atau mediasikan kepada masyarakat atau publik.

Dalam *level methodology*, paradigma kritis mengambil metode *participative*; yaitu dengan melakukan pengamatan terlibat dari waktu ke waktu proses pengkonstruksian berita dan proses redaksional, dan hal ini tidak dapat peneliti lakukan, karena objek kajian penelitian ini adalah berita pada surat kabar yang sudah jadi, bukan pada proses pembuatan berita, jadi tidak dilakukan pengamatan terlibat. Sebagai pengganti menggunakan analisis yang bersifat *multi-level*, analisis dilakukan secara menyeluruh, kontekstual dan beberapa level, dengan menggunakan metode pemikiran Fairclough. Teknik penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan bersifat empati dalam memngungkap makna atau pesan yang tersembunyi dibalik bahasa atau tanda yang digunakan yang mengacu dan menghubungkan konteks dengan berbagai level. **Seperti Gambar 12 berikut :**

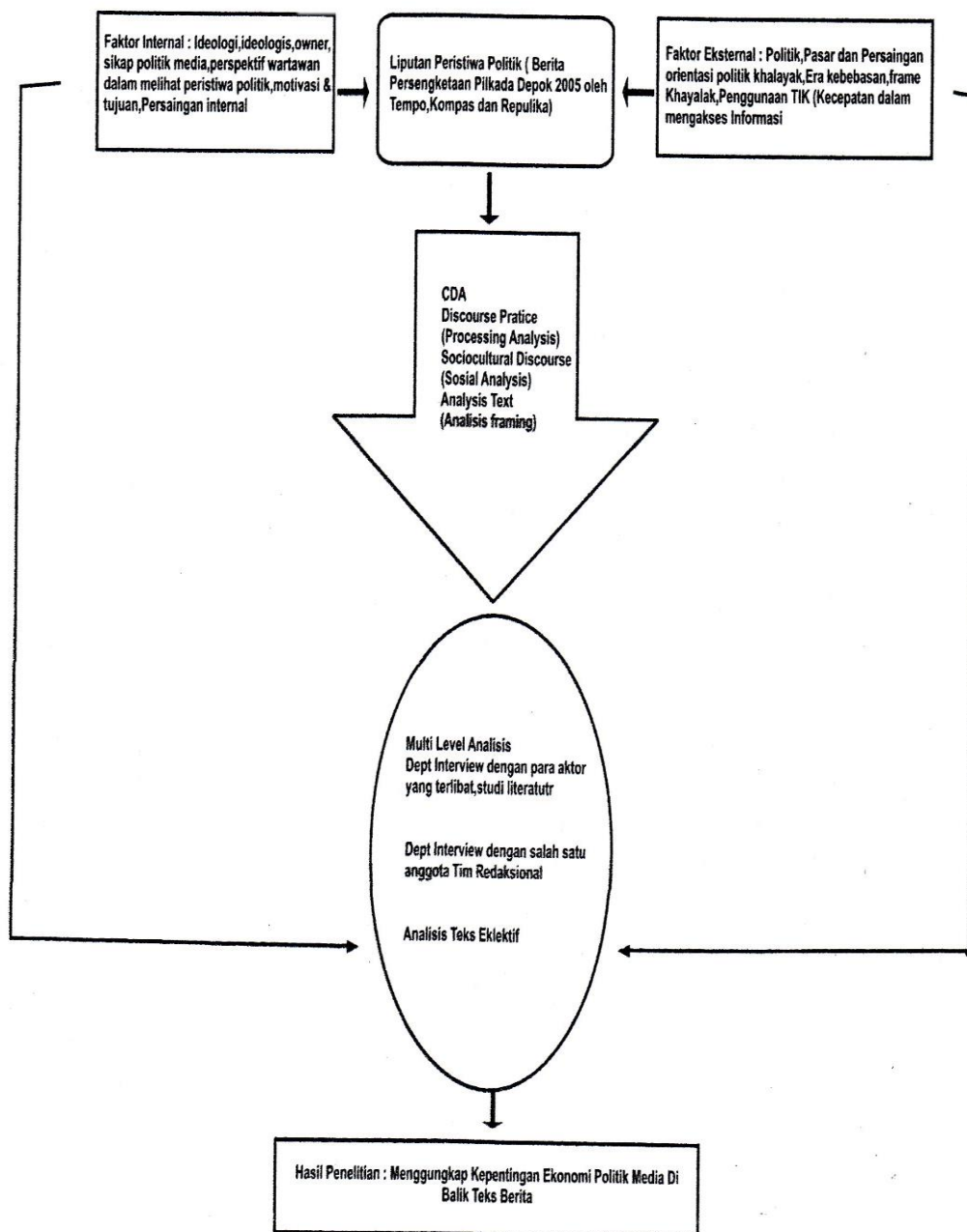
Paradigma kritis mempunyai pandangan tertentu mengenai bagaimana media, dan pada akhirnya berita harus dipahami dalam

---

<sup>5</sup> Diambil dari Hamad, 2004: 44-46.

keseluruhan proses produksi dan keseluruhan sosial. Paradigma ini dipengaruhi ide dan gagasan Marxis yang melihat bahwa masyarakat sebagai suatu system dominant tersebut.

**Gambar 12: Kerangka Kerja Penelitian (*Frame Work Research*)**



### III.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif induktif dengan menggunakan analisis Wacana Kritis atau *Critical Discourse Analysis* oleh Norman Fairclough tujuannya untuk membongkar maksud-maksud atau kepentingan ekonomi politik media di balik sebuah realitas yang tampak (*virtual reality*) dalam sebuah wacana yang telah dikonstruksi. Hal ini dilakukan untuk mengkritisi dengan memberikan masukan-masukan yang bermanfaat kepada media yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada perubahan dari efek penanaman makna yang terdistorsi dari wacana yang dihadirkan; dalam hal ini mengenai kebenaran dan fakta dari suatu peristiwa atau berita yang dimunculkan dengan realitas yang dikonstruksikan oleh media yang mempunyai pengaruh dan efek yang signifikan di dalam masyarakat mengenai suatu pembentukan opini dan pencitraan terhadap tokoh-tokoh politik atau hal-hal tertentu yang menjadi pembicaraan publik.

### III.3 Metode Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan strategi riset analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis – CDA*).<sup>6</sup> Karena menggunakan paradigma kritis yang menghendaki dipakainya *multilevel methods*, maka peneliti menggunakan kerangka analisis wacana kritis (CDA) dari Norman Fairclough seperti yang tampak pada kerangka

---

<sup>6</sup> Fairclough, Norman, *Critical Discourse Analysis; The Critical Study of Language*, 1995: 96-99. Dalam Hamad: 2004; 46-47.

kerja dalam gambar 3. di dalam kerangka tersebut dikehendaki bahwa di dalam memperoleh pemahaman secara utuh (mengenai teks), analisisnya mengehndaki diletakkan di dalam konteks sosio-kultural dan latar belakang subjek atau aktor pembuat teks tersebut dalam hal ini media.<sup>7</sup>

Kerangka analisis ini diterjemahkan ke dalam konteks yang bersifat *multy-metode*; yaitu level analisis makro, meso, dan mikro. Seperti dalam tabel berikut :

**Tabel 3: Level Analisis<sup>8</sup>**

No	Level permasalahan	Level analisis	Metode penelitian yang digunakan
1	Sociocultural practise	Makro	Dept interview dengan para saksi pada proses pelaksanaan pilkada dibantu dengan literatur
2	Discourse practise	Meso	Depth interview dengan pengelola media (proses produksi teks) dibantu dengan literatur
3	Text	Mikro	Teks elektif

<sup>7</sup> Hamad, Ibnu, 2004: 47.

<sup>8</sup> Hamad, (2004:47-48), diambil dari Fairelough (1995: 49-50) yang telah dimodifikasi sesuai dengan keperluan riset.

Pada **level makro** (*sociocultural practice*) penggalian data dilakukan pada perubahan gaya dalam penyampaian berita atau peristiwa; yang secara dinamis mengalami pergerakan dari masa reformasi ke arah demokrasi yang ditandai dengan adanya sistem politik multi partai dan pemilu yang bebas, bergerak menuju pada era transparansi (kebebasan). Untuk kelengkapan informasi dan mendapatkan keterangan-keterangan pada metode-metode ini dibantu dengan literatur dan wawancara pada sanksi-sanksi yang terlibat dan sumber-sumber yang kredibel yang mengikuti dan mengalami secara langsung peristiwa Pilkada Depok 2005.

Pada **level meso** (*discourse practise*); menggunakan metode wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses redaksional dan produksi teks yang menjadi sample dalam penelitian. Data sekunder berisi informasi dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan surat kabar sebagai media yang diteliti yang dipergunakan untuk menunjang analisis. Pencarian data dari wawancara mendalam dan data sekunder terutama di fokuskan pada produksi teks (proses pembuatan teks) termasuk pertimbangan-pertimbangan dalam rapat-rapat redaksional dalam memutuskan isu apa yang dianggap penting yang akan di munculkan dalam teks tersebut. Dalam hal ini juga ada faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan teks; yaitu konsumsi penyusunan teks (*text consumption*): pembaca setia dan perkembangan mengenai pengetahuan dan pemahaman serta minat mereka terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini peristiwa politik.

Pada **level mikro** (*level teks*) akan dianalisis dengan menggunakan analisis wacana eklektif (pada tabel 4). Dalam hal digunakannya analisis wacana eklektif karena dua alasan; pertama, karena keragaman metode analisis wacana dalam rangka menjelaskan masalah penelitian. Karena secara prinsip berita merupakan hasil konstruksi realitas yang mencakup paling tidak tiga aspek: perlakuan atas peristiwa, strategi pengemasan, dan penggunaan symbol dan analisis wacana dalam penelitian ini atas dasar ketiga aspek tersebut. (Lebih jelasnya lihat tabel 4) :

**Tabel 4: Instrumen teks Eklektif<sup>9</sup>**

Unsur Kerangka Teori	Unsur Pembentuk Teks	Evidensi		
		Alat Pembuktian	Bukti dalam teks	Makna
Fungsi agenda setting	Perlakuan atas peristiwa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tema yang diangkat</li> <li>- Penempatan berita</li> </ul>		
Strategi framing	Sumber yang dikutip	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama dan atribut sosial sumber</li> </ul>		
	Cara penyajian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilihan fakta yang dimuat</li> <li>- Struktur penyajian</li> </ul>		
Fungsi bahasa	Simbol yang dipergunakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbal: kata, istilah, frase</li> <li>- Non verbal: foto, gambar</li> </ul>		
Jalan pikiran (kesimpulan) yang dibuat:				

<sup>9</sup> Diambil dari Hamad, Ibnu, 2004: 49-51; yang merupakan gabungan dari teori-teori analisis teks media.

Analisis framing yang digunakan adalah Gamson dan Modigliani hal ini melihat keperluan untuk menjelaskan pokok kajian analisis teks media.

Dengan melihat teks berita yang merupakan hasil konstruksi realitas media (yang secara sengaja dilakukan) melalui strategi pengemasan pesan dan penggunaan simbol-simbol dan untuk analisis wacana penelitian ini dilaksanakan dengan konsep-konsep tersebut.

Untuk mencari makna bagi analisis wacana; seluruh konsep-konsep di atas digunakan sebagai alat atau instrument tanda, dan untuk interpretasi tanda, dan untuk interpretasi dengan menggunakan semiotik adalah guna menemukan tanda-tanda di dalam konteks tersebut yang pada akhirnya berkaitan satu dengan yang lainnya, hal ini digunakan untuk mencari kesimpulan secara menyeluruh.

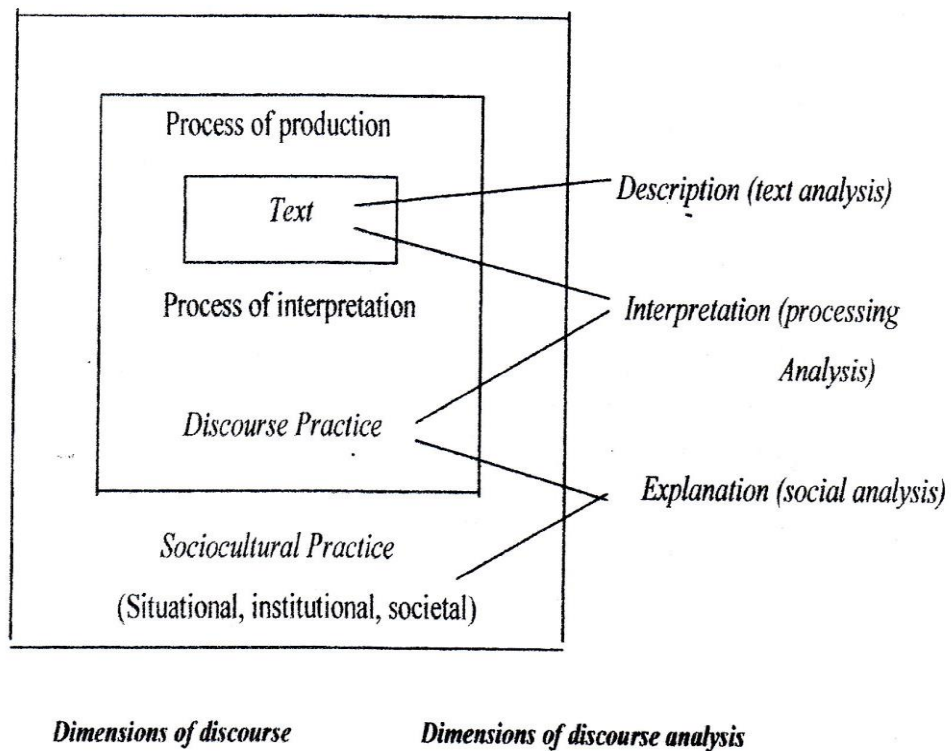
Pada pembuatan wacana dengan menggunakan apapun pendekatannya senantiasa terdapat empat unsur; yaitu melakukan atas peristiwa, sumber yang dikutip, strategi pengemasan dan sumber-sumber lain yang digunakan.

Setelah semua dianalisa (pada setiap level analisis) maka temuan-temuan data pada level dianalisis secara keseluruhan sesuai dengan strategi riset (CDA) yang digunakan. Disini akan diupayakan untuk menemukan dinamika produksi teks dan perkembangan-perkembangan sosial budaya di sekitar media.



Dengan multi level analisis dan menggunakan instrument analisis eklektif diharapkan dapat memenuhi tuntutan CDA Norman Fairclough sebagai strategi. Seperti penampang yang ada di bawah ini.

**Kerangka Analisis wacana Fairclough<sup>10</sup>**



Sumber: Fairclough Norman, *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*, hal.98.

<sup>10</sup> Fairclough, 1995: 98-99; *Critical Discourse Analysis; The Critical Study of Language*, Longman; London.

### **III.4 Obyek Analisis Penelitian**

Ketika konflik pelaksanaan pilkada disejumlah daerah menjadi pembicaraan publik; hal ini berhubungan dengan otonomi daerah dan pesta demokrasi lokal sebagai pendidik politik masyarakat. Kesiapan dan sosialisasi mengenai pelaksanaan dan undang-undang yang mengaturnya pun dipertanyakan. Pemahaman yang belum optimal dari pihak penyelenggara dan peserta seperti ini menimbulkan sengketa atau konflik, dalam hal ini wakil atau calon dari partai-partai dan para pendukung setia mereka kepada KPUD yang menjadi penengah dan wasit yang independen.

Pilkada Depok 2005 merupakan Pilkada pertama yang dilaksanakan secara langsung di provinsi Jawa Barat. Sehingga Pilkada Depok akan menjadi tonggak atau barometer bagi keberhasilan pilkada di Kota dan Kabupaten Se-Jawa Barat. Sedangkan Persengketaan pilkada Depok merupakan sengketa persetujuan politik dua kubu yang cukup kuat dan dianggap spektakuler, yaitu Kubu Badrul Kamal dan Partai Golkar dan Kubu Nurmahmudin Ismal dari partai Kesejahteraan.

Disamping itu situasi politik di Depok amat menarik untuk diperhatikan. Badrul yang sudah memiliki birokrasi yang sudah mapan dapat dikalahkan oleh pesaingnya Nurmahmudi Ismail yang lahir dari partai yang masih muda tapi memiliki pendukung yang signifikan di Kota Depok. Kedua nama itu juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh ketiga calon lainnya. Badrul selain sebagai kandidat yang masih menjabat, menguasai birokrasi, memiliki popularitas, dan merupakan calon dari partai

yang meraih suara kedua terbanyak pada pemilu legislatif di Depok. Meskipun hanya menempati kedua di Depok, namun demikian secara nasional partai orde baru itu adalah pemenang Pemilu Legislatif 2004. Jusuf Kalla yang memang dari partai Golkar menjadi Wakil Presiden dan Wakil umum Golkar Agung Laksono menjadi Ketua DPR, dan Ketua DPRD juga dari partai Golkar. Dukungan partai-partai politik kepada Badrul pun cukup memadai. Dengan jargon 'Sudah terbukti, sudah teruji', badrul dapat memikat kalangan yang sudah biasa dengan budaya birokrasi yang "mapan". Namun demikian publik di Depok sudah berkembang dengan lebih kritis, terdidik dan merindukan perubahan. Pendidikan yang memadai ini yang menyebabkan kesadaran politik mereka tidak mudah di manipulasi dan dimobilisasi.

Di lain pihak Nurmahmudi memiliki konstituen yang terikat secara moral dan emosi, karena dengan beberapa wawancara dengan anggota PKS yang merupakan anggota pengajian-pengajian; mereka mempunyai komitmen moral yang cukup tinggi. Di mata masyarakat Depok PKS juga memiliki citra yang baik. Ditengah praktek demokrasi dan carut marutnya kehidupan politik dan moral para elit yang banyak menghalalkan cara, PKS hadir mengisi peluang dan harapan sebagai partai yang dianggap bersih dan santun. Simpati pendukung pun berdatangan yang berakibat pada dukungan perolehan suara. Berkat posisi dan kelebihan yang mereka miliki dapat dikatakan bahwa Badul dan Nurmahmudi adalah *the real contestant* Pilkada Depok 2005.

Dukungan dari khalayak media massa kepada parpol juga menjadiperhatian tersendiri. Dengan adanya sentimen ideology maka aksi dukung mendukung ini pun menjadi faktor yang cukup diperhitungkan. Sementara itu media massa memasukkan berbagai faktor yang menajdi pertimbangan mereka dalam mengkonstruksi dan mempeoduksi sebuah teks berita. Faktor pesaing pasar, ideologi, ekonomi dan idealis menjadi menarik untuk dilakukan penelitian terhadap berita-berita tentang tokoh yang dimunculkan oleh ketiga media tersebut. Penelitian ini akan menjawab adalah sentimen positif media terhadap *ideology* tokoh politik tertentu mendatangkan dukungan dari media tersebut ?

Maka dengan alasan politik media yang berkaitan dengan ideologi mediayang menjadikan adanya keberpihakan media, maka dilakukan analisis kepada ketiga harian tersebut. Karena disamping faktor politik dan ideologi, koran juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidupnya di dalam pasar yang penuh persaingan (kepentingan ekonomi).

### **III.5 Tehnik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara mendalam dengan pihak redaksional (Tim redaksional dari *Tempo, Kompas, dan Republika* yang dipilih sebagai narasumber atau sampel).

2. Analisis teks menggunakan analisis framing; dengan mengikuti pemberitaan mengenai persengketaan pilkada Depok yang terbit dari tanggal 27 Juni 2005 oleh ketiga koran tersebut.
3. Wawancara mendalam dengan *key informan*; diantaranya KPUD Depok, Para Saksi di KPU, Para Tokoh Masyarakat Depok, Saksi dari PKS dan Golkar, wawancara mendalam kepada pembaca setia ketiga surat kabar tersebut. Dibantu dengan literatur dan dokumen-dokumen sebagai pelengkap data penelitian.

### **III.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sekunder (*Level text*) dan analisis proses produksi dengan melakukan investigasi kepada tim redaksional harian tersebut, dan analisis sosiokultural dengan wawancara mendalam kepada para saksi (tokoh-tokoh) yang terlibat pada persengketaan pilkada Depok 2005.

Pada level teks (*level mikro*); penelitian ini menggunakan analisis framing dari Gamson dan Modigliani; akan dianalisis tentang seperangkat strategi media dalam membingkai isu atau tokoh politik dalam bentuk teks berita, yang dalam teori *framing* dari Gamson; bahwa berita diibaratkan terdiri dari beberapa bagian yang merupakan *package interpretative* yang mendukung struktur makna tertentu, yaitu gagasan sentral (*core frames*) yang berisi elemen-elemen inti untuk memberikan pengertian yang relevan terhadap peristiwa, dan mengarahkan makna isu yang dibangun *condensing*

*symbol* (simbol yang "dimampatkan"). Struktur *framing devices* yang mencakup *metaphors*, *exemplars*, *catchphrases*, *depictions*, dan *visual images* menekankan aspek membenaran terhadap cara "melihat" isu, yakni *roots* (analisis kausal) dan *appeals to principle* (klaim moral). Teks berita yang dianalisa adalah yang terbit pada tanggal 27 Juni 2005 sampai dengan 26 Januari 2006.

Pada level *discourse practice (level meso)*: dilakukan wawancara yang mendalam kepada subyek yang terlibat dalam proses redaksional media dan dibantu dengan literatur. Data sekunder mengenai sejarahan yang berhubungan dengan media yang dijadikan sampel juga digunakan untuk kepentingan analisis. Data yang diambil juga mengenai produksi teks dan pengaruh serta pertimbangan ketika pembuatan teks berita. Dan *text consumption*: mengenai permintaan pembaca serta perkembangan cara berpikir pembaca yang juga menjadi pertimbangan tersendiri oleh media.

Pada *level sociocultural practice (level makro)*; dilakukan investigasi kepada para saksi dan pelaku pada proses pilkada 2005 (Beberapa anggota DPRD, Fraksi Golkar, fraksi Depok, DPD PKS, KPU Depok, dan masyarakat Depok). Dan ditambah dengan beberapa tulisan serta literatur untuk melihat kesejarahan pers dan keterkaitannya dengan perjalanan sistem politik di Indonesia; hal ini dilakukan agar memberikan pemahaman yang koheren mengapa teks berita atau peristiwa dimunculkan seperti itu pada konteks masyarakat pada saat itu.

Teknik analisis data seperti ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang jelas dan secara menyeluruh dari lahirnya sebuah wacana, dan keberadaan wacana pada ruang lingkup dan konteks masyarakat serta proses sistem redaksional yang kompleks dan situasi politik saat itu.

## **BAB 1V**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **IV.A HASIL ANALISIS**

##### **IV.A.1 Depok : Sebagai Wilayah dan pengaruhnya dalam Pentas Politik Nasional**

Pada sistem kultural masyarakat Depok (dilakukan wawancara mendalam dengan Bardian sebagai penduduk Depok daerah Sawangan, lebih jelasnya ada pada lampiran C); Depok terbentuk dalam usia muda. Artinya seiring reformasi datang Depok berpisah dengan Kabupaten Bogor; yang asalnya adalah Kota Depok. Ketidaksiapan dan terlalu tergesa-gesa atau belum adanya kesiapan, menjadi sebuah kota dimana dilihat dari tata ruang Depok pada mulanya diperuntukkan untuk pemukiman; yang meliputi terdiri Depok I, Depok Utara, Depok II Tengah dan Depok II Timur, di luar daerah ini nyaris pedesaan. Setelah ditingkatkan menjadi kota otomatis berubah bentuknya menjadi kelurahan, masa transisi ini juga sarat dengan persoalan-persoalan. Seperti yang dirasakan bagaimana ketika orang Sawangan, Limo, Cimanggis; karena kotip pada waktu itu hanya tiga kecamatan; yaitu Beji; kecamatan pancoran Mas, dan Kecamatan Sukmajaya; di luar ini tidak termasuk Kotip. Hanya pertimbangan penduduk dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka tiap kecamatan ditarik, seperti beberapa bagian Bojonggede. Tapi sampai saat ini kepolisian di bawah Metro Jaya; ini juga dianggap sebagai



indikasi bahwa memang Depok diperhitungkan untuk menjadi bagian integral dari sistem Metro Jaya. Dan ketika Pilkada 2005 ditengarai kemungkinan mengganggu kepentingan Ekonomi Politik Internasional jika dimenangkan oleh PKS, hal ini ditandai dengan datangnya perwakilan Kedutaan Amerika di TPS tempat Nurmahmudin mencoblos. Ada tanggapan pada masyarakat Depok bahwa kedatangan utusan tersebut karena Amerika memiliki kepentingan politik.

Jika kita bicara kultur Depok, maka kita membicarakan mengenai penduduknya yang berwarna. Penduduk asli Depok adalah orang-orang yang menempati wilayah Depok lama dan ada peranan Vander Castle yang merupakan cikal bakal ikut andil berdirinya Depok. Ada Depok lama dan Pancoran Mas, dan di luar daerah ini sebelumnya memang sudah kontra produktif, artinya wilayah-wilayah pinggir termarjinalkan oleh kongsi kekuasaan jaman Belanda. Bagaimana; Sawangan, Limo, Cimanggis dan sebagainya. Sehingga, dulu ada pandangan bahwa orang asing Depok adalah orang pribumi yang tidak terintegralkan dengan Belanda Depok. Dan pada mereka mempunyai wacana bahwa memilih sekolah negeri itu tidak pantas. Karena menurut mereka negeri diidentikan dengan penjajah atau penjajah yang diidentikan dengan kekuasaan dan kekuasaan diidentikan dengan konfrontatif. Jadi dari dulu di Depok ada semacam bentuk-bentuk tradisi perlawanan bagaimana masyarakat pribumi memandang pendatang sebagai sesuatu hal yang dimaksudkan sebagai "lawan", curiga. Dan ketika terjadi pertarungan pilkada sekalipun, bisa

dilihat bahwa Kecamatan Sawangan memenangkan Badrul Kamal juga merupakan bisnis Badrul Kamal. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena mayoritas penduduk Sawangan adalah penduduk asli; dimana masih sedikit adanya tradisi membaca; seperti orang beji, dan para pendatang. Dan sampai pada saat ini nampaknya benang merah itu belum bisa terputus, mereka memandang bahwa Badrul dianggap sebagai figur pemimpin yang bisa mengerti lebih banyak dan lebih jauh terhadap orang-orang pribumi. Dikatakan demikian karena Badrul adalah orang Bogor, dan memang ada pembenaran bahwa Bogor asalnya memang bagian dari Depok. Ada asumsi di Sawangan Depok nomer telpon rumah masih menggunakan 0251 sentralnya masih ikut dengan Bogor. Dan sekolah di Sawangan rata-rata masih sekolah agama, dan bisa dibilang "sangat agama", dan baru akhir-akhir ini ada sekolah SMP dan SMU Negeri. Dan untuk tradisi membaca dari masyarakat pada umumnya adalah koran-koran lokal, terutama Sawangandan daerah-daerah matjinal. Disamping itu masa berakhirnya para kepala desa untuk Kota Depok terkonsentrasi di daerah Sawangan, Cimanggis dan Limo. Jadi masih banyak kerancuan yang mana pendatang dan pribumi penduduk Depok.

Pertarungan pilkada Depok, kendati muncul kepermukaan pertarungan jika dilihat dari sosiokulturalnya. Dan pertarungan ada kecenderungan terhadap "Islam" bahwa Islam pribumi Depok itu sangat eksklusif, dan melakukan beberapa tradisi; andaikata itu sudah terusik itu dianggap "lawan". Bahkan untuk bahasa kejujuran sekalipun kalau itu

bukan bagian dari tradisi, maka dianggap bukan merupakan kejujuran. Hal ini maka dapat dipahami; mengapa kemenangan Nurmahmudi Ismai bukan di daerah-daerah marginal. Kemenangan Nurmahmudi banyak terdapat di pusat-pusat dan sentral-sentral aktivitas yang kemungkinan besar kelas menengah yang ikut mewarnai bagaimana opini masyarakat terbentuk; sehingga mampu melahirkan pimpinan Depok yang lebih representatif. Tapi ketika mereka masuk ke daerah-daerah marginal ternyata terbukti, untuk dapat dipengaruhi. Artinya disini jika toh dapat dipengaruhi, maka harus ada proses. Perlu pembelajaran, dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki "lokal genius", di mana ia terkategori sebagai kelas menengah dan mampu merubah tatanan yang sudah ada

Kalaupun memang PKS sebagai panitia muda untuk ke wilayah pertarungan pilkada, dan melahirkan yang namanya Nurmahmudin-Yuyun memang merupakan ada sesuatu nilai yang baru, yang ditawarkan Nilai itu salah; bagaimana berbicara dengan kejujuran, kebenaran, keterbukaan, hal inilah yang banyak mempengaruhi konstituen, terutama di kelas menengah, yang dimaksud kelas menengah disini adalah bukan karena ekonomi tetapi dalam *basic education*. Mereka benar-benar yang dulu orang tuanya orang Golkar, PDI, PPP atau apapun, ketika mereka sudah mulai sekolah atau kuliah dan aktif di kampus, ikut kegiatan pengajian kampus ada semacam pencerahan. Maka mereka secara stuktur dan sistematis menjadi terintegral dan itu tak jarang menjadi "mesin politik" yang sangat efektif.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan penduduk Depok asli; menurut mereka : bahwa bekerja untuk pencalonan wali kota sekarang justru akan menjadi bumerang, terutama sangat sectarian atau kelompok. Kedua; eksklusif , ketiga; ada beberapa hal yang secara pasif janji politik yang belum tentu dipenuhi.

Kota Depok merupakan salah satu kota yang strategis di Indonesia, terutama dalam perspektif peta politik di Indonesia. Depok merupakan salah satu kota penyangga ibu kota negara yang dapat dikatakan cukup pengaruhnya di dalam kekuasaan pusat. Depok merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor yang berubah menjadi Kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 1981. statusnya masih dibawah Kabupaten Bogor. Wilayahnya meliputi Kota Madya Depok lewat Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999.<sup>1</sup> wilayahnya pun meliputi wilayah Kota Administrasi ditambah sebagian wilayah Kabupaten Bogor (Kecamatan Limo, Manggis, Sawangan dan sebagian wilayah Kecamatan Bojonggede).

Kota Depok didalam dinamika percaturan politik di Indonesia memberikan kontribusi yang penting, ini dilihat dari pengaruh dinamika politik lokal pada perpolitikan di Jakarta. Maka tidak mengherankan jika kekuatan-kekuatan politik nasional merasa mempunyai kepentingan dengan daerah ini dalam rangka melebarkan pengaruhnya yang merupakan

---

<sup>1</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 3. Harakatuna Publishing, Bandung.

bagian dari strategis partai-partai politik nasional dalam rangka meraih dukungan atau perolehan suara (*raise vote*).

Keberadaan Universitas Indonesia (UI) dan beberapa perguruan tinggi merupakan pengaruh tersendiri bagi Depok. Perpindahan kampus UI pada tanggal 5 September 1987 yang menempati areal sekita 318 hektar juga menjadi penentu bagi perkembangan Depok.<sup>2</sup> Dengan banyaknya mahasiswa dari berbagai daerah lain yang berbaur dengan mahasiswa lokal akan memberikan kemampuan mereka untuk bersatu dan *sharing* informasi mengenai sikap politiknya.

Sebagai agen perubahan mahasiswa jika merupakan kelompok yang dianggap strategis. Maka dalam hal ini Depok merupakan salah satu daerah yang didapat diperhitungkan bagi partai-partai politik untuk membangun jaminan dan kader-kader mereka. Perspektif ini dilihat dari upaya partai-partai politik yang terkesan memperebutkan pengaruhnya di Depok. Para aktivis mahasiswa UI juga memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan politik pada level nasional. Contohnya saja ketika terjadi gerakan untuk mengkritisi status quo Orde Baru 1978.<sup>3</sup> Juga gerakan yang saat ini memberikan pengaruh pada perubahan *system* pers yaitu gerakan yang saat ini memberikan jalan bagi era keterbukaan dan kebebasan. Gerakan reformasi itu memaksa turunnya Soeharto dan proses

---

<sup>2</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 2. Harakatuna Publishing, Bandung.

<sup>3</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 1-2. Harakatuna Publishing, Bandung.

*impeachment* Presiden Abdurrahman Wahid dalam Sidang Istimewa MPR 2001.

Masyarakat Depok memiliki mobilitas tinggi; karena sebagian penduduknya banyak beraktivitas di luar Depok ketika larut malam. Disamping itu banyaknya perumahan yang dibangun dari Perumnas sampai perumahan mewah juga menjadikan heterogenitas masyarakat dan struktur masyarakat Depok. Perkembangan perumahan ikut andil dalam memberikan kenaikan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi (4 persen) pertahun.<sup>4</sup> Hal ini juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Depok, jika melihat Margonda Raya sebagai pusat kota dan seluruh aktivitas di Depok. Perubahan status Depok, mobilisasi yang cukup tinggi serta perubahan ekonomi dan sosial penduduk memberikan peluang mereka untuk melibatkan diri dalam berbagai wacana politik serta gerakan-gerakan yang berpengaruh di Ibu Kota Jakarta.

Peta politik Depok juga cukup berpengaruh dalam peta politik Nasional; Daerah ini menyediakan 12 kursi DPR kursi DPR pusat, 4 kursi DPRD Provinsi, dan 45 kursi DPRD Kota Depok. Pada pemilu 2004 menunjukkan banyak perubahan dalam prosentase peserta pemilu, dari 24 partai politik peserta pemilu, 7 kantor yang berhasil meraih kursi di DPRD pusat (PKS, PDI-P, Golkar, PD, PAN, PPP dan PDS), dan 4 partai politik di DPRD Provinsi (PKS, PD, Golkar, dan PDI-P) , serta 8 partai politik di DPRD Kota Depok (PKS, PG, Golkar, PDI-P, PAN, PPP, PDS, dan PKB).

---

<sup>4</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 2. Harakatuna Publishing, Bandung.

Partai Demokrat, PKS, Partai Golkar telah memperoleh suara yang cukup signifikan; untuk DPRD Kota Depok. PKS dan PD adalah partai yang merupakan pendatang baru untuk pentas politik nasional dibandingkan dengan Partai Golkar yang memang sudah matang dan dewasa dalam kancah perpolitikan nasional. Namun demikian kekuatan politik lokal di Depok; didominasi oleh PKS dan Golkar. Keunggulan dan popularitas PKS di Depok semakin tak terbendung; dari 45 kursi legislative yang tersedia; PKS berhasil memperoleh 12 kursi dan sisanya untuk partai-partai politik lain. Di samping itu persaingan *popular vote* sua pesaing politik utama Depok, PKS dan Golkar berhasil meraih suara tertinggi; yakni PKS; 176.656 suara atau (24,49%), sedangkan Golkar dengan 112.330 suara (14,31%).<sup>5</sup> Untuk mendapatkan gambaran persaingan perolehan suara dukungan kepada partai-partai maka dihadirkan gambaran hasil pemilu Legislatif 2004 di DPRD Kota Depok, sebagai berikut :

**Tabel 5 : Hasil Pemilu Legislatif 2004 DPRD Kota Depok**

No	Nama Partai	Perolehan Suara Masing-masing Daerah Pemilihan						Jml Kursi	Jml Suara	% suara
		Beji	Cimanggis	Sukmajaya	Pancoran mas	Sawangan	Limo			
1	PKS	17.363	46.842	49.026	36.741	13.147	13.739	12	176.858	24%
2	Golkar	12.787	25.424	29.736	23.083	9.596	9.596	8	112.330	14%
3	Demokrat	7.181	41.104	23.631	15.058	6.457	9.346	8	102.777	14%
4	PDIP	4.615	21.686	15.206	14.975	8.203	7.962	5	72.647	10%
5	PAN	5.452	12.925	19.600	12.701	8.021	5.230	5	63.929	8,8%
6	PPP	3.862	11.814	6.263	10.128	7.402	5.812	4	45.281	6,2%
7	PKPB	715	3.954	2.295	3.401	2.739	4.699	0	17.803	2,4%
8	PBR	3.186	3.954	4.815	2.749	4.902	4.196	0	23.798	3,3%
9	PDS	2.182	6.349	7.412	5.340	1.696	2.950	1	25.929	3,5%
10	PKB	1.436	6.567	2.451	3.377	7.448	2.452	2	23.731	3,2%
11	PBB	1.296	5.999	3.040	3.054	2.096	2.003	0	17.518	2,4%
12	PPDK	133	361	322	4.043	4.967	1.143	0	7.969	1,1%
13	PPIB	55	271	137	419	179	1.113	0	2.174	0,3%
14	PPN UI	243	484	747	816	2.555	703	0	5.548	0,7%
15	PELOPOR	1.447	906	1.504	770	1.043	650	0	6.320	0,8%
16	PNBK	412	1.568	1.527	4.370	287	521	0	5.785	0,8%

<sup>5</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 3-4.

17	PKPI	46	841	1.466	4.063	535	426	0	4.377	0,6%
18	PNIM	137	303	181	673	266	198	0	1.758	0,2%
19	PPDI	95	979	360	594	232	171	0	2.431	0,3%
20	PSI	95	996	678	312	163	118	0	2.362	0,3%
21	PPD	96	661	0	523	71	67	0	.418	0,2%
22	PBSD	234	753	556	1.802	328	0	0	3.673	0,5%
23	MERDEKA	0	1.863	763	178	710	0	0	3.673	0,4%
24	PATRIOT	0	0	557	395	323	0	0	4.295	0,1%
Total		63.068	196.604	163.396	140.565	85.471	73.121	45	722.225	100%

Sumber : [www.depok.go.id.pks-jabar.or.id](http://www.depok.go.id.pks-jabar.or.id)

Melihat keadaan di atas adalah bagaimana munculnya dua kekuatan politik di Depok yang dapat memprediksi kemunculan perolehan suara pada pilkada 2005 yang cukup spektakuler yang diraih oleh calon wali kota Nurmahmudi Ismail (PKS) dan Badrul Kamal (Golkar).

**Tabel 6 : Perolehan Suara dan Kursi Legislatif Partai Politik dari Daerah Pemilihan Depok pada pemilu 2004<sup>6</sup>**

No	Nama Partai	DPR		DPRD Provinsi		DPRD Kota	
		Jumlah suara	Jumlah kursi	Jumlah suara	Jumlah kursi	Jumlah suara	Jumlah kursi
1	PKS	550.837	3	187.470	1	176.858	12
2	GOLKAR	504.544	2	99.384	1	112.330	8
3	DEMOKRAT	361.601	2	113.316	1	102.777	8
4	PDI PERJUANGAN	336.594	2	73.859	1	72.647	5
5	PAN	205.245	4	63.034	0	63.929	4
6	PPP	178.687	4	48.601	0	45.281	5
7	PDS	89.111	4	26.101	0	25.929	1
8	PKB	80.592	0	20.135	0	23.731	2
Jumlah			21		4		45

<sup>6</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 5.



#### **IV.A.2 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Langsung Sebagai Produk Otonomi Daerah.**

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung yang merupakan produk dari otonomi daerah (berdasarkan UU No. 32 tahun 2004) merupakan sebuah kemajuan dari dinamika demokrasi di Indonesia. Kebangkitan demokrasi pada tingkat lokal merupakan awal dari pondasi demokrasi pada tingkat nasional. Dalam hal ini pilkada seharusnya dapat menjadikan proses pembelajaran politik bagi masyarakat secara langsung, namun demikian banyak evaluasi dan analisa yang membahas mengenai kekurangan sosialisasi dan persiapan, baik dalam aspek prosedural, material maupun kerangka yuridis atau regulasi yang kurang dipahami oleh berbagai pihak.

Kerangka yuridis pilkada adalah UUD 1945 pasal 18 ayat 4, UU Nomor 32/2004 jo. Perpu No.3/2005, PP No. 6/2005 jo. Permendagri 21/2005, Perma 2/2995.<sup>7</sup> Kerangka yuridis tersebut ternyata pada prakteknya masih banyak yang belum memahami, baik para peserta maupun sebagian anggota partai pendukung, sehingga pelaksanaan pilkada berjalan tanpa pemahaman dan sosialisasi yang matang, hal inilah yang menyebabkan mengapa masih banyak kejanggalan dan pelanggaran-pelanggaran terjadi.

Perhelatan demokrasi tersebut sepatutnya dapat menjadikan tonggak harapan baru bagi sebuah pemerintahan kota yang membawa

---

<sup>7</sup> Dikutip dari Makalah M. Amin Nurdin: Pengaturan dan Sengketa Hukum Pilkada; *Seminar Setengah Hari KPU Pangkal Pinang*; 2006. Didukung dengan wawancara di KPU Kota Depok.

kesejahteraan bagi warganya. Namun demikian pilkada masih lebih kepada permainan segelintir politik lokal.

Proses pelaksanaan pilkada secara langsung melalui beberapa tahapan melalui beberapa tahapan seperti yang telah diatur dalam ketentuan UU No. 32 tahun 2004 pasal 65 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pilkada dilaksanakan melalui dua rangkaian pertahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan meliputi empat kegiatan; *pertama* pemberitahuan DPRD kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; *kedua* perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tatacara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; *ketiga* pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS, *keempat*, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.<sup>8</sup> Untuk tahapan pelaksanaan pilkada ini sendiri terdiri dari; *pertama* penetapan pendaftaran pemilih; *kedua* pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; *ketiga* kampanye; *keempat* pemungutan suara; *kelima* penghitungan suara; dan yang *keenam* penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesagan dan pelantikannya.

Calon yang akan diajukan adalah berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (1) dan (2) adalah pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang diajukan oleh partai politik yang atau koalisi partai politik sesuai persyaratan tertentu yang ditetapkan. Syarat yang terpenting adalah

---

<sup>8</sup> Informasi ini merupakan wawancara mendalam dengan anggota KPU Kota Depok; sebagai Ketua Bidang Kampanye, Pendaftaran Pemilih dan Sengketa Hasil Pilkada. M. Amin Nurdin.

calon harus dari partai politik atau gabungan dari partai-partai politik serta persyaratan pengajuan calon parpol atau gabungan parpol.<sup>9</sup>

**Tabel 7 : Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dalam Berbagai Masa<sup>10</sup>**

No.	Undang-Undang	Prinsip Dasar	Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
1.	Undang-undang Nomor 1 tahun 1945	<p>A. Membentuk Komite Nasional keresidenan, Kota beronotomi dan kabupaten serta daerah-daerah kepala lain yang diperlukan Surakarta dan Yogyakarta dan Menteri dalam Negeri</p> <p>B. Komite Nasional Daerah selanjutnya dijadikan badan perwakilan rakyat daerah (BPRD).</p> <p>C. Tugas utamanya BPRD menjalankan pekerjaan</p>	Dipilih oleh Dewan

<sup>9</sup> Diambil dari BAB IV. Pemilihan Kepala Daerah, pada bagian pembahasan mengenai *Analisis terhadap sistem pelaksanaan pilkada langsung*, oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)

<sup>10</sup> Diambil dari BAB IV. *Pemilihan Kepala Daerah*, pada bagian *Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Analisis terhadap sistem pelaksanaan pilkada langsung*, oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)

		<p>mengatur rumah tangga daerahnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih tinggi daripadanya (pasal 2). Dalam hal ini termasuk membuat peraturan daerah dan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari pemerintah pusat di atasnya.</p> <p>D. KND memilih beberapa orang, sebanyak-banyaknya 5 orang sebagai badan eksekutif, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah melaksanakan pemerintah Daerah.</p> <p>E. Ketua BPRD dijabat rangkap oleh Kepala Daerah sebagai kepala badan eksekutif.</p>	
--	--	---	--

2	<p>Undang-undang Nomor 22 tahun 1948</p>	<p>A. Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah.</p> <p>B. Ketua dan wakil Ketua dewan perwakilan rakyat daerah dipilih oleh dan dari anggota DPRD</p> <p>C. Kepala Daerah menjabat Ketua dan anggota Dewan pemerintah Daerah.</p>	<p>Kepala Daerah dipilih oleh Pemerintah Pusat dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD berhak mengusulkan pemberhentian seorang Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.</p>
3.	<p>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957</p>	<p>A. Perubahan daerah otonom swapraja menjadi daerah swantatra dan daerah istimewa, dimana pembagian daerah tersebut dibagi menjadi 3 tingkat.</p> <p>B. Hubungan pusat dan daerah.</p> <p>C. Sistem otonomi rill</p> <p>D. Pemerintahan Daerah terdiri dari DPRD dan DPD.</p> <p>E. Kekuasaan tugas dan kewajiban DPRD semakin</p>	<p>1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD</p> <p>2. Kepala Daerah tingkat satu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden</p> <p>3. kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh</p>

		luas.	Menteri Dalam Negeri dan otonom daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan
4	Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965	<p>A. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>B. Kepala Daerah melaksanakan politik pemerintah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri menurut hirarki yang ada.</p> <p>C. Kepala Daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh wakil Kepala Daerah dan badan pemerintahan harian (pasal 6).</p>	<p>1. Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.</p> <p>2. Kepala Daerah Tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p> <p>3. Kepala daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri dalam Negeri dan otonomi daerah, dan calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan</p>

		D. DPRD mempunyai pimpinan yang terdiri dari seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang jumlahnya menjamin ”propos nasakom”.	
5.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974	<p>A. Otonomi Nyata dan bertanggung jawab,</p> <p>B. Pembagian daerah dibagi menjadi dua daerah yaitu daerah tingkat I untuk wilayah propinsi dan daerah tingkat II untuk wilayah Kabupaten/Kotamadya.</p> <p>C. Bentuk dan susunan Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah DPRD</p>	<p>1. Kepala daerah dipilih oleh DPRD</p> <p>2. Kepala daerah tingkat I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.</p> <p>3. Kepala Daerah tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi daerah, dari calon-calon yang diajukan oleh DPRD yang bersangkutan</p>
6	Undang-undang	A. Wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam	Kepala daerah dipilih dan bertanggungjawab

	<p>Nomor 22 Tahun 1999</p>	<p>daerah propinsi, Kabupaten, dan kota yang bersifat otonomi.</p> <p>B. Daerah-daerah otonom propinsi, kabupaten/kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki sebagaimana ditentukan pada pasal 4.</p> <p>C. Daerah otonom propinsi berkedudukan juga sebagai daerah administrative.</p> <p>D. Kepala Daerah Proponsidipimpin oleh seorang Gubernur, Kepala Daerah kabupaten adalah bupati, kepala daerah kota adalah wali kota.</p> <p>E. Di daerah dibentuk DPRD sebagai sebagai badan Legislatif daerah.</p> <p>F. Pemerintah Daerah terdiri</p>	<p>kepada DPRD</p>
--	--------------------------------	--	--------------------



		<p>dari Kepala Daerah dan perangkat daerahnya.</p> <p>G. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi, bupati dan walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota</p>	
--	--	--	--

Sumber : [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net) oleh Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

Problem yang kerap muncul diberbagai pelaksanaan pilkada dengan aturan-aturan demikian adalah mengenai ketidakpuasan sejumlah pihak terhadap pelaksanaan dan verifikasi yang dilakukan oleh KPUD, kemudian tidak adanya upaya hukum yang diambil untuk menggugat keputusan KPUD yang bersifat final dan mengikat ini. Untuk menghadapi permasalahan yang sering muncul ketidakpuasan para pihak, maka diperlukan kejelasan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akuntabilitas dan transparansi KPUD di dalam proses tahapan ini KPUD hendaknya menjelaskan kepada publik dan kepada para peserta mengenai kriteria dan hasil verifikasi.

Permasalahan lainnya adalah dengan tidak adanya upaya hukum, penetapan kata-kata “final dan mengikat” dari keputusan penetapan calon

ini dapat dipahami sebagai bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh undang-undang supaya tidak ada kesimpangsiuran dari tafsiran keputusan yang dibuat KPUD. Namun dengan waktu yang sempit dan kemampuan serta fasilitas yang tidak memadai ada kemampuan KPUD dapat melakukan kesalahan dalam proses verifikasi. Dengan demikian batasan waktu dan kejelasan mekanisme pelaksanaan serta terpenuhi hak hukumnya semua pihak maka jadwal pilkada dan pelanggaran-pelanggaran dapat diminimalisasi.

Pelaksanaan kampanye juga memerlukan perhatian yang cermat pada dua hal,<sup>11</sup> yaitu terkait dengan bentuk kampanye dan akuntabilitas dana kampanye. Teknis dan bentuk kampanye telah diatur oleh UU No. 32 tahun 2004 pada pasal 75 sampai pasal 82 yang mengatur mengenai teknis, rentang waktu, pelaksanaan, jadwal kampanye, media yang digunakan dan larangan-larangan yang diberlakukan selama pelaksanaan kampanye.

Pada tahapan ini sering terjadi bentrokan fisik dan kerusuhan. Namun demikian tahap ini merupakan wadah pendidikan komunikasi politik bagi masyarakat lain.

#### **IV.A.3 Dinamika Pilkada Depok 2005: dalam Perspektif Ekonomi Politik**

Kota Depok baru berusia enam tahun sebagai sebuah kota, namun demikian demokrasi secara langsung telah mewarnai kehidupan politik

---

<sup>11</sup> Diambil dari BAB IV. *Pemilihan Kepala Daerah*, pada bagian *Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Analisis terhadap sistem pelaksanaan pilkada langsung*, oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dan ditampilkan di [www.parlemen.net](http://www.parlemen.net)

masyarakatnya. Seiring dengan menjamurnya lokasi-lokasi pemukiman, maka tidak dapat dipungkiri pertambahan populasi penduduknya bertambah dengan adanya para pendatang. Mobilitas yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat menambah gairah politik Depok bergitu bergejolak, dilain itu adanya kehadiran partai Baru PKS yang sebagian besar berasal dari kader-kader pengajian-pengajian, yang banyak diikuti oleh para mahasiswa; memiliki potensi, dinamis dan tanggap dalam masalah-masalah politik.

Pikada yang dilaksanakan pada 26 Juni 2005 yang diikuti oleh lima pasang calon, yaitu Abdul Wahab-Ilham (Partai Demokrat), Harun-Heryana-Fakhan AR (PAN), Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad (Golkar), Yus Ruswandi-Soetadi Dipowongso (PDI-P), dan Nurmahmudin Ismail. Pada saat kampanye poster dan spanduk hanya didominasi oleh dua pasangan spektakuler tersebut.

Pikada Depok tak ubahnya dengan pemilu yang lainnya, dimana pada saat menjelang pikada 2005 isu-isu bermainnya politik uang untuk mendukung kandidat tertentu dengan bantuan dana kampanye yang besar demi memuluskan jalan kandidat menjadi wali kota. Dan anggapan ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam praktek-praktek *sharing power* didalam setiap pemilihan kepala daerah. Pada akhirnya *savety cost* yang harus dibayar dalam politik balas budi ini pun dapat membebani para pemenang jika kemenangan mereka merupakan sokongan dari pihak lain. Dalam perspektif ekonomi politik tidak jarang investasi pada investor

terhadap pemerintahan daerah juga tidaks edikit, hal ini artinya akan berhubungan dengan tender-tender dan keluarnya yang bernilai ekonomi tinggi. Dari perspektif ekonomi-politik bukan tidak mungkin para pemilik modal yang sangat berpentingan ikut bermain dalam pemilihan Wali Kota Depok. Daya tarik ini bagi investor merupakan hal yang sangat menguntungkan karena Kota Depok saat ini sedang terus membangun berbagai infrastuktur yang bernilai ekonomi nagi para investor. Bagaimanakah jalannya persengketaan Pilkada Depok, berikut ini akan dijelaskan mengenai **kronologi jalannya Nurmahmudi Ismail menuju kursi Wali Kota Depok**. Seperti tabel berikut ini :

**Tabel 8: Jalam Terjal Nutmahmudi Menuju Posisi Orang Nomor satu di Depok**

No.		
1.	26 Januari 2005	Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung
2.	5 Juli 2005	Hasil akhir penghitungan suara, pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra unggul dengan perolehan suara 232.610 (43,9%) disusul dengan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad 206.781 suara (39%)
3.	11 Juli 2005	Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad mengajukan gugatan terhadap KPUD menyangkut hasil pilkada Kota Depok.
4.	3 Agustus 2005	Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) memenangkan gugatan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad
5.	11 Agustus	Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan

	2005	menegaskan, putusan PT Jabar soal Pilkada Depok bersifat final.
6.	16 Agustus 2005	KPUD Kota Depok, secara resmi mendaftarkan memori Peninjauan Kembali (PK), ke MA
7.	16 Desember 2005	Putusan MA memenangkan Nur Mahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra sebagai Walikota/Wakil Wali Kota Depok
8.	3 Januari 2006	Gubernur Jabar, Danny Setiawan, menerima surat tembusan dari DPRD Depok perihal terpilihnya pasangan Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra dan akan segera merekomendasikannya kepada Mendagri.
9.	17 Januari 2006	Mendagri mengeluarkan surat keputusan pemberhentian pejabat wali kota dan pengesahan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok
10.	18 Januari 2006	Mahkamah Konstitusi (MK), menggelar sidang uji materiil terhadap putusan MA yang membatalkan putusan PT Jabar yang memenangkan Badrul-Syihabuddin
11.	25 Januari 2006	MK menolak permohonan Badrul Kamal agar menguji materi putusan MA
12.	26 Januari 2006	Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra dilantik sebagai wali Kota dan Wakil wali Kota Depok periode 2005-2010

*Sumber: Suara Pembahasan 26 Januari 2006; yang diambil dari Litbang Suara pembaharuan*

Penolakan MK atas permohonan pasangan calon Walikota Depok pasangan Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad untuk uji materi putusan MA tang mengabulkan PK KPUD; menurut majelis MK yang diketuai Jimly Asshiddiqie dalam putusannya, dengan alasan bahwa putusan MA bukanlah kewenangan konstitusional MK seperti yang tercantum dalam pasal 25 C ayat (1) dan ayat (2) UUD1945 jo UU No 24/2003 tentang MK. Dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon. Permohonan uji materiil ini oleh kuasa hukum Badrul Kamal; Albert M Sagala berdasarkan pertimbangan, bahwa putusan MA yang telah mengabulkan PK KPUD Depok akan menjadi yurisprudensi yang setara atau bahkan lebih kuat dari undang-undang.<sup>12</sup>

Mengingat hak konstitusional tersebut diperoleh dari putusan PT Jabar dimana didalam mengadili sengketa tersebut tidak melaksanakan wewenangnya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 106 UU No 32/2004 tentang Pemda. MA sebagai pemberi delegasi sudah tentu dapat mengadili sendiri sengketa hasil perhitungan suara Pilkada Kota Depok sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ketentuan Pasal 106 UU Pemda. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dikatakan oleh MK putusan MA tidak bertentangan dengan UUD 1945.<sup>13</sup>

Membicarakan kasus hukum di atas tidak terlepas pada tahapan pelaksanaan yang perlu dicermati. Karena pada tahap pendaftaran pemilih

---

<sup>12</sup> Diambil dari Koran Suara Pembaharuan; dengan judul berita: *Akhirnya Nur Mahmudi Jadi Wali Kota Depok*, 26 Januari 2006.

<sup>13</sup> Diambil dari Koran Suara Pembaharuan; dengan judul berita: *Akhirnya Nur Mahmudi Jadi Wali Kota Depok*, 26 Januari 2006.

merupakan tahap yang paling mungkin terjadi berbagai kecurangan. Pada tahap pendaftaran ini terdapat indikasi kecurangan. Misalnya di sejumlah tempat, ada terjadi konspirasi antara aparat kelurahan dan petugas pendaftaran ditingkat RT untuk mendukung akndidat tertentu. Kecurangan-kecurangan tersebut dalam beberapa bentuk; pengandaan data pemilih; dengan cara panitia pendaftaran pemilih (pantarlih) mendaftarkan seorang pemilih lebih dari satu kali, yang kedua; membuat data pemilih fiktif, dengan cara mendaftarkan sejumlah nama calon pemilih padahal nama tersbeut sudah tidak ada atau meninggal, mengontrak rumah dan bisa juga sudah pindah. Pemilih fiktif ini cukup ditemukan di sejumlah daerah. Ketiga, tidak mendaftarkan calon pemilih yang diprediksi merupakan pendukung kandidat lain, hal ini terjadi karena petugas telah diarahkan oleh oknum aparat untuk berpihak dan mendukung kandidat tertentu. Misalnya di Perumahan Mentari permai cukup banyak warga yang tidak mendapatkan hak pilihnya padahal mereka sudah tinggal 2-4 tahun di wilayah itu.<sup>14</sup> Hal ini ada hubungannya karena Perumahan Bumi Mentari, Pondok Petir, sebagian Sawangan, memang dikenal sebagai basis pendukung PKS.

Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa dan beberapa penduduk Depok; bahwa Tim Badrul Kamal menjanjikan jika ia terpilih maka kedudukan lurah dan camat tidak akan digeser dan digantikan untuk masa jabatan yang datang. Ini juga terjadi bagi para pejabat, sehingga

---

<sup>14</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 34.

Badrul Kamal banyak mendapat dukungan. Prilaku lurah disejumlah tempat juga berdasarkan berita pada koran-koran menjadikan membenaran hal ini memang terjadi. Seperti yang diberitakan Republika pada tanggal 5 januari 2006, halaman 3; munculnya pernyataan sikap Paguyuban Lurah (PL) se-Kota Depok yang menolak keputusan MA.

Dalam perspektif ekonomi politik internasional ternyata Depok sebagai kota yang kecil dipandang oleh hegemoni Negara pusat, telah terjadi sebuah wacana mengenai kehadiran salah seorang utusan Kedutaan Besar AS; staf dari bagian Political Officer Firt Secretary, David R. Greenberg. Dalam tugas yang katanya sebagai sarana untuk melihat pemilihan secara langsung atau proses demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Mengapa Depok ? Adakah hubungannya dengan adanya Partai Islam. Mengingat Depok merupakan basis PKS, dan PKS telah memenangkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2004; dengan mendapatkan 12 kursi di DPRD, dan dukungan suara 176.856 dari total suara 722.225 dengan dengan prosentase 24,49 persen dai seluruh perolehan suara.<sup>15</sup> Pemilu ini diikuti oleh 24 partai-partai politik.

Namun demikian kader-kader Golkar dan kekuasaan masih sangat kental bermain dalam kancah politik lokal. Dengan sepak terjang Golkar selama dasawarsa telah membangun kekuasaan rezim Orde Baru yang mapan, maka dapat dipahami jika sebagian besar aparat pemerintah, dari

---

<sup>15</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 34-35.



pusat sampai ke daerah, masih terdominasi oleh kader-kader Golkar. Peta politik lokal ini masih bisa terasa dalam pilkada secara langsung.

Bahkan berdasarkan informasi dari sebuah sumber; kemenangan PKS atau Nurmahmudi di Depok masih banyak mengalami tantangan. Mereka lawan politik Nurmahmudi mengatakan Nurmahmudi boleh menang tapi dalam pelaksanaan pemerintah di Depok jangan harap kami mendukungnya. Hal inilah yang menjadi pemikiran mengapa hingga saat ini hasil-hasil kerja Wali Kota tersebut dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Depok. (Lebih jelasnya dapat dilihat ada lampiran hasil wawancara dengan anggota PKS).

#### IV.A.4 Profil Lima Pasangan Kandidat Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Depok 2005<sup>16</sup>

**Tabel 9 : Nama Kandidat Walokota , Asal Partai dan Jabatan**

<b>Nomor Urut</b>	<b>Nama Pasangan Kandidat</b>	<b>Partai Yang Mengajukan</b>	<b>Jabatan Yang Pernah Diemban dan keanggotaan dalam Organisasi politik dan Sosial</b>
1.	Abdul Wahab- Ilham Wijaya	Partai Demokrat	
2.	Harun Heryana- Farkhan A.R	Koalisi partai Amanat Nasional, PBB, PBR,	Farkhan A.R.: Putra tokoh Muhammadiyah,

<sup>16</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 21.

		PKPI, dan PKPB	mendian K.H. A.R. Fakhruddin
3.	Badrul Kamal-Syihabuddin Ahmad	Koalisi partai Golkar dan PKB	Badrul Kamal; tokoh Golkar, mantan Walikota Depok (2000-2005) Syihabuddin Ahmad; anggota DPRD Depok dari PKB, ketua Dewan Syuro DPC PKB Depok
4.	Yus Ruswandi-Soetadi Dipowongso	Koalisi PDI Perjuangan, PPP, dan partai Damai Sejahtera	Yus Ruswandi; mantan Wakil Walikota Depok era Badrul Kamal
5.	Nurmahmudi Ismail-Yuyun Wirasaputra	PKS	Nurmahmudi Ismail : Presiden PK, mantan Menteri Kehutanan di era pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yuyun Wirasaputra; Camat Beji Asisten Daerah Kota Depok, Mustasyar Nadlatul

			Ulama Cabang Kota Depok
--	--	--	----------------------------

Dari lima calon pasangan yang diajukan oleh partai-partai politik di atas, terdapat dua calon yang bersaing secara ketat baik dari perolehan suara maupun popularitasnya di tingkat lokal maupun nasional, mereka adalah Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail, yang merupakan calon yang diusung oleh dua partai yang sangat kontroversial. Golkar yang mengusung Badrul Kamal merupakan partai yang cukup kuat dan populer, sedangkan PKS merupakan partai kecil yang nampaknya mempunyai peluang untuk menjadi besar jika melihat perolehan suara di legislatif baik pada tingkat kota maupun pusat.

Dengan tampilnya pasangan yang spektakuler tersebut pilkada Depok 2005 seperti hanya merupakan pertarungan politik antara kubu Nurmahmudi Ismail dan kubu Badrul Kamal. Pertarungan ini pun tak lepas dengan posisi Golkar dan PKS dalam pemerintahan di Depok, dimana PKS di DPRD Kota mendapat 12 kursi, DPRD Provinsi 1 kursi dan DPR 3 kursi. Sedangkan Golkar di DPRD Kota mendapat 8 kursi, DPRD provinsi 1 kursi, dan DPR 2 kursi. Dari 45 kursi legislative yang tersedia PKS berhasil meraih 12 kursi. Golkar hanya 8 kursi dan yang lainnya partai Demokrat 8 kursi, PDI P dan PPP masing-masing 5 kursi,

PAN 4 kursi, dan untuk PKB dan PDS masing-masing 2 kursi dan 1 kursi legislative di Kota Depok.<sup>17</sup>

Dalam peta politik di Depok, persaingan antara PKS dan Golkar sangat kencang, PKS mempunyai konstituen yang sangat loyal dan memiliki citra yang baik di mata masyarakat, sedangkan Golkar eksistensinya masih terasa kental dengan lobi-lobi politik yang cukup baik dan jaringan birokrasi yang sangat kuat serta sumber dana politik yang sangat signifikan ini juga berpengaruh pada 'kesempatan' Golkar dalam meraih posisinya di Depok. Namun walaupun pada akhirnya PKS memenangkan pilkada 2005, kekuasaan Golkar masih dirasakan sangat kental. Hal ini merupakan kelebihan partai Golkar dalam membangun peta politik di Indonesia.

#### **IV.A.5. Tinjauan Sejarah: Dinamika Politik dan Sistem Pers di Indonesia**

Dunia pers memang selalu menjadi penting untuk dijadikan wacana aktual, karena sistem politik yang berlaku selalu menjadi rujukan sistem pers yang diberlakukan oleh suatu negara. Terdapat dua perspektif kaitan pers dengan politik. Pertama, pers dipandang sebagai sumber kekuatan perubahan yang sangat mempengaruhi kehidupan politik misalnya dalam studi propaganda dan opini publik. Kedua, pers memiliki ketergantungan dari kehidupan politik, dapat dilihat dalam studi mengenai sistem pers dan pembangunan.

---

<sup>17</sup> Sumarno, *Drama Politik Pilkada Depok; Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*, (Bandung: Harakatuna Publishing, 2006), hlm: 8-10.

Berikut akan dijabarkan perkembangan pers Indonesia yang ditinjau secara ringkas, khususnya yang menyangkut hubungan antara pers dengan pemerintah sejak zaman Kolonial yang diadopsi dari tulisan Yasuo Hanzaki: 1998, yang memuat beberapa klasifikasi perkembangan.<sup>18</sup>

### **Klasifikasi Perkembangan**

Siebert, Peterson dan Schramm, menegaskan pers memiliki kemampuan bergerak cepat dan efisien terhadap struktur sosial-politik dimana dia berpotensi. Kedua pada masa singkat di tahun 1950-an, ketika pers Indonesia berada pada kerangka kerja yang disebut Sistem Pers Otoriter. Perkembangan sejarah hubungan antara pers Indonesia pemerintah dapat dibagi ke dalam dua periode. Pertama, semakin bebasnya pers dari kontrol negara hingga tahun 1957. dan kedua, semakin luasnya kontrol negara terhadap pers yang membuat pers menciut. Hanazaki membagi kedua periode menjadi delapan tahap; tahap pertama sampai keempat menjadi periode pertama. Tahap kelima sampai kedelapan menjadi periode kedua.

#### **IV.A.5.A. Tahap Pertama : Era Kolonial (sampai pada akhir abad 19)**

Pemerintah kolonial Belanda menerbitkan surat kabar berbahasa Belanda. Diikuti oleh masyarakat Indo Raya dan Cina juga menerbitkan surat kabar dalam bahasa Belanda dan Cina juga bahasa daerah. Pada saat

---

<sup>18</sup> Diambil dari buku: *Pers Terjebak*, Karya Yasuo Hanazaki (terjemahan), judul asli: *The Indonesia Press in the era of Keterbukaan: A Force for Democratization*, 1998: 5-15.

itu orang Indonesia tingkat pendidikannya masih rendah dan tingkat ekonomi juga belum memadai; ini menjadi alasan ketidakmampuan untuk menerbitkan surat kabar.

#### **IV.A.5.B Tahap Kedua : Era Perjuangan Kaum Nasionalis (Awal Abad 20 sampai tahun 1945).**

pada tahap ini kekuatan nasionalisme sedang tumbuh bergerak maju. Sejarah pers Indonesia mencatat untuk pertama kali; lahir surat kabar yang dibiayai, disunting, diterbitkan oleh etnis Indonesia. Surat kabar kedaerahan menjadi pengobar nasionalisme. Dibawah kolonial telah mencetak pengalaman bagi wartawan tan pers mengawali pers perjuangan.

#### **IV.A.5.C Tahap Ketiga : Masa Transisi Pertama (1942-1945)**

Pada masa-masa transisi dari perjuangan Belanda menjadi Republik Indonesia lalu dibawah penjajahan Jepang; situasi politik mengalami perubahan-perubahan yang sangat mengejutkan. Dalam era pendudukan jepang ini, pers Indonesia belajar tentang kemampuan media massa sebagai alat mobilitas massa untuk mencapai tujuan tertentu. Pada era ini pers Indonesia mengalami kemajuan dalam hal teknis, bersamaan dengan ini mulai diberlakukan izin penerbitan pers, sebagai sarana kontrol yang dilakukan oleh pemerintah Jepang.

#### **IV.A.5.D Tahap Keempat : Era Pers Partisipan (1945-1957)**

Semangat kemerdekaan yang menggebu menimbulkan masalah yang berawal dari semangat kebebasan. Semangat yang menjiwai perjuangan kemerdekaan pun mulai memudar, timbul persaingan keras antar kekuatan politik. Pers Indonesia ikut larut ke dalam arus itu, terjadi perubahan watak dari pers perjuangan menjadi pers partisan. Pers telah menjadi corong partai politik. Meskipun pers bersifat partisan, bisa dikatakan periode ini dikatakan oleh Hanazaki adalah “masa bahagia yang singkat” buat kebebasan pers, khususnya untuk wartawan politik.

#### **IV.A.5.E Tahap Kelima : Era Pers Terpimpin (1957-1965)**

Periode demokrasi terpimpin diberlakukannya “Undang-Undang Darurat Perang”, pers pun mengalami era terpimpin. Presiden Soekarno memerintahkan pers untuk setia kepada ideologi Nasakom serta memanfaatkannya buat mobilisasi rakyat, Soekarno tidak ragu-ragu untuk melarang surat kabar yang menentangnya. Di bawah pemerintahan Soekarno. Surat kabar kaum komunis tumbuh subur. Namun hal ini memunculkan perlawanan dari kelompok surat kabar (sayap kanan) nasionalis, yang mengatasnamakan Badan Pendukung Soekarno (BPS). Terjadi konflik sayap kanan dengan kelompok kiri yang tak terelakkan. Soekarno lebih memihak kaum kiri, yang mengakibatkan dilantang terbitnya surat kabar dari golongan kanan atau anti komunis. Dan era ini disebut sebagai periode akhir dari perjuangan pers partisipan.

#### **IV.A.5.F Tahap Keenam : Masa Transisi Kedua (1965-1974)**

Awal pemerintahan Orde Baru, sebelum Soeharto melakukan konsolidasi kekuasaannya, pers cukup mendapatkan kebebasan. Namun pada tahun 1970, pemerintah mulai melakukan politik campur tangan dalam pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ini berarti, pemerintahan mulai melaksanakan aturan yang mengikat untuk mengendalikan pers. Hanazaki menjabarkan bahwa periode ini merupakan masa transisi kedua, dan dikatakan dimulainya kebijakan pers di era Soekarno yang ketat menuju pers era Soeharto, yang memiliki jargon “Pers Pancasila” inilah masa singkat yang penuh keterbukaan bagi pers sepanjang awal pemerintahan Orde Baru. Ini terjadi karena saat itu basis kekuasaan Soeharto belum terkonsolidasi secara penuh.

#### **IV.A.5.G Tahap Ketujuh : Era Bisnis Pers (1974-1988)**

Peristiwa kerusuhan Malapetaka 15 Januari 1974 (Malari) mengawali terjadinya pembredelan pers, mengakibatkan pers yang tadinya vokal, menjadi ketakutan. Kontrol dan pengekangan terhadap pers terus berlanjut. Pers Indonesia semakin bisa dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah setelah sejumlah surat kabar dilarang terbit pada 1978, karena adanya pemberitahuan gerakan mahasiswa anti- Soeharto. Dijelaskan pada periode ini pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang berimbas pada semakin terbukanya pasar bagi industri surat kabar. Ironisnya, sebagian besar pers yang berhasil mengembangkan



bisnisnya, ternyata sangat hati-hati dalam mengungkapkan pandangan politiknya. Ini, karena penguasa senantiasa menyatakan tidak ragu-ragu untuk memberangus surat kabar yang bertentangan dengan pemerintah baik secara sembunyi atau terang-terangan.

#### **IV.A.5.H Tahap Kedelapan : Masa Transisi Ketiga (1989 -1997)**

Perubahan sistem politik pada akhir tahun 80-an, makasituasi politik juga mengalami perubahan; kekuasaannya militer dalam politik mulai dikurangi, orang-orang sipil mulai lebih tegas, kelas menengah semakin bertambah. Perubahan ini merupakan produk kebijaksanaan perkembangan politik Orde Baru. Dijelaskan bahwa hal ini terjadi karena Soeharto akan mencapai usia tujuh puluh tahun pada tahun 1991, saat itu muncul perkiraan perubahan di tubuh rezim Orde Baru hanya menunggu waktu. Dikatakan juga saat terjadi keterbukaan politik sejak 1989 merupakan tanda akan adanya perubahan, namun tidak demikian, pergeseran tersebut ternyata tidak diikuti dengan perubahan kebijakan pers Orde Baru. Era “keterbukaan” memang menggerakkan aktivitas pers tidak dihapus. Faktor yang mendorong era keterbukaan semakin diperluasnya akses informasi. Ini merupakan pers dalam posisi dilematis: si satu sisi pers harus berhadapan secara konfrontatif dengan kontrol ketat pemerintah ini merupakan alasan ekonomi juga. Hal ini juga diperparah dengan partisipasi agresif dari kalangan bisnis yang ikut terjun dalam industri pers.

#### IV.A.5.i Pers Masa Reformasi (1998-)

Sejak Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, pers Indonesia memang telah berubah. Perubahan ini dilihat karena beberapa ketentuan yang membelenggu kebebasan pers tersebut. Misalnya, Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) No. 1/1984, yang selama ini dijadikan alat legalisasi pembredelan. Organisasi-organisasi tunggal pers, yang semasa Orde Baru dibentuk untuk memudahkan kontrol, juga dihilangkan. Selain itu, masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan Surat Izin Umum Penerbitan Pers (SIUPP).

Akibat krisis ekonomi, ongkos produksi naik berlipat-lipat, sementara pemasukan dari iklan mengalami penurunan tajam.

**Tabel 10: Perbandingan Penggunaan Istilah dalam UU Per**

No.	UU. No. 11/1996	UU No.21/1982	UU No. 40/1999
1.	Alat revolusi	Alat perjuangan nasional	Lembaga sosial, lembaga ekonomi
2.	Alat penggerak masa	Alat penggerak pembangunan bangsa	Wahana komunikasi Massa
3.	Pengawal revolusi	Pengawal ideologi Pancasila	Media Informasi, pendidikan, hiburan, dan control sosial
4.	Pers Sosialis Pancasila	Pers Pancasila	Pers nasional, pers asing
5.	Tiga kerangka	Tujuan nasional	Memenuhi hak masyarakat

	revolusi		atas informasi, menegakkan nilai-nilai demokrasi, HAM, supremasi hukum
6.	Progresif	Konstruktif Progresif	Melakukan pengawasan, atau menghalangi kemerdekaan pers
7.	Kontra revolusi	Menentang Pancasila	Menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers
8.	Berkhianat terhadap revolusi	Berkhianat terhadap perjuangan nasional	
9.	Gotong royong atas asas kekeluargaan	Secara bersama atas asas kekeluargaan	Peran serta masyarakat
10.	Revolusi	Perjuangan Nasional	Kemerdekaan pers
11.	Ideologi Pancasila	Ideologi Pancasila	Kemerdekaan pers

Sumber : Dimuat dalam kampus, 18 Juni 2002, Dikutip dari Ibnu Hamad 2004 : hal. 64

#### IV.A.6. Profil Singkat Surat Kabar TEMPO, KOMPAS dan *Republika*

##### IV.A.6.A *Tempo*<sup>19</sup>

Dijelaskan oleh Hanzaki Koran *Tempo* adalah Koran nasional yang lahir karena adanya perjuangan untuk meraih ‘keterbukaan’ pers yang

<sup>19</sup> Diambil dari buku: *Pers Terjebak*, Karya Yasuo Hanazaki (terjemahan), 1998: 161-165. Dilengkapi dengan hasil wawancara secara langsung.

diupayakan oleh Pimpinan redaksinya yang saat itu Goenawan Muhamad dan wakil pimpinan redaksi, Fikri Jufri yang mengantarkan “pembredelan” pada tanggal 9 Juni 1994 persoalan ini menjadi fenomenal sampai keluar negeri. Pemimpin umum Tempo Eric Samola. Sebelum gugatan Goenawan Mohamad ada peranan Surya Paloh menyusun peninjauan hukum (*judicial review*) atas Peraturan Menteri Penerangan tentang pencabutan izin penerbitan. Meskipun Surya Paloh kala ia telah menjadi semacam pahlawan atau idola di antara para wartawan muda. Kemenangan Tempo di PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Negara) pada saat itu merupakan tonggak bahwa pengadilan dapat independen dari pemerintah dan menjadi pendukung kemerdekaan pers pada saat itu. Keputusan PTUN ini di Jakarta menjadi tanda perubahan ke masa depan.

Koran Tempo yang kini usianya baru mencapai tujuh tahun merupakan usia yang masih sangat muda, namun demikian gaya bahasa Tempo yang bebas dan vocal adalah merupakan cermin dari ciri khas Tempo yang memang sudah menjadi *trade mark* dan telah banyak mengesankan hati pelanggannya. Idealisme ini sangat relevan pada konteks masyarakat saat ini. Koran Tempo merupakan produk dari majalah mingguan yang terbit pertama kali, pada 6 Maret 1971, dengan oplah sebesar 20.000 eksemplar. Oplah itu meningkat pada tahun 1983 hingga mencapai 107.000 eksemplar.

Saham *Tempo* adalah gabungan dari para wartawan dan PT Pembangunan Jaya, perusahaan yang dipimpin Ciputra. Jaya

pembangunan memegang 50 persen saham Grafiti Pers yang menerbitkan *Tempo* pada saat itu. Grafiti Pers memegang 40 persen saham harian Jawa Pos Surabaya. Namun demikian pada saat tu Kelompok Tempo-Jawa Pos telah membangun sebuah kerajaan penerbitan yang sejajar dengan Kompas-Gramedia.

### **Visi**

Visi Tempo merupakan seperti yang dijelaskan oleh redaktur Ekklusif Eksekutif GendurSudarsono; yaitu dengan semangat Reformasi; Penegak Demokrasi dan HAM, untuk demokrasi terutama peningkatan kualitas demokrasi, untuk HAM yaitu penegak hukum keadilan.

### **Pimpinan Redaksi**

Penerbit Koran tempo pada saat ini adalah PT tempo Inti media Harian, Corporate Chief Editor : Bambang Harymurti, pemimpin Redaksi : S. Mahargasarie. Pj Redaktur eksekutif : Gendur Sudarsono. Redaktur Senior : Diah Purnomowati, Fikri Jufri, Goenawan Mohamad, Leila. S. Chudori, Putu Setia, Yusril Djalinus. Redaktur Utama : Burhan Solihin, Karaniya Dharmasaputra, Purwanto Setiadi, Wicaksono.

#### IV.A.6.B. Republika<sup>20</sup>

Republika adalah Koran Nasional yang dilahirkan oleh kalangan komunitas muslim bagi publik Indonesia. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari upaya panjang kalangan umat Islam, khususnya para kalangan wartawan profesional muda yang dipimpin oleh eks wartawan Tempo, Zaim Uchrowi yang telah menempuh berbagai langkah. Kehadiran Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia yang dapat menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berubah. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993. Ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu memungkinkan upaya-upaya tersebut berbuah. Republika terbit perdana pada 4 Januari 1993.

Koran Republika terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah BJ. Habibie tak lagi menjadi presiden dan dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham ini dimiliki oleh kelompok Mahaka Media.

PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi *holding company*, dan Republika berada di bawah bendera PT Republika Media Mandiri, salah satu anak perusahaan PT Abdi Bangsa. Di bawah bendera Maha Media, kelompok ini juga menerbitkan majalah Golf Digest, Koran berbahasa Mandarin Harian Indonesia, majalah Parents, majalah a+, radio Jak FM,

---

<sup>20</sup> Lihat buku: *Kompas dari Belakang ke Depan Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007: 3-11. Dan ditunjang dengan informasi dari buku; *Pers Terjebak*: Yasuo Hazaki (terjemahan), 1998: 172-175, dilengkapi dengan hasil wawancara.

dan JakTV. Mahaka Media juga melakukan kolaborasi dengan kelompok Prambors, terutama radio Female dan Delta.

Meskipun berganti kepemilikan, Republika tak mengalami perubahan visi maupun misi. Namun harus diakui, ada perbedaan gaya dibandingkan dengan sebelumnya. Sentuhan bisnis dan independensi Republika menjadi lebih kuat. Karena itu, secara bisnis Koran ini berkembang. Republika menjadi makin profesional dan matang sebagai Koran nasional untuk komunitas Muslim.

Republika pertama kali terbit dengan "desain blok" (*modular layout*) yang tak lazim, yang kini diikuti oleh semua Koran di Indonesia. Republika pun memperoleh gelar juara pertama lomba Perwajahan Media Cetak 1993. Tahun 1995, membuka situs surat kabar pertama di Indonesia. Tahun 1997, menjadi yang pertama mengoperasikan Sistem Cetak Jarak Jauh (SCJJ). Menjadi salah satu koran pertama yang menerbitkan halaman khusus daerah.

Pada 31 Januari 2000, Republika menjadi Koran pertama yang melakukan resizing. Pada umumnya Koran Indonesia menggunakan kertas ukuran sembilan kolom. Hal ini terlalu lebar dan tidak ergonomik. Di dunia pada umumnya Koran telah berubah ke ukuran tujuh kolom. Agar pembaca tak kaget, maka Republika memulai perubahannya dengan ukuran delapan kolom. Ketika seluruh Koran pada 2005 berubah ke delapan kolom, maka pada 2 Januari 2006 Republika berubah ke tujuh kolom. Tahun 2006, mulai edisi September, Republika memberi sisipan

gratis majalah olahraga Arena. Ini merupakan hal yang pertama pula bagi pers Indonesia, karena mereka dapat membeli Koran dan mendapatkan majalah sekaligus. Di Amerika Serikat, hal itu sudah lazim. Misalnya The New York Times memberikan sisipan majalah olahraga Play dan majalah umum The New York Times Magazine. Republika juga Koran pertama yang sejak awal menjadi perusahaan terbuka dan telah listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ).

## **Visi**

Republika memiliki Visi menjadikan hal utama Republika sebagai Koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejk, toleran, damai, cerdas dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat Islam yang berdasarkan pemahaman *Rahmatan Lil Alamin*.

## **Pemimpin Redaksi**

Republika telah mengalami berkali-kali pergantian pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi yang pertama adalah Parni Hardi, lalu Andi Makmur Mekka, Zaim Uchrowi, Tommy Tamtomo, Yayat Supriyatna, Asro Kamal Rokan, dan saat ini pemimpin redaksi Republika adalah Ikhwanul Kiram Mashuri.



#### IV.A.6.C. Kompas<sup>21</sup>

Yakob Oetama membagi Kompas dalam tiga periode. Pertama periode akhir masa pemerintahan Soekarno. Kedua, periode penuh kekuasaan Presiden Soeharto. Ketiga, periode Reformasi dari Presiden BJ. Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnopoetri, dan kini hasil Pemilu langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kompas, 28 Juni 2005, Jakob Oetama : 2007).

Indonesia juga berada dalam era globalisasi, ketika dalam posisi ini peranan media, termasuk Kompas sebagai mediator dan edukator masyarakatnya, tantangan yang dihadapi tidaklah ringan. Karena berhadapan dengan kemajuan dan teknologi elektronik yang mengancam media cetak, masyarakat yang semakin terdidik, kritis dan mudah sekali terjadi kemarahan sosial. Dihadapkan pada era perubahan yang sangat cepat maka Kompas menganggap peliputan tidak bisa dianggap *taken for granted*, tidak lagi sekedar *cover both sides* tetapi perlu *cover all sides*.

#### Visi dan Misi Kompas

Visi KKG (Kelompok Kompas Gramedia) yang didasarkan atas falsafah perusahaan kita, dirumuskan lebih panjang di tahun 2002, adalah "menjadi agen pembaru dalam rangka turut serta menciptakan masyarakat baru Indonesia". Misi KKG, "mencerahkan dan memajukan kehidupan bangsa menuju masyarakat baru Indonesia". Oleh karena itu KKG

---

<sup>21</sup> Diambil dari beberapa informasi dari Hamad, Ibnu. 2004: 120-123 dan website *Republika* di internet.

terutama terjun dalam upaya mencerdaskan bangsa dan memanukan kehidupan bangsa melalui usaha di bidang komunikasi, informasi dan bidang-bidang lainnya. Masyarakat baru Indonesia adalah masyarakat yang memiliki sifat menjunjung tinggi demokrasi. Keterbukaan, mengakui kemajemukan bermasyarakat tanpa membedakan SARA, profesi, watak baik dan setia kepada Negara. Hal ini yang menjadikan Kompas mempunyai pembaca yang cukup besar. Dari enam nilai dasar, maka dirumuskan visi dan misi pada tahun 2000. Visi Kompas adalah menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan nilai kemanusiaan. Misi Kompas adalah mengantisipasi dan merespons dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah perubahan (*trendsetter*) dengan menyediakan dan menyebarkan informasi yang terpercaya.

Pada akhir 2006 kedua visi dan misi disatukan sekaligus diberi jangka waktu tertentu yaitu 2007-2008. Visi dan misi Kompas 2007-2008 : menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman dan sejahtera, dengan mempertahankan Kompas sebagai *market leader* nasional melalui optimalisasi sumber daya serta sinergi bersama mitra strategis.

Ketika didirikan pada pertengahan tahun 1965 yang bertepatan tiga bulan sebelum meletusnya peristiwa 30 September 1965, Kompas banyak didukung masyarakat Katolik, termasuk Partai Katolik dan Pemuda

Katolik. PK Ojong sendiri bergabung dengan Partai Katolik. Namun, berdasarkan pengalaman bekerja di perusahaan media sebelumnya, yang akhirnya bangkrut, dia mengambil sikap sosial politiknya, yakni berjuang pada perjuangan sosialisme demokrat golongan profesional dan secara perlahan-lahan meninggalkan pengaruh politik dari Partai Katolik. PK Ojong dan Jakob Oetama lebih cenderung mendukung kelompok teknokrat dari fakultas Ekonomi Indonesia, yang dipimpin oleh Prof. Widjojo Nitisastro, kader profesional Prof. Soemitro dari Sayap Partai Sosialis Indonesia. Mereka sama-sama berjuang mengembangkan ekonomi nasional yang berorientasi pada mekanisme kerja pasar, sebuah konsep yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith di Inggris dengan bukunya yang mengubah pasar dunia : *The Wealth of Nation*. Konsep ekonomi pasar ini terus menerus disempurnakan di mana-mana termasuk teknokrat Orde Baru. Mereka bercita-cita mengembangkan sebuah sistem kapitalisme berwajah human, berkesadaran etis moral dan hidup dalam usaha mengelola kekayaan bangsa, negara dan masyarakat dalam sebuah sistem kontrol yang efektif melalui gerakan sosialisme demokrat demi tercapainya negara sejahtera (*welfare state*).

#### **IV.B. PEMBAHASAN HASIL ANALISIS WACANA KRITIS**

IV.B.1 Konstruksi Media pada Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail ; Menemukan Pesan-pesan Tersembunyi Media sebagai Hasil Temuan Riset dengan Metode CDA.

Penelitian dengan paradigma kritikal menghendaki dilakukannya multilevel analisis,<sup>22</sup> untuk menemukan ”pesan-pesan tersembunyi” yang di create oleh media di balik teks yang mereka konstruksikan. Pada hasil temuan ini akan dibahas mengenai domain-domain penelitian level demi level, dimana di dalam CDA dikenal tiga level analisis, yakni pada level teks (*text analysis*) ditemukan suatu deskripsi (*description*) mengenai isi teks ; lalu pada level proses dibuatnya teks (*processing analysis*) yang digunakan untuk melakukan penafsiran (*interpretation*) atas sebuah teks; dan pada level sosial (*social analysis*) yang membahas dan mengkaji mengenai keadaan sosial yang memberikan pengaruh dalam proses pembuatan teks. Dengan demikian berdasarkan penerapan CDA yang dilakukan pada masing-masing Koran, maka hasil yang didapat akan diuraikan seperti berikut ini :

#### **IV.B.A Kompas**

##### **1. Deskripsi (Text Analysis)**

Dari hasil analisis terhadap berita-berita tentang persengketaan pilkada Depok yang melibatkan Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail, ternyata Kompas memberikan tempat atau porsi yang tidak berimbang. Hal ini dibuktikan dengan porsi yang lebih mengenai berita-berita atau pembicaraan-pembicaraan yang dimunculkan dari kader Golkar (Badrul Kamal), meskipun pada masa reformasi Kompas banyak memunculkan

---

<sup>22</sup> Hamad, Ibnu: *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa; Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, 2004:44-45.

penolakannya pada status quo pada berita-berita politiknya, mungkin pada waktu itu sentimen negatif status quo dan ORBA pada saat reformasi memiliki nilai jual dari segi beritanya.

Pada pemberitaan persengketaan pilkada Depok, terlihat sepiantas memang hampir sama liputan yang dibuat, tetapi dari penggunaan sumber-sumber lebih banyak yang pro kepada Golkar dengan wawancara-wawancara yang dilakukan kepada Badrul Kamal. Kecenderungan adanya keberpihakan tersebut walaupun begitu halus dapat terasa dari penekanan-penekanan kalimat dan penggunaan kata-kata dan bahasa yang ada keberpihakan pada Badrul Kamal. Tetapi di lain wacana yang terlihat, mengingat para pembaca Kompas mengangkat sentimen negatif terhadap tokoh-tokoh Islam yang dapat dibidang "vokal dalam menyuarakan nilai-nilai Islam" memiliki nilai jual untuk sebagian besar pembaca setianya. Hal ini dapat dibuktikan bagaimana sikap penolakan Kompas terhadap sosialisasi UU Pornografi dan berita-berita mengenai Al-Qaeda, bagaimana konstruksi Kompas mengenai agama Islam yang sedang bergeliat ini memang ada kecenderungan memunculkan berita yang tidak memihak.

Walaupun kecenderungan Kompas dalam tulisan-tulisannya pada saat Orde Baru banyak memunculkan isu negatif seputar status Quo, namun hal ini tidak dilakukan dalam berita persengketaan pilkada Depok yang merupakan perebutan kekuasaan atau kepemimpinan lokal. Dan dalam mengangkat berita tersebut Kompas terlihat kurang antusias karena dalam liputannya Kompas tidak sedetail dan selengkap Tempo dan Republika ; ini terbukti dalam penelusuran untuk analisis level teks yang

dilakukan dari tanggal 27 Juni 2005-2006 Januari 2006 ; Kompas memuat 37 berita, Tempo 57 berita, Republika 73 berita yang benar-benar mempunyai nilai berita bagi pilkada Depok (lihat lampiran 1). Dalam hal ini Kompas bersikap tidak begitu konsen karena Kompas menganggap perseteruan pilkada Depok yang memang pada realitasnya dimenangkan oleh Nurmahmudi yang dianggap sebagai bagian dari partai yang dianggap eksklusif dan fundamental tidak memiliki nilai jual bagi pembaca setianya, sedangkan koalisi Golkar dengan partai-partai Islam konvensional dan partai lain (PAN, PKB, PPP) yang dilakukannya pada pilkada Depok tidak begitu menarik bagi Kompas dari sudut nilai beritanya.

Citra yang dibentuk oleh Kompas dan diwacanakan untuk mempengaruhi kepada pembaca mengenai sosial Badrul Kamal sebagai kader Golkar dan sosok Nurmahmudi sebagai kader PKS; yang merupakan partai pemain baru dalam politik tetapi wajib dicermati karena dukungan massanya yang cukup signifikan. Kemudian wacana ini dimunculkan kepada audiens menjadi diskusi publik dan opini serta penilaian-penilaian terhadap tokoh-tokoh tersebut tetap dibentuk atau diarahkan secara halus dengan menggunakan tanda-tanda dalam bentuk kata-kata, simbol dan gambar.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Dalam buku Alex Sobur; Analisis Teks Media; Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing, 2001: 126-127; Dijelaskan Semiotik berusaha menggali hakikat sistem tanda yang berangkat keluar kaedah tata bahasa dan sintaksis dan mengatur arti eks yang rumit, tersembunyi, dan bergantung pada kebudayaan. Hal ini kemudian menimbulkan perhatian pada makna tambahan (konotatif) dan arti penunjukkan (denotatif)-kaitan kesan yang ditimbulkan dan diungkapkan melalui penggunaan dan kombinasi tanda. Jadi semua; kata-kata, simbol-simbol adalah tanda-tanda yang memiliki makna khusus.

Seperti pada hasil analisis teks media pada tabel berikut. (Untuk lebih lengkapnya lihat pada lampiran B wacana hasil konstruksi secara keseluruhan).

**Tabel 11 : Konstruksi Kompas mengenai Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail**

Badrul Kamal	Badrul Kamal adalah mantan orang nomor satu di Depok, memiliki massa dan pengaruh yang cukup kuat, namun demikian ia menerima kealahannya dengan bijaksana.
Nurmahmudi Ismail	Nurmahmudi Ismail adalah wali kota yang kemenangannya kontroversial, merupakan kader PKS yang memiliki dukungan dari berbagai kalangan. Adalah wajar jika ia menang di Depok yang merupakan basis massa PKS.

## 2. Interpretasi (*Processing Analysis*)

Kompas merupakan Koran yang mempunyai nama yang cukup dikenal dalam level nasional dan merupakan salah satu Koran terkemuka di Indonesia. Mengamati cara Kompas melakukan konstruksi terhadap dua aktor politik dukungan PKS dan Golkar, tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok. Tetapi jika diamati dari pesan-pesan yang disampaikan akan terlihat porsi yang berlebih kepada Badrul Kamal yang merupakan partai yang sudah mapan dan sangat piawai dalam politik. Sedangkan Nurmahmudi sebagai kader PKS yang merupakan sosol yang 'tegas' dalam menerapkan nilai-nilai Islam itu menimbulkan rasa 'ketakutan' tersendiri karena banyak yang belum mengenal PKS secara dekat, hal ini mengingat PKS merupakan partai baru sekaligus mempunyai *brand image* yang

cenderung positif jika dibandingkan partai-partai Islam yang konvensional lainnya ; seperti PPPP dan PAN (yang kebanyakan dukungan dari Muhammadiyah).

Pada Pemilu 2004 yang lalu PKS juga meraih suara terbanyak di DKI hal ini juga menjadi pemikiran tersendiri bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Secara ekonomi internasional mengingat sentimen negatif dunia barat terhadap Muslim dan memang asumsi-asumsi dan *ideology* (katolik) yang mewarisi Kompas tentu dengan alasan tersebut akan menjadi hal yang sangat dipahami mengapa berita dan porsi terhadap PKS atau kadernya tidak mendapat dukungan yang lebih dalam ulasan-ulasan berita persengketaan pilkada Depok. Meskipun Kompas terlihat tidak begitu banyak mengulas dan menyajikan pilkada Depok, namun demikian secara halus sentimen *ideology* masih dapat dirasakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan strategi *framing* dimana dari 37 teks berita Kompas mengenai persengketaan pilkada Depok; hampir 90 persen pro terhadap Badrul Kamal, teks yang netral hanya 3, dan pro Nurmahmudi hampir tidak ada (untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran hasil analisis *framing* terhadap Kompas).

Dalam memahami proses produksi dan konsumsi teks. Persengketaan pilkada Depok yang melibatkan Badrul Kamal dan Nurmahmudi oleh Kompas jika dilihat dari perspektif subjektif harian ini, maka kita harus meletakkan pemahaman tentang kesejahteraan mengenai pendirinya. Kompas yang kini sudah berusia 41 tahun dan perjalanannya



yang mengalami pasang surut dan dinamikanya, telah banyak merebut hati pembacanya. Institusi ini dibangun oleh Dwitunggal PK Ojong dan Jakob Oetama dengan berbagai suka dan duka. Dalam buku dengan judul : Kompas Dari Belakang Ke Depan ; Menulis dari Dalam, 2007 : Disampaikan Keduanya membangun institusi yang berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based institution*) dengan visi ”ikut mencerdaskan dan mencerahkan bangsa serta menjadi patriot Indonesia Mini” yang sangat menghormati perbedaan pluralisme. Sehingga hal ini juga mempengaruhi Kompas dengan bahasanya yang sedikit hati-hati dan halus.

Kompas pertama kali terbit 28 Juni 1965. PK Ojong sebagai pimpinan meninggal 31 Mei 1980, yang digantikan posisinya oleh Jakob Oetama sebagai presiden direktur kedua KKG, Juni 1980. Jakoeb dalam pidato obituary, menegaskan salah satu proyek *legacy* dari senior kepada juniornya adalah paham sosialisme demokrat ; adalah paham yang telah dirintis oleh *Fabian Society* pada pertengahan abad ke-19 di London. Pada saat itu Inggris menjadi pusat gerakan *civil society* di tengah proses perubahan stratifikasi sosial secara baru dalam kelas dalam masyarakat berdasarkan pekerjaan modern (hadirnya mesin-mesin teknologi).

Sejak tahun 1945 ketika Sutat Sjahrir dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) menduduki kursi Perdana Menteri RI. Golongan intelektual yang bekerja di perusahaan media yang menerbitkan Koran *Keng Po* dan *Star Weekly* menjadi *reference-group*-dari gerakan-gerakan sosial politik

dengan berafiliasi pada PSI. Tokoh-tokoh PSI melihat kelompok *Keng Po* dan *Star Weekly* sebagai kelompok PSI Katolik dan PK Ojong sebagai aktor intelektual.<sup>24</sup>

Jakoeb Oetama adalah murid PK Ojong dalam profesi kewartawanan ketika ia bekerja di Majalah Penabur. Walaupun sebagai patner bisnis dalam mendirikan Perusahaan KKG (Kelompok Kompas Gramedia). Majalah penabur dalam konteks gerakan sosialisme demokrat tahun 1950-an (berlakunya sistem multi partai) berafiliasi secara ideologis dengan Partai Katolik. Seperti nama-nama berikut ; Ignatius Josef Kasimo, Frans Seda, Lo SH Ginting, dan kawan-kawan berada dalam gerakan sosialisme demokrat dengan berdasarkan *reference-group*-nya Partai Katolik Belanda dengan sosialismenya yang disponsori oleh Vatikan dengan ajaran Sosial Gereja di dalam proses industrialisasi abad ke-20. Majalah Penabur juga mempunyai *reference-group*-nya yaitu teologi pembebasan Amerika Latin dan Kapitalisme Jerman (CDU *fenan konrad adenauer*). Dalam gerakan sosialisme-demokrat-KKG juga berafiliasi dengan gerakan sosialisme katolik baik dari Vatikan, Amerika Latin juga Kapitalisme Sungai Rhein, Jerman.<sup>25</sup>

Kepemimpinan Jakoeb Oetama didamping oleh P. Swantoro ; tradisi sosialisme yang mempunyai warna Sosialisme Intelektual Jesuit dari Majalah Basis dan pendekatan penulisan Sejarah Sosial Indonesia

---

<sup>24</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007: xvii; Sambutan Pemimpin Redaksi; Suryopratomo.

<sup>25</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:8.

secara baru yang dirintis oleh Prof. Sartono Kartodirdjo dan jurusan Sejarah UGM.

Ketika didirikan pada pertengahan tahun 1965, Kompas banyak didukung masyarakat katolik, termasuk Partai Katolik dan Pemuda Katolik. Namun, setelah PK Ojong bergabung dengan Partai Katolik yang akhirnya bangkrut, dia mengambil sikap sosial politiknya, yakni berpihak pada perjuangan sosialisme demokrat golongan profesional dan secara perlahan-lahan meninggalkan pengaruh politik dari Partai Katolik.<sup>26</sup>

Dengan semangat humanisme yang digaungkan, Kompas dalam berbahasa juga mengutamakan atau menggunakan bahasa yang humanitis dalam menyampaikan pesan kepada khalayaknya. Bahasa yang digunakan terkesan menghindari isu-isu perbedaan, memberikan kebebasan berpikir dan memperhatikan emosi. Karena prinsip dan kehati-hatian tersebut maka strategi yang digunakan dalam mengkritik terlihat lebih santun dengan menghadirkan berbagai pilihan kepada pembaca untuk mengartikan makna. Walaupun demikian secara 'lembut' pesan-pesan dan opini publik yang dibentuknya tetap dapat tertangkap melalui penggunaan tanda baca dan pengulangan-pengulangan.

Karena bersifat 'santun' dan 'halus' Kompas dalam memunculkan persoalan atau masalah lebih cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang merupakan himbauan atau yang menjadi harapan. Namun demikian fungsi sebagai *watch dog* Kompas tetap menggunakan kata-kata yang berani

---

<sup>26</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:9.

namun tetap mengembangkan pemikiran-pemikiran yang bebas. Kompas dengan segmen pasar menengah ke atas telah menjadi sebuah Koran dapat diperhitungkan dalam peranannya secara nasional. Kompas berkembang menjadi perusahaan yang besar dengan idealisme yang menjadi semangat dan moto harian Kompas : "Amanat Hati Nurani Rakyat", yang merupakan suatu roh baru untuk konteks Indonesia masa kini yang bersumber pada prinsip *salus populi suprema lex*.

Kompas memiliki pembaca yang setia dari golongan menengah ke atas tentu hal ini juga menjadi perhitungan ; karena Kompas terkesan tidak terlalu melibatkan diri pada dunia politik karena orientasi ekonomi tetap dijaganya, terutama segmen pasar atau pasar Kompas dari kaum kristiani juga cukup signifikan disamping dukungan pembaca agar tetap sebagai pelanggan. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan Kompas. Dalam dunia media meskipun fakta dan penyampaian informasi harus dilakukan ; namun demikian alasan ekonomi tetap menjadi alasan yang utama, hal ini mengingat mutu Koran dan keberadaannya agar tetap eksis sangat ditentukan oleh segi ekonomi. Keberhasilan Kompas sebagai perusahaan media tentu ditunjang oleh asumsi-asumsi maupun nilai-nilai yang telah mengkristal dan tetap dijaga oleh anggota organisasi tersebut. Dalam lembaga Kompas, sampai saat ini 2009 tetap berdasarkan pada nilai-nilai yang disebut sebagai Nilai-nilai Dasar Kompas, yaitu :

1. Menghadapi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan martabatnya ;
2. Mengutamakan watak baik ;
3. Profesionalisme ;
4. Semangat kerja tim ;
5. Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja penerima proses selanjutnya) ;
6. Tanggungjawab sosial.<sup>27</sup>

Dari enam nilai dasar tersebut dirumuskan visi dan misi Kompas. Visi dan Misi Kompas agar lebih membumi tidak lagi dipisahkan. Keduanya telah disatukan dan diberi jangka waktu tertentu, tahun 2007-2008 : adalah ”Menjadi agen perubahan dalam membangun komunitas Indonesia yang lebih harmonis, toleran, aman dan sejahtera, dengan mempertahankan Kompas sebagai *Market Leader* secara nasional melalui optimalisasi sumber daya serta sinergi bersama mitra strategis”.

Dalam dunia media termasuk Koran dalam hal ini Kompas, Oplah Koran tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi tetapi juga ditentukan oleh faktor politis dan mutu isi Koran. Pengolahan yang baik terhadap peristiwa akan menentukan isi dari Koran tersebut. Hasil survey yang dilakukan Litbang Kompas tahun 1994, bahwa lonjakan-lonjakan oplah terjadi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa besar, menyangkut faktor *magnitude* dan dampak kemanusiaan yang ditimbulkan. Kompas melihat

---

<sup>27</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:66-67.

peluang-peluang itu, semangat dan cara kerja yang tidak hanya mempertimbangkan bisnis tetapi juga berdasarkan atas fungsi media yang berusaha menjadi *trensetter*, menjadi mitra masyarakat dan menjadi referensi mengenai duduknya persoalan. Dalam hal ini Kompas berupaya mengarahkan kepada kejelian pimpinan media mengambil posisi cerdas di tengah dinamika politik dengan tetap berusaha untuk *independent*.

Pada usia tiga bulan Kompas mencapai oplah berkisar 15.000 eksemplar. Setelah ditutup tanggal 2-5 Oktober 1965, Kompas dicetak 34.700 eksemplar pada tahun 1966. Ketika dicetak oleh PT Gramedia pada tahun 1972 kecepatan cetak ditingkatkan dua kali 20.000 per jam. Hambatan dapat diatasi oplah naik dari 115.000 menjadi 175.000 eksemplar pada tahun 1974. Saat peristiwa Malari 1974, Kompas hampir saja ditutup karena dianggap berpihak pada gerakan mahasiswa. Namun berdasarkan kecurigaan keberpihakan pada mahasiswa ini menambah "kepercayaan" (*trust*) yang merupakan dasar utama eksistensi media yang menjadikan oplahnya naik mencapai 203.925 eksemplar.<sup>28</sup>

Pada tahun 1978 saat oplah Kompas mencapai 275.000, pada tanggal 21 Januari-5 Februari Kompas ikut ditutup bersama sejumlah media lain. Penilaian rezim Soeharto terhadap Kompas yang menganggap telah ikut serta menyebarkan kebencian dan kritik pada pemerintahan Soeharto. Untuk kembali terbit para pemimpin redaksi harus menandatangani sejumlah syarat. Lewat suatu pembicaraan yang panjang

---

<sup>28</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:73.

dan pertimbangan untung rugi, terutama hilangnya kesempatan dalam proses demokratisasi dan pembredelan itu, Jakob Oetama mengambil alih persoalan meskipun dirasa cukup berat tuntutan itu karena bertentangan dengan nurani dasar media massa. Akhirnya, dia menandatangani persyaratan tersebut. Akhirnya, Kompas bersama media lain diijinkan terbit kembali pada tanggal 6 Februari 1978 dengan sejumlah syarat, yang termasuk di dalamnya mensyaratkan tidak menulis tentang kekayaan Soeharto dan keluarganya, dwifungsi ABRI, konflik sosial dan SARA.<sup>29</sup>

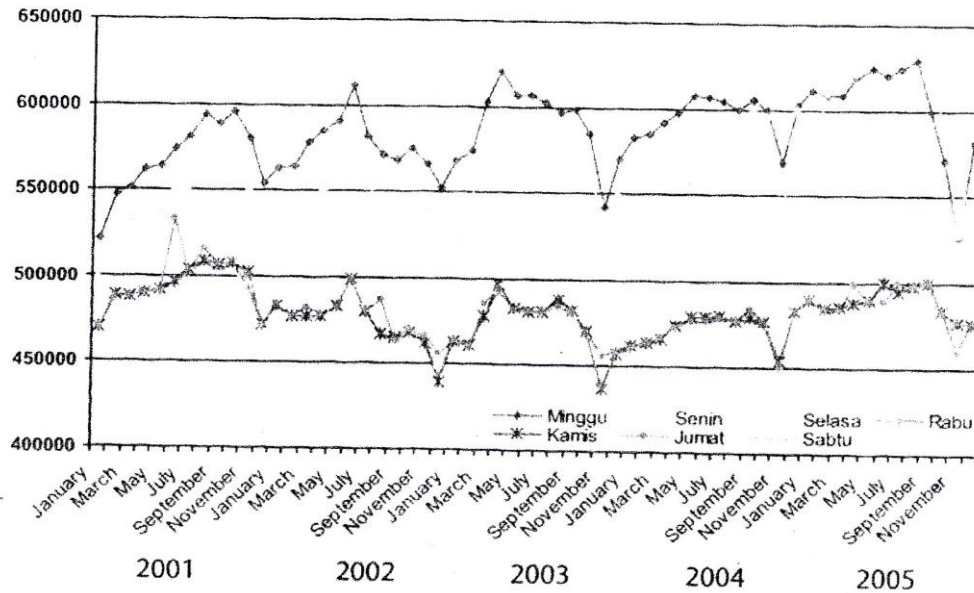
Penutupan terhadap Kompas yang hampir dua minggu ini berdampak psikologis dan finansial ; perusahaan mengalami kerugian sekitar 352.651.180,7 Oplah terbesar (750.000 eksemplar) pernah dicapai oleh Kompas, saat Kompas terbit dengan "Edisi Khusus 100 Tahun Bung Karno", 1 Juni 2001. Oplah terbesar tersebut kabarnya sampai sekarang belum pernah diraih kembali. Gambar berikut ini dapat menjelaskan uraian di atas. Gambar 13 : Grafik Oplah Kompas Kirim Harian (Senin-Minggu) Rata-rata 2001-2005.

---

<sup>29</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:73-74.

**Grafik 2**

**Oplah Kirim Harian (Senin-Minggu) Rata-rata 2001-2005**



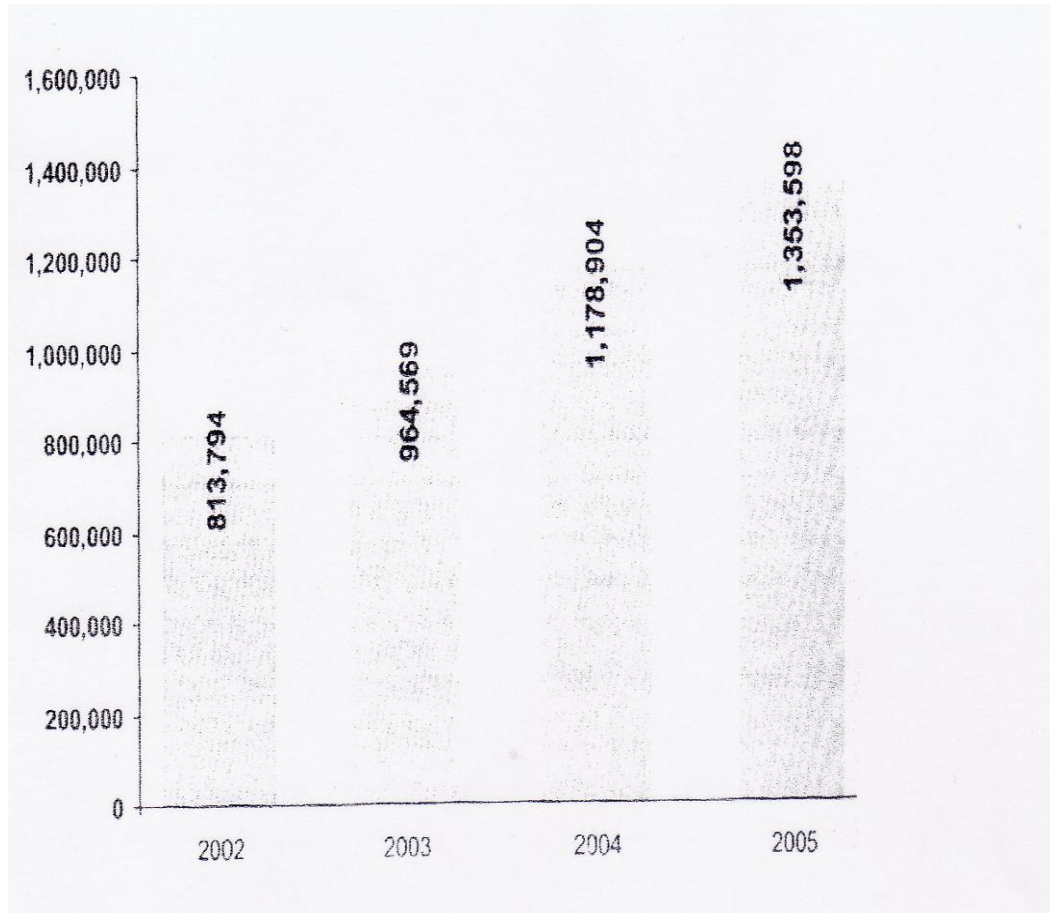
Di atas adalah grafik yang menggambarkan penerimaan iklan Kompas tumbuh secara meyakinkan. Berdasarkan pencatatan lembaga riset media, Ac Nielsen, setiap tahun, yang terlihat terus meningkat. Data empat tahun terakhir seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini dapat menginformasikan kondisi peningkatan tersebut. Jika pada tahun 2002 perolehan kotor iklan Kompas diperkirakan mencapai Rp. 813,7 miliar, dari total Rp.3,46 triliun belanja iklan media cetak nasional (23,5 persen), maka pada tahun 2005 Kompas meraih Rp. 1,35 triliun atau sebesar 19,2 persen total belanja iklan surat kabar secara nasional (Rp. 7,03 triliun) (gambar 10).



**Gambar 14 : Grafik Pendapatan Iklan Kompas 2002-2006 (AdQuest, AC Nielsen)**

**Grafik 3**

**Pendapatan Iklan Kompas 2002-2006 (AdQuest, AC Nielsen)<sup>30</sup>**

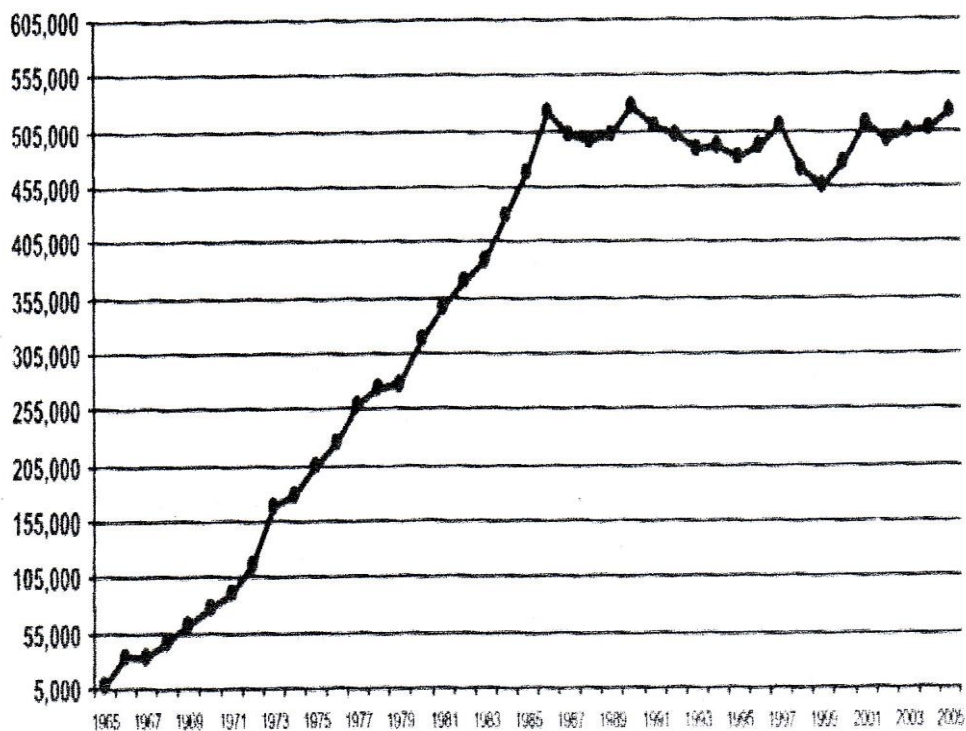


<sup>30</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:141-142.

Perjalanan Kompas dalam pergulatannya dan berbagai situasi yang terjadi yang merupakan sebuah fase yang harus dihadapi bagi tumbuhnya sebuah organisasi membuat Kompas masih tetap dapat diperhitungkan di kancah nasional. Seperti yang terlihat adanya pertumbuhan angka sirkulasi harian, misalnya pada permulaan diterbitkan pada tahun 1965 saat Kompas diterbitkan pertama kali sebesar 4.828 eksemplar, maka pada tahun 2005 mencapai angka 521.036 eksemplar. Berikut ini **Gambar 15** : Grafik perkembangan oplah Kompas dalam masa 40 tahun.<sup>31</sup>

**Grafik 1**

**Oplah Kirim Rata-rata Kompas Setiap Tahun Sejak 1965 hingga 2005**

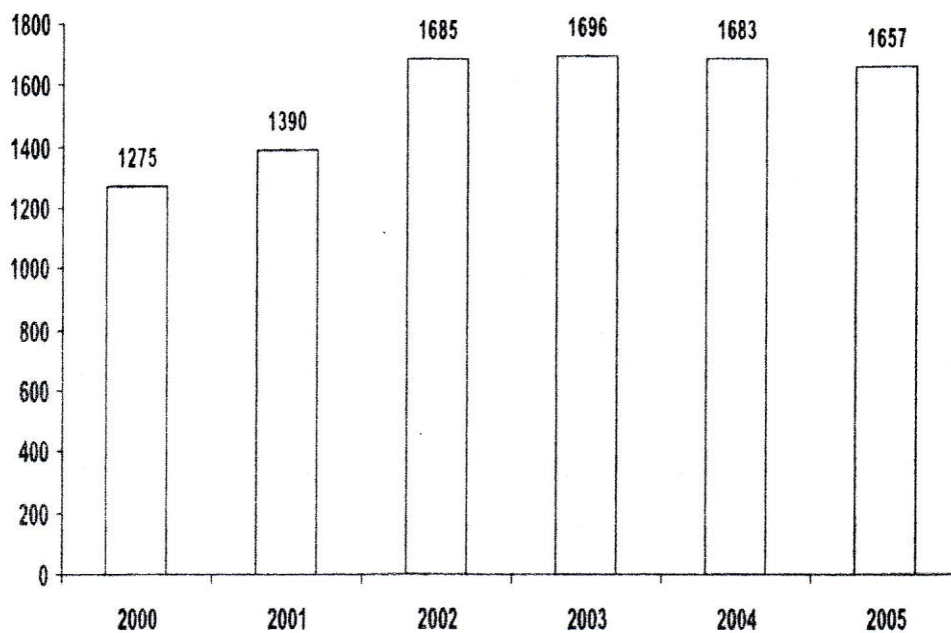


<sup>31</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:140.

Dengan adanya usaha memperkuat jaringan distribusi di berbagai daerah, terutama menangani distribusi dan peningkatan kualitas pelayanan pelanggan Kompas di berbagai kawasan perumahan baru yang tergolong kurang terjangkau oleh agen-agen konvensional surat kabar. Kompas yang selama ini tetap mengandalkan keberadaan agen akhirnya juga dapat mengalami pertumbuhan jumlah agen yang meningkat. Seperti yang terlihat pada **gambar 16**: grafik berikut.<sup>32</sup>

**Grafik 7**

**Pertumbuhan Jumlah Agen Kompas 2000-2005**



<sup>32</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:160.

Dalam menyikapi situasi politik Kompas berusaha untuk tidak larut teralu dalam, hal ini terlihat dalam pemberitaan persengketaan pilkada Depok ketika muncul persinggungan antara Golkar dan Partai Islam, Kompas tidak begitu banyak membahasnya, justru Kompas menghadirkan wacana pemikiran yang terbuka mengenai suatu peristiwa secara dialogis tentang perkembangan politik dan sistem pers dari masa ke masa. Sikap Kompas yang secara berhati-hati tidak ingin menjustifikasi dan terlihat secara terus terang berpihak pada salah satu tokoh atau partai politik tertentu, hal menjadi alasan positioning Kompas yang memang sudah mapan dan Kompas masih eksis memberikan arahan untuk perubahan. Melalui teks berita penilaian akhir mengenai tokoh atau partai maupun peristiwa dikembalikan kepada publik, namun demikian secara teliti kita dapat menemukan keberpihakan itu. Hal ini merupakan sikap Kompas dalam mempertahankan pembaca setianya. Kompas yang kini telah masuk kepada industri media dengan prinsip *humanisme transcendental*, Kompas berusaha untuk menghindari isu-isu yang menyangkut SARA dan politik. Jad, yang nampak saat ini ketidakberpihakan Kompas kepada Nurmahmudi mempunyai alasan untuk mempertahankan segmen pasar dari non Islam yang memang sudah mapan, selain itu sentimen ideologi yang telah membudaya tetap masih dapat dirasakan dalam mengcreate tulisan atau judul-judul berita dalam persengketaan Pilkada Depok.

Falsafah *humanisme transcendent*<sup>33</sup> yang selalu dikumandangkan menjadi pegangan bagi kegiatan Kompas. Falsafah ini secara nyata, dihidupkan lewat pergaulan internal. Menyatukan semua potensi yang beragam, tanpa memandang perbedaan agama, suku, serta pembatasan-pembatasan sosial lainnya. Harapannya dengan ini maka Kompas akan tumbuh menjadi wadah pertemuan antar berbagai macam pemikiran yang ada di dalam masyarakat hal ini dilakukan untuk mewujudkan tingkat perkembangan yang lebih sehat. Menurut analisa De Jong, Kompas merupakan *views-paper* dengan melengkapinya dengan usaha keras untuk selalu menggali lebih dalam fakta dan peristiwa, yang dengan melengkapi latar belakang lebih luas serta mendalam. Menurutnya, fakta tidak akan muncul tanpa konteks.

Dengan persaingan yang sangat ketat dan pemahaman politik yang berkembang di masyarakat, dalam konteks kebebasan saat ini maka Kompas mengambil peluang untuk tidak terlalu memojokkan atau memunculkan citra negatif partai politik maupun aktor-aktor politik. Pasar yang penuh tantangan dan persaingan ini memberikan peluang munculnya istilah di kalangan wartawan pekerja 'gila-gilaan', yang memiliki watak *compulsiveness* yang pantang menyerah untuk sebuah mimpi dan kenyataan. Kompas sebagai lembaga bisnis, saat ini dan ke depannya ia mengumandangkan untuk melihat ke segala arah, berorientasi pada pasar modern, pasar urban, pasar kosmopolitan dengan status ekonomi sebagai

---

<sup>33</sup> Sumber dari buku; *Kompas dari Belakang ke Depan; Menulis dari Dalam*, penerbit: PT Kompas Media Nusantara, 2007:130-131.

komunitas produsen. Di samping itu, Kompas juga menamakan dirinya sebagai produk kultural yang ditandai dengan terobosan rasional dan intelektualnya ke dalam kebutuhan-kebutuhan non fisik dengan langganan mereka yang selalu mempunyai peluang untuk berubah.

### **3. Eksplanasi (Social Analysis)**

Dari penjelasan-penjelasan dan paparan di atas, dapatlah dipahami jika Kompas tidak terlalu vocal, walaupun ada keberpihakan disampaikan secara halus untuk menghindari image negatif yang mengganggu posisi Kompas sebagai Koran nasional. Hal ini mengingat orientasi bisnis yang mengimbangi independensinya, dalam rangka mempertahankan ikatan emosional para pelanggannya. Kompas tidak terjebak dalam euforia kebebasan saat ini. Maka pemberitaan oleh Kompas selalu bersifat santun dan menjaga segi humanisme, hal inilah yang cukup memberikan nilai plus bagi strategi Kompas dalam memelihara pasar yang memang telah memilihnya. Karena tidak ingin berkecimpung dalam kepentingan politik yang lebih kepada mempertahankan segi emosi pelanggannya maka hal ini menjadi kejelasan bagi Kompas dalam pemberitaannya lebih kepada alasan ekonomi.

Semangat pluralisme dan menghargai perbedaan hal inilah yang menjadi alasan mengapa Kompas tidak menggunakan kata-kata yang cenderung menimbulkan konflik, dengan semangat idealismenya Kompas berusaha untuk dapat berkembang maju tetapi secara evolusi dan

perusahaan ini akan berusaha menjaga nilai-nilai dan asumsi-asumsi dari para pendirinya yang disebut dengan 'sang pemula' itu.

Semangat untuk menjalin kepercayaan pelanggannya juga dapat dilihat pada teks yang diproduksi (*text analysis*) maupun interpretasi (*processing analysis*) menjadi kejelasan bahwa Kompas dalam dinamikanya tidak ingin terperangkap dalam politik praktis. Ini dibuktikan walaupun Kompas menyediakan ruang khusus Pilkada Depok dan Persengketaan Pilkada Depok namun demikian Kompas hanya menghadirkan sedikit ulasan bagi yang disertai dengan pemikiran-pemikiran dan harapan bagi terwujudnya demokrasi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan kata-kata Jakoeb Oetama berikut ini :

”....itu lebih menunjukkan pada cara bagaimana pers harus berperanan dalam suatu masyarakat, yang falsafah demokrasinya masih harus dikembangkan oleh kebudayaan politik masyarakat dan suprastrukturnya. Saya berpendapat, pers tetap mempunyai komitmen terhadap prinsip demokrasi dan kebebasan. Cara melaksanakannya disesuaikan atau dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan masyarakat, kultur politik serta nilai-nilai dasar masyarakat kita. Namun arah benang merah yang tetap menjadi kewajiban pers untuk menariknya ialah perluasan ide demokrasi dan kebebasan....”

**(Jakoeb Oetama, Dunia Usaha dan Etika Bisnis Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2001) (Dalam Buku ; Kompas Dari Belakang ke Depan Menulis dari Dalam ; hal : 33, 2007).**

#### **IV. B.1.C Koran Tempo**

##### **1. Deskripsi (Text Analysis)**

Dari hasil analisis teks media terhadap berita-berita tentang persengketaan pilkada Depok yang melibatkan Nurmahmudi Ismail dan

Badrul Kamal, dalam mengkonstruksikannya Tempo tetap bersifat netral, begitu pula pemberitaan yang diberikan kepada kedua belah pihak. Dengan gaya Tempo yang lugas dan tegas kritik tetap dilontarkan kepada kedua belah pihak, tapi semua itu dilakukan dalam rangka idealisme Tempo dalam menegakkan demokrasi dan HAM (Hak Azasi Manusia), juga semangat reformasi yang mewarnainya. Pencitraan yang diberikan kepada Badrul Kamal dan Nurmahmudi Ismail tidak serta merta Tempo memberikan citra secara langsung, tapi melalui teks dan pesan yang tersembunyi Tempo memberikan gambaran kedua figur tersebut secara berimbang, kemudian untuk pencitraan sesungguhnya dikembalikan kepada masyarakat. Seperti Tempo menghadirkan Nurmahmudi sebagai sosok yang santun dan bersih berangkat dari partai Islam dan dukungan massa di Depok sangat menguntungkannya yang merupakan basis PKS, sedangkan kepada Badrul Kamal Tempo menghadirkan sebagai sosok orang lama yang masih mempunyai *power* dan pengaruh dari birokrasi namun demikian dia seorang tokoh yang bijaksana. Semangat Tempo tentang nasionalisme dan sekulernya merupakan pertahanan Tempo dalam memelihara pasar secara ekonomi namun selalu berusaha untuk idealis.

Dalam menghadirkan berita kepada publik Tempo tetap dengan gayanya yang bersifat tegas dan lugas semua dihadirkan dalam bentuk informasi secara detail dan runtut, kemudian permasalahan mengalir sesuai dengan fakta dan hasil akhirnya diungkapkan sesuai fakta ; pembaca diberi kebebasan untuk memilih. Seperti yang terlihat ; Tempo menghadirkan



liputan peristiwa politik persengketaan Pilkada Depok 2005 secara urut sebanyak 57 berita yang merupakan bagian-bagian yang teratur (*dapat dilihat pada lampiran 1 liputan berita persengketaan pilada Depok 2005, sebagai hasil analisis framing*).

Untuk menjaga keseimbangan demokrasi Tempo memberikan ruang yang sama kepada Nurmahmudi dan Badrul Kamal ; hal ini dibuktikan adanya liputan wawancara yang dilakukan kepada kedua tokoh/nara sumber tersebut secara berimbang, dengan bahasa yang lugas dan vokal. Liputan pemberitaan tersebut dari awal tidak ada statmen mengenai pihak-pihak tertentu yang dimunculkan, tetapi Tempo menampilkan seluruh proses dalam segi hukumnya atau legalnya seperti untuk menjawab pertanyaan mengapa Nurmahmudi Batal jadi Walikota Depok ; maka pokok bahasan mengenai kata-kata 'final dan mengikat' atas keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat ditampilkan (Berita Tempo pada tanggal 5 Agustus 2005) yang memberikan konsekuen keputusan majelis hakim dinilai cacad prosedur dan substansi, bersamaan dengan itu esoknya Tempo mengangkat berita mengenai 'Nurmahmudi Masih Bisa Dilantik' dengan alasan Undang-Undang Nomor 32/2004 tentang Pemda Pasal 106 ayat 7, Keputusan Pengadilan Tinggi hanya bersifat final tetapi tidak mengikat (Berita Tempo pada tanggal 6 Agustus 2005) ; sampai kepada ditemukannya bahwa Pengadlan Tinggi Jawa Barat melakukan tindakan tidak profesional (*unprofessional conduct*) dan melampaui kewenangannya dalam memutus sengketa pemilihan tersebut (Berita

Tempo pada tanggal 22 Agustus 2005), kemudian PK diajukan KPUD ke MA ; MA tidak boleh menolak perkara ; karena majelis hakim yang menganulir keputusan KPUD Depok dianggap melakukan tindakan tidak profesional (Berita Tempo tanggal 9 September 2005). Selanjutnya untuk menjawab mengapa hakim diduga telah melakukan tindakan tidak profesional ; maka Tempo menjelaskan Putusan Pengadilan Jawa Barat itu juga telah 'mengganggu rasa keadilan' karena diambil berdasarkan 'asumsi' semata, bukan 'fakta' (Berita Tempo pada tanggal 17 Desember 2005). Begitulah bahasa yang digunakan Tempo urut dan lugas dengan penjelasan-penjelasan yang memberikan pemikiran-pemikiran yang terbuka kepada publiknya.

Dalam mengungkapkan peristiwa politik tidak ada tanda-tanda Tempo untuk terjebak dalam politik praktis, dan beritanya dengan bahasa yang vocal untuk mengkritik jika tidak diikuti secara urut maka akan timbul adanya keberpihakan, namun setelah diikuti secara detail demi detail, poin demi poin maka jawaban-jawaban itu ada sesuai dengan proses dan fakta. Begitu pula ketika peneliti mengikuti berita persengketaan pilkada Depok ; tadinya ada unsur kecurigaan adanya keberpihakan namun ternyata Tempo memang vocal terhadap semua pihak dan sikapnya dalam memandang peristiwa politik sebagai proses dan pembelajaran demokrasi.

**Tabel 12 : Konstruksi Tempo Mengenai Badrul Kamal dan  
Nurmahmudi Ismail**

Badrul Kamal	Badrul Kamal adalah kader Golkar yang masih memiliki orang-orang yang loyal, masa pendukung yang cukup banyak, dan menerima kekalahkannya dengan legawa
Nurmahmudi Ismail	Nurmahmudi Ismail adalah calon walikota yang memiliki dukungan massa yang cukup signifikan di Depok ; sebagai kota yang merupakan basis PKS, dan kemenangannya diraih secara <i>legitimate</i> .

Melihat konstruksi tersebut Tempo, pesan yang ingin disampaikan oleh Tempo adalah ; bagaimanapun untuk mencari keadilan harus melalui proses hukum agar dapat diakui secara legal dan transformasi mengenai nilai-nilai demokrasi ditampilkan dengan mengikuti proses persengketaan pilkada Depok secara runtut ; hal ini dilakukan untuk memberikan wacana bagaimana cara-cara mengatasi persoalan, karena pilkada adalah pelaksanaan demokrasi yang dianggap masih baru di negeri ini.

**2. Interpretasi (*Processing Analysis*)**

Sikap netral yang diperlihatkan Tempo memang sesuai dengan idealismenya. Dinamika perkembangan Tempo dalam memperjuangkan demokrasi banyak mengalami tantangan. Seperti cerita berikut ini ; dimulai ketika setelah krisis 1965-1966 mulai reda, ada sekelompok wartawan muda di Jakarta, salah satunya Goenawan Mohamad yang baru selesai melanjutkan studinya di Brugges, Belgia dan bergabung dengan

Harian Kami. Goenawan sebagai wartawan dikenal juga sebagai penyair. Ada juga Fikri Jufri ; yang bercita-cita menajdi ekonom dan bekerja pada Harian Pedoman.

Goenawan berkata dalam majalah Tempo edisi khusus November 1986 dalam rangka menanggapi tulisan isterinya mengenai 'Perusahaan Awang-awang' yang diangan-angankannya : ia menjawab 'angan-angan itu kami rentang lebih jauh'. Goenawan menyarankan ; kalau mau bikin majalah, kenapa tak mencoba mingguan berita model Time dan Newsweek di Amerika Serikat, yang dipakai L'Express di Prancis, Der Spiegel di Jerman Barat, atau Elsevier di Belanda ?".

Gagasan yang menurutnya di awang-awang itu akhirnya terlaksana. Pada 1969 Goenawan bersama kawan-kawan menerbitkan majalah Eskpres yang didanai oleh B.M. Diah, yang pada waktu itu pemilik Harian Merdeka dan juga merupakan mantan Duta Besar Indonesia. Goenawan pada waktu itu ditunjuk oleh kawan-kawan sebagai pemimpin redaksi.

Ketika penerbitan Ekspres, Taufiq Ismail sebagai penyair kondang diajak Goenawan ke Dapur Majalah Ekspres. Taufiq mengatakan bahwa Majalah Ekspres kemungkinan berumur pendek; sebulan atau dua bulan. Tapi menurutnya kalau nantinya harus mati ya sudah, sudah membuat sejarah. Goenawan menanggapi dengan kata-kata, 'Saya senang dengan kata-kata itu'. Apa yang dikatakan Taufiq ternyata benar, belum genap setahun terjadi konflik dalam tubuh Persatuan Wartawan Indonesia

(PWI). B.M. Diah ditunjuk oleh Ali Murtopo, yang pada waktu itu sebagai salah satu Jenderal Soeharto, untuk menjadi ketua PWI ; tujuannya tak lain adalah untuk mengontrol wartawan. Padahal ketika itu PWI baru saja melaksanakan kongres dan Rosihan Anwar dari Pedoman terpilih sebagai ketua yang baru. Maka terjadilah dualisme kepemimpinan. Goenawan membuat pernyataan yang tidak mendukung keputusan Ali Murtopo ; hal inilah yang membuat B.M. Diah memecatnya. Dan pemecatan Goenawan dari Ekspres membentuk solidaritas teman-temannya dengan turut pergi meninggalkan Ekspres.

Goenawan dan teman-teman bertekad memiliki majalah sendiri. Tiga alasan Goenawan yang mendorong untuk mendirikan majalah baru adalah ; Pertama, untuk menampung teman-teman yang sudah solider kepadanya. Kedua, ingin punya majalah di mana modal dari luar itu tak mendikte hal ini karena ia telah mengalaminya dengan Ekspres. Ketiga, untuk mengembangkan kebebasan yang kami cita-citakan dan mengusahakan agar sensor jangan terlalu ketat.

Tradisi kumpul bareng mereka lakukan di Balai Budaya ; sebuah gedung yang biasa digunakan sebagai tempat pameran lukisan yang berlokasi di Menteng, Jakarta. Pada saat ini muncul nama Lukman Setiawan mantan wartawan olah raga Kompas. Lukman mengatakan kepada Fikri Jufri ; bahwa Ciputra, Pendiri Yayasan Jaya Raya dan merupakan direktur utama perusahaan properti PT Pembangunan Jaya, ingin bertemu di lapangan golf Ancol.

Lukman Setiawan juga menandatangani Harjoko Trisnadi dari Majalah Djaya, rupaya ia juga diundang Ciputra ; karena kata-kata Lukman mengenai pembicaraan soal majalah dengan Goenawan dan kawan-kawan. Trisnadi mengatakan ; kata Lukman, kelompok Goenawan ingin melanjutkan menerbitkan majalah, setelah mereka pecah dengan Ekspres. Dalam pertemuan antara Ciputra dan Harjoko Trisnadi di Kantor Ciputra di Proyek Senen, Jakarta. Ciputra menyarankan agar Djaya digabungkan dengan majalah yang sedang direncanakan. Akan terlalu panjang jika kita menceritakan perjalanan Tempo hingga sampai menerbitkan sebuah Majalah hingga merambah ke koran.

Kesejarahan Koran Tempo tiak dapat dipisahkan dari proses perjalanan panjang berdirinya majalah Tempo. Niat menerbitkan Tempo harian diwujudkan ketika ulang tahun majalah Tempo yang ke-30 pada 2 April 2001. Saat peluncuran Koran tersebut, perseroan melakukan kampanye iklan besar-besaran yang dilakukan setiap hari, baik di Koran, televisi dan internet. Dalam keseluruhan iklan-iklannya Tempo menghadirkan tokoh-tokoh dari beragam profesi, seperti budayawan, artis, intelektual dan politisi. Dalam iklannya, para tokoh menyampaikan pujiannya terhadap kesuksesan majalah Tempo dan harapan mereka kesuksesan tersebut juga akan diraih oleh Koran Tempo.

Bambang Harimurti mengatakan, secara umum Koran Tempo ingin mengembalikan prinsip-prinsip jurnalisme harian yang kini terabaikan, yaitu cepat, lugas, tajam dan ringkas. Banyak komentar yang bermakna

ada kepesemisan bahwa Koran Tempo dapat menjadi sukses seperti majalahnya. Misalnya Mahtoem Mastoem mengatakan ; "Kok berani-beraninya Tempo mendirikan Koran Tempo ? dari segi nama, karena sama-sama menggunakan nama 'Tempo'". Amarzan Loebis, redaktur pelaksana Gatra, juga mengatakan "Gila, menurut saya Tempo sedang berjudi". Tapi tidak demikian menurut Yuswohadi ; mengatakan nama Tempo dipakai untuk merebut pangsa pasar. Menurutnya ; "Dalam pemasaran, utilisasi merek Tempo dari majalah ke koran disebut sebagai ekstensi merek. Yang merupakan asset mereka yang sangat berharga di majalah mereka transfer ke kelas produk lain seperti Koran".

Ada beberapa alasan yang disampaikan oleh Bambang Harimurti akan keberaniannya mendirikan Koran Tempo; "Misalnya, jika pendapatan majalah setahun 40 miliar dengan jumlah karyawan 200 orang, maka kita bisa menggaji karyawan rata-rata sekian. Anda bayangkanlah, begitu kami masuk Koran, pendapatan majalah setahu di bidang iklan sama dengan pendapatan Koran dalam kurun satu bulan".

Beberapa komentar lain juga menunjukkan bahwa jika menyimak pilihan media iklan dan tokoh-tokoh yang diminta pendapatnya, diduga bahwa sasaran pembaca yang dibidik Tempo adalah pasar lapisan menengah ke atas. Mereka yang menakodai Koran Tempo ingin mengisi ruang kosong yang terbentang antara Kompas dengan Republika dan Media Indonesia. Dengan dinamika dan konflik di tubuh Tempo tapi yang jelas Koran dan Majalah Tempo masih eksis hingga saat ini, dengan

jumlah karyawan Majalah dan Koran Tempo masing-masing sekitar 200 orang.

Nilai idealisme yang mewarnai Tempo dalam mengkonstruksikan secara berimbang terhadap Nurmahmudi Ismail dan Badrul Kamal. Tempo masih dengan ciri khas bahasanya dalam mewacanakan kemapanan dan dukungan untuk kader Golkar dari birokrasi legislatif masih sangat kental. Namun ini hanya bersifat memberikan pemikiran bahwa praktek seperti ini sudah tidak relevan di saat Indonesia pada fase proses keterbukaan dan demokrasi dalam konteks saat ini.

Karena kehadiran Tempo tidak terlepas dari 'keberaniannya' dalam mengungkap fakta maka hal ini mengingatkan perjalanan Tempo yang mengalami 'pembredelan 19 Juni 1994'. Dengan isu yang mencuat pada saat ini mengenai perseteruan Tempo-Habibie. Kiprah Goenawan Mohamad yang kini menjabat sebagai redaktur senior Koran Tempo yang diterbitkan oleh PT Tempo Inti Media Harian dapat diperhitungkan.

Demikian Goenawan sudah tidak muda lagi namun bahasa yang digunakan untuk mengisi halaman akhir di majalah *Tempo* terasa lebih sangat keras namun di elaborasi dengan penggunaan bahasa yang diperhalus dengan sosial dan pemikiran yang bebas; lebih banyak kepada pesan moral baik mengenai nilai-nilai kemanusiaan, mempertanyakan demokrasi dan permasalahan yang sedang dialami oleh bangsa ini. Goenawan sebagai sosok bijaksana mengungkapkan pesan yang memberikan pembelajaran tentang makna yang memberikan kebebasan



pemikiran bagi pembacanya. Nilai-nilai ini ternyata masih terasa jika kita membaca pemberitaan *Tempo*, kritk-kriknya dan pengungkapkan fakta yang lugas. Bagaiman seorang Goenawan Mohamad menumpahkan penanya dalam catatan pinggir yang menyeruakan kecemasannya sebagai anggota suatu bangsa dalam mengembangkan demokrasi, seperti kutipan berikut ini:

Mungkin persoalannya dimulai ketika orang lupa, bahwa Indonesia dimulai dengan sebuah kekosongan. Tak ada yang kekal dan niscaya harus berkuasa mengisi kekosongan itu.

Kekosongan memang membuat cemas. Tapi justru dengan itu tampak ada sesuatu dalam kehidupan bersama yang memungkinkan kita untuk mengisinya. Dengan catatan: kekuatan politik mana pun akan mustahil mampu mengisinya penuh-sebab selalu akan ada selisih, bak kata pepatah, "tak ada gading yang tak retak". Kekosongan dan keretakan adalah isyarat yang menjanjikan kemungkinan tapi sekaligus juga kemustahilan.

Pengalaman sejarah Indonesia yang tragis tapi berharga adalah tentang itu-pengalaman tentang kemustahilan: tiap rezim mencoba merumuskan secara final apa itu "Indonesia", tapi tak berhasil.

Itu sebabnya demokrasi di negeri ini jadi penting (dikutip sesuai aslinya pada Majalah *Tempo*: No. 17/XXXV/19-25 Juni 2006 hal. 130).

Dan kejelasan tentang semngat demokrasiya juga dituliskan seperti kutipan berikut ini:

Tapi seperti dalam revolusi, di dalamnya ada kehendak yang tak sabar. Ia mengasumsikan adanya subyek yang utuh dalam tubuh bangsa, untuk menggerakkan seluruh proses.

Maka sebuah sistem politik yang punya asumsi lain diperlukan: sebuah demokrasi yang tanpa ilusi, yang menganggap tak ada dasar a priori apapun yang memberi posisi istimewa kepada seseorang sebagai sang subyek. Artinya tak dapat kita elakkan pluralitas, tak dapat ditiadakan persaingan politik, dan tak mungkin ada kekuasaan yang mutlak membentuk masyarakat. Yang ada hanyalah hegemoni yang tak abadi. (dikutip sesuai aslinya pada Majalah *Tempo*: No. 17/XXXV/19-25 Juni 2006 hal. 130).

Dalam konteks masyarakat saat ini *Tempo* hadir sesuai dengan semangat reformasi dimana nilai-nilai demokrasi dan pluralisme yang selalu dipertahankan. Dengan ini terlihat bahwa *Tempo* masih sangat kritis dan tidak berpihak dalam teks pemberitaannya, seperti ketika *Tempo* mengangkat peristiwa politik mengenai persengketaan pilkada Depok 2005; *Tempo* memberikan posisi yang sama. Ini mungkin karena telah menjadi pengalaman *Tempo* ketika tekanan politik yang bertubi-tubi dan control pemerintahan masih sangat kuat; itu ketika masa Orde Baru, saat ini ketika keterburukan menjadi semangat yang selalu dikumandangkan; *Tempo* tidak ingin kehilangan idealismenya. Dan *Tempo* dengan semangat idealisme dan nasional telah memiliki pasar yang cukup baik di negeri ini, namun demikian semangat pluralisme dan idealisme yang dijual *Tempo* masih perlu perjuangan yang gigih karena penting dalam posisi ini masih terlalu banyak.

Ketika kita kembali menguak sejarah *Tempo* bagaimana Kemenangan *Tempo* di PTUN pada saat itu, membuka mata pers internasional. Protes pembredelan inipun datang dari "*The Straits Times*" yang menulis artikel tanggal 22 juni 1994 bahwa pembredelan adalah "Sebuah angin badai bagi iklim keterbukaan politik yang telah dipromosikan di Indonesia".<sup>34</sup>

Hipotesis Godwin Chu tentang korelasi antara media, pemerintah dan masyarakat atas empat tahap, dan dalam tahap keempat Chu menulis :

---

<sup>34</sup> Hanazaki, Yasuo; *Pers Terjebak* (Terjemahan). Penerbit Institusi Studi Arus Informasi, 1998:181.

Hal ini memberikan arti bahwa di Indonesia pers mulai memainkan peran sebagai forum untuk menyeruakan perdebatan politik, walaupun dengan resiko yang tinggi. *Tempo* dengan visinya (hasil wawancara redaksional); yang ingin menegakkan demokrasi dan HAM, dalam semangat reformasi; nilai-nilai ini menjadi landasan dan sekaligus menjaga kebebasan pers dan demokrasi. *Tempo* kepada wartawannya selalu menegakkan konsistensi terhadap visi jurnalisme di dalam proses demokrasi. Semua liputan yang diberitakan harus sesuai fakta dan bukti-bukti yang akurat. Didalam menjaga ekstensi tersebut *Tempo* terlihat selalu berada di tengah-tengah yaitu diantara idealisme, keinginan pasar dan keinginan masyarakat. Ini mungkin merupakan kepentingan ekonomi *Tempo* dengan politik pemberitaanya. Dengan demmikian *Tempo* tidak serta mereta meninggalkan kepentingan ekonomi, dimana *Tempo* selalu menjadi penengah dengan misinya yaitu 'menyajikan berita yang mencerdaskan'. Dan nilai-nilai keberimbangan serta semangat reformasi yang dijual *Tempo* saat ini mempunyai peluang yang besar dalam system pers saat ini, dan konteks masyarakatnya.

Dalam menyajikan peristiwa politik persengketaan pilkada Depok, *Tempo* melihat korelasi mengenai bagaimana aturan main dan prosedur, serta pada regulasi dan pelaksanaan demokrasi secara baik. *Tempo* tidak ingin ada keberpihakan kepada Badrul maupun Nurmahmudi, namun lebih kepada pesan-pesan pada proses pelaksanaan demokrasi dengan

masyarakat yang berfikir dalam konteks pembelajaran politik dan kritik-kritikpun diberikan berimbang kepada kedua kubu tersebut.

Pada proses redaksional yang dilakukan oleh siapapun atau institusi manapun *Tempo* berusaha untuk menghargai perbedaan. Perbedaan tersebut terutama pada cara memandang persoalan, bukan pada institusi media itu sendiri. Perbedaan-perbedaan itu terlihat biasanya pada penentuan topic, cara melihat persoalan dan pemahaman terhadap peristiwa tersebut. Hal ini juga diterapkan pada rapat-rapat di redaksionalkan; terjadi dinamika dan tarik menarik untuk menyikapi suatu peristiwa dan demokrasi itu terjadi juga di internal *Tempo*. Seperti yang diungkapkan oleh Eni Saeni bagian editing, bahwa *Tempo* tidak ingin menyembunyikan dan menghapus fakta yang ada.

Sebagai institusi media *Tempo* tidak berusaha untuk masuk ke dalam suatu politik, tetapi hanya membeberkan fakta yang terjadi. Dalam penulisan berita seperti media lain *Tempo* juga memiliki 'politik media' yang sangat bergantung pada kebijakan media tersebut. Untuk menjaga independensinya dan etik jurnalistik, *Tempo* dalam menurunkan berita selalu dengan konfirmasi terlebih dahulu sebagai alasan mengapa berita tersebut di munculkan. Konsep *framing* dipakai untuk mendapatkan konsekuensinya, dan lebih kepada 'message' yang ingin disampaikan, kemudian masyarakatlah yang memberikan penilaian.

***(Pada analisis inteprestasi Tempo diatas : Kesejahteraan; perjalanan dan percakapan-percakapan antara orang-orang yang***

*bersinggungan dengan lahirnya Koran Tempo diatas diambil sesuai dengan aslinya walaupun tidak secara keseluruhan. Ditunjang dengan litelatur dan informasi dari [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com) ; hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh gambaran secara utuh)*

### **3. Eksplanasi (Social Analysis)**

Melihat keterangan di atas, dapatlah dipahami jika Tempo tidak ada keberpihakan dalam mengkonstruksikan kedua calon wali kota tersebut. Semangat Tempo bagi dan untuk mendukung pengembangan demokrasi dan semangat nasionalisme; yang telah menjadi nilai-nilai dan asumsi yang telah membudaya dan menjadi *trade mark* Tempo yang membuat pembacanya kian bertambah. Tempo berusaha untuk tidak terjebak pada eforia kebebasan tanpa batas. Politik kebebasan yang telah distrategikan Tempo telah menyeimbangkan dalam pemberitaan untuk tidak melupakan faktor ekonomi dan pasar. Persaingan bisnis di era Pasar Bebas, membuat Tempo berupaya untuk selalu konsisten terhadap idealismenya sebagai media yang menyuarakan demokrasi dan nasionalisme. Pada konteks saat ini ketika masyarakat mulai antusias terhadap persoalan politik, maka Tempo menyikapi lebih kepada mencari alternatif solusi. Tempo menganggap orientasi ekonomi menjadi faktor yang perlu diperhatikan yang nantinya menjadi faktor penentu bagi kualitas isi dan eksistensi pemberitaan. Hal ini dapat dianggap sebagai

suatu kewajaran karena bagaimanapun Tempo harus memperhatikan oplah untuk operasional institusi tersebut.

Dalam mengkonstruksi Nurmahmudi Ismail dan Badrul Kamal Tempo tampak tegas memberikan kritik di antara keduanya sesuai dengan fokus permasalahannya pada saat itu. Semua rentetan persengketaan pilkada Depok dimunculkan sebagai proses pembelajaran demokrasi dan politik bagi masyarakat, yang menghargai aspek ideologi dan pluralisme. Tempo hadir menjadi media massa yang tidak ingin terjebak dalam politik praktis. Pada saat ini ketika orang bebas untuk beropini dan berada pada wilayah perang wacana, Tempo berusaha untuk tidak terpancing. Mungkin dalam hal ini Tempo telah memperoleh gambaran bagaimana Koran yang menjadi corong suatu partai dia tidak akan bertahan lama dan ditinggalkan oleh pembacanya.

Cuaca transparansi begitu terasa dan frame yang digunakan oleh masyarakat untuk menganalisa berita juga berkembang, kini orang mulai bosan kepada berita-berita yang terlalu memihak pada kepentingan politik atau kelompok tertentu. Dalam hal ini ada semacam negosiasi dan konsensus dengan masyarakat ; berita apa yang menjadi kemauan masyarakat, menjadi kebutuhan dan yang memiliki nilai jual ; sementara media harus menyampaikan informasi sesuai fakta, tantangan ini bisa dijadikan peluang oleh media. Masyarakat kita saat ini telah 'melek' politik dan setiap cerita politik terkadang mereka sudah mengetahui akhirnya, di era globalisasi saat ini orang bebas dan mampu mengakses

setiap saat dengan cepat, mudah dan murah ; inipun menjadi salah satu tantangan. Untuk itu Tempo ingin memberikan warna pada dirinya, sehingga tidak dapat sama dengan media terutama Koran yang lain.

Kemungkinan Tempo beranggapan bahwa eforia keberpihakan politik sudah tidak layak jual. Namun, lebih kepada penyelesaian suatu solusi setiap permasalahan yang dimunculkan pada berita peristiwa politik yang memiliki nilai jual ; Tempo jeli menangkap tanda-tanda ini. Persaingan yang kuat baik dari segi teknologi dan kecepatan mengakses informasi juga menjadikan tantangan tersendiri bagi dunia bisnis media. Trend masyarakat saat ini adalah ; selalu berpikir minimalis, cepat, solusi yang efektif dan cerdas dalam mensiasi pasar ; ini juga memberikan tantangan kepada dunia bisnis Koran.

Pada saat ini kepopuleran Golkar pun sudah tidak layak jual, hal ini berhubungan dengan kiprah sebagian orang-orang Golkar di birokrasi yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat kebanyakan. PKS tampil sebagai wajah baru Islam yang lahir dari kaum muda dan akademisi ; Tempo memunculkannya hanya sebuah wacana sebagai bentuk pencerahan bagi partai-partai Islam dan kehadirannya dalam memberikan keragaman dari partai-partai Islam konvensional yang sudah ada. Walaupun dapat dikatakan PKS sebagai partai yang mengisi harapan publik akan adanya partai Islam yang bersih, namun demikian kiprah PKS dalam dunia politik mengenai konsistensinya selalu menjadi bahan

renungan akankah bisa bertahan seperti julukannya sebagai partai yang bersih dan santun.

Gegap gempita transparansi dan keterbukaan menjadikan peluang bagi *Tempo* untuk menyampaikan semangat demokrasi yang memang telah berakar di institusi ini. Pemberian citra yang negatif kepada salah satu kandidat walikota tidak dilakukannya, namun untuk menjaga idealisme dan semangat reformasi *Tempo* tetap melakukan kritik kepada kedua belah pihak. Sikap inilah yang dijaga *Tempo* untuk tetap memelihara hubungan yang baik bagi pembaca setia atau calon pembacanya di tanah air ini.

#### **IV.B.1.C *Republika***

##### **1. *Deskripsi (Teks analysis)***

Melihat berita dalam teks *Republika* yang memberikan porsi yang lebih kepada Nurmahmudi, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan histories pendirinya yaitu ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) dan Habibie sebagai pimpinan saat itu. Jika kita melihat konstruksi yang dilakukan *Republika* menjadi sebuah pemahaman; bila Nurmahmudi Ismail dikonstruksi positif oleh *Republik*. Nurmahmudi sebagai kader dari partai Islam menempati ranah tersendiri di dalam *Republika*. Sentimen politik terhadap Muslim adalah alasan yang memang dapat diterima ketika banyak Koran atau media yang melakukan pemberitaan miring mengenai



Islam.<sup>35</sup> Hal ini mengingat memang akar mula diterbitkannya *Republika* sebagai koran yang memberikan keseimbangan pemberitaan.

PKS dengan langkahnya yang berbeda dengan partai Islam lain, telah memberikan inspirasi bagi umat Islam mengenai sosok Islam yang cerdas, bersih dan lebih beretika dalam politik. Kehadiran kader-kader dan tokoh-tokoh PKS telah memberikan ‘ruh tersendiri’ bagi kehidupan Muslim akan sebuah pencerahan kehadiran warna Islam yang baru (yang berbeda dengan Muhammadiyah dan NU) tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai Islam yang murni; inilah yang membuat orang melihat PKS sebagai sesuatu yang eksklusif. Bahkan fobia PKS juga ditunjukkan dalam birokrasi di Depok pada saat itu, ada selentingan yang menyuarakan ‘asal bukan PKS’.

*Republika* ketika memberikan konstruksi mengenai kubu Badrul Kamal yang cenderung tidak tertib juga tidak melibatkan Golkar, tetapi Badrul sebagai person dan orang-orang sebagai pejabat lama dalam birokrasi di Depok yang kiranya takut akan posisinya. *Republika* juga memunculkan tindakan yang tidak profesional yang telah dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat (PT Jabar) dalam memutus perkara persengketaan Pilkada Depok yang berdasarkan ‘asumsi’ bukan fakta. Seperti berita-berita yang dihadirkan oleh *Republika* berikut ini :

---

<sup>35</sup> Dijelaskan dalam Hamad, Ibnu, *Konstruksi realitas Politik Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Granit Bandung, 2004: 125; bahwa melihat sejarah kelahiran dan keterangan redaksi (Bani Saksono) bahwa *Republika* adalah Koran Islam.

(1) Judul : Kesalahan LSM Minta MA Terima PK

*Frame* : Kesalahan Fatal Putusan Hakim Merupakan Alasan Yang Sah untuk Sebuah PK (Berita Republika : 20 Agustus 2005)

(2) Judul : KPUD Mestinya Menang

*Frame* : Sikap 'Diam' KPUD di persidangan Dipertanyakan ((Berita Republika : 22 Agustus 2005)

(3) Judul : Kubu Badrul Kamal protes MA

*Frame* Deprediksi ada unsur KKN dan *Money Politic* Putusan PT Jabar dianulir. (Berita Republika : 20 Agustus 2005)

(4) Judul : Agung : Golkar Tak Ikut Campur Sengketa Pilkada Depok

*Frame* : Badrul gunakan Golkar Politiknya. ((Berita Republika : September 2005)

Dengan melihat berita yang dimunculkan dari hasil *framing*-nya pada keempat berita jelas *Republika* sangat tegas memberikan kriti terhadap Badrul Kamal, Kubu Badrul Kamal dan tindakan hakim PT Jabar yang memenangkan Badrul kamal, dan partai Golkar yang dimunculkan hanya sebagai kendaraan politik Badrul. Pesan yang disampaikan; Golkar tidak ingin campur tangan terhadap permasalahan badrul.

Untuk lebih jelasnya bagaimana Republik mengkonstruksi kedua calon yang bersaing itu, dari hasil analisis CDA kita lihat adanya sentimen positif terhadap Nurmahmudi , seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 13 : Konstruksi *Republika* mengenai Badrul Kamal dan  
Nurmahmudi Ismail**

Badrul Kamal	Badrul Kamal adalah mantan walikota yang bertekad untuk menjadi orang nomor satu di Depok, memiliki massa yang tidak tertib, dan Keputusan PT Jabar yang kontroversial ini hanya berdasarkan 'asumsi' bukan fakta
Nurmahmudi Ismail	Nurmahmudi Ismail adalah walikota terpilih yang memegang prinsip Islam, memiliki massa yang tertib, dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan

Melihat hasil konstruksi tersebut jelas *Republika* mencitrakan kepada Nurmahmudi ismail sebagai sosok yang mempunyai prinsip tegas dan disenangi banyak kalangan tetapi citra sebaliknya yang dilakukan pada Badrul Kamal. (Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap silahkan dibaca lampiran B)

**1. Interpretasi (*Processing Analysis*)**

Kedekatan *Republika* kepada Islam tentu tidak lepas dari sejarah kelahirannya yang tidak dapat dipisahkan dari ICMI. Penerbitan tersebut merupakan puncak dari usaha panjang kalangan wartawan profesional muda yang dipimpin oleh eks Wartawan Tempo, Zaim Uchrowi. *Republika* terbit perdana pada tanggal 4 Januari 1993 dibawah Bendera Perusahaan PT Abdi Bangsa. Pada akhir tahun 2000 mayoritas saham koran ini dimiliki oleh Kelompok Mahaka Media. PT Abdi Bangsa selanjutnya menjadi *holding company*, dan *Republika* berada dibawah

bendera PT. Republika Media Mandiri yang merupakan salah satu anak perusahaan PT. Abdi Bangsa.

Karena hubungan *Republika* dan ICMI tidak dapat dipisahkan. Maka ketika kita ingin memahami *Republika* kita harus mengetahui kiprah ICMI sebagai pendirinya. ICMI sendiri dalam Politik mempunyai kesejarahan sendiri yang fenomenal sebagai kelas menengah Muslim. Habibie sebagai tokoh yang pernah menjadi orang nomor satu di Indonesia ini sangat berhubungan dengan kelahiran ICMI.

ICMI dalam gelombang baru dari gerakan Islam yang Esposito (1992) (dalam Yasuo Hanazaki, 1996) disebut "Membawa Islam ke Tengah Panggung". Ada penelitian beberapa sarjana, bahwa pendirian ICMI dapat memberi energi yang akan memimpin pembaharuan masyarakat sipil yang didasari pada etika Islam, dan mereka melihatnya ICMI merupakan sebuah produk dari tumbuhnya kesadaran Muslim moderen. *Republika* disisi lain juga dapat dianggap sebagai refleksi intelektual Muslim Moderen Indonesia.

ICMI sebagai Institusi atau badan memiliki tiga program utama : (1) Pengembangan *Islamic Center*; (2) Pengembangan CIDES; (Center for Informations and Development Studies) dan (3) Penerbitan Harian Umum *Republika*.<sup>36</sup>

Yasuo Hanazaki menulis dalam bukunya pers terjebak, menurutnya bila dipahami dengan cara yang berbeda dan sejarah pembentukan ICMI.

---

<sup>36</sup> Hamad, Ibnu, *Konstruksi realitas Politik Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Granit Bandung, 2004: 120.

Hal ini mengacu pada saat hubungan Soeharto mengambil tindakan balasan dengan cara membangun hubungan lebih dekat dengan Islam. Pada saat itu; Penguasa Orba selalu khawatir terhadap dua kelompok (komunis dan muslim). Setelah komunis (PKI) secara fisik lenyap, maka kekuatan Islam dikuasai dengan menyatukan partai-partai Islam ke dalam PPP dan diikuti oleh berlakunya UU keormasan.

Hakekat organisasi ICMI sulit dipahami, karena ICMI mewakili kepentingan kelas menengah Muslim, dan di lain pihak keanggotaan ICMI terdiri dari berbagai orang dengan keyakinan politik yang berbeda-beda. Seperti ada yang percaya pada nilai-nilai demokrasi, ada yang mencari kemajuan sosial bagi masyarakat Muslim, ada yang ingin mendapatkan posisi yang lebih baik di dalam hierarki sosial yang ada. Namun hal ini menjadi sesuatu hal yang wajar karena memang ICMI anggotanya berasal dari kalangan Muslim yang mempunyai berbagai kepentingan dan tujuan. Pada tahun 1993, Habibie membawa empat anggota ICMI dalam kabinet baru : Satrio Budiharjo Joedono, Haryanto Dhanutirto, Wardiman Djojonegoro, dan Sudjudi.

Republika dimulai dengan investasi 40 milyar (Mochtar Loebis, 1993) (Dalam Yasuo hanazaki 1998 : 130). Habibie sangat berperan dalam mengumpulkan dana tersebut. PT Abdi Bangsa sebagai penerbit Republika yang merupakan anak Yayasan Abdi Bangsa dan menjadi sumber dana bagi ICMI. Habibie sebagai Ketua Umum ICMI juga menjadi Ketua Yayasan Abdi Bangsa. Singkatnya, Republika adalah koran yang dieditori

intelektual Muslim dan dilindungi oleh Habibie, Soeharto dan teman-temannya. *Republika* sebagai sebuah organ ICMI mewakili kepentingan kelas menengah Muslim kerap juga berbicara untuk pemerintah.

*Republika* yang memiliki visi yaitu menjadi hal utama *Republika* sebagai koran umat yang terpercaya dan mengedepankan nilai-nilai universal yang sejuak, toleran, damai, cerdas, dan profesional, namun mempunyai prinsip dalam keterlibatannya dalam menjaga persatuan bangsa dan kepentingan umat islam berdasarkan pemahaman Rahmatan Lil Alamin.

Pimpinan redaksi *Republika* telah mengalami beberapa pergantian yang pertama Parni Hardi, lalu Andi Makmur Mekha, Zaim Uchrowi, Tommy Tamtomo, Yayat Supriyatna, Asro Kamal Rokan, dan saat ini pemimpin Redaksi *Republika* adalah Ikhwanul Kiram Mashuri. *Republika* jika dibandingkan dengan media dakwah koran-koran Islam lain cenderung lebih moderen.

## 2. *Eksplanasi (Social Analysis)*

Berdasarkan hasil analisis teks terhadap berita persengketaan Pilkada Depok hingga pelantikan walikota terpilih, *Republika* tampaknya ada kecenderungan memberi gambaran dan citra yang positif kepada Nurmahmudi Ismail dan PKS (Partai Islam). Sentimen positif *Republika* terhadap Islam memang sejalan dengan kesejarahan kelahirannya dan merupakan koran nasional yang komunitas Muslim. Dengan semangat

nilai-nilai keIslamannya *Republika* cenderung memberikan citra positif terhadap tokoh atau partai-partai Islam.

Kontruksi replubika yang selalu positif kepada Nurmahmudin Ismail, adalah sebagai jawaban yang selama ini Koran-koran lain selalu sentiment negative terhadap islam, terutama pada kalangan Muslim yang lebih tegas menyuarakan tentang nilai-nilai Islam. Kepada Badrul Kamal *Republika* cenderung negative, namun demikian tidak menyinggung Badrul Kamal sebagai Kader Golkar tetapi Badrul Kamal sebagai pribadi dan kubunya. Hal ini dilakukan oleh replubika karena memang dalam perjalanan sendirinya Habibie mempunyai hubungan yang dapat dibilang mesra dengan Golkar. Ulasan persengketaan pilkada Depokpun lebih banyak mengenai penyampaian protes terhadap sikap hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam memutuskan perkara. Tidak ada kata-kata yang terlalu keras terhadap Badrul Kamal atau Golkar.

Melihat gambaran diatas maka jelas, *Republika* dalam menggambarkan tokoh politik selalu menggunakan pertimbangan ideologis (keIslaman) dan pembelaanya terhadap opini-opini yang bertentangan dengan islam. Dapat dilihat pada kolom khusus pilkada; semua liputan dan wacana selalu mengarah kepada pembelaannya terhadap nurmahmudi, menggunakan simbol-simbol untuk memperkuat symbol verbal, seperti aksi damai yang dilakukan oleh kader PKS untuk memprotes keputusan PT Jabar yang membatalkan kemenangan Nurmahmudi Ismail. Seperti kata-kata telah 'mencederai rasa keadilan',

tidak berdasarkan fakta tetapi hanya berdasarkan asumsi dan lain-lain. Pesan-pesan yang disampaikan pada umumnya adalah Nurmahmudi Ismail merupakan wali kota terpilih secara *legitimate* dan keputusan KPUD sudah benar.

Seperti yang terlihat pada Berita pada tanggal 19 Agustus 2005 dengan judul: Keadilan Dilanggar dalam Kasus Depok, yang menghasilkan *frame*: Demi Keadilan Upaya Hukum Harus Dilakukan. Dengan penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan pemikiran pembaca diarahkan kepada penegakkan nilai keadilan, dan kasus Depok adalah pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan.

Hingar bingar foto-foto istighotsah Qubro juga ditampilkan dalam bentuk doa dan keprihatinan bersama dalam mensikapi keputusan PT Jabar, pesan yang disampaikan adalah bahwa memang Nurmahmudi wali kota pilihan masyarakat bukan pilihan hakim. Unjuk rasa yang juga menampilkan tokoh-tokoh Islam, massa PKS, dan Budayawan Rendra; untuk memberikan kesan bahwa Nurmahmudi didukung penuh oleh berbagai kalangan, dan perseteruan pilkada Depok bukan hanya permasalahan Nurmahmudin dan Badrul Kamal tetapi merupakan permasalahan umat dalam penegakan nilai-nilai keadilan.

Bagi *Republika* sebagai Koran yang memiliki segmen pasar untuk kaum Muslim Modern, dari perspektif ekonomi media; berita mengenai persengketaan pilkada Depok yang memunculkan isu-isu tentang pencideraan nilai-nilai keadilan dianggap sebagai berita yang memiliki



nilai jual bagi pembaca setia nya atau segmen Republika yang memang sudah mapan. Hal ini merupakan keseimbangan yang terjaga dari sentuhan bisnis dan independensi Republika terasa lebih kuat. Dalam konteks masyarakat yang selalu menginginkan sebuah pencerahan dan sangat *well informed*; Republika hadir sebagai pilihan bagi para generasi Islam Moderen; muda, kosmopolit dan selalu menginginkan perubahan namun tetap menjaga prinsip dan nilai-nilai ideologi sebagai landasan hidupnya.

Konteks masyarakat saat ini yang terlihat sudah mulai bosan dengan opini-opini elit politik, dan ada kecenderungan para publik figur berduyun-duyun mulai belajar mengenai pendalaman Islam; pengajian yang marak di hotel-hotel berbintang, pertumbuhan pebisnis muslim yang mulai terasa menggeliat; merupakan salah satu peluang Republika dalam menambah segmen pasarnya. Kecenderungan pasar bebas pun berdampak dengan kecenderungan pertumbuhan kaum intelektual dan pebisnis muslim yang ikut bermain dalam hiruk pikuk pasar global. Dan tentu mereka juga memerlukan surat kabar yang independen, memiliki ideologi Islam dan juga informasi perkembangan bisnis yang terkini. Tanda-tanda yang terlihat orang-orang yang menyatakan dirinya kosmopolit dan modern ada kecenderungan untuk memahami atau melakukan ritual (pengajian-pengajian) sebagai keseimbangan untuk memenuhi rasa haus jiwa mereka dengan kepenatan perhelatan pekerjaan yang banyak menyita waktu keseharian mereka; di saat kebutuhan fisik telah terpenuhi oleh teknologi, kebutuhan rohani pun berusaha mereka penuhi dan ini tidak

hanya berlaku bagi umat Islam tapi juga bagi umat dari agama lain. Sistem pers terbuka pun saat ini memberikan peluang kepada institusi-institusi media untuk mengaktualisasikan inovasinya, jika memang tidak ingin tergilas oleh persaingan pasar yang tajam. Dan menggeliatnya Islam saat ini merupakan peluang bagi Republika untuk menambah calon pembaca setia yang memang sudah banyak.

(informasi mengenai kesejarahan Republika untuk keperluan interpretasi ini sebagian diambil dari [republikaonline.com](http://republikaonline.com))

#### **IV.B.2 MENGUNGKAP WACANA POLITIK MEDIA; MEMBONGKAR KEPENTINGAN EKONOMI POLITIK MEDIA DI BALIK BERITA**

Dari hasil Analisis Wacana telah memperlihatkan bahwa cara atau strategi dalam mengkonstruksi sebuah pesan yang dilakukan oleh surat kabar berbeda-beda. Perlakuan yang berbeda-beda ini berhubungan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dimiliki oleh setiap Koran; baik pertimbangan ekonomi, politik pemberitaan dan ideologi yang mereka anut. Hasil penelitian dengan metode multi level analisis, telah ditemukan bahwa realitas atau fakta yang terlihat dan terdeskripsikan dalam teks menyimpan realitas tersembunyi yang dapat dilihat dari hasil penafsiran (*interpretation*) pada teks. Penggunaan metode multilevel ini dapat mengungkap sebuah temuan cerita yang sebenarnya dibalik teks berita. Dan pemahaman teks secara keseluruhan; dapat memberikan pengertian bagaimana teks berita hadir dan dibaca oleh publik dengan 'makna' yang

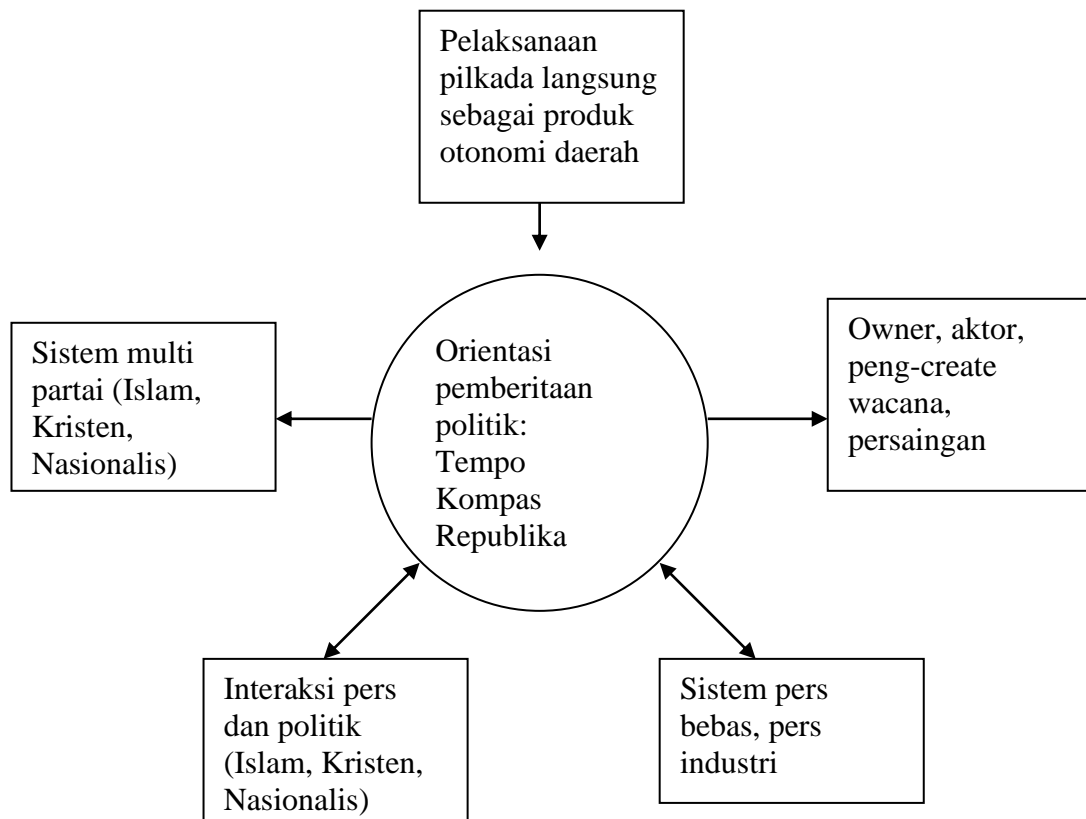
beragam, sehingga menentukan opini dan isu tertentu terhadap tokoh ataupun peristiwa politik.

Di dalam 'berkata' media tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh organisasional; misalnya salah satu tujuan media untuk mencari keuntungan dari segi materiil. Maka tujuan secara ekonomi media akan mempengaruhi *content* atau isi berita yang diproduksinya, begitu pula gaya atau politik pemberitaan yang berbeda-beda. Namun demikian, ideologi juga memiliki pengaruh yang sangat kuat. Shoemaker dan Reese (1991); Menganggap ideologi sebagai mekanisme simbolik yang menyediakan kekuatan kohesif yang dapat mempersatukan di dalam masyarakat. Kemungkinan pendapat ini ingin menjelaskan dampak yang besar sebuah makna dari 'kata' oleh suatu Koran misalnya, menjadi suatu kesepakatan bersama orang-orang untuk bertindak. Seperti Republika; sebagai pembawa semangat nilai-nilai Islam yang modern; ia selalu menyuarakan nilai-nilai 'keadilan', 'amanah' dan lain-lain. Pesan-pesan tersebut dikonsepsi sedemikian rupa sehingga memberikan pemahaman koheren pada makna-makna yang dimunculkan. Di sini dapat dilihat ; frame yang merupakan cara pandang wartawan dalam menyeleksi, memunculkan dan menempatkan isu-isu menjadi suatu kesepakatan dengan pembacanya, sehingga juga dapat mempengaruhi frame pembaca dalam cara memaknai suatu simbol atau peristiwa.

Pertimbangan-pertimbangan itu dapat menjadikan pemahaman mengapa Republika selalu positif memberikan citra kepada Nurmahmudi

Ismail dan tidak selalu positif kepada Badrul Kamal, dan bagaimana yang dilakukan oleh Kompas serta Tempo pun berbeda. Penggunaan bahasa baik secara implisit maupun eksplisit digunakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Bahasa di sini dijadikan sebagai relief seperti apa yang akan diciptakan tentang realitas, dan bahasa ini pun dapat membentuk *in group* dalam cara memberikan makna, pada akhirnya akan mempengaruhi gambaran dan makna yang dihasilkan dari fakta atau realitas yang dikonstruksikannya. Ada koran-koran yang selalu menggunakan kata-kata sentimen positif dengan Islam, ada yang idealis nasionalis dan tidak memihak, ada pula yang idealis modern dengan menghindari isu-isu sara tetapi ada semangat ideologi yang diembannya.

**Gambar 17 : Motiv-motiv Tersembunyi Media dalam Pengkonstruksian Tokoh-tokoh Politik**



Menurut Lippmann ; bahwa masyarakat menerima fakta bukan bagaimana adanya, akan tetapi apa yang mereka anggap sebagai fakta ; sebagai kenyataan fatamorgana atau 'lingkungan palsu'. Distorsi-distorsi ini menurutnya datang dari berbagai faktor, seperti emosi, kebutuhan ego, stereotip-stereotip dan gambaran yang kita miliki tentang tokoh atau figur tertentu. Hal ini berhubungan dengan opini publik yang dibangun oleh masyarakat, bagaimana ada kecenderungan dalam masyarakat, bahwa mereka memilih tokoh yang distereotipkan untuk mereka oleh kebudayaan mereka ; media di sini berperan sebagai sarana transformasi budaya. Sehingga masyarakat cenderung merumuskan isu atau tokoh-tokoh tersebut ; dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan oleh media ; misalnya si A orangnya demokratis, dekat dengan rakyat dan sebagainya. Maka citra yang terbentuk mengenai si A adalah citra yang baik di dalam benak masyarakat. Lippmann mengatakan citra yang terbentuk sebagai akibat dari rumusan-rumusan kita tadi disebut dengan ; 'gambaran-gambaran dalam benak kita' ; hal ini yang sangat mempengaruhi sikap kita, keberpihakan kita pada salah satu figur atau tokoh dan sikap politik kita secara umum, walaupun dalam kenyataannya tingkat pengaruh ini masih sangat dibutuhkan pengembangan penelitian dalam konteks yang terkini sebagai masyarakat informasi. Melihat bahwa pendidikan masyarakat kita masih banyak yang belum cukup pengaruh ini masih sangat signifikan. Seperti yang berhubungan dengan bagaimana pendukung atau orang-orang melihat citra dan opini mengenai

Nurmahmudi atau Badrul Kamal. Mereka akan merumuskannya dari partai mana Badrul Kamal atau Nurmahmudi berasal ; maka mereka akan merumuskan kriteria yang mereka anggap dapat mewakili keduanya. Maka kebenaran sangat sulit didapatkan karena sudah ada gambaran tentang mereka dalam diri kita, padahal kebenaran yang sesungguhnya dapat tersembunyi. Gambaran tentang realitas yang digunakan oleh individu ini akan mendasari mereka untuk bertindak.

Dalam memilih isu dan cara memandang isu dalam hubungannya dengan nilai berita, wartawan memiliki pertimbangan – pertimbangan tertentu; maka apa yang dipelitu oleh wartawan terkadang hanya sebagai apa yang mereka anggap ‘fakta, tetapi bukannya ‘kebenaran’. Fakta yang disebut wartawan itu adalah fakta yang sarat dengan berbagai keterbatasannya; misalnya adanya kebijakan redaksional, ada perasaan was – was apakah ini akan menimbulkan permasalahan pada dirinya, fitnah, dan berbagai hal yang mengancam dirinya. Maka berita yang diturunkan adalah berita yang melalui stereotip-stereotip, standar penilaian menurut institusinya, dan menghandari masalah – masalah yang pelik. Maka ‘fakta, yang dianggap oleh wartawan sebagai fakta yang berdasarkan nilai – nilai, kebutuhan- kebutuhan tertentu dan berbagai kepentingan; seperti nilai berita (news value) atau nilai jual, politik dan ekonomi.

Dalam batas- batasnya, emosi dapat ditransfer baik sebagai stimulus maupun sebagai reaksi, seperti bagaimana kata – kata dalam berita dapat membangkitkan emosi orang untuk orang melakukan

tindakan; seperti kerusuhan. Dalam hal ini kekuatan yang signifikan bagaimana media mentransfer emosi melalui "kerjanya bahasa"; karena tanda disini juga dapat mewakili sebuah ideology tertentu; seperti simbol – simbol islam pendukung Nurmahmudi dimunculkan oleh satu Koran sebagai yang mewakili salah satu sikap seorang muslim. Maka tak heran jika kemunculan bentrokan oleh dua kubu hadir ketika sebelumnya muncul dalam koran 'tanda-tanda' itu. Seperti yang diberitakan dalam koran Tempo, 9 Agustus 2005: pendukung Badrul dan Nurmahmudi nyaris bentrok; yang sebelumnya didahului dengan adanya pemberitaan dengan judul : KPUD Depok akan 'Melawan'; pada tanggal 8 Agustus 2005; ini memberikan pengertian bahwa jika KPUD Depok akan melawan, maka hasil keputusan Pengadilan Negeri Jawa Barat Dibatalkan. Tak elak pesan ini pun sampai kepada pendukung Badrul kamal untuk juga melakukan perlawanan dalam rangka mendukung kemenangan Badrul Kamal.

Berita dan peristiwa yang dikonstruksi oleh koran berbeda satu dengan yang lainnya, hal dapat dilihat dari perbandingan Ketiga Koran tersebut dalam strategi pengemasan pesan yang berdasarkan; ideologi, teknologi, ekonomi atau pasar, politik, idealisme, nasionalisme, prulalisme dan sebagainya.

Kompas; yang mempunyai motif idealis, pruralis dan ekonomi. Sedangkan Republika; ideology (islam) modern, ekonomi. Nampaknya bukan hanya faktor kebetulan saja, jika Koran tersebut selalu ada

kepentingan ekonomi didalamnya; rupanya pengaruh pasar bebas industri media yang bersaing ketat saat ini menjadi alasan yang tersendiri.

Pada masa Orde Baru, ketika Pers ingin bebas dari control penguasa; dimana komunikasi politik yang terjadi telah didominasi oleh sumber – sumber resmi dari pemerintah, masyarakatpun dibatasi dan ditekan dalam menyuarakan kritik terhadap pemerintah dan merekalah yang dianggap benar.

Massa reformasi (1999) ada pergeseran komunikasi politik; komunikator politik meluas kepada semua kekuatan politik; seperti partai politik, aktivis atau pressure group termasuk didalamnya LSM. Maka pada saat ini berita – berita dan isu – isu yang dimunculkan adalah penolakan Status Quo dan pesan – pesan politik cenderung beragam. Sejak Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, pers di Indonesia memang telah berubah. Hal ini diwarnai dengan pencabutan Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen)No1/1984, yang pada waktu itu dijadikan alat legitimasi untuk melakukan pembredelan. Organisasi – organisasi tunggal pers, pada zaman Soeharto digunakan untuk mempermudah control dihilangkan. Maka masyarakat pada waktu itu sangat mudah mendapat Surat Izin Umum Penertiaban Pers (SIUUP). Dengan euforia terbukanya atau bebasnya dari belenggu kontrol pemerintah maka orang ramai – ramai membikin massa cetak



**Tabel 14 :Citra yang Dimunculkan oleh TEMPO Kompas, dan Republika Mengenai Nurmahmudi Ismail dan Badrul Kamal**

	<b>Nurmahmudi Ismail</b>	<b>Badrul Kamal</b>
Tempo	Sebagai aktor politik yang biasa – biasa saja.	Sebagai aktor politik yang biasa – biasa saja.
kompas	Baik kearah buruk. Tokoh politik yang berambisi besar menjadi orang nomor satu diDepok.Tokoh yang mendapat dukungan dari partai – partai politik yang lain.	Baik tokoh yang banyak mendapat dukungan dari partai politik yang lain bijaksana dalam menghadapi kekalahkannya walaupun pengaruhnya masih cukup signifikan di diDepok
Republika	Baik,simpatik, demokrasi, mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagai aktor politik yang dapat memenuhi harapan masyarakat.	Baik kearah buruk. Tidak demokrasi.

Dari ruang lingkup permasalahan, citra baik dan buruk yang dimiliki oleh tokoh politik dalam tabel 10, menyangkut beberapa hal ini berikut:

1. Berhubungan dengan wacana ‘wali kota pilihan rakyat atau wali kota pilihan hakim’ seorang calon walikota jika mendapat julukan wali kota pilihan rakyat maka dikatakan memiliki citra yang baik; dan jika sebaliknya dikatakan wali kota pilihan hakim maka berarti bercitra buruk
2. Berkaitan dengan perilaku massa pendukungnya, jika massa pendukung wali kota A itu cenderung anarkhis massa pendukungnya itu dicitrakan buruk; kalau massa B cenderung damai dalam aksi – aksinya maka dikatakan massa pendukung itu dicitrakan positif atau baik
3. Berkaitan dengan ‘nilai – nilai kejujuran dan keadilan’, jika calon wali kota A tidak memiliki usaha untuk memperjuangkan nilai – nilai kejujuran dan keadilan maka dicitrakan buruk; sebaliknya jika calon wali kota B memiliki upaya untuk memperjuangkan nilai – nilai keadilan dan kejujuran maka ia dicitrakan baik. Ada semangat demokrasi.
4. Berkaitan dengan “dukungnya dari berbagai masyarakat dari berbagai kalangan”, jika digambarkan calon wali kota A tidak memiliki dukungan dari masyarakat dari berbagai kalangan maka ia dicitrakan buruk, dan jika calon wali kota B mempunyai dukungan dari masyarakat dan berbagai kalangan maka dicitrakan baik.

Seperti inilah setiap media mengkonstruksikan kedua calon wali kota dengan menggunakan bahasa politik dari simbol – simbol yang berbeda. Dalam lampiran terdapat hasil analisis teks eklektif, didalam lampiran tersebut terdapat jargon – jargon dan istilah – istilah yang mengarahkan pada pembentukan makna positif dan negatif terdapat kedua aktor politik tersebut.

Dengan adanya pencitraan dan stamen dari berbagai kalangan/para ahli yang dimunculkan mengenai sikap para kandidat dan masa pendukungnya, maka membentuk opini publik.

Ada sebuah pergeseran oleh harian Republika; seperti berita pada liputan politik, koran ini biasanya memberikan porsi dan kecenderungan kepada partai Golkar, namun ketika calon dari Golkar maju sebagai kandidat, harian yang mendukung Nurmahmudi Ismail notabene merupakan calon dari PKS; adanya sebuah kecenderungan pada masa sekarang ketika kebebasan dan transparansi dikumandangkan maka mempengaruhi sikap para pekerja media atau media itu sendiri. Maka sentimen ideology menjadi hal yang layak jual dan memiliki nilai bagi media, seperti porsi yang sedikit di berikan Kompas untuk Badrul Kamal. Mungkin juga pertimbangan sikap personal kandidat menjadi pertimbangan tersendiri. Disamping alasan ekonomi dan politik media yang memanga masih kental didalam situasi pasar bebas seperti saat ini. Tempo dengan semangat idealisme dan nasionalis serta bersifat netral pun

tetap memasukan pertimbangan ekonomi politik media dan pasar yang selalu berkembang.

**Tabel 15 : Perbandingan Komunikasi Politiuk Masa Orba, Reformasi, dan Pers B ebas /Pers pasca Reformasi<sup>37</sup>**

	ORBA	Reformasi	Pers Bebas
Komunikator politik	Sumber resmi yang berasal dari kalangan pejabat pemerintah dan aparat.	Datang dari berbagai semua kekuatan politik dan LSM serta aktivis	Bebas, lebih vokal dan transparan dari berbagai kelompok kepentingan cenderung bermainnya kapitalis/pemilik
Sifat – sifat pesan politik	Isu bersifat seragam orientasi tunggal, menggunakan bahasa eufisme, bersifat anti luar Orba.	Isu lebih beragam orientasi dari berbagai arah heterogen. Bahasa yang lebih terbuka cenderung permisif menganggap Orba sebagai musuh	<b>Heterogen. Terjadi perang wacana.</b>

<sup>37</sup> Diambil dari Hamad, Ibnu, *Konstruksi realitas Politik Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis terhadap Berita-berita Politik*, Granit Bandung, 2004: 172; ditambahkan dengan komunikasi politik di erapers bebas yang merupakan hasil wawancara dan pengamatan agar didapat perbedaan yang disesuaikan dengan konteks perkembangan komunikasi politik dari masa ke masa.

Khalak frame,dan sikap politik	Khalayak dalam keadaan tertekan pengetahuan tentang isu - isu	Lebih peduli dalam isu – isu politik menjadi pendukung partai	Khalay lebih terbuka dan cenderung Vokal. Lebih berani.
	Politik sangat terbatas. Sikap politiknya cenderung pasif	Dengan kesadaran ideologis yang cukup tinggi. Berusaha melibatkan diri dalam pembicaraan politik.	Menyatakan dukungan dan mengkritik yang tidak disukainya. Sintimen ideology menjadi peluang untuk mendukung partai – partai yang sesuai dengan ideologinya.
Media massa	Sistem conrol media massa oleh Orba atau penguasa. Porsi Golkar lebih besar dari partai lainnya.	Adanya kebebasan media yang membawa kecenderungan partisan kepada salah satu kekuatan politik.	Pers bebas tanpa bats. Dalam era TIK, Penuh persaingan, media massa dikuasai oleh pemegang modal. Partai – partai besar masih mendapat porsi yang besar dari

			media yang memiliki kesamaan ideology.
Efek komunikasi politik	Segala keputusan dan kebijakan pemerintah harus dipatuhi; segala yang datang dari pemerintah dianggap benar	Apresiasi yang merata sesuai kekuatan politiknya.	Segala keputusan dari pemerintah menjadi diskusi publik yang kontroversial. Dukungan dan kritikan datang lebih transparan.

Yang menarik melihat perkembangannya kondisi komunikasi politik di Indonesia dari masa ke masa; selalu mengalami dinamika yang signifikan menuju pada demokrasi. Pada saat Orde baru Pers cenderung bebas yang dapat dikatakan kebablasan; dengan kritikan yang tajam kepada kebijakan-kebijakan pemerintah dan terjadinya perang wacana secara terbuka.

Dinamika politik dan sistem pers selalu bersinggungan. Di saat sekarang ini ketika demokrasi sedang diperjuangkan, pers dianggap sama dengan demokrasi langsung, dari hari ke hari dibebani tugas dalam skala yang jauh lebih luas. Pers bagaikan "*Court of Public Opinion*"<sup>38</sup> yang

---

<sup>38</sup> Lippmann, Walter: *Opini Umum* (terjemahan) Yayasan Obor Indonesia, 1998: 346.

terbuka siang dan malam dan terus menerus membuat undang-undang dan segalanya; dan itu jelas di luar kemampuan.

Wartawan sebagai subyek mempunyai otoritas mengani interpretasi melalui kesadaran yang muncul saat menulis sebagai kondisi yang berbeda dari ucapan, teks membutuhkan otonomi berkenaan dengan sang pengarang, berkenaan dengan kondisi sosial historisnya.<sup>39</sup> Peranan wartawan atau pers dalam membangun opini publik politik merupakan peran sentral. Peran media adalah membantu menciptakan opini publik, tidak melulu melalui agenda setting.<sup>40</sup> Akan tetapi dalam arti lain media memang mengatakan apa yang harus dipikirkan. Hal ini berhubungan ketika pencitraan yang dilakukan kepada aktor politik untuk mendapatkan opini publik mengenai si aktor sesuai dengan tujuan media.

Perang wacana saat ini juga diikuti oleh para intelektual, karena dalam politik tertentu ada beban yang mengarahkan pemikiran yang lebih baik dan terbuka kepada masyarakat; hal ini memerlukan peranan kaim intelektual sebagai individu yang dikaruniai bakat untuk merepresentasikan, mengekspresikan dan mengartikulasikan pesan, pandangan, sikap, filosofi dan pendapatnya kepada publik. Dan peran ini tentu ada batasnya, serta tak dapat dimainkan tanpa rasa seseorang yang melontarkannya kepada publik guna membangkitkan pertanyaan,

---

<sup>39</sup> Thompson, John B. *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia* (Terjemahan), 2003: 306-307.

<sup>40</sup> Nimmo, Dan: *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek* (Terjemahan), Penerbit: PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001: 27.

menghadapi dogma, menjadi orang yang tidak mudah dikooptasi para penyandang kepentingan.<sup>41</sup>

#### **IV.B.3 MEMPERTANYAKAN IDEALISME DAN DEMOKRASI MEDIA DI ERA KETERBUKAAN DAN PASAR BEBAS**

Pengkonstruksian dua aktor politik pikada Depok ini terjadi pada masa Indonesia dalam era keterbukaan dan ketika berlakunya sistem pers bebas dan pasar bebas pada tahun 2005. pada saat ini Indonesia berada pada era kebebasan, bahkan nyaris tanpa batas, ini terlihat pada warna pemberitaan baik pada televisi maupun media cetak, beritanya pun kesenderungan permisif dan mengorbankan harkat manusia yang paling fundamental. Pada saat ini tidak ada lagi privasi individu; baik publik figur maupun elit politik; semua dihadirkan kepada pemirsa ataupun pembaca begitu vulgar nyaris tanpa batas. Apalagi ketika terjadi kasus pada mereka, alhasil menjadi konsumsi publik yang murah meriah; lagi-lagi alasan pasar menjadi harga mati. Kini kita berada pada saat ketika semua orang bebas berbicara, seakan kita sedang mengalami euforia kebebasan dalam berekspresi, baik dari masalah politik, sosial maupun budaya.

Pada masa ini, media massa dan kelompok-kelompok penekan, elit politik; menggabungkan antara kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik dari setiap wacana yang dibentuknya maupun dalam sepek terjangnya, hal ini diprediksi ketika kondisi yang sekarang ini pada masa

---

<sup>41</sup> Said, Edward W: *Peran Intelektual* (terjemahan), Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998:7.



berlakunya pasar bebas dan berada pada wilayah persaingan yang ketat; media masa semakin terlihat galak dan menunjukkan taringnya. Namun demikian; yang menjadi pertanyaan disini adalah apakah taringnya masih tajam dalam mempertahankan independensi, menyuarakan nilai-nilai demokrasi dan idealisme; hal inipun dipertanyakan; melihat ada kecenderungan media pada masa pers bebas saat ini masih membebaskan dalam teks hasil produksinya suatu keberpihakan media kepada aktor-aktor politik tertentu; baik dengan cara membungkusnya melalui kepentingan *ideology*, ekonomi, dan politik pemberitaan media. Pertanyaan besar pun muncul; apakah pers di masa sistem pers bebas seperti saat ini ikut memberikan kontribusi kepada berkembangnya nilai-nilai demokrasi dan independensi, atau sebaliknya pers ikut serta dalam euphoria kebebasan tanpa batas yang menjadikan pers melakukan keberpihakan.

Media saat ini mengglobal mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ada beberapa yang menjadi faktor pendorong bagi perubahan dan kedinamisannya<sup>42</sup> yaitu: kemajuan teknomogi yang sangat cepat, berubahnya gaya hidup masyarakat dalam memperoleh informasi, industri media dan perkembangan jurnalistik di era perkembangan yang terbaru. Meluasnya penggunaan *computer* personal menjadi pembuka babak baru zaman informasi. Hal ini pun dimarakkan dengan munculnya internet di decade 1990-an. yang bermula dari kebutuhan militer, kemudian menjadi

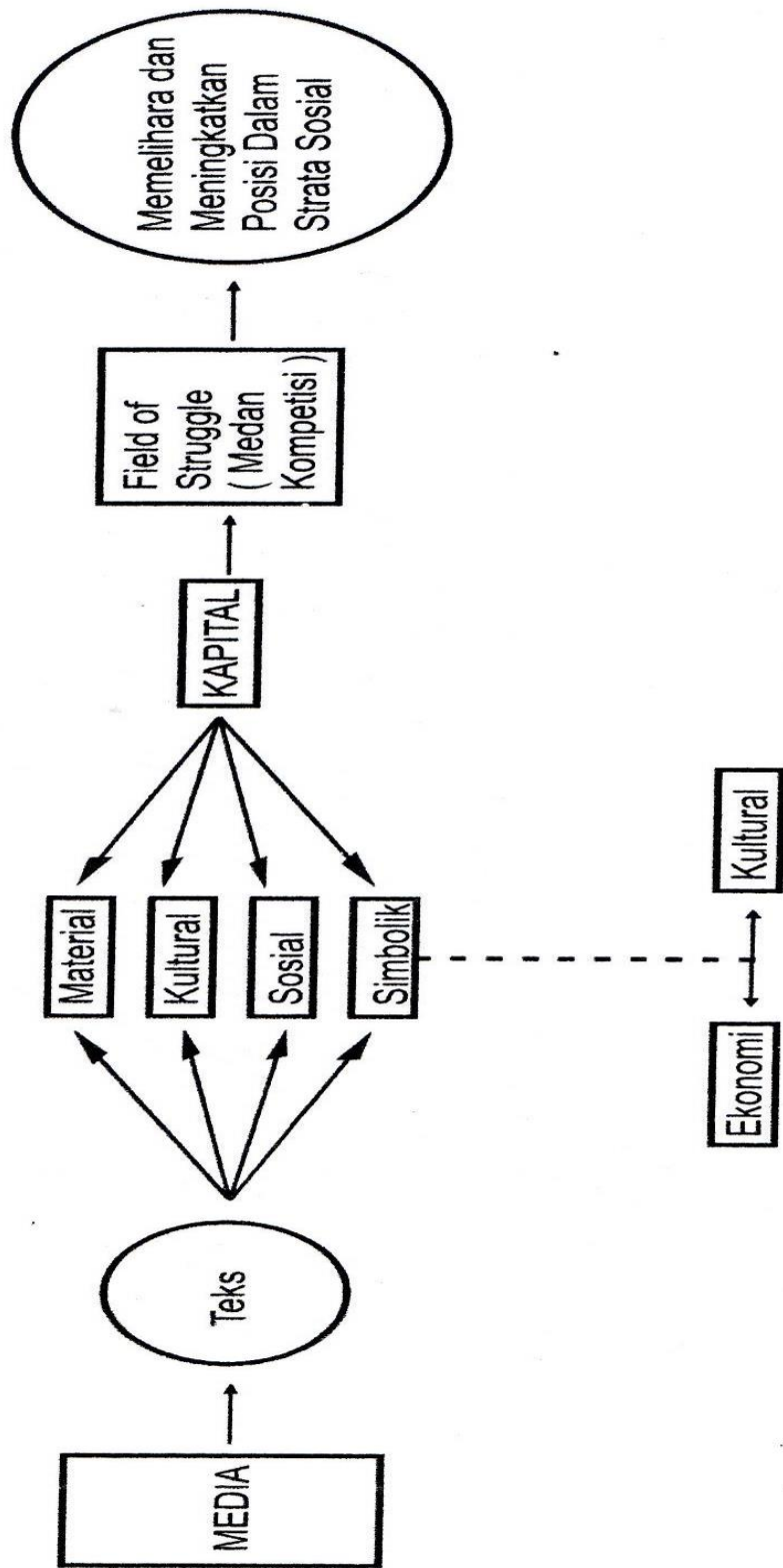
---

<sup>42</sup> PT Kompas Media Nusantara, (2007): *Kompas Dari Belakang ke Depan, Menulis dari Dalam*: 237.

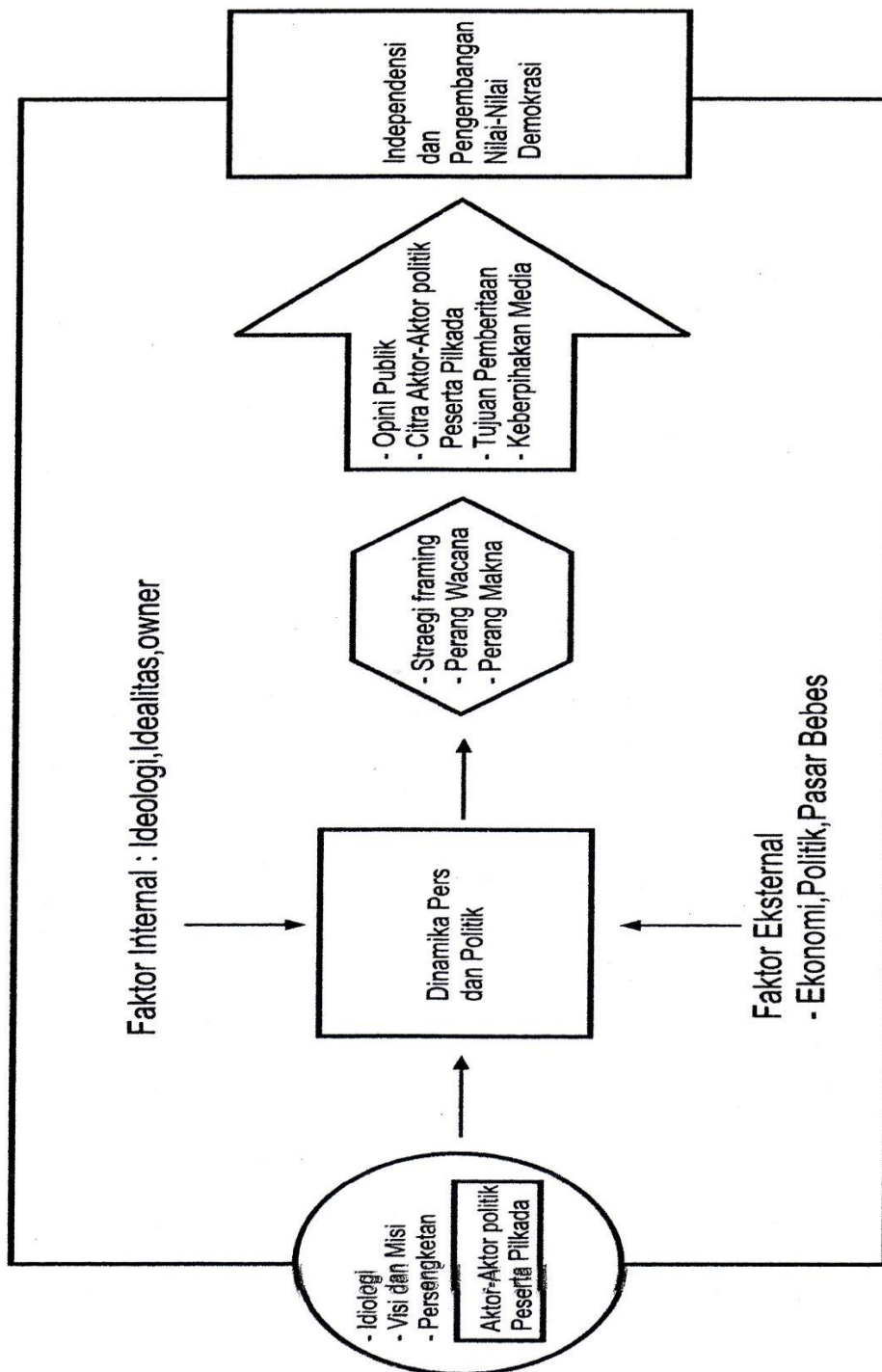
perpaduan antara dua teknologi yakni teknologi informasi dan telekomunikasi; namun demikian internet disamping memberikan pencerahan untuk kemudahan dalam mengakses informasi, internet juga meresahkan; terutama untuk generasi muda dan pengaruhnya pun sangat signifikan dalam perubahan pola hidup kita. Namun demikian perkembangan teknologi ini tidak dapat memanfaatkan perkembangan koran sebagai media cetak konvensional untuk tetap mempertahankan diri atau tetap eksis. Dengan ini maka berduyun-duyun koran memperbaharui wajahnya, seperti format baru, pendekatan editorial baru, distribusi dan pemasaran juga dibenahi. Namun demikian adanya gejala masuknya kapitalisme dan kepemilikan media oleh investor asing maka strukturisasi terjadi; dan owner masih menjadi yang krusial dalam mempengaruhi konten pemberitaan; seperti yang diperlihatkan pada gambar 18 ; yang diadopsi dari Piere Bourdieu; (dalam Swartz, David, 1997: *Culture and Power. The Dociology of Piere Bourdieu*).

Disamping itu pembaca setia koran tertentu, telah banyak dihadapkan pada alternatif media baru yang menggabungkan seluruh media atau disebut dengan multi media, konvergensi media. Masyarakat yang semakin kritis saat ini; menjadi alasan yang harus diperhitungkan oleh media untuk melaksanakan strategi pengemasan pesan. Maka media pun berduyun-duyun dan berlomba untuk bermain dalam pengkonstruksian wacana. Maka saat ini semua lebih nampakberagam; baik opini, analisa, sikap politik, ideology, maupun perspektif individu.

Media pun dalam mengangkat suatu isu peristiwa politik secara implicit dan eksplisit mempertimbangkan kesepakatan ataupun konsensus yang dibuat dengan publiknya. Gambar 18 menunjukkan bagaimana kekuatan kapitalisasi bermain dalam media massa baik cetak maupun elektronik. Disini media memegang peranan bagaimana realitas itu diciptakan oleh kapitalis, sehingga hanya mengetengahkan berita yang bagaimana yang menarik, disukai tanpa memperdulikan dampaknya. Power itu tersebar dimana-mana dan secara cepat menyentuh seluh aspek kehidupan masyarakat. Disini terlihat, media dengan kepentingan ekonomi dapat mempenagruhi konten berita yang berada dalam konteks persaingan. Oleh karena itu menjadi perlu dilakukan aspek-aspek digitalisasi, konsolidasi dan deregulasi pada media yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini dengan adanya perusahaan asing yang menginvestasika dananya pada media; pemerintah diharapkan memperjelas aturan prosentase kepemilikan saham, yang tujuannya untuk menuntut responsibility dari *owner*.



Dalam liputan peristiwa Pilkada Depok 2005 ini secara umum menggambarkan suatu model peliputan seperti yang ditunjukkan oleh gambar 19.



Model ini menunjukkan bahwa pilkada sangat rawan konflik. Walaupun demikian sebagian warga masyarakat menilai pemilihan kepada daerah secara langsung cukup berhasil. Seperti yang terdapat pada berita Kompas dengan judul; *Pilkada, Gagalnya Desentralisasi Demokrasi* oleh Subhan SD, yang dimuat pada 20 Desember 2005. Disini dijelaskan walaupun sebagian warga masyarakat mengatakan atau menilai pilkada secara langsung cukup sukses yang ditunjukkan oleh 59 persen responden (N = 835) merasa puas dengan pelaksanaan pilkada yang dimulai sejak Juni 2005. Namun demikian ketika dibandingkan dengan keyakinan publik akan kemampuan kepala daerah yang baru mengatasi persoalan daerah mereka, tidak sampai sepatuh responden yang menyakininya (44,9 persen) dan sisanya tidak tahu (23,6 persen), serta tidak yakin (31,5 persen).

Dari semua pelaksanaan pilkada, hampir seluruhnya tidak sepi konflik. Kiruh pilkada sebenarnya berawal juga dari dimulainya pemcalonan kandidat yang dinilai cacat hukum atau dugaan menggunakan ijazah palsu, praktik curang, politik uang (*money politic*), hingga perolehan dan perhitungan suara; hal ini pun terjadi pada pilkada Depok 2005.

Terlepas dari perhelatan pilkada, (yang membutuhkan dana sekitar Rp. 4,25 triliun, 50 persen yang menjadi beban APBN dan 50 persen lainnya dari APBD pers dan media menghadapi tantangan yang sulit di masa depan. Media harus meresponnya dengan bijak, dengan memperhatikan hal-hal berikut; media harus berhenti mengulahi

audiensnya; harus ada perubahan. Media diubah karena percakapan (*places for conversation*) dan “Tujuan” (*destination*) dimana “*blogger*” dan “*podcaster*”<sup>43</sup> bersatu untuk melaksanakan diskusi yang luas. Blog memungkinkan perkembangan apa yang disebut jurnalisme antar perorangan; banyak yang memprediksi ini membuka peluang berkembangnya suatu bentuk jurnalisme masa depan.

Dengan melihat tantangan yang demikian menekan tentu tidaklah mudah bagi media untuk tetap *survive*, untuk itu mereka harus mengerahkan seluruh sumber dana dan upayanya. Konvergensi<sup>44</sup> juga merupakan wacana baru yang aktual harus disikapi oleh media, terutama media cetak mengenai *repositioning* yang baru dalam era digital.

Yang menjadi pertanyaan apakah koran atau surat kabar dapat mempertahankan *independency*nya dalam rangka menyuarkan demokrasi; ini yang menjadi kecemasan tersendiri bagi kita akan menunggu dimasa depan. Dimana masa depan media, terutama media cetak (koran) harus berbagi dengan berbagai media baru, tentu ini akan menjadi masalah ekonomi, politik dan pasar; perebutan audiens yang sangat kejam dan cepat diantara media. Apakah mereka; media (khususnya koran) juga akan tetap bertahan dengan *ideology*, *sentiment ideology* tertentu, nilai-nilai

---

<sup>43</sup> PT Kompas Media Nusantara, (2007): *Kompas Dari Belakang ke Depan, Menulis dari Dalam*: 276. Di sini juga dijelaskan blogger adalah penulis blog dari weblog- yang tidak lain merupakan jurnal online yang berisi catatan jurnal pribadi, pemikiran atau penghubung (link) web, di mana setiap orang dapat ikut secara aktif. Murdoch menyebut sebagai “penduduk asli digital” (*digital natives*) yaitu generasi yang terlahir di era digital. Di buku yang sama pada hlm: 275 juga dijelaskan bahwa di AS ada 44 persen pengguna internet yang berusia 18-29 tahun dan membacanya setiap hari (menurut survey CNN/USA/Today/Gallup)

<sup>44</sup> PT Kompas Media Nusantara, (2007): *Kompas Dari Belakang ke Depan, Menulis dari Dalam*: 277.

institusinya, kultur, dan keberpihakkannya, atau akan menjadi dan merayap *ideology* dan nilai-nilai baru dari dampak globalisasi di Era Konvergensi teknologi dan informasi serta bermainnya neoriberalisme dan sistem pasar bebas dalam media seperti yang terjadi pada saat ini; hal ini akan menjadi sebuah pertanyaan yang perlu diupayakan jawabannya dalam penelitian yang lebih lanjut.



## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **V.1 Kesimpulan**

Sasaran akhir penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban permasalahan penelitian dan membuktikan dari tujuan penelitian. Dengan ini, berdasarkan serta imterprerasi pada pokok bahasan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan metode analisis CDA berdasarkan paradigma kritis, dapat terungkap bahwa sebuah teks berita (sebagai realitas yang teramati) yang kita baca tidak begitu saja berdasarkan fakta, namun merupakan “fakta yang telah dikonstruksi” atau fakta yang telah “direkayasa” oleh media. Berita merupakan hasil akhir dari suatu “proses” sistem yang kompleks dengan berbagai kepentingan yang membebani (rutinitas wartawan, nilai-nilai institusi, ideologi ekonomi, budaya, persaingan pasar, benturan-benturan keinginan antara media dan masyarakat serta politik pemberitaan). Dalam melihat berita, nilai-nilai wartawan secara subjektif masuk yang mempengaruhi cara pandang wartawan dalam memberikan persepsi atas peristiwa, Pilkada Depok adalah peristiwa politik yang termasuk aktual dimana memberikan semangat baru media untuk meliputnya karena memiliki nilai berita yang aktual. Media berusaha untuk menjalankan demokrasi dan meliputi peristiwa, namun bagi mereka tidaklah mudah, karena sebelum meliput ada rapat-rapat redaksi, nilai-nilai, batasan-batasan dan dinamika

internal yang terjadi dalam diri wartawan. Inipun meliputi sudut pandang, siapa yang terpilih sebagai nara sumber, isu apa yang akan dimunculkan, siapa sebagai peran utama, siapa yang menjadi dirugikan dan efek apa yang menjadi bekal wartawan sebelum turun lapangan untuk meliput dan dalam ruang editing yang dipengaruhi oleh owner, hal ini merupakan proses yang selalu terjadi di dalam institusi media. Disamping itu masyarakat pada konteks saat ini mempunyai kesadaran politik cukup tinggi dan antusias terhadap politik, hal ini juga menjadi pertimbangan media di dalam memberikan berita politik yang cukup berkualitas bagi pembacanya.

2. Pada *level deskripsi* menghadirkan sebuah realitas historikal, pengaruh dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang tokoh-tokoh politik yang tertuang pada level interpretasi dan eksplanasi. Pada liputan Pilkada Depok 2005; yang terlihat dari Republika dengan strategi framingnya; Republika memihak kepada Nurmahmudi Ismail, walaupun pada era orde baru koran ini terkesan berpihak pada Golkar. Ini menjadi pertimbangan Republika bahwa Badrul Kamal adalah tokoh politik Islam konvensional dalam Pilkada Depok. Sedangkan Nurmahmudi Ismail, merupakan aktor politik yang berasal dari suatu partai yang dianggap cukup bersih yaitu PKS dan sangat vokal dalam menyuarakan nilai-nilai keadilan dan anti korupsi disamping itu memang partai ini merupakan partai Islam baru yang memberikan pencerahan terutama dikalangan aktivis muda dan akademis. Namun demikian dari semua pemahaman ini alasan ideologi, ekonomi dan untuk mempertahankan pasar

tetap menjadi yang utama, karena Republika memiliki pasar dan calon pembaca di segmen muslim yang kosmopolit.

Sementara itu KOMPAS dengan sedikit malu-malu dan menggunakan bahasa yang halus masih terasa menyuarkan sentimen ideologinya melalui beberapa hal; yaitu cara meliput, pilihan nara sumber, sudut tembak, dan isu yang dimunculkan. Lagi-lagi KOMPAS melakukan ini adalah untuk mempertahankan pasar yang notabene KOMPAS sudah memiliki pasar yang loyal. Untuk itu kehati-hatian KOMPAS dalam penggunaan bahasa adalah sebagai cara untuk mempertahankan sikap idealisnya, yang memang salah satu nilai jual untuk KOMPAS. Bagi KOMPAS untuk menarik pembaca setianya. Dalam liputan Pilkada Depok 2005, KOMPAS memunculkan citra positif kepada Badrul Kamal adalah seseorang yang paling tidak dianggap lebih sekuler dari Nurmahmudi. Dan melihat liputan KOMPAS yang tidak terlalu bersemangat tentang Pilkada Depok 2005 memperlihatkan bahwa KOMPAS tidak menganggap penting mengenai Pilkada Depok 2005, dan melihatnya sebagai peristiwa politik yang biasa-biasa saja.

Sementara itu Koran TEMPO hadir dengan semangat demokrasi dan idealismenya, dan dengan pertimbangan politik “berdiri” diantara kedua Koran diatas; hal ini ditunjukkan dengan penelusuran liputan pilkada Depok 2005 dengan strategi framingnya yang dilakukan koran TEMPO dalam analisisnya; TRMPO menempatkan tokoh-tokoh politik Pilkada Depok 2005 tanpa keberpihakan, andaikan itu ada TEMPO menempatkannya sangat

berimbang, dengan memunculkan citra positif bergantian diantara dua tokoh tersebut dalam wacana yang berbeda.

Melihat perbedaan-perbedaan dari ketiga Koran tersebut dan hasil menelisik dalam terdapat satu kesamaan, yaitu alasan ideologi dan ekonomi atau mempertahankan pasar; masih terlihat mendominasi politik pemberitaan media, meskipun mereka membungkusnya dengan nilai-nilai semangat menyuarkan demokrasi dan idealisme media yang selalu mereka jaga secara institusi.

3. Terdapat tiga jenis tipe pengkonstruksian yang dilakukan media terhadap kedua tokoh Politik Pilkada Depok 2005. pertama, berdasarkan citra yang dibangun untuk kedua tokoh tersebut. Karena di era keterbukaan seperti saat ini, personal yang memiliki semangat demokrasi dan berantusias menyuarkan rasa keadilan berpeluang mendapat dukungan dari berbagai kalangan dibandingkan dengan personal yang merupakan bagian dari Orde Baru. Kedua, berdasarkan kepentingan ekonomi atau mempertahankan pasar, idealisme media, sentimen ideologi serta politik pemberitaan, menjadikan adanya keberpihakan media terhadap salah satu tokoh politik yang bersaing yang berakibat pada pencitraan keduanya. Ini diperlihatkan ketiga media tersebut melalui strategi pengemasan pesan yang berbeda; ada yang secara halus memasukkan keberpihakan melalui sentimen ideologi, ada yang mengisi ruang ditengah-tengah dengan bersifat nasionalis demokrasi dengan memberikan porsi yang seimbang di dalam pemberitaannya, dilain pihak ada yang membungkus kepentingan ideologi dan ekonomi atau pasar dengan

semangat idealisnya. Ketiga, berdasarkan perilaku massa dan partai-partai pendukungnya. Citra yang dibentuk KOMPAS adalah cenderung negatif ke Nurmahmudi dan positif pada Badrul Kamal, Republika memberikan citra positif kepada Nurmahmudi dan cenderung negatif kepada Badrul kamal. Tempo, berdiri diantara keduanya dan berimbang.

4. Berdasarkan CDA jika dilihat dari pengkonstruksian ketiga koran di atas; maka dapat dilihat motif dan tujuan masing-masing koran dalam mengkonstruksikan dua tokoh politik tersebut. Motif ideologis dan ekonomi dapat kita lihat dari KOMPAS dan Republika dengan melihat cara mereka melakukan keberpihakan pada salah satu tokoh tersebut. Motif ideologis, ekonomis dan politis dilakukan Republika dalam membela Nurmahmudi. Sedangkan Koran TEMPO cukup berimbang, walaupun kepentingan ekonomi masih membebani disetiap pemberitaannya. Dari semua ini motif ekonomi dan pasar hampir menjadi alasan ketiga koran tersebut, walaupun tetap melibatkan motif ideologis, dan idealis. Tujuan dan ketiga motif secara halus diselipkan dan tidak secara jelas diterjemahkan, karena diantar ketiga Koran; motif-motif itu terlihat tumpang tindih. Dan semuanya membungkus motif pasar atau ekonomi di dalamnya. Hal ini mendasari pertimbangan ketiganya yang telah memiliki posisi/segmen yang berbeda dalam pasar. Republika dan KOMPAS menggunakan sentimen ideologisnya untuk tetap mempertahankan segmen pasarnya.
5. Berbagai strategi yang digunakan koran atau media di dalam mengkonstruksikan tokoh politik, pada dasarnya selalu tidak dapat terbebas

dari nilai-nilai internal; yaitu ideologis, idealis serta faktor eksternal antara lain, pasar, sistem pers dan situasi politik pada saat peristiwa itu dipersepsi dalam konteks masyarakat pada massanya. Ini semua adalah hasil pendidikan atau pembentukan dalam suatu institusi media dimana wartawan memegang peranan yang penting. Hasil wawancara menunjukkan bahwa institusi media akan mencetak suatu subjek atau wartawan yang benar-benar mewakili busaya perusahaan itu, dengan agenda settingnya, diarahkan, bahkan ada yang memberikan pendidikan bagaimana menjadi wartawan A atau wartawan B, maka ketika kita melihat hasil tulisan berita akan sangat kental terlihat bagaimana “gaya mereka bercerita”. Sehingga akan sangat terlihat bahwa berita ini adalah tulisan wartawan TEMPO, yang lain adalah tulisan Wartawan KOMPAS dan seterusnya.

Seluruh berita persengketaan Pilkada Depok 2005; dari mulai penetapan hasil perolehan suara oleh KPUD sampai dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang berakhir pada pelantikan wali kota terpilih : isu-isu yang trend seputar silang pendapat tentang keabsahan perolehan dan wacana terminologi silang pendapat mengenai arti kata-kata; “final dan mengikat”, persetujuan dua tokoh yang fenomenal, wacana mengenai sikap dari berbagai kalangan sekitar mempertanyakan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, sikap berbagai kalangan mengenai putusan PT Jabar, beberapa aksi pengerahan massa antara dua kubu, kedudukan MA, kedudukan MK serta aksi damai. Ancamandan teror juga terjadi kepada ketua dan anggota KPUD dari berbagai pihak. Kurangnya kesiapan teknis di lapangan

dan sosialisasi mengenai produk hukum pilkada juga menjadi agenda tersendiri. Permintaan peliputan untuk membela salah satu kubu juga terjadi ke tim redaksional. Keadaan politik di Depok juga tidak kondusif; di DPRD Depok juga terjadi konflik antara pendukung dan anti Nurmahmudi, banyak isu korupsi juga dimunculkan untuk mempertanyakan “kerja” wali kota Depok yang lama Badrul kamal. Sementara itu masyarakat di Depok juga terbagi-bagi ada pendatang, akademisi ada pribumi yang termarjinalkan. Janji-janji politik yang lama yang belum terpenuhi juga berkembang dan menimbulkan banyak kontra produktif di masyarakat Depok. Dinamika sosial politik di Depok amat menarik dan unik, hal ini menjadi alasan yang sangat penting sebagai focus penelitian, disamping itu Depok merupakan kota penyanggah Jakarta yang cukup signifikan dan dapat diperhitungkan bagi pengaruh politik nasional.

Yang terakhir dan terpenting adalah sebagaimana dalam kehidupan tataran sosial; media massa dalam hal ini koran juga terpetakan dalam domain persepsi yang beragam menghadapi pro dan kontra keberpihakan dan peletak wacana. Hal ini dapat dipahami karena media atau institusi tidak dapat berdiri tanpa dibebani oleh kepentingan-kepentingan didalamnya. Isu-isu yang dikonstruksikan pada sudut tembak yang berbeda, permainan bahasa, penggandaan makna dan simbol-simbol yang mewakili kepentingan memang harus diambil oleh media sebagai alasan agar berita menjadi lebih berwarna dan layak jual. Ini seperti berita-berita persetujuan Pilkada Depok 2005 telah membuktikan bahwa selalu ada keberpihakan seorang subjek entah itu sebagai

peng *create* wacana atau sebagai yang mewakili institusi, yang meramaikan proses kompleks dalam redaksional dalam rangka menjual konten yang memang layak jual kepada pembacanya yang juga sangat kompleks. Media, saat ini sedang menghadapi permaianan pasar global dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi; *blog, facebook* yang membuka peluang sebagai alternative pilihan bagi pembaca setia mereka, ini pun menjadikan kekhawatiran tersendiri bagi media dalam rana mempertahankan eksistensi secara ekonomi.

## V.2. Saran-saran

1. Keberadaan pers yang sangat kursial dalam kehidupan politik hendaknya dapat difungsikan secara maksimal untuk mengarahkan kehidupan politik dan nilai-nilai demokrasi yang lebih mencerdaskan; oleh karena itu sebaiknya pers menghindari keberpihakan yang membabi buta dengan berbagai tokoh atau kelompok tertentu dengan berpegang kepada aturan-aturan jurnalistiknya. Kebebasan pers hendaknya didefinisikan pada kebebasan yang bertanggungjawab secara moral dan sosial. Meminjam kata-kata Daniel Sparingga dalam *Seminar Komunitas Indonesia untuk Dempkrasi*; media hendaknya tidak hanya terjebak pada wilayah pertempuran politik (*polical struggle*) dan pertarungan ideologis (*ideological battlefield*) serta perang wacana secara terselubung. (*delicate and subtle*). Tetapi lebih berperan dalam memberikan pembelajaran nilai-nilai kebebasan yang bertanggungjawab.



2. Dengan banyaknya pelaksanaan pilkada dan konflik yang menyertainya; alangkah baiknya jika pers tidak ikut menambah keruhnya suasana dalam setiap pemberitaannya, tetapi lebih kepada memberikan alternative solusi yang cerdas bagi pembacanya; untuk itu alangkah indahnya jika masa kebebasan seperti sekarang ini pers mengimbangnya dengan tanggung jawab sosial terhadap berita dan opini-opini serta pencitraan tokoh-tokoh atau kelompok tertentu yang merupakan hasil konstruksinya. Hendaknya Pers dapat menjadi pelopor inovasi dalam solusi politik di dalam diskusi-diskusi publik melalui strategi wacana yang menyegarkan, kepada masyarakat, tidak memberikan istilah atau tanda-tanda yang memiliki makna yang bercabang, yang menimbulkan kebingungan nasional di dalam kondisi masyarakat yang sangat sulit seperti saat ini.
3. Dalam suasana pasar bebas yang mendorong kapitalisasi media; ketika media memiliki kekuatan dalam proses ekonomi dan struktur produksi makna dalam media serta keterkaitannya dengan politik, hal ini dapat mempengaruhi konten pemberitaan; oleh karena dalam rangka mempertahankan independensi dan fungsi *watcdog* yang diemban media: hendaknya pers menjaga idealismenya, meskipun dalam persaingan yang ketat. Kedepan sangat mendesak dan menjadi tanggung jawab yang besar bagi akademisi untuk diupayakan penelitian dan kajian-kajian yang lebih mendalam dan berinovasi mengenai fungsi pers dan efeknya dalam era keterbukaan yang sarat dengan perang wacana. Dimana para era ini, kita berhadapan dengan era digital dimana perkembangan informasi dan

teknologi perkembangan (mengglobal); hal inipun menimbulkan permasalahan tersendiri; mengenai dampak efek serta bias batas-batas terluar yang boleh dan tidak boleh tersentuh; misalnya yang berhubungan dengan keamanan negara atau individu.

## LAMPIRAN 1

### PENELUSURAN LIPUTAN PERISTIWA POLITIK BERITA-BERITA “PERSENGKETAAN PILKADA DEPOK 2005” (27 JUNI 2005-26 JANUARI 2006)

No.	Nama Koran	Memuat Berita Pro Badrul Kamal	Menuat Berita Nurmahmudi Ismaim	Berita Netral	Jumlah Berita	Prosentase Keberpihakan
1.	Kompas	32	-	5	37	98% BK
2.	Koran Tempo	22	19	35	57	Netral
3.	Republika	-	70	3	73	97% NI
	Total Berita yang dianalisis				167	

Berikut ini akan didiskripsikan penelusuran berita-berita (27 Juni 2005-26 Januari 2006) yang dianalisis mengenai Persengketaan Pilkada 2005 sebagai *Perbandingan* konstruksi ketiga koran tersebut dengan menggunakan strategi framing masing-masing koran. Ke 167 total berita yang ditelusuri dan dianalisis bagi penelitian level teks, melalui analisis framing. Berikut ini akan dihadirkan kepada pembaca dalam bentuk tabel lengkap dengan judul berita dan hasil analisis *framing* serta kesimpulan (adanya keberpihakan media) yang merupakan hasil dari analisis tersebut. dalam tabel tersebut terlihat prosentase yang sangat signifikan terhadap keberpihakan kedua media pada salah satu calon Walikota Depok 2005; yaitu KOMPAS dan Republika melalui berita-berita yang dimunculkan, pemilihan nara sumber yang diarahkan serta isu yang dimunculkan dan bisa juga disebut sebagai “Sudut Tembak” media. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran halaman berikut :

**PERBANDINGAN STRATEGI FRAMING YANG DIMUNCULKAN  
KOMPAS, KORAN TEMPO DAN REPUBLIKA DALAM  
MENGHADIRKAN BERITA PERSENGKETAAN PILKADA DEPOK  
2005**

**A. KOMPAS**

No.	Judul Berita	Frame yang dibuat Media	Pro BK	Pro NI	Netral
1.	Manipulasi dan Kecurangan di Kota Depok Sangat Mungkin Terjadi (28 Juni 2005)	“Indikasi Kecurangan Mengarah pada Pesaing Terberat BK”	√		
2.	Nurmahmudi Ismail Walikota Depok Terpilih (7 Juli 2005)	“Pelanggaran dan Keganjilan Mewarnai Kemenangan Nurmahmudi”	√		
3.	Badrul Ajukan Keberatan (13 Juli 2005)	“Badrul Resmi Ajukan Keberatan Hasil Penghitungan Suara”	√		
4.	Situasi Memanas Menjelang Pelantikan Walikota Depok (27 Juli 2005)	Pro dan Kontra Tanggapi Surat Pelantikan Walikota Depok di DPRD	√		
5.	Pilkada Dianulir, PKS : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Dagelan (5 Agustus 2005)	Pilkada Depok Dianulir; PKS Protes	√		
6.	Kader PKS Unjuk Rasa. Partai Golkar Minta Putusan Pengadilan dihormati (6 Agustus 2005)	PKS Diminta untuk Menghormati Putusan Pengadilan	√		
7.	KPU Jabar Minta MA Bertindak. PKS Gelar Istighosah (8 Agustus 2005)	MA Diminta Bertindak	√		
8.	KPU Ajukan PK, MA Anggap Putusan Sah (Agustus 2005)	Putusan PT Jabar Bersifat Final dan sah	√		
9.	Dua Kelompok Berhadapan. KPUD Depok Kebingungan (9 Agustus 2005)	Massa pendukung Nurmahmudi Hadapi Pendukung Badrul untuk Menolak Putusan PT	√		

		Jabar			
10.	Komisi Yudisial Bekerja Hakim Banding PT Jabar Kasus Pertama (10 Agustus 2005)	Nurmahmudi Kecewa dengan Putusan PT Jabar	√		
11.	Badrul Kamal : Pro Kontra itu Wajar (10 Agustus 2005)	Badrul Sikapi dengan Wajar Aksi Massa yang Menolak Putusan PT	√		
	Banding PT Jabar Kasus Pertama (10 Agustus 2005)	Dengan Putusan PT Jabar	√		
11.	Badrul Kamal : Pro-Kontra Itu Wajar (10 Agustus 2005)	Badrul Sikapi dengan Wajar aksi Massa yang Menolak Putusan PT Jabar	√		
12.	Putusan PT Final dan Mengikat. Depdagri Tidak Ikut Campur tangan (11 Agustus 2003)	Tidak Ada Upaya Hukum Lagi bagi Nurmahmudi	√		
13.	Pertemuan 2 Agustus Dicurigai. KPU Depok taklanjutan Proses (12 Agustus 2005)	Hakim PT Jabar dan Tim Badrul Kamal Dicurigai Melakukan Kesepakatan	√		
14.	Ketua PT Merasa Difitnah. Ketua MA minta Semua Pihak Sabar (13 Agustus 2005)	Nana Merasa Difitnah dengan Bergulirnya Pertemuan 2 Agustus	√		
15.	Lima Hakim PT Jabar Diperiksa Komisi Yudisial. KPU Depok Desak MA Percepat Proses PK (30 Agustus 2005)	Komisi Yudisial Periksa Lima Hakim PT Jabar	√		
16.	Ketua PT Jabar Dipanggil MA (16 Agustus 2005)	Putusan PT Jabar Sesuai Prosedur	√		
17.	Kader PKS Akan Terus Melawan (19 Agustus 2005)	Hakim PT Jabar Dianggap Melakukan Kebohongan Publik	√		
18.	DPD PKS Didemo pendukung Badrul Kamal (23 Agustus 2005)	Menuntut Pelantikan Badrul Kamal Segera Dilaksanakan	√		

19.	Badrul Kamal Meminta Ketegasan MA (26 Agustus 2005)	Badrul Kamal merasa dirugikan dengan berbagai Berita yang beredar	√		
20.	KPU Depok pertanyakan Proses Hukum di MA (8 September 2005)	MA akan Berhati-hati dalam Menangani Pilkada Depok	√		
21.	MA Bentuk Majelis Hakim Peninjauan Kembali (9 September 2005)	Mempertanyakan Keanggotaan Majelis Hakim Mengapa Sama Dengan Tim Pnel			√
22.	MA Didesak Degera Putuskan Kasus Depok (12 September 2005)	Desak MA Segera Putuskan Kasus Depok			√
23.	MA “Menangkan” Nurmahmudi-Yuyun (!7 Desember 2005)	Menangnya Nurmahmudi –Yuyun berbau politis	√		
24.	Presiden Minta Mendagri Agar Diselesaikan Secara Undang-Undang Nur Mahmudi Masih Menunggu Salinan Keputusan (18 Desember 2005)	Selesaikan Masalah Sepok Sesuai dengsn UI	√		
25.	Tindak Hakim Yang Salah. Jatuhkan saksi bagi Hakim Banding Pilkada Depok (19 Desember 2005)	MA Jangan Bersikap Munafik	√		
26.	Putusan MA ditolak. Tiga Fraksi Ancam Boikot Pelantikan Nurmahmudi Ismal (20 Desember 2005)	Putusan MA Ditanggapi Resisten Anggota DPRD Kota Depok	√		
27.	Badrul diminta Partai Golkar Lakukan Perlawanan Hukum (21 Desember 2005)	Golkar Mendukung Badril Lakukan Perlawanan Hukum	√		
28.	Tunda Pelantika Walikota Depok. PKS; Tak Ada Alasan Untuk Abaikan Keputusan MA (28 Desember 2005)	Jangan Lantik Nurmahmudi	√		

29.	Saling Lempar Masalah Depok. Partai Golkar Tawarkan Konsensus Sebagai Solusi (4 Januari 2006)	Golkar Tawarkan Konsensus Sebagai Solusi	√		
30.	<i>Manuver Politik Alapak Lurah</i> 5 Januari 2006)	Hubungan Simbiosis Mutualisme yang Perlu Dipertanyakan			√
31.	Mendagri Tunggu Depok. Realitas Politik Pilkada Dipertimbangkan (5 Januari 2006)	Realitas Politik berkembang., Dukungan Kalisasi Beralih	√		
32.	Sebagai Lurah Ngotot Dukung Kamal dan Tolak Keputusan MA (7 Januari 2006)	Masalah Depok Harus Melihat Realitas Depok	√		
33.	Koalisi Pro Badrul-Pesah (11 Januari 2006)	Realitas Politik Berkembang, Dukungan Koalisi Beralih	√		
34.	Badrul Adukan MA ke MK (12 Januari 2006)	Putusan MA Layak Diajukan ke MK	√		
35.	Pendukung Badrul Kamal Beraksi (18 Januari 2006)	Jangan Sahkan Nurmahmudi Sebagai Ealikota Depok.	√		
36.	Sidang Pilkada Depok Perdebatkan Kewenangan MK (25 Januari 2006)	Perdebatan Kewenangan MK	√		
37.	Upaya Badrul Kandas. Padi ini Nurmahmudi Dilantik Jadi Walikota Depok (26 Januari 2006)	Upaya Basrul Sudah Final. Golkar Legowo	√		

## B. KORAN TEMPO

No	Judul Berita	Frame Yang Dibuat Media	Pro BK	Pro NI	Netral
1.	Nurmahmudi Unggul di Depok (27 Juni 2005)	Nurmahmudi Unggul Sementara		√	
2.	Perwakilan AS pun Melihat (27 Juni 2005)	Kunjungan Utusan AS Tak Menyulut Minat Masyarakat			√
3.	6 Pelaku “Serangan Fajar Ditahan (27 Juni 2005)	Pelaku dicurigai pendukung Nurmahmudi	√		
4.	Pemilihan Tak penuh Prosedur (28 Juni 2005)	Pilkada Depok Siragukan Keabsahannya	√		
5.	Porsi Nurmahmudi Makin Kuat (28 Juni 2005)	Nurmahmudi Berjanji Mngubah “Persepse” Mengenai Aparat pemerintah		√	
6.	Kubu Badrul-Nurmahmudi Tegang (29 Juni 2005)	Pengerahan Dua Kubu Warnai Perhitungan Suara			√
7.	PPK Hentikan Penghitungan Suara (30 Juni 2005)	Meski Terimidasi Perhitungan Suara Tetao Dilaksanakan			√
8.	“Pasangan Nurmahmudi Unggul” (1 Juli 2005)	Pendukung Badrul Protes Tim Sukses PKS	√		
9.	“Depok Tidak akan Jadi Kota PKS” (6 Juli 2006)	Janji Nurmahmudi; Tidak akan Menerapkan Syareat Islam		√	
10.	Tak Mneteri. Walikota pun jadi (6 Juli 2005)	Pasangan Dari Partai Keadilan Menang		√	
11.	Panwas-KPU Depok Bersitegang. (7 Juli 2007)	Panwas Anggap keputusan KPUD Cacat Hukum			√
12.	Ketua KPUD Depok Diperiksa Polisi (8 Juli 2005)	Ketua KPUD Diperiksa Karena Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen	√		
13.	Nurmahmudi Batal Jadi Walikota (5 Agustus 2005)	Kemenangan Nurmahmudi Dianulir	√		



14.	Tak Ada Lagi Peluang Hukum	Leputusan Pengadilan bersifat Final dan Mengikat	√		
15.	Cetro : Nurmahmudi Tetap Bisa Dilantik (6 Agustus 2005)	Pelantikan Nurmahmudi Masih Menunggu Surat Resmi dari Gubernur		√	
16.	Heboh Hasil Pilkada (6 Agustus 2005)	Perlu Penelitian Lebih Lanjut oleh MA dan KY	√		
17.	Peluang Nurmahmudi Masih Terbuka	Tiga Kejanggalaan Putusan PT Jabar Menjadi Pertimbangan MA		√	
18.	KPUD Depok Akan Menang (8 Agustus 2005)	KPUD Depok Membahas Upaya Hukum Keputusan PT Jabar		√	
19.	KPUD Jawa Barat Ajukan Peninjauan Kembali (9 Agustus 2005)	Tim hokum KPUD Jawa Barat Mengajukan PK ke MA		√	
20.	Pendukung Badrul dan Nurmahmudi Nyaris Bentrok. (9 Agustus 2005)	Dua Kubu Mnedesak Bertemu Anggota DPRD			√
21.	Nasib Wali Kota Depok di Tangan MA (10 Agustus 2005)	MA Tidak Bisa Lepas Tangan Atas Kasus Depok			√
22.	Depok Main Panas. (10 Agustus 2005)	Depok Makin Panas.			√
23.	Depdagri Tunggu Kepurusan KPU Depok (10 Agustus 2005)	Sengketa Pilkada Depok Menjadi Tanggung Jawab KPU Depok			√
24.	MA : Badrul Wali Kota. (11 Agustus 2005)	Tidak Ada Upaya Hukum Lagi Bagi Nurmahmudi	√		
25.	Kasus Numahmudi : Bagir: Semua Pihak Tahan Diri. (13 Agustus 2005)	Dihimbau untuk Tidak Terburu-Buru Mengambil Kesimpulan.			√
26.	Penitia Kecamatan Diimbau Jadi Saksi (15 Agustus 2005)	Diperlukan Segera Saksi dengan Bukti dan Data yang Akurat			√
27.	PKS Akan Hentikan Unjuk Rasa (16 Agustus 2005)	PKS Menolak Putusan PT Jabar dengan Cara Konsitusional.	√		

28.	Depok Bergolak (16 Agustus 2005)	Klaim Suara Badrul Hanya Berdasarkan Asumsi	√		
29.	Tim MA Salahkan Hakim Kasus Nurmahmudi (20 Agustus 2005)	Hakim PT Jabar Telah melakukan Unprofesional Conduct.		√	
30.	Pengacara Nurmahmudi Datangi KPUD Jawa Barat (20 Agustus 2005)	Buyung Usulkan Upaya Hukum Berkaitan Dengan Putusan PT Jabar			√
31.	PKS Tunda Pelantikan Walikota Depok (22 Agustus 2005)	PKS Meminta Depdagri Secara Resmi Tunda Pelantikan Badrul Kamal		√	
32.	“PKS” Demo PKD di Depok (23 Agustus 2005)	Ada wacana yang Berkembang PKS sudah Terpecah Belah	√		
33.	Nurmahmudi andalkan KPUD (24 Agustus 2005)	KPUD Ajukan PK, Nurmahmudi Batalkan Rencana Kasasi	√		
34.	Kubu Badrul Kamal Datangi MA (26 Agustus 2005)	Merasa Dirugikan Badrul Datangi MA			√
35.	Kasus Sengketa Pilkada di Depok. Majelis Hakim Diperiksa Hari ini (29 Agustus 2005)	Tindak Tegas Hakim yang tidak Profesional		√	
36.	PEMERIKSAAN HAKIM PT JABAR. Belum ditemukan penyimpangan (5 September 2005)	Nurmahmudi dan Badrul Menunggu Kepastian Hukum	√		
37.	Tim Panel Mahkamah Agung jadi Majelis PK Kasus Depok (9 September 2005)	Diharapkan Majelis Pk Besikap Netral			√
38.	Peninjauan Kembali Kasus (9 September 2005)	Tim Panel; “BK Bisa Dilakukan”			√
39.	Bagir Bantah Majelis PK Depok sudah Dibentuk (10 September 2005)	MA Belum Menentukan Kapan Perkara akan Diputus			√

40.	MA Belum Pikirkan Sanksi Hakim (17 September 2005)	Hakim Kasus Pilkada Belum Diberi Sanksi			√
41.	Anggota Tim Sukses Badrul Tersangka (21 September 2005)	Tim Sukses Badrul Membantah Telah Berikan Kesaksian Palsu		√	
42.	SENGKETA PILKADA DEPOK. Bagir: Hakim Berhak Bela Diri. (24 September 2005)	KY Merekomendasikan Nana Diberhentikan Sementara.	√		
43.	MA Diminta Tindak Lanjuti Hakim Kasus Depok (24 Oktober 2005)	Segera Tindaklanjuti Keputusan KY		√	
44.	MAHKAMAH AGUNG MENANGKAN NURMAHMUDI. Golkar Tuding Ada Tekanan Politik. (17 Desember 2005) MAHKAMAH AGUNG MENANGKAN NURMAHMUDI. Golkar Tuding Ada Tekanan Politik. (17 Desember 2005)	Dikabulkannya PK Diprediksi Ada Tekanan Politik yang sangat Kuat	√		
45.	MENANG (17 Desember 2005)	Putusan MA Mengantarkan Nurmahmudi Sebagai Pemenang	√		
46.	Golkar Cari Celah (19 Desember 2005)	Golkar Tuding Putusan MA Merupakan Hasil Rekayasa	√		
47.	Tiga Fraksi Tolak Nurmahmudi (20 Desember 2005)	Tiga Fraksi Ancam KPU, Jika Tetap mengangkat Nurmahmudi sebagai Walikota	√		
48.	Babak Akhir Drama Nurmahmudi (30 Desember 2005)	PK Putusan PT Jabar Dikabulkan, Nurmahmudi Sah sebagai Orang Nomor satu di Depok			√

49.	Pelantikan Nurmahmudi Tunggu Menteri Dalam Negeri (3 Januari 2006)	KPUD Mengirimkan Surat Penetapan Nurmahmudi Sebagai Walikota Terpilih		√	
50.	42 Lurah Depok Tolak Nurmahmudi (4 Januari 2006)	Segera Tindak Para lurah yang berindikasi Memihak	√		
51.	Gubernur Jawa Barat Loloskan Nurmahmudi (5 Januari 2006)	Nurmahmudi Lolos, Paguyuban Lurah Sekota Depok akan menghadapi Sanksi			√
52.	Pelantikan Nurmahmudi Tergantung Kesiapan Depok (18 Januari 2006)	Golkar Minta pelantikan Nurmahmudi Ditunda sampai ada Keputusan Hukum dari MK		√	
53.	Mahkaman Konstitusi Sidangkan Sengketa Depok (19 Januari 2005)	Sidang Sengketa Pilkada Depok Masih Berlangsung		√	
54.	Nurmahmudi Dilantik Pekan Depan (20 Januari 2006)	Tanggal Pelantikan Nurmahmudi telah Ditetapkan		√	
55.	Nurmahmudi Dilantikan 26 Januari (20 Januari 2006)	Jadwal Pelantikan Masih Mengalami silang pendapat		√	
56.	Partai Golkar Setujui pelantikan Nurmahmudi (24 Januari 2006)	Akhirnya Partai Golkar Setuju Pelantikan Nurmahmudi	√		
57.	Nurmahmudi-Yuyun Tak Terbendung (26 Januari 2006)	Perdebatan Hukum dalam pemilu Walikota Depok Berakhir			√

### C. REPUBLIKA

No.	Judul Berita	Frame yang Dibuat Media	Pro BK	Pro NI	Netral
1.	<i>Quick Count:</i> Nurmahmudi Unggul. (27 Juni 2005)	Nurmahmudi Unggul di Depok.		√	
2.	KPUD Diminta Hentikan Pengumuman Hasil Perhitungan Publik. (28 Juni 2005)	KPUD Diminta Hentikan Pengumuman Hasil Perhitungan Sementara		√	
3.	Badrul Kamal Akui Tak Tahu Rinci Anggaran DPRD. (29 Juni 2005)	Badru Kamal Menjadi Saksi Dugaan Korupsi		√	
4.	Warga Depok Diimbau Terima Hasil Pilkada (30 Juni 2005)	Nurmahmudi yuyun: Pilihan Terbaik Warga Depok		√	
5.	Rekapitulasi Suara PPK Rampung. (2 Juli 2005)	Kendati Banyak Kendala Rekapitulasi Berhasil Diselesaikan		√	
6.	Nur Ditetapkan Menang (6 Juli 2005)	Nurmahmudi Wali Kota Terpilih.		√	
7.	KPUD Diduduki. (29 Juni 2005)	Aparat Harus Tegas Hadapi Aksi Massa yang Mengganggu Proses Pilkada		√	
8.	Badrul Kamal Gugat KPUD Depok (13 Juli 2005)	Badrul Tidak Terima Hasil Pilkada		√	
9.	Wali Kota Depok Belum Dilantik (30 Juli 2005)	Segera Lakukan Pelantikan Nurmahmudi Ismail		√	
10.	Hasil Pilkada Depok di Batalkan (5 Agustus 2005)	Putusan PT Jabar Rancu dan Kadaluarsa		√	
11.	Bisa Di Bawa Ke Komisi Yudisial (5 Agustus 2005)	Kemenangan Badrul Menuai Kontroversi		√	
12.	Logika Putusan PT Jabar (6 Agustus 2005)	Proses Pencarian Bukan Untuk Menghambat Pada Jabatan		√	
13.	Suasana Depok Aman (6 Agustus 2005)	Keputusan PT Jabar Kontroversial		√	
14.	“Cetro; Pembatalan Pilkada Depok Tak Mengikat” (6 Agustus	Putusan PT. Jabar tidak Dilandasi Bukti-Bukti yang Otentik		√	

	2005)				
15.	KPUD Depok : Kami Sudah Benar (8 Agustus 2005)	Hasil Perhitungan KPUD Depok Sudah Final		√	
16.	Demo Anti Putusan PT. Jawa Barat Marak (8 Agustus 2005)	Massa Tolak Putusan PT Jabar		√	
17.	KPUD Jabar Akan Ajukan PK (9 Agustus 2005)	Keputusan Hakim PT Jabar Secara Subtansi Banyak Ketimpangan		√	
18.	Titaful Sembiring Mengaku Temui Kalla. (10 Agustus 2005)	PKS Berhak Mencari Keadilan		√	
19.	Saksi Dalam Sidang Sengketa Pilkada Depok Melakukan Kebohongan (11 Agustus 2005)	Saksi Dalam Sidang Sengketa Pilkada Depok Melakukan Kebohongan		√	
20.	Ketua MK: Kita Tidak Bisa Apa-apa (11 Agustus 2005)	Sikap Bagir Manan Menunjukkan MA Tidak Mempunyai Itikad Baik Untuk Membangun Good Law		√	
21.	KPUD Depok Abaikan Sikap Ketua MA (12 Agustus 2005)	MA Seharusnya Segera Meninjaklanjuti PK KPUD.		√	
22.	Bagir: Biarkan PKS Bekerja. (13 Agustus 2005)	Beri Kesempatan PKS dan MA untuk Bekerja.		√	
23.	PKS Kembali Menggelar Istidhatsah (15 Agustus 2005)	Aksi Keprihatinan Tangapi Keputusan PT Jabar.		√	
24.	MA Panggil Ketua PT Jabar (16 Agustus 2005)	MA Minta Nana Mengklarifikasi Putusan Pembatalan Hasil Pilkada Depok		√	
25.	Kpud Kota Depok Resmi Ajukan PK (18 Agustus 2005)	KDUD Depok: Prosesor Perhitungan Suara Sudah Benar.		√	
26.	20 % Data Pemilih Fiktif (19 Agustus 2005)	Kasus Pilkada Depok Mnjadi Pelajaran Penting.			√
27.	Keadilan Dilanggar Dalam Kasus Depok (19 Agustus 2005)	Demi Keadilan Upaya Hukum Harus Dilakukan.		√	

28.	LSM Minta MA Terima PK (20 Agustus 2005)	Kesalahan Fatal Putusan Hakim Merupakan Alasan yang Sah untuk Sebuah PK		√	
29.	DPD Golkar Depok Meminta Badrul Segera Dilantik. (20 Agustus 2005)	Tunda Pelantikan Wali Kota Depok.		√	
30.	KPUD Depok Mestinya Menang. (22 Agustus 2005)	DIKAP “Diam” KPUD Dipertanyakan		√	
31.	PK KPUD Depok Diserahkan Hari Ini Ke MA. (23 Agustus 2005)	Upaya Hukum Demi Keadilan Harus Dilakukan.		√	
32.	MA Diminta Prioritaskan Kasus Putusan PT Jabar. (24 Agustus 2005)	PT Jabar Melakukan Pelanggaran dalam Memutus Perkara Sengketa Pilkada Depok		√	
33.	Kubu Badrul Kamal Protes MA. (26 Agustus 2005)	Putusan PT Jabar Dianulir karena Adanya Unsur KKN dan Money Politics		√	
34.	PK KPUD Depok Belum Diregristasi. (27 Agustus 2005)	Bentuk Upaya Hukum KPUD Masih Menunggu Masukan dari Tim Panel.		√	
35.	Kepastian Pelantikan Belum Jelas. (29 Agustus 2005)	KPUD Tunggu Rekomendasi Tim Panel Majelis Hakim MA.		√	
36.	Hari Ini, Lima Hakim PT Jabar Diperiksa. (29 Agustus 2005)	Tindak hakim yang tidak Profesional.		√	
37.	“KY tak Periksa Materi Putusan”. (30 Agustus 2005)	KY Fokus pada Proses Pengambilan Putusan Dalam Memeriksa Hakim PT Jabar.		√	
38.	Agung: Golkar tak Ikut Campur Sengketa Pilkada Depok. (3 September 2005)	Badrul Gunakan Golkar sebagai Kendaraan Politiknya		√	
39.	Tim Panel Serahkan Rekomendasi Hari Ini. (8 september 2005)	KPUD Menanti Jawaban MA		√	
40.	MA Diminta tak Tunda-Tunda Penanganan PK KPUD Depok. (10 September	Proses Pencarian Keadilan Harus Dilanjutkan		√	

	2005)				
41.	MA bentuk Majelis Hakim PK. (9 September 2005)	Demi Keadilan MA Dihimbau Segera Menangani PK KPUD		√	
42.	Komisi Yudisial Sampaikan Rekomendasi ke MA, Presiden, dan DPR (14 September 2005)	Isi Rekomendasi Belum Bisa Dipublikasi		√	
43.	Juru Bicara Badrul Kamal Tersangka (21 September 2005)	Juru Bicara Badrul Terlihat dalam Kasus Kesaksian Palsu		√	
44.	PT Jabar Makin Dipertanyakan (22 September 2005)	Hakim Melakukan Kesalahan dalam Persidangan		√	
45.	MA Akan Dahulukan PK KPUD Depok (24 September 2005)	MA Diminta Fokus pada PK KPUD Depok		√	
46.	MA Harus Memutus Dengan Adil (27 September 2005)	MA Harus Berani melakukan Koreksi terhadap keputusan PT Jabar		√	
47.	Ormas di Depok Desak MA Tuntaskan Pilkada (28 November 2005)	Secepatnya Tuntaskan Kasus Pilkada Besok		√	
48.	Nurmahmudi Walikota Depok (17 Desember 2005)	KPUD Sudah Benar, Nurmahmudi Walikota Depok		√	
49.	Badrul Tuduh Putusan MA Rekayasa Hukum (19 Desember 2005)	Putusan MA Bukan Rekayasa Tapi Untuk Memenuhi Rasa keadilan		√	
50.	Nurmahmudi :Saya Siap Bertemu Badrul (21 Desember 2005)	Penolakan Tiga Fraksi Terhadap Putusan MA Merupakan Bentuk Arogansi Politisi		√	
51.	Bagir abaikan Badrul (20 Desember 2005)	Upaya Badrul Sia-sia		√	
52.	Suhu Politik Mulai Memanas (21 Desember 2005)	Depok masih Terkendali		√	
53.	“Badrul Bisa ajukan perkaranya ke MK” (22 Desember 2005)	Silahkan Badrul Ajukan Perkaranya ke MK		√	
54.	Pendukung Badrul Bentrok dengan Aparat (23 Desember 2005)	“Tidak Puas” Pendukung Badrul Unjuk Rasa.		√	



55.	Hakim Pidana Depok Dipindahkan ke MA. (24 Desember 2005)	Hakim Sengketa Pilkada Depok Diberi Sanksi.		√	
56.	DPRD Depok Dikirim Salinan Putusan MA (28 Desember 2005)	DPRD Depok Diminta Priotaskan Salinan Putusan MA.		√	
57.	Nurmahmudi Minta yang Kalah Sportif (29 Desember 2005)	Segera Teruskan Surat KPUD ke Gubernur.		√	
58.	Protes Mengenai Penetapan APBD Depok. ( 31 Desember 2005)	Ditemukan Diplikasi Anggaran APBD Depok 2005		√	
59.	DPRD Depok Tersuka Surat KPUD ke Mendagri. (3 Januari 2006)	Gubernur Diminta Secepatnya Merespon Surat DPRD Depok ke Mendagri.		√	
60.	Pelantikan Nurmahmudi sepekan Lagi. (4 Januari 2006).	Segera Lakukan Pelantikan Nurmahmudi		√	
61.	Lurah Tak Netral Akan Dicapot. ( 5 Januari 2006)	Tindak Tegas Lurah yang Tidak Menaati Hukum.		√	
62.	Merasa Namanya Dicatut, Para Lurah akan Lapor Polisi.	MA Sudah Memutuskan Tunggu Apalagi.		√	
63.	DPRD Depok Turun Tangan. (7 Januari 2006)	Beri Sanksi Aparat yang Melakukan Keberpihakan.		√	
64.	Rendra: Depok Kondusif.(11 Januari 2006)	Segera Lakukan Penelitian pada Wali Kota Pilihan Rakyat.		√	
65.	Pendukung Nurmahmudi Siap Amankan Pelantikan. (12 Januari 2006)	Masyarakat Depok Siap Amankan Pelantikan Nurmahmudi-Yuyun.		√	
66.	Langkah Mendagri Bernuansa Politis. (14 Januari 2006)	Syarat Pelantikan Nurmahmudi sudah Lengkap.		√	
67.	Mendagri Minta Wali Kota Depok Dilantik. (17 Januari 2006)	Nurmahmudi Harus Segera Dilantik.		√	
68.	Nurmahmudi Segera Dilantik. (20 Januari 2006)	Pelantikan Nurmahmudi sudah Berkekuatan Tetap		√	

69.	Kursi Goyang dari Depok. (21 Januari 2006)	Keputusan MA Sudah Benar.		√	
70.	Nurmahmudi Dilantik Di Depok. (23 Januari 2006)	Situasi Kondusif Jelang Pelantikan Nurmahmudi di Depok.		√	
71.	“Golkar Minta PKS Cabut Laporan Mengenai Saksi Palsu” (24 Januari 2006)	Golkat Minta PKS Mencabut Kasus Kesaksian Palsu.		√	
72.	Hari Ini MK Jatuhkan Putusan”. Ruang Pelantikan Nurmahmudi Disiapkan. (25 Januari 2006)	MK tak Berwenang Menangani Perkara Putusan PK		√	
73.	Badrul Ikhlas, Nurmahmudi Lega. (26 Januari 2006)	Badrul Tak Memiliki Kedudukan Hukum untuk Ajukan Uji Matrei.			√

## DAFTAR PUSTAKA

- A Reader (1995) ; *Approaches to Media*, Edited by Oliver Boyd-Barrett and Chris Newbold; Foundations in Media; Arnold; Londons
- Baran, Stanley J and Davis, Dennis K (200); *Mass Cammunication Theory, Foundations, Ferment, and Future*, Seconde Edition Wadsworth/Thomson learnig; Belmont; USA
- Curran, James and Gurevitch, Michael(1991); *Mass Media and Society*; Edward Arnold; London – New York – Melbourne –Auckland.
- Nimmo, Dan (2001); *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek* (terjemahan) PT Remaja Rodaskarya; Bandung.
- \_\_\_\_\_ (2005); *Komunikasi Politik; Komunikator; Pesan, dan Media*, (terjemahan); pt remaja rosdakarya; bandung.
- Dowse, Robert E And Hughes, Jhon A (1986); *Political Sociology*, 2 Edition; Jhon Wiley & SONS; Chicherter – New York – Brisbane – Toeonto – Singapore.
- Eriyanto (2002); *Analisis Framing; Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*; LKiS; Yogyakarta.
- Fairclough, Norman (1995); *Critical Discourse Analysis, The Critical Study of Language*, Longmann; London.
- Golding, Peter (2004); *Who Owns The Media?, Global Trends and Local Resistances*, Southbound, Northam House; Penang; Malaysia.
- Hamad, Ibnu, (2004); *Konstruksi Realitas Politikdalam Media Massa, Sebuah Studi Critical Discourse Analysis Terhadap Berita-berita Politik*, Edisi `; Granit; Bandung.
- Hanazaki, Yasuo (1998); *Opini Umum; Antara Rekayasa dan Realitas*, (terjemahan); edisi 1; Yayasan Obor Indonesia; Jakarta.
- H. Chon, Theodore (2002); *Global Political Economy, Theory and Practice*, Second Edition; Simon Fraser University; Addison Wesley Longman Inc; New York.
- Johannesen, Richard L (1996); *Etika Komunikasi*, (Terjemahan), Third Edition; Remaja Rosdakarya; Bandung.

- Lippmann, Walter (1998) *Opini Umum; Antara Rekayasa dan Realitas*, (terjemahan), edisi 1; Yayasan Obor Indonesia; Jakarta.
- Little John, Stephen W (1999); *Theories of Human Communication*, Sixth Edition; Wadsworth; Belmont; California.
- Mas'oe'd Mochtar dan Mac Andrew, Colin (1978); *Perbandingan Sistem Politik*; Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mc Quail, Denis (2002); *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, (3<sup>rd</sup> Edition; London-Thousand Oaks-New Delhi).
- Mosco, Vincent (1996); *The Political Economy of Communication, Rethinking and Renewal*; SAGE Publications Ltd 6 Bonhill street; London EC2A 4 PU.
- PT. Kompas Media Nusantara (2007); *Kompas dari Belakang ke Depan, Menulis dari Dalam*, Edisi 1; Penerbit Buku Kompas; Jakarta.
- Soeprapto. R (2006); *Kritisi Reformasi 1998, Kembali ke UUD 1945*; Taman Pustaka.
- Said, Edward W (1978); *Orientalisme*, (terjemahan); Pustaka; Bandung.
- \_\_\_\_\_ (1998); *Peran Intelektual, Kuliah-kuliah Reith Tahun 1993* (terjemahan); Edisi 1; Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Sobur, Alex (2001); *Analisis Teks Media, Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*; PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sumarno (2006); *Drama Politik Pilkada Depok, Badrul Kamal Menggugat Nur Mahmudi Menjawab*; Harakatuna Publishing; Bandung.
- Smith, Craig Allen (1990); *Political Communication*; Harcourt Brace Jovanovich, Publisher; San Diego-New York-Chicago-Austin-Washington DC-London-Sydney-Tokyo-Toronto.
- Swartz, David (1997); *Culture and Power, The Sociology of Piere Bourdieu* Chicago, University of Chicago Press.
- Thompson, Jhon B (2003); *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*, (terjemahan), IRCsoD; Yogyakarta, 55281

## **Laporan Tahunan**

Laporan Tahunan 1998/1999 ; Pers Indonesia Pasca Soeharto; *Setelah Tekanan Penguasa Melemah*. Lemaga Studi Pers dan Pembangunan. Aliansi Jurnalis Independent.

## **Surat Kabar**

KOMPAS; Manipulasi dan Kecurangan di Kota Depok Sangat Mungkin Terjadi, 28 Juni 2005.

KOMPAS; Nurmahmudi Ismail Wali Kota Depok Terpilih, 7 Juli 2005.

KOMPAS; Badrul Ajukan Keberatan, 13 Juli 2005.

KOMPAS; Situasi Memanas Menjelang Pelantikan Walikota Depok, 27 Juli 2005.

KOMPAS; Pilkada Dianulir, PKS: Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Dagekan 5 Agustus 2005.

KOMPAS; Kader PKS Unjuk Rasa. Partai Golkar Minta Putusan Pengadilan Dihormati, 6 Agustus 2005.

KOMPAS; KPU Jabar Minta MA Bertindak, PKS Gelar Istighotsah, 8 Agustus 2005.

KOMPAS; KPU Ajukan PK, MA Anggap Putusan Sah, 9 Agustus 2005.

KOMPAS; Dua Kelompok Berhadapan. KPUD Depok Kebingungan, 9 Agustus 2005.

KOMPAS; Komisi Yudisial Bekerja Hakim Banding PT Jabar Kasus Pertama, 10 Agustus 2005.

KOMPAS; Badrul Kamal; Pro-Kontra itu Wajar, 10 Agustus 2005.

KOMPAS; Putusan PT Final dan Mengikat. Depdagri Tidak Ikut Campur Tangan, 11 Agustus 2005.

KOMPAS; Pertemuan 2 Agustus Dicurigai. KPU Depok Tak Lanjutkan Proses, 12 Agustus 2005.

KOMPAS; Ketua PT Merasa Difitnah. Ketua MA Minta Semua Pihak Sabar, 13 Agustus 2005.

KOMPAS; Lima Hakim PT Jabar Diperiksa Komisi Yudisial. KPU Depok Desak MA Percepat Proses PK, 30 Agustus.

KOMPAS; Ketua PT Jabar Dipanggil MA, 16 Agustus 2005.

KOMPAS, Kader PKS Akan Terus Melawan, 19 Agustus 2005.

KOMPAS; DPD PKS demo Pendukung Badrul Kamal , 23 Agustus 2005.

KOMPAS, Badrul Kamal Meminta Ketegasan MA, 26 Agustus 2005.

KOMPAS; KPU Depok Pertanyakan Proses Hukum di MA, 8 September 2005.

KOMPAS; MA Bentuk Majelis Hakim Peninjauan Kembali, September 2005.

KOMPAS; MA Didesak Segera Putuskan Kasus Depok, 12 September 2005.

KOMPAS; MA "Menangkan" Nurmahmudi-Yuyun, 17 Desember 2005.

KOMPAS; Presiden Minta Mendagri Agar Diselesaikan Sesuai Undang-Undang Nurmahmudi Masih Menunggu Salinan Keputusan, 18 Desember 2005.

KOMPAS; Tindakan Hakim Yang Salah.Jatuhkan sanksi bagi Hukum Banding Pilkada Depok, 19 Desember 2005.

KOMPAS; Putusan MA Ditolak. Tiga Fraksi Ancam Boikot Pelantikan Nurmahmudi Ismail, 20 Desember 2005.

KOMPAS; Badrul Diminta Partai Golkar Lakukan Perlawanan Huku, 21 Desember 2005.

KOMPAS; Tunda Pelantikan Wali Kota Depok. PKS; Tak Ada Alasan Untuk Abaikan Keputusan MA, 28 Desember 2005.

KOMPAS; Saling Lempar Masalah Depok. Partai Golkar Tawarkan Konsensus Sebagai Solusi, 4 Januari 2006.

KOMPAS; Manuver Politik Ala Pak Lurah, 5 Januari 2006.

KOMPAS; Mendagri Tunggu Depok. Realitas Politik Pilkada Dipertimbangkan, 5 Januari 2006.

KOMPAS; Sebagian Lurah Ngotot Dukung Badrul Kamal dan Tolak Keputusan MA, 7 Januari 2006.

KOMPAS; Koalisi PRO-Badrul Pecah, 11 Januari 2006

KOMPAS; Badrul Adukan MA ke MK, 12 Januari 2006.

KOMPAS; Pendukung Badrul Kamal Beraksi, 18 Januari 2006.

KOMPAS; Sidang Pilkada Depok Perdebatkan Kewenangan MK, 25 Januari 2006.

KOMPAS; Upaya Badrul Kandas. Pagi ini Nurmahmudi Dilantik jadi Wali Kota Depok. 26 Januari 2006.

Koran TEMPO; Nurmahmudi Unggul di Depok, 27 Juni 2005.

Koran TEMPO; Perwakilan AS pun Melihat, 27 Juni 2005.

Koran TEMPO; 6 Pelaku “Serangan Fajar” Ditahan, 27 Juni 2005.

Koran TEMPO; Pemilihan Tak Penuhi Prosedur, 28 Juni 2005.

Koran TEMPO; Porsi Nurmahmudi Makin Kuat, 28 Juni 2005.

Koran TEMPO; Kubu Badrul-Nurmahmudi Tegang, 29 Juni 2005.

Koran TEMPO; PPK Hentikan Penghitungan Suara, 30 Juni 2005.

Koran TEMPO; “Pasangan Nurmahmudi Unggul”, 1 Juli 2005.

Koran TEMPO; “Depok Tidak Akan Jadi Kota PKS”, 6 juli 2005.

Koran TEMPO; Tak Menteri, Wali Kota Pun Jadi, 6 Juli 2005.

Koran TEMPO; Panwas - KPU Depok Bersitegang, 7 Juli 2005.

Koran TEMPO; Ketua KPUD Depok Diperiksa Polisi, 8 Juli 2005.

Koran TEMPO; Nur Mahmudi Batal Jadi Wali Kota, 5 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Cetro; Nurmahmudi Tetap Bisa Dilantik, 6 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Heboh Hasil Pilkada Depok, 6 Agustus 2005.

Koran TEMPO; peluang nurmahmudi masih terbuka, 6 agustus 2005.

Koran TEMPO; KPUD Depok Akan Menang, 8 Agustus 2005.

Koran TEMPO; KPUD Jawa Barat Ajukan Pinjaman Kembali, 9 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Pendukung Badrul Dan Nurmahmudi Nyaris Bentrok, 9 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Nasib Wali Kota Depok Ditangan MA, 10 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Depok Makin Panas, 10 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Depdagri Tunggu Keputusan KPUD Depok, 10 Agustus 2005.

Koran TEMPO; MA: Badrul Wali Kota, 11 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Kasus Nurmahmudi: Bagir: Semua Pihak Tahan Diri, 13 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Panitia Kecamatan Dihimbau Jadi Saksi, 15 Agustus 2005.

Koran TEMPO; PKS Akan Hentikan Unjuk Rasa, 16 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Depok Bergolak, 16 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Tim MA Salahkan Hakim Kasus Nurmahmudi, 20 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Pengacara Nurmahmudi Datangi KPUD Jawa Barat, 20 Agustus 2005

Koran TEMPO; PKS Tunda Pelantikan Wali Kota Depok, 23 Agustus 2005.

Koran TEMPO; "PKS" Demo PKS Di Depok, 23 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Nurmahmudi Andalkan KPUD, 24 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Kubu Badrul Kamal Datangi MA, 26 Agustus 2005.

Koran TEMPO; Kasus Sengketa Pilkada di Depok, Majelis Hakim Diperiksa hari ini, 29 Agustus 2005.

Koran TEMPO; PEMERIKSAAN HAKIM PT JABAR. Belum Ditemukan Penyimpangan, 5 September 2005.

Koran TEMPO; Tim Panel Mahkamah Agung Jadi Majelis PK Kasus Depok, 9 September 2005.

Koran TEMPO; Peninjauan Kembali Kasus Sepok, 9 September 2005.

Koran TEMPO; Bagir Bantah Majelis PK Depok Sudah Dibentuk, 10 September 2005.

Koran TEMPO; MA Belum Pikirkan Sanksi Hakim, 17 September 2005.

Koran TEMPO; Anggota Tim Sukses Badrul Tersangka, 21 Agustus 2005.

Koran TEMPO; SENKETA PILKADA DEPOK. Bagir: Hakim Berhak Bela Diri, 24 September 2005.

Koran TEMPO; MA Diminta Tindak Lanjuti Hakim Kasus Depok, 24 Oktober 2005.

Koran TEMPO; MAHKAMAH AGUNG MENANGKAN NURMAHMUDI. Golkar Tuding Ada Tekanan Politik, 17 Desember 2005.

Koran TEMPO; MENANG, 17 desember 2005

Koran TEMPO; Golkar Cari Celah, 19 Desember 2005.

Koran TEMPO; Tiga Fraksi Tolak Nurmahmudi, 20 Desember 2005.

Koran TEMPO; Babak Akhir Drama Nurmahmudi Badrul, 30 Desember 2005.

Koran TEMPO; Pelantikan Nurmahmudi Tunggu Menteri Dalam Negeri, 3 Januari 2006.

Koran TEMPO; 42 Lurah Depok Tolak Nurmahmudi, 4 Januari 2005.

Koran TEMPO; Gubernur Jawa Barat Loloskan Nurmahmudi, 5 Januari 2006.

Koran TEMPO; Pelantikan Nurmahmudi Tergantung Kesiapan Depok, 18 Januari 2006.

Koran TEMPO; Mahkamah Konstitusi Sidangkan Sengketa Depok, 19 Januari 2006.

Koran TEMPO; Nurmahmudi Dilantik Pekan Depan, 20 Januari 2005.

Koran TEMPO; Nurmahmudi Dilantik, 26 Januari 2006.

Koran TEMPO; Nurmahmudi-Yuyun Tak Terbendung, 26 Januari 2006.

Republika; Quick Count; Nurmahmudi Unggul, 27 Juli 2005.

Republika; KPUD Diminta Hentikan Pengumuman Hasil Perhitungan Suara, 28 Juni 2005

Republika; Badrul Kamal Akui Tak Tahu Rinci Anggaran DPRD, 29 Juni 2005.

Republika; Warga Depok Diimbau Terima Hasil Pilkada, 30 Juli 2005.

Republika; Rekapitulasi Suara PPK Rampung, 2 Juli 2005.

Republika; Nur Ditetapkan Menang, 6 Juli 2005.

Republika; KPUD Diduduki, 29 Juni 2005.

Republika; Badrul Kamal Gugat KPUD Depok, 13 Juli 2005.

Republika; Wali Kota Depok Belum Dilantik, 30 Juli 2005.

Republika; Hasil Pilkada Depok Dibatalkan, 5 Agustus 2005.

Republika; Bisa Dibawa ke Komisi Yudisial, 5 Agustus 2005.

Republika; Suasana Depok Aman, 6 Agustus 2005.

Republika; "Cetro; Pembatalan Pilkada Depok Tak Mengikat", 6 Agustus 2005.

Republika; KPUD Depok; Kami Sudah Benar, 8 Agustus 2005.

Republika; Demo Anti Putusan PT Jawa Barat Marak, 8 Agustus 2005.

Republika; Kpud Jabar Akan Ajukan PK, 9 Agustus 2005.

Republika; Tifatul Sembiring Mengaku Temui Kalla, 10 Agustus 2005.

Republika; Saksi Dalam Sidamh Sengketa Pilkada Depok Melakukan Kebohongan, 11 Agustus 2005.

Republika; Ketua MA: Kita Tidak Bisa Apa-Apa, 11 Agustus 2005.

Republika; KPUD Depok Abaikan Sikap Ketua MA, 12 Agustus 2005.

Republika; Bagir: Biarkan PKS Bekerja, 13 Agustus 2005.

Republika; PKS Kembali Menggelar Istighotsah, 15 Agustus 2005.

Republika; MA Manggil Ketua PT Jabar, 16 Agustus 2005.

Republika; Kpud Kota Depok Resmi Ajukan PK, 18 Agustus 2005.

Republika; 20 Persen Data Pemilih Fiktif, 19 Agustus 2005.

Republika; Keadilan Dilanggar dalam Kasus Depok, 19 Agustus 2005.

Republika; LSM Minta MA Terima PK, 20 Agustus 2005.

Republika; DPD Golkar Depok Minta Badrul Segera Dilantik, 20 Agustus 2005.

Republika; KPUD Depok Mestinya Menang, 22 Agustus 2005.

Republika; PK KPUD Depok Diserahkan Hari Ini Ke MA, 23 Agustus 2005.

Republika; MA Diminta Prioritaskan Kasus Putusan PT Jabar, 24 Agustus 2005.

Republika; Kubu Badrul Kamal Protes MA, 26 Agustus 2005.

Republika; PK KPUD Depok Belum Diregristrasi, 27 Agustus 2005.

Republika; Kepastian Plentikan Belum Jleas, 29 Agustus 2005.

Republika; "KY tak Periksa Menteri Putusan", 30 Agustus 2005.

Republika; Agung Golkar Tak ikut Campur Sengketa Pilkada Depok, 3 September 2005.

Republika; Tim Panel Serahkan Rekomendasi Hari Ini, 8 September 2005.

Republika; MA Diminta tak Tunda-tunda penanganan PK KPUD Depok, 10 September 2005.

Republika; MA Bentuk Majelis Hakim PK, 9 September 2005.

Republika; Komisi Yudisial Sampaikan Rekomendasi Ke MA, Presiden, dan DPR, 14 September 2005.

Republika; Juru Bicara Badrul Kamal Tersangka, 21 September 2005.



Republika; PT Jabar Makin Dipertanyakan; 22 September 2005.  
Republika; MA akan Dhulukan PK KPUD Depok, 24 September 2005.  
Republika; MA Harus Memutuskan Dengan Adil, 27 September 2005.  
Republika; Ormas di Depok Desak MA Tuntaskan Pilkada, 28 November 2005.  
Republika; Nurmahmudi Wali Kota Depok, 17 Desember 2005.  
Republika; Badrul Tuduh Putusan MA Rekayasa Hukum, 19 September 2005.  
Republika; Nurmahmudi; Saya Siap Bertemu Badrul, 21 Desember 2005.  
Republika; Bagir Abaikan Badrul, 20 Desember 2005.  
Republika; Suhu Politik Mulai Memanas, 21 Desember 2005.  
Republika; "Badrul Bisa Ajukan Perkaranya ke MK", 22 Desember 2005.  
Republika; Pendukung Badrul Bentrok Dengan Aparat, 23 Desember 2005.  
Republika; Hakim Pilkada Depok Dipindahkan ke MA, 24 Desember 2005.  
Republika; DPRD Depok Dikirim Salinan Putusan MA, 28 Desember 2005.  
Republika; Nurmahmudi Minta Yang Kalah Sportif, 29 Desember 2005.  
Republika; Protes Warnai Penetapan APBD Depok, 31 Desember 2005.  
Republika; DPRD Depok Teruskan Surat KPUD ke Mendagri, 3 Januari 2006.  
Republika; Pelantikan Nurmahmudi Sepekan Lagi, 4 Januari 2006.  
Republika; Lurah Tak Netral Akan Dicapot, 5 Januari 2006.  
Republika; Merasa Namanya Dicatut, Para Lurah Akan Laporkan Polisi, 6 Januari 2006.  
Republika; DPRD Depok Turun Tangan, 7 Januari 2006.  
Republika; Rendra: Depok Kondusif, 11 Januari 2006.  
Republika; Pendukung Nurmahmudi Siap Amankan Pelantikan, 12 Januari 2006.  
Republika; Langkah Mendagri Bernuansa Politis, 14 Januari 2006.  
Republika; Mendagri Minta Wali Kota Depok Dilantik, 17 Januari 2006.  
Republika; Nurmahmudi Segera Dilantik, 20 Januari 2006.  
Republika; Kursi Goyang Dari Depok, 21 Januari 2006.  
Republika; Nurmahmudi Dilantik Di Depok, 23 Januari 2006.  
Republika; "Golkar Minta PKS Cabut Laporan Mengenai Saksi Palsu", 24 Januari 2006.  
Republika; Hari Ini MK Jatuhkan Putusan Ruang Pelantikan Nurmahmudi Disiapkan, 25 Januari 2006.  
Republika; Badrul Ikhlas, Nurmahmudi Lega, 26 Januari 2006.